

**Penaksiran Cepat Untuk Transfer Tunai
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
(ACDP - 038)**

Laporan Akhir

2014

Program Kemitraan untuk Peningkatan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP):
Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Tel. +62 21 5785 1100, Fax: +62 21 5785 1101
Website: www.acdp-indonesia.org
Email Sekretariat: secretariat@acdp-indonesia.org

Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan BAPPENAS), Australian Agency for International Development (AusAID), Uni Eropa (EU) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Program Kemitraan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) sebagai fasilitas untuk memajukan dialog kebijakan dan reformasi kelembagaan dan organisasi sektor pendidikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan membantu mengurangi kesenjangan dalam kinerja pendidikan di propinsi dan kabupaten di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (ESSP) yang terdiri dari (i) dukungan sektor anggaran Uni Eropa dengan pengaturan yang telah disetujui untuk pencairan hibah - didasarkan oleh hasil dan(ii) kebijakan dan program yang dialokasikan-oleh AusAID sektor pendukung hibah pengembangan yang terdiri dari: program prasarana sekolah, dan sebuah program pengembangan pengelolaan sekolah di kabupaten secara nasional serta sebuah program untuk mempercepat akreditasi madrasah swasta di Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.



Institusi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan studi ini adalah PT. Trans Intra Asia (TIA), Indonesia bekerjasama dengan Institute of Public Administration of Canada (IPAC), Kanada

Para konsultan yang menyiapkan laporan ini adalah:

1. **Hafid Abbas**, Team Leader/National Education Research Specialist
2. **Daniel Moulton**, International Education Research Specialist
3. **I Made Sumertajaya**, National Data Analyst
4. **Premono Koekoeh**, Regional Research Coordinator-Sumatra
5. **M. Nur Aidi**, Regional Research Coordinator-Java
6. **Suratno**, Regional Research Coordinator-Kalimantan
7. **Mansyur**, Regional Research Coordinator-Sulawesi
8. **GN Wibawa**, Regional Research Coordinator-Nusa Tenggara/ Maluku
9. **Alvian Sroyer**, Regional Research Coordinator-Papua

Pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan tanggung jawab penuh dari para pengarangnya dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia dan Uni Eropa.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Istilah dan Singkatan	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Sekilas tentang BSM dan tujuannya	2
1.3 Aturan dalam Implementasi BSM.....	2
1.4 Tujuan Studi.....	3
1.5 Struktur Pelaporan	4
2. Deskripsi Tahapan Studi dan Keluarannya	5
2.1 Mobilisasi Tim.....	5
2.2 Laporan Pendahuluan	5
2.3 Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan Kunci	5
2.4 Menyusun Metodologi Survei dan Draf Instrumen	6
2.5 Uji Coba Instrumen Survei	7
2.6 Pelaksanaan Survei.....	8
2.7 Analisis Data	9
2.8 Penyusunan Laporan Akhir	9
3. Temuan	11
3.1 Pertanyaan Penelitian: Akurasi Mekanisme Pentargetan yang Diterapkan pada Program BSM. 11	
3.2 Pertanyaan Kunci Penelitian: Apakah biaya satuan (<i>unit cost</i>) yang diterapkan pada komponen Beasiswa dirasa cukup?.....	20
3.3 Hingga pada taraf apakah kesulitan akses menuju pendidikan dapat diatasi oleh BSM?	27
3.4 Apakah yang menjadi dampak dari program BSM yang baru?.....	28
3.5 Apa yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan pemberian beasiswa kepada murid miskin di masa mendatang?	33
Lampiran 1. Daftar Kabupaten Sampel	39
Lampiran 2. Ringkasan Pemilihan Sampel	40
Lampiran 3. Ringkasan Responden Focus Group Discussion (FGD)	41
Lampiran 4. Persepsi Responden-Responden Terkait Kelayakan BSM Berdasarkan Region	42
Lampiran 5. Metodologi ACDP 038 Dan Susenas BPS Untuk Menentukan Tingkat Kemiskinan	47
Lampiran 6. Data Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten	48
Lampiran 7. Biaya Unit Lengkap Untuk Pendidikan Tahun 2003 – 2011	72
Daftar Pustaka	77
Aneks 1. Risalah Kebijakan BSM	79
Aneks 2. Studi Kasus	85
1. Wilayah Jawa Bali	87
2. Wilayah Kalimantan	97
3. Wilayah Nusa Tenggara - Maluku	107
4. Wilayah Papua	117
5. Wilayah Sulawesi	125
6. Wilayah Sumatera.....	135

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perkiraan Tingkat Kesalahan dengan metode Slovin untuk menentukan ukuran sampel Sekolah/Madrasah	6
Tabel 2.	Pendapat Para Responden Mengenai Akurasi Pentargetan Penerima Manfaat Program BSM	12
Tabel 3.	Persentase Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 yang Menerima BSM Berdasarkan Tingkat Pendidikan serta Kepemilikan Sekolah (Negeri/ Swasta)	14
Tabel 4.	Pengalokasian BSM kepada Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 Berdasarkan Daerah	14
Tabel 5.	Kelayakan Para Penerima BSM Menurut Kepala Sekolah Berdasarkan Daerah.....	15
Tabel 6.	Persentase Kepala Sekolah yang Merujuk Muridnya kepada Program Pendukung BSM.....	17
Tabel 7.	Jenis Dokumen yang Digunakan untuk Mengajukan Menerima BSM Berdasarkan Sekolah dan Madrasah: Persentase Murid	18
Tabel 8.	Pengetahuan Kepala Sekolah Mengenai Keberadaan Mekanisme Pengarsipan Pengaduan BSM	19
Tabel 9.	Jawaban Kepala Desa Tentang Adanya Mekanisme Pengarsipan Pengaduan Mengenai BSM.....	19
Tabel 10.	Jenis-jenis Pengaduan yang Diterima oleh Kepala Sekolah	20
Tabel 11.	Rangkuman Penilaian Kecukupan Dana BSM (Kepala Sekolah, Orangtua, Murid)	21
Tabel 12.	Penilaian Kepala Sekolah Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah.....	21
Tabel 13.	Kajian Orangtua Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah	22
Tabel 14.	Kajian murid Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah.....	22
Tabel 15.	Persentase Dana BSM yang Menutupi Biaya-Biaya pada Sekolah Negeri Berdasarkan Data Tahun 2011	23
Tabel 16.	Persentase Dana BSM yang Menutupi Biaya-Biaya pada Sekolah Swasta Berdasarkan Data Tahun 2011	23
Tabel 17.	Ukuran Rata-Rata BSM (Rp / Tahun) yang Direkomendasikan oleh Kepala Sekolah Menurut Tingkat dan Jenis Sekolah serta Berdasarkan Daerah.....	24
Tabel 18.	Pemanfaatan Dana BSM Menurut Orangtua Berdasarkan Daerah.....	25
Tabel 19.	Pemanfaatan Dana BSM Menurut murid Berdasarkan Daerah.....	25
Tabel 20.	Bulan-bulan Pertama Dicairkannya Dana BSM Menurut Kepala Sekolah (2010 -2013)	26
Tabel 21.	Jumlah Pencairan Dana BSM/ Tahun Menurut Kepala Sekolah Berdasarkan Wilayah	27
Tabel 22.	Hambatan Bersekolah Menurut Orangtua Berdasarkan Wilayah	28
Tabel 23.	Angka Putus Sekolah (<i>Dropout Rates – DO</i>) Berdasarkan Data Sekolah Sampel (2011-2013).....	29
Tabel 24.	Angka Putus Sekolah (<i>Dropout – DO</i>) Menurut Jenis Sekolah Berdasarkan Data Sampel Sekolah (2011-2013)	30
Tabel 25.	Angka Putus Sekolah (<i>Dropout – DO</i>) menurut Status Pembangunan Kabupaten/ Kota Berdasarkan Data Sampel Sekolah (2011-2013)	30
Tabel 26.	Pandangan Kepala Sekolah Mengenai Dampak Program BSM.....	31
Tabel 27.	Pandangan Para Guru Mengenai Dampak Program BSM.....	32
Tabel 28.	Pandangan Orangtua Mengenai Dampak Program BSM	32
Tabel 29.	Pandangan Para murid Mengenai Dampak Program BSM	32
Tabel 30.	Perubahan Pada Nilai Ujian Nasional (UN) 2011-2013	33

Daftar Gambar

Gambar 1.	Kecenderungan kemiskinan.....	1
Gambar 2.	Pendapat Para Respondent Mengenai Akurasi Pentargetan Penerima Manfaat BSM.....	12
Gambar 3.	Pengalokasian BSM Berdasarkan Tingkat Kemiskinan (Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga/ Bulan dalam Rupiah).....	13
Gambar 4.	Pengalokasian BSM kepada Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 Berdasarkan Daerah	14
Gambar 5.	Penggunaan Dokumen untuk Mengajukan Menerima BSM: Persentase Murid	18
Gambar 6.	Pusat Pengaduan BSM di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	19
Gambar 7.	Hambatan Bersekolah Menurut murid Berdasarkan Wilayah	28
Gambar 1.	Penerima BSM dari Madrasah MI NU 45 Trimulyo, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	87
Gambar 2.	Ruang kelas dari satu Madrasah Dasar Swasta, MIS Daar El-Muflihin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	88
Gambar 3.	Orangtua Murid dari PMI NU 45 Trimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	89
Gambar 4.	Sebuah Madrasah yang sukses: MA Darul Muta'alimin, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	89
Gambar 5.	Kegiatan belajar aktif di ruang kelas Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.....	90
Gambar 6.	Pengajaran dan belajar yang mengambil tempat di ruang kelas Sekolah Dasar di SDN Gantang 1, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	91
Gambar 7.	Sebuah ruang kelas Madrasah tingkat menengah di MA Ma'arif Borobudur, Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.....	93
Gambar 8.	Orang tua dari murid yang Memperoleh BSM dari Madrasah Menengah Atas XII MAN 5 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Orangtua adalah Petani dengan Satu Tanaman/Tahun. Mereka juga bekerja pada pekerjaan paruh waktu.	98
Gambar 9.	Penerima BSM dari MIN Anjir Muara Kota Tengah, Kabupaten Barito Kuala di Rumahnya	99
Gambar 10.	Hanya satu murid di Sekolah Dasar di MIN Anjir Muara Kota Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima BSM.	100
Gambar 11.	Banyak murid menggunakan sepeda untuk menuju sekolah, SDN Sungai Tunjang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan	101
Gambar 12.	Hanya Satu Murid Sekolah Menengah Pertama dari 40 murid di XII MAN 5 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima BSM.....	102
Gambar 13.	SMKN 2 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sekolah menengah Kejuruan dengan Instalasi Listrik sebagai salah satu mata pelajaran. 30 murid menerima BSM dari sejumlah 165 yang mengajukan. Pada foto Praktikum, Ali adalah satu-satunya di kelas XII yang menerima BSM	105
Gambar 14.	Penerima manfaat BSM di Tingkat Dasar, SDN Fataleke, Kabupaten Nagakeo, Provinsi NTT.....	107
Gambar 15.	Sebaran Penerima BSM berdasarkan Tingkat Sekolah di Kota Ambon 2012/2013	108
Gambar 16.	Distribusi jumlah murid di Kota Ambon 2012/2013.....	108
Gambar 17.	Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama, SMPN 3 Taebenu, Kabupaten Kupang (murid perempuan yang berdiri, ayahnya adalah PNS, menerima BSM)	109
Gambar 18.	Contoh rumah keluarga miskin di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT	110
Gambar 19.	Ruang Kelas Sekolah Dasar, SD Inpres Malawona, Kabupaten Nagakeo, Provinsi NTT.....	111
Gambar 20.	Sekolah Dasar Katolik Galawea, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	112
Gambar 21.	Orang Tua Murid yang menerima BSM di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Barat 113	
Gambar 22.	Contoh Sosialisasi yang baik di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTB.....	114
Gambar 23.	Murid Sekolah Dasar yang menerima BSM di Tahun 2012 pada SD YPK II, Kampung Baru, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua	118

Gambar 24. Orang Tua murid penerima BSM yang terlihat berkecukupan dari SMP YPP Siloam, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	119
Gambar 25. SD YPPK St. Xaverius Boven Digoel, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua	119
Gambar 26. Kondisi Hunian dari Keluarga Miskin di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua	120
Gambar 27. Murid umumnya menggunakan perahu untuk menuju sekolah pada banyak tempat di Papua	120
Gambar 28. Sekolah Dasar YPPK Kathan, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua dimana tidak ada kelas dilangsungkan selama 3 bulan.....	121
Gambar 29. Tingkat Kehadiran atau penerimaan yang rendah pada SMP Negeri 1 Mappi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua.....	122
Gambar 30. SMP penerima BSM di SMP YPP Siloam, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.....	123
Gambar 31. Keluarga yang hidup di lingkungan seperti ini adalah pada sasaran dari BSM	126
Gambar 32. Rumah penerima BSM dari SDN 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan	126
Gambar 33. Orang Tua Murid yang menerima BSM, SDN 4 Bantenge, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	127
Gambar 34. Focus Group Discussion antara Kepala Sekolah, Guru, dan Pejabat Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.....	128
Gambar 35. Sukri, seorang murid Sekolah Dasar pada SDN 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Province yang menerima BSM. Ibunya tidak memiliki KPS.....	128
Gambar 36. Sekolah Dasar 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan tidak dipertimbangkan sebagai Sekolah Miskin. Namun dari 300 murid, 100 mengajukan BSM dengan 40 murid telah menerima BSM	129
Gambar 37. Ruang Kelas SMAN 15 Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dua Murid dalam kelas ini menerima BSM.....	130
Gambar 38. Orang Tua Penerima BSM.....	136
Gambar 39. Upacara Bendera pada SDN 6 Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	137
Gambar 40. SMPN 2 Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	138
Gambar 41. Membeli makanan ringan di sekolah merupakan tradisi: SDN 10 Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat	139
Gambar 42. Ruang Kelas SMA dan Murid yang menggunakan Seragam Olah Raga di SMAN I Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.....	140
Gambar 43. Anak-anak Ibu Epi dan temannya menolong usaha Ibu Epi dalam berjualan dengan menggunakan gerobak makanan	140
Gambar 44. Ruang kelas SMAN I Toboali. Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.....	143

Daftar Istilah dan Singkatan

ACDP	Kerjasama untuk Pengembangan Analisis dan Kapasitas	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
ADB	Asian Development Bank	<i>Asian Development Bank</i>
AHH	Angka Harapan Hidup	<i>Health Indicators</i>
AMH	Angka Melek Huruf	<i>Literacy Rates</i>
APM	Angka Partisipasi Murni	<i>School Participation Rates</i>
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Board</i>
BAPPENAS	Badan Perencanaan dan Pengembangan Nasional	<i>Ministry of National Development Planning</i>
BSM	Bantuan Siswa Miskin	<i>Poor Students Program</i>
FGD	Kelompok Diskusi Terfokus	<i>Focus Group Discussions</i>
IPM	Index Pembangunan Manusia	<i>human development index</i>
KPS	Kartu Perlindungan Sosial	<i>Social Security Card</i>
KTM	Kartu Tanda Miskin	<i>Poverty Card</i>
MI	Madrasah Ibtidaiyah	<i>Elementary madrasah</i>
MoEC	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	<i>Ministry of Education and Culture</i>
MoF	Kementerian Keuangan	<i>Ministry of Finance</i>
MoRA	Kementerian Agama	<i>Ministry of Religious Affairs</i>
MSS	Standar Pelayanan Minimal	<i>Minimum Service Standards</i>
MTs	Madrasah Tsanawiyah	<i>Junior secondary madrasah</i>
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	<i>Gross Regional Domestic Product</i>
PKH	Program Keluarga Harapan	<i>Family Hope Program</i>
RASKIN	Program beRAS misKIN	<i>rice-for-the-poor program</i>
SD	Sekolah Dasar	<i>Primary School</i>
SMP	Sekolah Menengah Pertama	<i>Junior Secondary School</i>
SKTM	Surat Keterangan Tanda Miskin	<i>Letter of Poor</i>
UPT	Unit Pelaksana Tugas	<i>Acting Unit</i>
JUKNIS	Petunjuk Teknis	<i>Technical Guidelines</i>
TIA	Trans Intra Asia	<i>Trans Intra Asia</i>
ToR	Kerangka Acuan Kerja	<i>Terms of Reference</i>
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<i>National Team for Acceleration of Poverty Reduction</i>

Ringkasan Eksekutif

Melalui pengumuman kenaikan harga BBM pada Juni 2013, pemerintah menerapkan suatu kebijakan baru yakni program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah demi mempertahankan kesejahteraannya.

Skema kompensasi ini meliputi:

- 1) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), berupa uang tunai sebesar Rp 150.000. BLSM ini dibayarkan dua kali selama 4 bulan kepada sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan secara finansial;
- 2) menambah bantuan dalam bentuk beras yang dialokasikan sebagai bagian dari program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang terdiri atas 15 kg per rumah tangga selama 3 bulan (Juni, Juli, September 2013);
- 3) menambah nilai nominal bantuan dan jumlah penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
- 4) menambah nilai nominal bantuan yang ditargetkan bagi 2,4 juta rumah tangga yang berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yakni dari jumlah rata-rata Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta per tahun.

Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang baru didasarkan pada hasil Kajian dan pemantauan pada tahun 2012 oleh TNP2K dan Bank Dunia. Tujuannya adalah: pengembangan suatu sistem beasiswa yang efektif dan efisien yang menguntungkan rakyat miskin; penentuan ukuran yang tepat bagi beasiswa pada setiap jenjang pendidikan; memperbaiki sistem penyaluran dan pemantauan dana; pengembangan kelembagaan serta definisi yang lebih jelas terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam menyalurkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program BSM.

Kekhasan BSM ini berupa perpaduan antara dukungan terhadap murid miskin¹ dengan mekanisme pentargetan serta akses yang dikembangkan oleh TNP2K² untuk penyaluran dana tunai. Mekanisme target memanfaatkan Basis Data Terpadu yang berisi nama dan alamat 96 juta orang dari 60 juta rumah tangga (bersumber dari data PPLS) serta Kartu BSM dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)³. Untuk mendukung program ini, Kemendikbud berupaya untuk menerapkan suatu strategi komunikasi yang bersamaan dengan penyaluran dana untuk mengatasi rendahnya daya serap yang mungkin terjadi.

Kebijakan BSM yang baru mulai berlaku pada Juli 2013. BSM memberikan jumlah uang dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, untuk SD jumlahnya dari Rp 360.000 menjadi Rp 450.000. dan kepada sekitar dua kali lipat jumlah penerima dibandingkan sebelumnya. Awalnya ditujukan kepada 8,7 juta anak usia sekolah, dan kini kepada 16,6 orang anak. Pencairan dana direncanakan dilakukan dua kali setiap tahunnya, yakni pada awal semester Tahun Ajaran baru. Pencairan pertama untuk BSM ini rencananya akan dilakukan selamadari Juli hingga September, dan dimulai pada daerah-daerah yang paling mudah dijangkau⁴.

¹ Meskipun BSM biasanya dikenal sebagai program beasiswa, TNP2K memilih untuk tidak melabeli BSM demikian karena beasiswa biasanya diberikan sebagai penghargaan khusus seperti prestasi akademis yang luar biasa. ("Tanya Jawab Program Bantuan Siswa Miskin". TNP2K, Februari 2013).

² TNP2K= Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

³ Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dibagikan kepada rumah tangga miskin yang menjadi target dari basis data TNP2K, berjumlah sekitar 60 juta rumah tangga. Kartu-kartu tersebut dapat digunakan untuk memperoleh bantuan pendidikan (BSM) dari sekolah.

⁴ Untuk murid SD, BSM dinaikkan dari Rp 360.000 (2012) menjadi Rp 450.000 (2013), SMP dari Rp 560.000 menjadi Rp 750.000, dan SMA tetap Rp 1.000.000 per tahun. Selain itu, sebagai akibat revisi anggaran untuk tahun 2013, maka para penerima BSM di semua tingkatan mendapatkan tambahan sejumlah Rp 200.000.

Suatu Kajian Cepat (*Rapid Assessment*) dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif tersebut di atas. Hasil analisis akan menghasilkan pilihan kebijakan untuk memperbaiki program BSM. **Tujuan dari Kajian Cepat ini** adalah untuk memberikankontribusi secara lebih efektif bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat miskin. Untuk itu berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang perlu dijawab⁵:

- (1) Seberapa akuratkah mekanisme pentargetan yang diterapkan untuk mengidentifikasi warga miskin dan hampir miskin?
- (2) Apakah cukup biaya satuan (*unit cost*) yang diterapkan pada komponen Beasiswa?
- (3) Hingga pada taraf apakah kesulitan akses terhadap pendidikan dapat diatasi oleh BSM?
- (4) Apakah dampak dari pelaksanaan program baru BSM ini?
- (5) Apa yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan pemberian beasiswa bagi warga miskin di masa mendatang?

Survei ACDP 038 dilakukan pada Oktober 2013 di 1.712 sekolah/ madrasah, di 29 kabupaten/ kota di 11 provinsi di enam wilayah: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, serta Papua - Papua Barat. Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion – FGD*) ini melibatkan sekitar 1.700 kepala sekolah/madrasah, lebih dari 3.000 guru, 19.800 murid, lebih dari 5.000 orangtua murid, serta 83 kepala desa.

Survei ini juga mengumpulkan data pelengkap serta informasi yang berkaitan dengan dampak program ini terhadap pendaftaran di sekolah, angka kehadiran murid, angka putus sekolah, serta angka melanjutkan. Juga mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi program BSM; akan tetapi, ini bukanlah tujuan utama dari survei.

Risalah kebijakan (*policy brief*) ini diawali dengan mengidentifikasi beberapa isu strategis. Menjawablima pertanyaan pokok penelitian untuk mengklarifikasi serta memprioritaskan tujuan utama serta tujuan antara program BSM di masa mendatang. Pengidentifikasi isu-isu strategis diikuti dengan beberapa usulan pilihan kebijakan yang berdasarkan pada hasil analisis data survei..

Sebagai suatu program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer – CCT*) BSM bertujuan untuk memberikan uang tunai kepada murid miskin, supaya mereka bisa tetap bersekolah, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka kehadiran murid dan angka melanjutkan, serta meringankan beban keuangan keluarga (miskin) untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Program ini telah berjalan sejak tahun 2010.

Sejak Juli 2013, jumlah penerima manfaat program BSM telah meningkat sebanyak dua kali lipat, dan jumlah uangnya pun bertambah. Penambahan subsidi tunai ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas meningkatnya pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan akibat naiknya harga barang dan jasa yang didorong oleh naiknya harga BBM pada Juli 2013 itu. Dalam rangka merencanakan perbaikan program BSM, maka perlu dipertimbangkan **beberapa keputusan strategis sebagai berikut ini:**

1. Apakah program ini dikembangkan sebagai suatu tindakan sementara untuk meringankan beban rumah tangga miskin dan hampir miskin akibat kenaikan harga yang sangat tinggi, atukah ini suatu program CCT untuk penanggulangan kemiskinan jangka-panjang? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin mengakibatkan beberapa implikasi nyata pada penganggaran nasional.
2. Apakah BSM tergolong program penanggulangan kemiskinan – yaitu memberikan dana tunai untuk membantu menutupi biaya sekolah, sehingga keluarga (miskin) dapat mengalihkan fungsi uang dari yang sebelumnya untuk pendidikan itu kepada keperluan lainnya? Atukah BSM merupakan program beasiswa yang ditargetkan kepada orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mereka dapat tetap bersekolah atau kembali ke sekolah? Jawabannya akan sangat memengaruhi bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan program ini selanjutnya. (Program CCT biasanya mencakup kedua tujuan tersebut sekaligus; tetapi untuk beberapa keputusan strategis, harus diprioritaskan salah satu dari kedua tujuan tersebut).

⁵ Kerangka Acuan (TOR) ACDP 038, Tabel 1, Halaman 3.

3. Tujuan program BSM yakni memberikan bantuan tunai kepada rumahtangga miskin dan hampir miskin melalui pembayaran langsung kepada anak-anak untuk menutupi pengeluaran pendidikan, sehingga penghasilan keluarga dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Harga-harga semakin meningkat setelah terjadi pengurangan subsidi BBM pada Juli 2013.

Dengan mengasumsikan suatu anggaran tetap untuk BSM, maka beberapa keputusan strategis berikut ini harus diambil: kebijakan manakah yang lebih baik, mendistribusikan uang yang jumlahnya relatif kecil kepada sebanyak-banyaknya orang, ataukah jumlah dana tersebut sebaiknya difokuskan pada pencapaian sasaran pendidikan, seperti misalnya pendidikan dasar untuk semua (dan juga kemungkinan diterapkannya wajib belajar 12 tahun di masa mendatang), dengan konsekuensi lebih sedikit keluarga yang akan menerima BSM?

4. Sejumlah pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota telah mengumumkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Ada banyak bukti yang memungkinkan program ini menjadi kebijakan nasional di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan bahwa pencapaian tujuan ini adalah hasil upaya berjangka panjang (misalnya angka partisipasi SMP hanya berkisar pada angka 78%) dan mempertimbangkan tingginya biaya bagi pendidikan tingkat lanjut jika dibandingkan dengan pendidikan dasar maka apakah tujuan utama BSM seharusnya untuk membantu mengatasi munculnya kebijakan baru yang mungkin akan diterapkan ini? Dana BOS misalnya telah membantu mengurangi beban biaya sekolah bagi murid.

Pembelajaran berharga dari Kajian Cepat yang dirangkum di bawah ini merupakan hasil analisis dari data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari survei, serta serangkaian pertemuan konsultasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah di tingkat nasional maupun pada pihak-pihak terkait. Informasi di bawah ini disajikan sebagai acuan pembelajaran, bukan rekomendasi. Pilihan-pilihan kebijakan spesifik didasarkan pada temuan yang dipresentasikan berikut ini:

Meningkatkan Mekanisme Pentargetan

1. Dampak BSM dirasakan paling minimal pada tingkat pendidikan dasar. Terkecuali di daerah terpencil yang miskin dan beberapa wilayah perkotaan, anak-anak akan tetap bersekolah di SD/ MI dengan ataupun tanpa adanya program BSM. Angka Partisipasi nasional berkisar di angka 95%.
2. Data menunjukkan bahwa sekitar 72% dari warga termiskin (seperti yang didefinisikan oleh survei) menerima BSM. Sementara hanya sekitar 50% dari rumahtangga hampir miskin (sebagaimana juga diperoleh dari survei) menerima BSM. Banyak keluhan terutama oleh mereka yang tidak menerima BSM meskipun mereka berasal dari keluarga dengan tingkat kemiskinan yang sama dengan yang menerima BSM.
3. Murid tidak mengetahui apakah mereka akan menerima BSM, baru mengetahui pada saat mereka terdaftar di sekolah. Hal ini berdampak terutama dirasakan oleh murid yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang murid yang berasal dari keluarga sangat miskin, yang lulus dari SD mungkin tidak akan mendaftarkan di SMP karena tidak sanggup membayar biaya-biayanya. Akan tetapi, jika murid tersebut mengetahui ketika dia di kelas 6 SD bahwa ia dapat menerima dana BSM di SMP, maka besar kemungkinan ia akan melanjutkan ke SMP.

Mendapatkan Suatu Ukuran yang Tepat

4. Seluruh responden menyatakan bahwa jumlah dana BSM seharusnya ditambah, akan tetapi jumlah tambahan yang diusulkan terdapat variasi yang cukup besar. Isu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sampai sejauh mana dana BSM dapat menutupi pengeluaran untuk biaya sekolah. Jumlah dana BSM yang diberikan kepada setiap keluarga saat ini, yang telah ditambah secara signifikan pada awal tahun 2013 menunjukkan bahwa BSM mengatasi sekitar 69%-72% dari biaya-biaya untuk bersekolah di SD negeri, dan 56%-64% di madrasah negeri, sementara BSM menutupi 46%-66% untuk SD swasta, dan 74%-100% untuk madrasah swasta.

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa dana BSM saat ini masih mungkin untuk ditambah bagi mereka yang tergolong sangat miskin, terutama 95% murid di usia SD/MI dan 22% murid di usia SMP/MTs yang pada saat ini tidak bersekolah.

5. Di tingkat dasar, pentargetan BSM tampaknya lebih penting dibandingkan dengan jumlahnya, terutama untuk madrasah swasta. Akan tetapi, meskipun tidak ada data kuantitatif yang spesifik untuk tingkat lanjutan atas, data kualitatif menunjukkan bahwa pengeluaran di tingkat ini sangat tinggi dan BSM sejumlah Rp 1.200.000/ tahun dirasakan tidak cukup untuk menutupi biaya iuran dan pengeluaran lainnya.

Hal ini kemudian menjadi keprihatinan yang serius, mengingat bahwa terdapat sekitar 400.000 murid putus sekolah di tingkat SMA per tahunnya dan karena angka pendaftaran terbilang kecil, maka rasio guru-murid juga sangat kecil, sehingga keseluruhan sistem pun tidak efisien.

6. "Satu ukuran tidak mungkin cocok untuk semua". Ada aneka variasi biaya hidup termasuk juga biaya sekolah di seluruh negeri, seperti yang diindikasikan oleh berbagai rangkaian data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagian responden menyebutkan bahwa jumlah BSM seharusnya disesuaikan dengan biaya hidup di setiap wilayah. Tampaknya penyesuaian jumlah BSM per wilayah ini dapat menjadikan program ini lebih efektif dan efisien biaya, daripada memberikan jumlah yang sama di seluruh daerah.

Dampak BSM

7. Pendistribusian dana BSM yang kerap terlambat mengakibatkan dampak negatif terhadap program ini, karena murid membutuhkan uang pada awal tahun ajaran untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, membayar transportasi serta pada beberapa kasus membayar iuran dan pungutan. Beberapa kasus dilaporkan mengenai pendistribusian dana BSM yang terjadi pada akhir Mei, untuk memenuhi kebutuhan tahun ajaran pada Juli satu tahun sebelumnya.
8. Porsi terbesar dana BSM digunakan untuk membeli seragam, terutama di SD dan SMP (iuran menjadi pengeluaran terbesar bagi murid di tingkat SMA). Suatu kasus yang ekstrim dijumpai di wilayah Kalimantan, murid diwajibkan untuk membeli lima setel seragam untuk tingkat SD dan enam setel untuk tingkat SMP.
9. Data hasil survei mengindikasikan bahwa angka putus sekolah masih dapat diterima selama pelaksanaan program BSM tiga tahun terakhir ini, dengan pengecualian di wilayah Papua, angka putus sekolah masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di wilayah lain di negara ini. Sementara sebagian besar kepala sekolah dan guru meyakini bahwa BSM berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi, meski hanya kurang dari 50% orangtua dan murid meyakini keberhasilan yang sama.

Pada waktu dilakukan survei, sudah dilakukan pencairan terhadap sebagian kecil dana BSM yang jumlahnya telah ditambah; meski demikian masih terlalu dini untuk menentukan apakah jumlah dana BSM yang baru ini akan memperbaiki sikap orangtua dan murid terhadap partisipasi dan putus sekolah.

10. Hampir seluruh responden mengeluh tentang prosedur pencairan dana BSM. Pencairan dilakukan melalui bank, yang dirasa menyulitkan terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari bank penyalur dana. Persyaratan administratif dirasakan sulit untuk dipatuhi oleh sebagian penerima dana; terkadang beberapa orang harus bolak-balik ke bank untuk dapat mematuhi persyaratan tersebut. Murid terkadang harus terlebih dahulu menyimpan sejumlah uang untuk dapat membuka rekening. Hal itu dirasa menjadi beban bagi keluarga miskin. Ongkos perjalanan menuju dan pulang dari bank juga dirasakan mahal baik dari segi uang dan waktu. (Di Papua misalnya, ada perjalanan yang harus menggunakan perahu dan memakan waktu tiga hari. Dan terutama untuk para murid SD, seseorang dari pihak sekolah harus menemani mereka.
11. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program BSM tahun 2013-2014 yang dikeluarkan secara bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas dengan jelas menyatakan bahwa dana BSM untuk murid tidak boleh dipotong oleh siapa pun. Akan tetapi, telah terjadi banyak kasus pemotongan yang dilaporkan selama survei. Juknis tersebut juga menyatakan bahwa kepala sekolah dapat mewakili murid untuk menerima dana jika terlalu sulit bagi murid untuk melakukan perjalanan menuju tempatmencairkan dana. Akan tetapi, tidak disebutkan di dalam Juknis bagaimana mengatasi biaya transportasi untuk mengambil dana tersebut. Di beberapa tempat terpencil biaya transportasi dapat menjadi sangat besar.

BSM dan Isu-isu Aksesibilitas

12. Sosialisasi program BSM dan KPS dirasakan sangat kurang. Beberapa responden survei, terutama para orangtua dan kepala desa, tidak memahami bahwa KPS dapat digunakan untuk mengajukan diri sebagai penerima BSM. Sejumlah kepala sekolah masih belum jelas tentang beberapa peraturan. Singkatnya, tidak ada responden yang mengetahui tentang Pusat Pengaduan BSM di Kemendikbud, atau pun bagaimana untuk melaporkan/ mengarsipkan pengaduan.
13. Kartu KPS dan BSM yang dirujuk dari basis data nasional TNP2K menjadi kriteria utama sebagai penerima manfaat program BSM. Akan tetapi, survei ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 51% penerima dana BSM menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan diri menjadi penerima dana BSM. Hampir 50% menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau yang dikategorikan sebagai anak tanpa ayah atau yatim-piatu ataupun faktor-faktor lainnya, seperti misalnya tekanan politik.
14. Transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan SKTM pun dipertanyakan. Sebagian kasus dilaporkan bahwa para pihak yang berwenang di desa mengeluarkan SKTM kepada siapapun yang memintanya; entah miskin ataupun tidak. Pada beberapa kasus dikenakan iuran untuk mendapatkan SKTM ini. Oleh karena itu, para pejabat sekolah mencurigai niat dari para kepala desa, dan pada saat yang sama kepala desa menyatakan bahwa merekalah yang paling mengetahui siapa yang miskin dan tidak, sehingga mereka harus dilibatkan dalam proses pentargetan program BSM.

Beberapa saran telah diberikan untuk membentuk suatu gugus tugas yang terdiri dari para pejabat desa dan pejabat sekolah serta anggota komite sekolah untuk memvalidasi status rumahtangga miskin sebagai target penerima dana BSM.

15. Beberapa kasus telah ditemukan adanya intervensi politis. Para politisi mengatakan bahwa mereka diberikan sejumlah dana untuk mendistribusikan BSM. Ada juga beberapa kasus, murid-murid hanya menerima setengah dari jumlah yang seharusnya mereka dapatkan.

Meningkatkan pemberian beasiswa bagi rakyat miskin di masa mendatang

16. Pihak-pihak berwenang di tingkat provinsi yang dimintai pendapat saat survei mengatakan bahwa mereka tidak diberi peran untuk terlibat dalam proses. Mereka sangat ingin membantu jika peraturan ditulis untuk menjelaskan peran mereka di dalam program BSM. Misalnya, satu kabupaten di wilayah Kalimantan tidak dapat memenuhi kuota BSM-nya. Jika provinsi ini diberikan peran koordinasi, maka pemerintah provinsi dapat melakukan distribusi-ulang terhadap kuota menurut persediaan dan permintaan. Pemerintah provinsi juga dapat membantu untuk memantau proses pentargetan, validasi data kemiskinan, serta pelaksanaan program.
17. Kementerian Agama memiliki suatu mekanisme yang tampaknya rumit. BSM untuk madrasah negeri dimasukkan ke dalam anggaran rutin (di bawah "Program"), sementara BSM untuk madrasah swasta muncul di bawah kategori anggaran yang berbeda ("Bantuan"). Rekomendasi telah diberikan agar Kemenag dan Kemendikbud menggunakan mekanisme yang sama untuk pentargetan, penganggaran, dan pemrograman BSM.
18. Wilayah Papua-Papua Barat memiliki kebutuhan yang berbeda dan lebih besar daripada seluruh wilayah lainnya. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa angka putus sekolah lebih besar di Papua dibandingkan dengan daerah lain. Kurangnya infrastruktur dan buruknya manajemen guru secara keseluruhan dalam pengembangan sosio-ekonomi terutama di daerah pedesaan, hingga memerlukan perhatian khusus dan kebijakan BSM khusus.

Pilihan kebijakan untuk meningkatkan program BSM berdasarkan temuan kunci dari Kajian Cepat diringkas di bawah ini.

- 1. Mengurangi jumlah BSM yang disasarkan pada jenjang SD/ MI dan meningkatkan jumlah BSM untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK**

Dampak BSM dirasakan paling minimal pada tingkat pendidikan dasar. Kecuali di daerah-daerah miskin dan terpencil serta di beberapa daerah perkotaan, anak-anak akan tetap bersekolah di SD/MI dengan atau tanpa adanya BSM. Angka partisipasi nasional berkisar di angka 95%. (Angka partisipasi nasional untuk jenjang SMP/ MTs adalah 78%. Sekitar 240.000 orang siswa putus sekolah dari SMA/MA/SMK/MAK setiap tahunnya. Suatu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah untuk membatasi BSM hanya untuk 5% siswa di jenjang dasar yang tidak bersekolah dan untuk anak yatim dan piatu, serta jumlah dana bantuannya dialihkan sebanyak 22% dari siswa di jenjang SMP yang tidak bersekolah dan 240.000 orang siswa yang tidak melanjutkan dari tingkat SMP.

2. Menerapkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah

Jika kuota BSM pada jenjang pendidikan dasar dipindahkan ke jenjang menengah untuk meningkatkan partisipasi, maka isu seragam sekolah harus diatasi. Dalam upaya mempertahankan angka partisipasi saat ini tanpa adanya BSM, maka kebijakan mengenai seragam perlu diubah untuk membatasi jumlah jenis seragam hingga satu atau dua saja. Hal yang sama juga berlaku untuk jenjang menengah pertama dan atas. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli berbagai macam seragam menjadi salah satu komponen biaya pendidikan yang paling besar dan tidak memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan itu sendiri.

3. Meningkatkan ketepatan pengidentifikasian tingkat kemiskinan para penerima BSM

Data menunjukkan bahwa sekitar 72% dari warga yang sangat miskin (seperti yang didefinisikan oleh survei) menerima BSM. Sementara hanya sekitar 50% dari hampir miskin (sebagaimana juga diperoleh dari survei) yang menerima BSM. Banyak keluhan yang diungkapkan terutama oleh mereka yang tidak menerima BSM meskipun mereka berasal dari keluarga dengan tingkat kemiskinan yang sama. Sebagian kecil dari BSM bahkan diberikan kepada mereka yang mempunyai tingkat pendapatan menengah-atas. Meskipun jumlahnya kecil, namun masyarakat mengetahui hal tersebut. Sehingga, banyak responden survei mempertanyakan akurasi dan transparansi dari program tersebut.

Satu opsi kebijakan yang dapat mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan data TNP2K KPS/BSM kepada setiap kepala desa. Kemudian data TNP2K itu seharusnya diverifikasi di tingkat desa oleh komite khusus yang terdiri dari para kepala sekolah, anggota komite sekolah, serta kepala desa maupun sekretaris desa. Orang-orang maupun keluarga yang terdaftar pada basis data TNP2K dan ternyata tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai warga miskin tidak diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai penerima BSM. Mereka yang ternyata miskin namun tidak termasuk di dalam basis data TNP2K harus diberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan diperbolehkan untuk menggunakan SKTM-nya sebagai dasar pengajuan diri sebagai penerima BSM. Nama-nama tersebut lalu dikirimkan kepada TNP2K melalui sistem proposal BSM, melalui Kemendikbud dan Kemenag.

4. Memadukan BSM dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Temuan studi lapangan mengindikasikan bahwa harus ditingkatkan jumlah uang BSM. Isu kebijakan yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah sejauh mana BSM seharusnya menutupi biaya keperluan untuk bersekolah. Jumlah dana yang diberikan dalam satu paket BSM saat ini, yang telah mengalami peningkatan secara signifikan pada awal tahun 2013 menunjukkan bahwa BSM menutupi sekitar 69%-72% biaya-biaya pendidikan dasar di sekolah negeri dan 56%-64% di madrasah negeri, sementara itu menutupi biaya pendidikan di sekolah swasta sekitar 46%-66% dan 74%-100% di madrasah swasta.

Analisis atas data survei tersebut menunjukkan bahwa dana BSM saat ini dapat dinaikkan untuk mereka yang sangat miskin, terutama bagi sekitar 5% dari anak usia SD/MI dan 22% anak usia SMP/MTs yang saat ini tidak terdaftar di sekolah/madrasah. Untuk dapat menjangkau anak-anak yang mengalami kendala geografis, sosial, dan ekonomi, BSM dapat dipadukan dengan strategi penanggulangan kemiskinan dengan mempromosikan program-program peningkatan pendapatan melalui saluran-saluran yang selaras.

5. Mengumumkan para penerima BSM sebelum tahun ajaran baru dimulai

Para siswa tidak mengetahui apakah mereka akan menerima BSM, karenanya mereka terdaftar di sekolah. Hal ini dapat berakibat fatal, terutama bagi para siswa yang akan melanjutkan. Suatu opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah untuk mengeluarkan peraturan bagi tim verifikasi data kemiskinan di tingkat desa (Opsi Kebijakan 1, di atas) untuk mencantumkan nama-nama siswa yang akan menerima BSM pada tahun ajaran berikutnya pada semester kedua. Pengaturan waktu ini memastikan agar siswa mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan BSM pada tahun ajaran berikutnya. Hal ini akan memungkinkan adanya pencairan dana BSM pada awal tahun ajaran, ketika dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para siswa.

6. Memastikan bahwa dana BSM dicairkan pada awal setiap semester

Pencairan dana BSM yang terlambat dapat berdampak negatif terhadap program BSM sendiri, karena siswa membutuhkan uang pada awal tahun ajaran untuk membeli seragam sekolah, perlengkapan, membayar transportasi serta pada beberapa kasus membayar iuran sekolah dan iuran lainnya, bilamana dibutuhkan. Kebijakan di atas, untuk memilih para penerima BSM sebelum dimulainya tahun ajaran baru memungkinkan BSM untuk dicairkan tepat pada waktunya.

7. Menyesuaikan jumlah dana BSM dengan perbedaan di tingkat regional

Studi ini menemukan adanya variasi biaya hidup dan biaya untuk sekolah di seluruh pelosok negeri, sebagaimana diindikasikan oleh berbagai rangkaian data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebuah pilihan kebijakan adalah dengan menyesuaikan jumlah dana BSM dengan tingkat biaya hidup di setiap wilayah.

8. Merevisi Mekanisme Pencairan Dana BSM

Praktek pencairan dana melalui bank yang berjalan saat ini dirasakan bermasalah; terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari bank penyalur dana. Petunjuk Teknis (Juknis) BSM tahun 2013-2014 yang dikeluarkan secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Atas dengan jelas menyatakan bahwa dana BSM untuk siswa tidak boleh dipotong oleh pihak manapun. Akan tetapi, dalam banyak kasus telah terjadi pemotongan seperti yang dilaporkan di dalam survei.

Juknis tersebut juga menyatakan bahwa kepala sekolah dapat mengambil dana BSM untuk siswanya jika murid kesulitan untuk melakukan perjalanan menuju ke lembaga pencair dana. Akan tetapi, tidak disebutkan dalam Juknis tentang bagaimana biaya transportasi akan diberikan bagi mereka yang mengambil dana BSM tersebut.

Dua opsi kebijakan harus dipertimbangkan untuk memperbaiki mekanisme pendistribusian dana. Pertama, kembali ke sistem kantor pos yang dirasa tidak terlalu bermasalah jika dibandingkan dengan pencairan melalui bank. Kedua, jika dana harus diambil dari bank oleh pejabat sekolah atas nama siswa, maka dana untuk transportasi harus disediakan untuk sekolah/madrasah. Dan pencairan dari pejabat sekolah langsung kepada siswa harus dimonitor, orangtua/wali murid harus diberi tahu dan melakukan verifikasi dalam bentuk tertulis bahwa siswa telah menerima jumlah yang utuh, serta perlu dibuat sanksi atas penyalahgunaan dana tersebut, dan diterapkan secara konsisten.

9. Meningkatkan dan memperluas sosialisasi program BSM

Sosialisasi program BSM dan KPS dirasakan sangat kurang. Beberapa responden survei, terutama para orangtua murid dan kepala desa, tidak memahami bahwa KPS dapat digunakan untuk mengajukan diri sebagai penerima BSM. Pesan yang jelas dan mudah dipahami mengenai program BSM maupun KPS, termasuk prosedur pengaduan, perlu dipahami oleh setiap siswa dan orangtua maupun walinya di negara ini.

Dua opsi kebijakan juga dianjurkan untuk memperkuat dan memperluas sosialisasi. Pertama, membuat kontrak dengan suatu perusahaan humas untuk mensosialisasikan program-program tersebut melalui berbagai media. Kedua, Kemendikbud dan Kemenag dapat membuat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta kementerian lainnya yang berkaitan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan program BSM ini.

10. Mencegah orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan distribusi BSM ataupun melakukan seleksi terhadap penerima BSM

Beberapa kasus yang dilaporkan adanya intervensi politis. Para politisi mengatakan bahwa mereka diberikan sejumlah dana untuk mendistribusikan BSM. Ada juga kasus bahwa sejumlah siswa hanya menerima setengah dari jumlah dana yang seharusnya mereka terima. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BSM semacam itu perlu ada opsi untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan bahwa hanya pihak komite desalah yang memiliki wewenang untuk melakukan nominasi BSM berdasarkan verifikasi terhadap data kemiskinan.

11. Peranan yang lebih besar untuk pemerintah provinsi

Pemerintah Provinsi dapat berperan penting dalam mengkoordinasikan program BSM. Misalnya, jika ada kabupaten yang tidak dapat memenuhi kuota BSM yang ditetapkan, maka pemerintah provinsi dapat mengalokasikan kuota tersebut untuk kabupaten lain. Pemerintah provinsi juga dapat membantu untuk memonitor penetapan sasaran, memvalidasi data kemiskinan, serta dalam pelaksanaan program itu sendiri.

12. Membangun suatu mekanisme BSM di Kemenag

Kemenag memiliki suatu mekanisme yang kelihatannya rumit. BSM untuk madrasah negeri dikategorikan sebagai anggaran rutin (di bawah "Program"), sementara BSM untuk madrasah swasta muncul di bawah kategori anggaran yang berbeda (di bawah "Bantuan"). Satu opsi kebijakan diperlukan bagi Kemenag dan Kemendikbud agar dapat menggunakan mekanisme yang sama dalam hal penetapan sasaran, penganggaran, serta pemrograman BSM.

13. Menerapkan suatu pendekatan khusus untuk pengelolaan BSM di Papua

Suatu kebijakan khusus BSM perlu dipertimbangkan untuk wilayah Papua-Papua Barat. Dalam semangat RUU Otonomi Khusus, maka pendistribusian BSM dapat dilakukan bagi semua siswa di pedesaan. Meskipun setelah lebih dari satu dekade penerapan otonomi khusus kesenjangan sosial-ekonomi antara masyarakat asli/adat Papua dengan para pendatang tidak semakin sempit. Kemiskinan, angka pengangguran, serta buruknya prasarana di daerah pedesaan memperlihatkan tidak adanya perbaikan yang signifikan. Sedangkan di daerah perkotaan, BSM dapat dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada.

14. Memperkuat Mekanisme Penanganan Keluhan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Suatu pusat penanganan keluhan yang canggih telah dibangun di kantor pusat Kemendikbud Jakarta. Data survei menunjukkan bahwa masih sangat sedikit penggunaan mekanisme pengarsipan keluhan. Sebagai masukan untuk sosialisasi yang lebih baik terhadap pusat keluhan di tingkat nasional, kiranya perlu dipertimbangkan adanya kebijakan untuk mengatur mekanisme penyampaian keluhan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

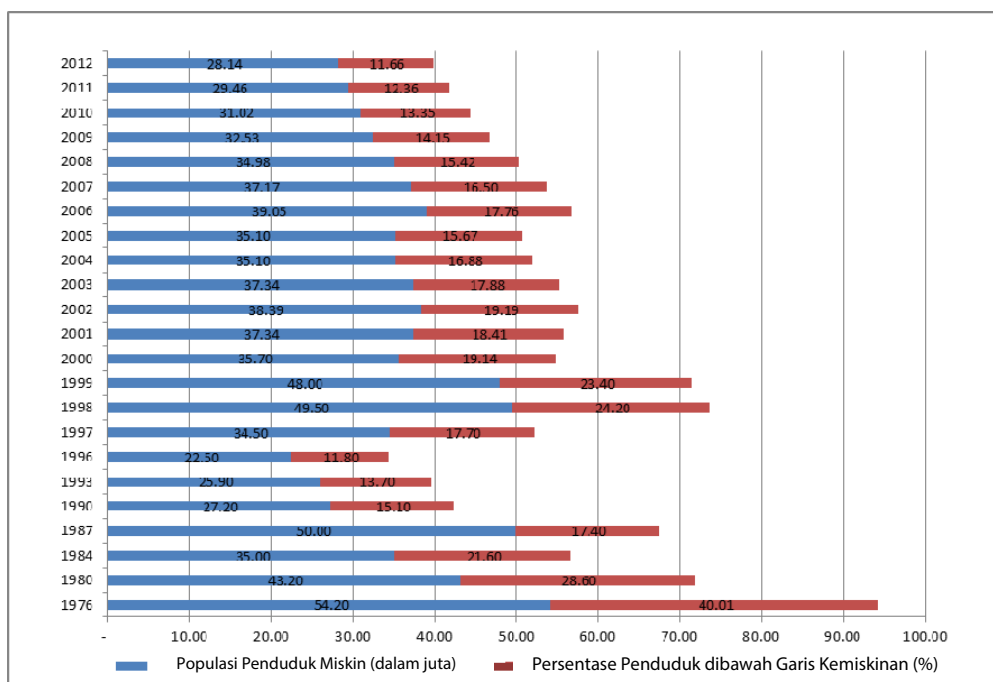
Melalui pengumuman kenaikan harga BBM pada Juni 2013, pemerintah menerapkan suatu kebijakan baru sebagai program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk mempertahankan kesejahteraannya.

Skema kompensasi ini meliputi:

- (1) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), berupa uang tunai sebesar Rp 150.000 yang dibayarkan sebanyak dua kali selama 4 bulan kepada sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan secara finansial;
- (2) menambah bantuan dalam bentuk beras yang dialokasikan sebagai bagian dari program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang terdiri atas 15 kg per rumah tangga selama 3 bulan (Juni, Juli, September 2013);
- (3) menambah nilai nominal bantuan dan jumlah penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
- (4) menambah nilai nominal bantuan yang ditargetkan bagi 2,4 juta rumah tangga yang berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari jumlah rata-rata Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta per tahun.

Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai level terendah pada tahun 1996. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan peningkatan kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan yang mencapai puncaknya pada tahun 1999 telah mengalami penurunan. Namun demikian, dengan diturunkannya subsidi BBM di tahun 2013 ini, ada kemungkinan kecenderungan penurunan kemiskinan berbalik arah.

Gambar 1. Kecenderungan kemiskinan⁶



⁶ Website TNP2K. 2013

Skema kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) diperkenalkan pada tahun 2008. Program BSM direvisi sebagai hasil penilaian dan pemantauan yang dilakukan pada tahun 2012 oleh TNP2K dan Bank Dunia. Mereka menemukan kelemahan dalam program ini diantaranya, bahwa penerima manfaat didistribusikan pada semua desil pendapatan. Kebijakan yang baru kemudian diberlakukan pada bulan Juli Tahun 2013.

Tahap pertama dengan skema baru ini dimaksudkan untuk dicairkan mulai dari Bulan Juli hingga September, dimulai pada daerah yang paling mudah dicapai. Namun, hingga awal Desember 2013, 100% dari dana tersebut masih belum dicairkan. Kebijakan BSM yang baru menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menyediakan kesempatan yang sama kepada semua anak Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan 20/2003 dan Undang-Undang Dasar. Undang-undang ini secara eksplisit menyediakan beasiswa bagi murid yang orang tuanya tidak mampu untuk menanggung biaya sekolah.

1.2 Sekilas tentang BSM dan tujuannya

Bantuan siswa miskin, yang diawali pada tahun 2008 adalah transfer dana yang dibiayai oleh pusat ke murid sekolah negeri dari keluarga miskin. Dana ini dimaksudkan untuk membayar uang sekolah dan kebutuhan lain seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam dsb. Pada tahun 2013 bantuan dari pemerintah ini tingkatnya bervariasi menurut jenjang pendidikannya, berkisar antara Rp. 360.000 (sekitar US\$ 36) bagi murid sekolah dasar sampai Rp 1.200.000 (sekitar US\$ 120) bagi mahasiswa. Transfer dana ini dilakukan dengan pembayaran sekaligus.

Semua sekolah negeri pada semua jenjang pendidikan mendapatkan Program BSM menurut jumlah murid yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi murid dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan lebih tinggi serta untuk mengurangi jumlah murid putus sekolah. Program BSM dibiayai oleh pemerintah pusat dan tidak mensyaratkan kontribusi apapun atau pembagian biaya secara tegas kepada penerima dana, pemda ataupun sekolah.

Tujuan dari skema baru ini termasuk: pengembangan dari sistem beasiswa yang efektif dan efisien untuk mendukung murid miskin; beasiswa yang tepat jumlah untuk semua tingkat pendidikan; meningkatkan mekanisme jaringan pendanaan dan juga sistem monitoring; pengembangan institusi dan pendefinisian yang lebih baik dan jelas terkait peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, Sekolah dan komunitas terkait penyampaian, monitoring dan evaluasi dari implementasi program BSM.

1.3 Aturan dalam Implementasi BSM

BSM merupakan satu dari beberapa jenis program beasiswa yang diimplementasikan oleh Kemendikbud dan Kemenag. Karena Kemendikbud dan Kemenag menyediakan beberapa jenis beasiswa yang secara tipikal berbasis kepada pencapaian akademis, BSM tidak dipertimbangkan sebagai sebuah program beasiswa namun sebagai sebuah Transfer Tunai Bersyarat kepada murid dari keluarga miskin dan hampir miskin⁷.

BSM untuk murid yang mengikuti sekolah negeri dan sekolah swasta dikelola oleh Kemendikbud, sementara BSM untuk murid yang bersekolah di Sekolah Agama Negeri dan Swasta atau Madrasah dikelola oleh Kemenag. Hingga Tahun 2012 ada 10 mekanisme BSM independen yang besar tanpa adanya unit koordinasi gabungan maupun dana yang terpusat. Pada kedua Kementerian, dana dan administrasi BSM dibagi-bagi berdasarkan tingkatan.

Pendanaan dimas? lalu disampaikan kepada murid-murid melalui 3 metode: melalui Kantor Pos; dibagikan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi; dan pendekatan ketiga, yang dilakukan oleh Kemenag, adalah penyampaian kepada sekolah melalui kantor Bendahara lokal yang pada akhirnya akan menyampaikan beasiswa tersebut kepada murid-murid.

⁷ Meskipun BSM umumnya disebut sebagai program beasiswa, TNP2K memilih untuk tidak melabelkan BSM sebagai beasiswa, karena biasanya beasiswa ditujukan sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kemampuan akademis yang tinggi. (*"Tanya Jawab Program Bantuan Siswa Miskin"*. TNP2K, Februari 2013.)

Mulai pada Tahun 2013, Kemenag mulai melakukan pendekatan yang sama dengan beberapa modifikasi seperti pemilihan penerima beasiswa oleh Panel Madrasah dan keharusan bagi murid untuk memperoleh sertifikat miskin dari RT/RW. Namun Kemendikbud telah melakukan sebuah perubahan signifikan pada manajemen BSM mulai dari Tahun 2013. Dibawah skema BSM Kemendikbud yang baru penerima BSM tidak lagi dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Sekolah mengusulkan penerima beasiswa kepada Kantor Dinas Pendidikan (yang kemudian mengirim daftar tersebut kepada Kantor provinsi dan kemudian kepada Kemendikbud Pusat) berdasarkan murid-murid yang menyerahkan kartu BSM atau Kartu Perlindungan Sosial yang diterima keluarga mereka. (KPS dapat digunakan untuk memperoleh berbagai jenis bantuan seperti beras pada program Raskin, uang dari program Bantuan Langsung Tunai, juga layanan kesehatan dan pendidikan (BSM)).

Pada Tahun 2013 Kartu BSM diberikan langsung kepada para murid melalui TNP2K. Namun jumlah penerima pada Tahun 2013 hanya 690.000 murid dan hanya murid kelas satu dan kelas tujuh yang menerima kartu BSM. Kuota dari penerima BSM Kemendikbud dan Kemenag pada Tahun 2013 berturut-turut adalah 13,5 juta dan 3 juta. KPS dikirimkan langsung kepada keluarga melalui TNP2K melalui Kantor Pos.

Nama keluarga penerima diperoleh dari Basis Data Terpadu TNP2K yang mencakup data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sejumlah 96 juta individu dan 60 juta keluarga. Jika para murid atau keluarga mereka belum menerima salah satu dari kartu tersebut, mereka dapat mengajukan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dari desa/kelurahan dan memberikannya kepada sekolah. Metode terakhir ini disebut *Buffer Program*.

Pada Tahun 2013 Kemendikbud telah memberikan dana melalui bank pembangunan daerah, dan bukannya melalui Kantor Pos sebagaimana sebelumnya. Namun Bank tidak akan menyampaikan dana tersebut kepada para murid namun hanya mendepositkannya saja kedalam akun tabungan yang mana para murid bisa menarik dana tersebut kala dibutuhkan.

Untuk mendukung program ini Kemendikbud menerapkan strategi komunikasi untuk memberikan beasiswa kepada murid miskin yang memiliki pengetahuan terbatas tentang program BSM. Mulai dari pertengahan 2013, TNP2K telah mendukung upaya sosialisasi⁸. Kemendikbud juga membuka sebuah pusat penerimaan dan pelayanan aduan terkait program BSM.

1.4 Tujuan Studi

Studi ini penting untuk mendapatkan pelajaran dari pelaksanaan gelombang pertama skema BSM yang baru, terkait dengan efektifitas mekanisme, termasuk masalah komunikasi, dan kecukupan jumlah terkait dengan pengeluaran yang mesti dikeluarkan oleh para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Tujuan dari kajian cepat ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada implementasi kebijakan pendidikan *pro-poor* yang lebih efektif. Dilakukan melalui survei dengan sampel program BSM yang mencakup seluruh negeri dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut ini⁹:

- 1) Seberapa akuratkah mekanisme penentuan sasaran dalam mengidentifikasi murid miskin dan hampir miskin?
- 2) Apakah jumlah komponen beasiswa sudah mencukupi?
- 3) Sejauh apa kesulitan dalam memperoleh pendidikan dapat diselesaikan oleh BSM?
- 4) Apa dampak dari mekanisme BSM yang baru?
- 5) Apa yang dapat kita pelajari dari program untuk meningkatkan jumlah beasiswa untuk murid miskin di masa yang akan datang?

⁸ Informasi dari TNP2K. Desember, 2013

⁹ KAK ACDP 038, Tabel 1, Halaman 3 (**Lampiran 1**)

1.5 Struktur Pelaporan

Pendahuluan ini diikuti dengan deskripsi tahapan dari studi dan keluaran-keluarannya (**Bagian 2**). **Bagian 3** menampilkan tentang temuan kunci yang dihasilkan dari analisis data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan selama survei dan juga sumber sekunder. Temuan ditampilkan sebagai jawaban kepada lima pertanyaan penelitian dan juga pertanyaan pelengkap yang disampaikan pada KAK ACDP 038 yang dilampirkan pada **Lampiran 1**. Teks utama dari laporan diikuti dengan apendix yang termasuk kepada beberapa jenis informasi rinci pelengkap. Sebuah ringkasan kebijakan yang terdiri dari pilihan kebijakan untuk memperkuat program BSM dilampirkan pada **Aneks 1**. **Aneks 2** meliputi kepada enam studi kasus, satu dari setiap enam region yang termasuk dalam survei, yang menyediakan dasar bagi data kualitatif yang dikutip dalam **Bagian 3**.

2. Deskripsi Tahapan Studi dan Keluarannya

2.1 Mobilisasi Tim

Tim Nasional secara resmi dimobilisasi pada 23 Agustus 2013 yang merupakan tanggal kontrak PT. Trans Intra Asia dimulai. Tim ini terdiri dari Ahli Penelitian Pendidikan Nasional (Ketua Tim), Ahli Penelitian Pendidikan Internasional, Analisis Data Nasional, dan Sekretaris. Anggota tim yang selanjutnya dimobilisasi pada akhir Agustus – pertengahan September adalah sebagai berikut: enam Koordinator Regional, 18 Pengawas Survei, dan 150 Enumerator untuk melaksanakan wawancara dan pengumpulan data.

Keenam Koordinator Regional menerima pelatihan dari Tim Nasional, dan mereka mengambil tempat pada survei ujicoba instrumen (lihat dibawah). Koordinator Regional melatih pengawas dan enumerator pada setiap Regional. Anggota Tim Nasional, Koordinator Wilayah dan Pengawas mengawasi jalannya survei dan melakukan validasi data.

2.2 Laporan Pendahuluan

Periode Laporan Pendahuluan adalah dari 23 Agustus 2014 hingga 4 September 2013. Selama waktu ini aktivitas utama yang dilakukan adalah:

- Desain wilayah sampel untuk disurvei dan mendapatkan persetujuan dari Sekretariat ACDP,
- Pemilihan kabupaten dan sekolah/madrasah sampel,
- Pengembangan instrumen survei untuk wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi kasus,
- Finalisasi Rencana Kerja,
- Kajian mendalam terhadap studi yang dilaksanakan pada Tahun 2012 oleh Bank Dunia dan TNP2K yang menuju kepada skema penentuan BSM yang baru, dan kajian terhadap program terkait BSM dan Transfer Tunai Bersyarat pada tiga negara Asia,
- Perekrutan Koordinator Wilayah dan mobilisasi pada 8 September 2013,
- Pengumpulan berbagai macam sumber yang terkait dan juga Konsultasi selama periode Pendahuluan (**Daftar Pustaka**),
- Pertemuan dengan pemangku kepentingan kunci.

Sebuah lokakarya telah dilakukan dengan 18 pemangku kepentingan kunci yang diundang untuk mengkaji draf laporan pendahuluan pada 8 Oktober 2013. Laporan Pendahuluan versi akhir termasuk masukan selama lokakarya diserahkan pada 18 October 2013.

2.3 Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan Kunci

Selama pelaksanaan studi anggota Tim bertemu dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan sebagai berikut:

- (1) asisten Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Budaya, Bappenas;
- (2) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendikbud (merangkap Kepala Satuan Tugas Khusus BSM);
- (3) anggota TNP2K;
- (4) staff Bank Dunia;
- (5) anggota Dharma wanita yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program BSM;

- (6) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemenag;
- (7) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud;
- (8) staf Pusat Pengaduan Resmi BSM, Kemendikbud; dan
- (9) pegawai Kantor Dinas Provinsi dan Kabupaten yang ditemui selama pelaksanaan Survei.

2.4 Menyusun Metodologi Survei dan Draft Instrumen

Studi ini ada dalam bentuk Kajian Cepat yang dilakukan pada 1.711 sekolah/madrasah (tingkat dasar hingga menengah pertama) pada enam wilayah di Indonesia: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, dan Papua. Ke 29 Kabupaten sampel di 19 Provinsi diperoleh dari database ACDP 018 yang terdiri dari 105 Kabupaten sehingga korelasi dapat tercipta dengan kinerja Standar Pelayanan Minimal.

Metodologi untuk Kajian Cepat menggunakan secara utuh metodologi survei yang digunakan pada survei sebelumnya dan memperkerjakan data enumerator yang dinilai memiliki kompetensi tinggi pada studi-studi sebelumnya. Tidak ada Kabupaten yang dimonitor oleh TNP2K yang terpilih pada Kajian Cepat ACDP 038.

Sejumlah 27 kabupaten dari 19 Provinsi dan 1.711 sekolah/madrasah terangkum dalam sampel survei. Daftar yang lengkap dari kabupaten yang disurvei dapat ditemukan pada **Lampiran 2**; daftar sekolah/madrasah yang disurvei disertakan dalam CD yang juga termasuk seluruh data yang diperoleh selama survei. Metodologi dideskripsikan sebagai *multistage stratified cluster random sampling*. Ada dua tipe kluster dalam desain metode survei ini: (i) kabupaten, dan (ii) sekolah/madrasah didalam kabupaten. Kabupaten-kabupaten tersebut diambil dari keenam wilayah survei (lihat diatas). "Range Equalization" merupakan metode yang digunakan untuk stratifikasi kabupaten. Kabupaten-kabupaten distratifikasi berdasarkan tingkat perkembangannya – Maju, Cukup Maju dan Kurang Maju - yang dibedakan berdasarkan tingkat kemiskinan dan juga beberapa indikator lainnya. Ketiga strata yang dikelompokkan sebagai terpencil, desa atau kota berdasarkan proporsi wilayah.

Ukuran sampel dari sekolah/madrasah didasarkan kepada metode estimasi *Solvin Error*. Metode ini menyebutkan ukuran sampel adalah 1.590 sekolah/madrasah untuk tingkat kesalahan hanya 2.5% (**Tabel 1**).

Tabel 1. Perkiraan Tingkat Kesalahan dengan metode Slovin untuk menentukan ukuran sampel Sekolah/Madrasah

Error Estimation (EE)	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	4.0%	5.0%
Ukuran Sampel	9,622	4,368	2,476	1,590	1,106	623	399

Distribusi sekolah/madrasah ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: (i) setiap stratum terdiri dari setidaknya satu sekolah/madrasah; (ii) alokasi dari setiap stratum ditentukan berdasarkan proporsi dari populasi. Dengan menerapkan kedua faktor tersebut, maka ukuran sampel akhir dari sekolah/madrasah adalah 1.711.

Tujuh jenjang pendidikan disusun sebagai gugus sekolah (dasar dan menengah pertama dan menengah atas, sekolah umum dan madrasah, dan negeri dan swasta). Semua kepala sekolah dari sekolah/madrasah sampel disertakan dalam survei dan setidaknya ada satu guru dari setiap sekolah sampel. Sekitar sepuluh murid mewakili setiap kelas dan ada distribusi yang jelas antara siswa dan siswi. Tiga orang tua murid dari setiap sekolah dan ada pemilihan secara acak untuk kepala desa. Gugus dan responden dari setiap gugus dipilih secara acak dalam proporsi sesuai dengan populasi pada setiap stratum. Distribusi akhir dari sekolah/madrasah dan responden survei berdasarkan tipe kabupaten disampaikan pada **Lampiran 3**.

2.5 Uji Coba Instrumen Survei

Sebagai salah satu langkah dalam survei ACDP 038, tim ADP 038 melakukan ujicoba instrumen penelitian dan manualnya pada Tanggal 12-13 dan 17-18 September 2013 pada tiga kabupaten di Jawa Barat¹⁰. Ketiga kabupaten ini mewakili tingkat stratifikasi yang digunakan secara ekstensif dalam survei yang dilakukan pada 1.711 sekolah pada 19 kabupaten di enam wilayah di Indonesia. Kabupaten ujicoba dan stratifikasinya dikategorikan berdasarkan kriteria BPS yaitu: Kota Bandung (Sangat Maju), Kabupaten Bandung (Cukup Maju) dan Kabupaten Bandung Barat (Kurang Maju).

Instrumen survei cepat terdiri dari kuisisioner untuk kepala sekolah *SD/MI*, *SMP/MTs*, *SMA/MA*, dan *SMK*, kuisisioner untuk kepala desa, kuisisioner untuk guru, orang tua dan murid, dan juga tema dan pertanyaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)¹¹. Tujuan dari ujicoba adalah untuk menilai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketepatan dan keandalan instrumen untuk menyediakan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditampilkan pada Tabel 1 Kerangka Acuan Kerja dan pemahaman responden terhadap pertanyaan.
- 2) Ketersediaan data terkait tingkat kehadiran murid dan penerima BSM.
- 3) Kapasitas Koordinator Wilayah untuk melakukan wawancara dan FGD (sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan seluruh survei).
- 4) Waktu dan jadwal dalam tujuan untuk menentukan apakah survei dapat dilaksanakan selama tiga minggu.
- 5) Menyediakan contoh tabel data kuantitatif, data kualitatif dan analisis yang dapat disertakan pada laporan survei akhir.
- 6) Memperoleh informasi untuk finalisasi panduan bagi para surveior lapangan.

Hal-hal berikut ini adalah temuan utama dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Tim ACDP 038 untuk meningkatkan kualitas instrumen survei.

- 1) Kuisisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan BSM dari responden berikut ini: kepala sekolah, murid, orang tua, dan kepala desa. Kuisisioner disampaikan dalam wawancara tatap muka. Sebagai hasilnya ujicoba menemukan bahwa responden tidak mengerti sebagian dari pertanyaan yang utamanyadisebabkan oleh kendala bahasa. Juga diketahui bahwa beberapa data yang berguna justru hilang dari pertanyaan kuisisioner. Kuisisioner tersebut kemudian direvisi berdasarkan hasil survei ujicoba.
- 2) Untuk menguji instrumen Focus Group Discussion (FGD), dilakukan sebuah FGD yang dihadiri oleh 34 peserta. Mereka mewakili penduduk desa/kelurahan setempat, mewakili tujuh sekolah yang berbeda baik dari sekolah negeri maupun swasta. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa instrumen FGD sudah dirasakan cukup memuaskan dan tidak akan diubah.
- 3) Rekaman kehadiran yang terbaru untuk masa ajaran yang dimulai dari Bulan Juli tahun 2013 tidak bisa diperoleh baik pada kantor Dinas Pendidikan, kantor Kemenag, atau pada sekolah /madrasah sampel.
- 4) Koordinator Wilayah yang berpartisipasi dalam ujicoba juga menguji kemampuannya dalam mengawasi pelaksanaan survei secara penuh.
- 5) Wawancara dan FGD dilakukan sesuai jadwal. Hasil dari ujicoba mengindikasikan bahwa survei secara penuh dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal, waktu tambahan yang disediakan untuk mencapai lebih banyak daerah terpencil.
- 6) Sebagai hasil dari ujicoba, pedoman bagi surveyor lapangan untuk memandu mereka dalam melakukan wawancara dan FGD telah diperbaharui dan difinalisasi.

Sebuah laporan pelaksanaan Survei Ujicoba Instrumen telah diserahkan pada 28 Oktober 2014.

¹⁰ Tim terdiri dari Hafid Abbas, Ketua Tim/Ahli Penelitian Pendidikan Nasional, Daniel Moulton, Ahli Penelitian Pendidikan Internasional, I Made Sumertajaya, Analis Data Nasional, Premono Koekoeh, Koordinator Penelitian Wilayah Sumatra, M. Nur Aidi, Koordinator Penelitian Wilayah-Jawa, Suratno, Koordinator Penelitian Wilayah-Kalimantan, Mansyur, Koordinator Penelitian Wilayah-Sulawesi, GN Wibawa, Koordinator Penelitian Wilayah -Nusa Tenggara/ Maluku dan Alviaan Sroyer, Koordinator Penelitian Wilayah -Papua

¹¹ Sebuah ujicoba adalah metode yang dilakukan untuk ngejui desain dan atau metode dan atau instrumen sebelum penelitian dilakukan. Terdiri dari pelaksanaan tes awal dari instrumen pengumpulan data dan proses untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan.

2.6 Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan pada periode 1 Oktober – 1 November 2013. Enumerator melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan kepala desa untuk melengkapi kuisioner dengan mengkuantifikasi data-data. Koordinator wilayah dan pengawas mengumpulkan data sekunder (tingkat kehadiran, dsb), selain juga mengawasi para Enumerator dan memvalidasi data.

Koordinator wilayah melaksanakan FGD dan merekam hasilnya untuk melakukan analisis kualitatif. Koordinator wilayah juga melakukan berbagai wawancara lanjutan pada banyak kasus selain juga berkonsultasi kepada beberapa pemangku kepentingan lokal dalam rangka untuk menyediakan informasi tambahan untuk menyusun laporan studi kasus.

Survei mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan *Focus Group Discussions* (FGD) menggunakan kuisioner, pedoman wawancara, dan panduan FGD. Panduan dikembangkan oleh Tim ACDP 038 dan melalui kajian terhadap kumpulan data tingkat kehadiran yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kandep Kemenag dan catatan tentang pelaksanaan program BSM dan bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan sosialisasi BSM di wilayah mereka.

Data sekunder terdiri dari dokumen yang dikumpulkan pada tingkat nasional tentang pelaksana BSM dan juga para evaluator. Hal-hal berikut adalah sumber temuan utama yang digunakan untuk menyusun rangkuman kebijakan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam KAK, tabel 1: "Index Pembangunan Manusia Tahun 2010-2011" dan data Susenas Tahun 2003-2009/2011 ACDP 006 Free Basic Education" digunakan untuk menyusun pilihan kebijakan untuk menjadi beberapa pertanyaan penelitian tertentu seperti tingkat akurasi mekanisme identifikasi sasaran dan jumlah BSM yang tepat (lihat lima pertanyaan penelitian di atas).

Dokumen "*Overview of the Education Sector in Indonesia 2012: Achievements and Challenges*"¹² memberikan informasi yang berharga untuk menyusun rangkuman kebijakan. Pedoman Pelaksanaan BSM dari Kemendikbud¹³ dan publikasi TNP2K yang menjelaskan tentang kebijakan BSM yang baru¹⁴ dan hasil evaluasi dari Bank Dunia tentang program BSM pada Tahun 2012¹⁵ telah membantu menyediakan data kunci dan informasi dalam menyusun studi Kajian Cepat.

FGD dilakukan pada delapan kabupaten yang mewakili enam wilayah. Sebaran setiap wilayah adalah sebagai berikut: Sumatera (2 kabupaten); Jawa/Bali (2 kabupaten); Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, Papua dan Papua Barat (masing-masing 1 kabupaten).

Pada setiap FGD respondennya adalah: tiga kepala desa dan tiga orang tua (satu dari setiap kabupaten Maju, Cukup Maju, dan Kurang Maju), tujuh kepala sekolah dan guru yang mewakili setiap strata sekolah/madrasah, tujuh murid yang mewakili kelas 7 dan 10 dan masing-masing jender, dua pejabat, dari Dinas Pendidikan dan KandepAg. Rangkuman responden FGD disampaikan pada **Lampiran 4**.

Pada saat pelaksanaan survei, dana BSM baru telah dibagikan hanya kepada 10% dari penerima¹⁶. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk menilai secara lengkap dampak dari program yang baru. Namun, informasi yang cukup telah dikumpulkan selama survei tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang ada namun juga dengan melakukan kajian terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya dalam rangka menyusun kesimpulan yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari program; dan untuk merekomendasikan pilihan kebijakan untuk meningkatkan program ini dimasa yang akan datang.

¹² Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN:978-602-282-111-3. 2013

¹³ "Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP TAHUN 2013". Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013

¹⁴ "Tanya Jawab Program Bantuan Siswa Miskin". TNP2K, Februari 2013.

¹⁵ "Bantuan Siswa Miskin cash Transfers for Poor Students" in "Social Assistance Program and Public Expenditure Review 5". World Bank. Februari 2012.

¹⁶ Data dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Kemendikbud

2.7 Analisis Data

Verifikasi data dan pemasukan data dilakukan pada periode 2-22 November. Dua pengawas dan 33 staf data entri dikerjakan dibawah pengawasan dari Analisis Data Nasional. Baik data kuantitatif dan kualitatif dianalisis. Data kuantitatif diambil dari wawancara, hasil FGD dan kajian sekolah/madrasah dan data tingkat kehadiran di kabupaten dan informasi yang berkaitan dengan distribusi BSM. Data kualitatif diperoleh dari FGD dan studi kasus yang dilakukan pada setiap wilayah (satu studi kasus per wilayah). Hasil studi kasus menyediakan pemahaman yang mendalam terhadap temuan kuantitatif. Data analisis yang dipresentasikan dalam 100 tabel dan grafik, beberapa diantaranya menggunakan deskripsi yang didasarkan dari temuan survei tersebut. Semua tabel dan grafik disatukan dalam CD yang melengkapi laporan ini.

2.8 Penyusunan Laporan Akhir

Draf Laporan Akhir dan Rangkuman Kebijakan diserahkan kepada Sekretariat ACDP pada 3 Desember 2013. Berdasarkan dari *feedback* Sekretariat, sebuah draf kedua dari Laporan Akhir dan Rangkuman kebijakan telah dibahas oleh 30 Januari 2014. Laporan Akhir dan Rangkuman Kebijakan diserahkan pada tanggal 25 Februari 2014.

3. Temuan

Temuan dari survei yang disajikan dalam bagian ini adalah untuk menjawab lima pertanyaan penelitian yang tercantum dalam Bagian 1.4, Tujuan Studi. KAK untuk Survei Cepat juga mengalokasikan pertanyaan tambahan untuk setiap pertanyaan pada penelitian utama. Ini perlu dalam rangka untuk menghasilkan suatu analisis yang lebih fokus. Temuan dalam bagian ini secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tercantum untuk setiap pertanyaan penelitian.

3.1 Pertanyaan Penelitian: Akurasi Mekanisme Pentargetan yang Diterapkan pada Program BSM

Pertanyaan pelengkap untuk membantu kajian terhadap mekanisme pentargetan BSM adalah sebagai berikut:

- (1) Sejauh manakah para pemangku kepentingan meyakini bahwa keluarga/ murid yang diidentifikasi sebagai penerima beasiswa adalah keluarga/ murid yang tepat?
- (2) Berapa persen murid yang menerima beasiswa tapi dinilai oleh kepala sekolah tidak layak untuk menerimanya?
- (3) Berapa persen murid yang dirujuk oleh kepala sekolah untuk diikutsertakan pada program pendukung (*buffer program*)?
- (4) Berapa banyak, serta keluhan jenis apa sajakah yang telah diterima?

Tanggapan terhadap tiap-tiap pertanyaan di atas disajikan di bawah berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan selama survei.

3.1.1. Sejauh manakah para pemangku kepentingan meyakini bahwa keluarga/ murid yang diidentifikasi sebagai penerima beasiswa adalah keluarga/ murid yang tepat?

Baik data kualitatif yang dikumpulkan dari Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion – FGD*) maupun data kuantitatif yang diambil dari wawancara dengan para pemangku kepentingan menunjukkan pembagian yang signifikan terkait dengan pertanyaan ini. **Tabel 1** dan **Gambar 1** menunjukkan bahwa kepala sekolah, guru dan murid menyepakati bahwa pengidentifikasian penerima manfaat program BSM adalah akurat-sangat akurat. Akan tetapi sebagian besar Kepala Desa/ Lurah (hampir 75%) dan lebih dari 50% dari orangtua murid mengatakan bahwa pentargetannya tidak akurat-sangat tidak akurat. (Perlu dicatat bahwa pada FGD para murid dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi tampak lebih kritis mengenai proses pentargetan, sementara pada beberapa kasus murid kelas lebih rendah di tingkat SD terkadang perlu didampingi oleh guru mereka untuk dapat memahami dan menjawab kuesionernya).

Kenyataan bahwa para kepala sekolah dan guru-lah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi/ mengusulkan calon penerima manfaat program BSM perlu dijadikan bahan pertimbangan. Pendapat dari para kepala desa yang mengklaim paling mengetahui siapa yang benar-benar miskin dan layak menerima manfaat program (di desanya) juga harus dipertimbangkan seperti juga pendapat para orangtua yang langsung terkena dampak program.

Data kualitatif mengindikasikan bahwa para orangtua yang menerima manfaat program BSM merasa cukup puas dengan mekanisme pentargetan yang diterapkan. Sementara mereka yang merasa berhak menerima manfaat akan tetapi pada kenyataannya tidak menerimanya menunjukkan rasa kecewa yang besar. Adanya

persepsi bahwa terjadi perlakuan yang tidak adil dan kenyataan adanya perbedaan dalam mengalokasikan BSM telah menyebabkan ketegangan sosial di beberapa daerah.

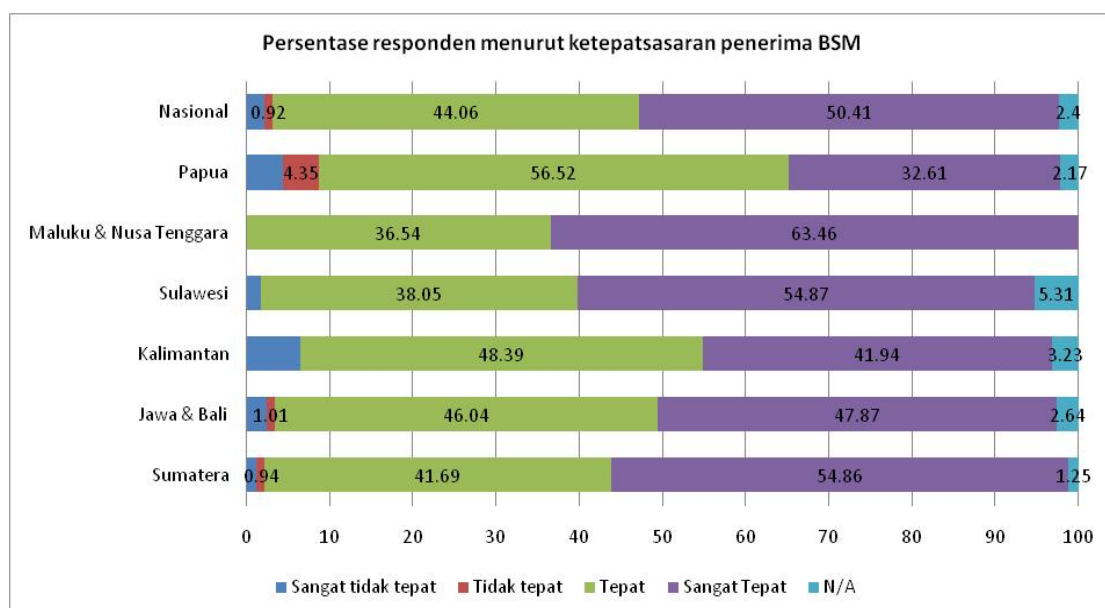
Suatu analisis yang dilakukan di tiap-tiap wilayah menunjukkan bahwa kepala sekolah di Papua dan Kalimantan menunjukkan tingkat kejadian tertinggi pentargetan yang tidak akurat (berturut-turut hanya 8,7% dan 6,5%). Sementara para kepala sekolah di keempat wilayah lainnya menyatakan bahwa pentargetan berjalan dengan baik-sangat baik. (Persepsi para responden mengenai akurasi pentargetan dapat dilihat pada tabel dan bagan pada **Lampiran 1**).

Para pemangku kepentingan di hampir seluruh daerah yang disurvei merekomendasikan dibentuknya suatu 'gugus tugas' atau tim khusus yang terdiri dari perangkat pemerintah desa, kepala sekolah, guru, dan anggota komite sekolah untuk memvalidasi status kemiskinan mereka yang diusulkan untuk menerima manfaat dari program BSM dan sebagian lainnya menganjurkan agar tim ini memantau pelaksanaan program tersebut.

Tabel 2. Pendapat Para Responden Mengenai Akurasi Pentargetan Penerima Manfaat Program BSM

Wilayah	Pendapat mengenai Keakuratan Pentargetan (%)					n= Orang
	Sangat Tidak Akurat	Tidak Akurat	Akurat	Sangat Akurat	N/A	
Kepala Sekolah	2.21	0.92	44.06	50.41	2.4	1,085
Guru	1.67	1.40	48.02	48.91		3361
Murid	1.49	2.46	53.36	42.70		19,850
Orangtua		50.94	9.73	1.09	38.25	5,133
Kepala Desa	32.53	45.78	18.07	3.61		83

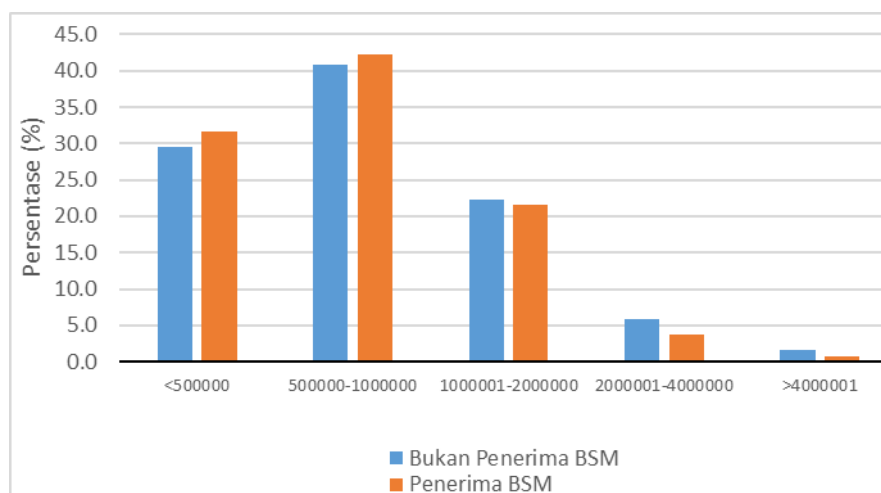
Gambar 2. Pendapat Para Respondent Mengenai Akurasi Pentargetan Penerima Manfaat BSM



Pendistribusian BSM Menurut Taraf Pengeluaran Rumah Tangga

Untuk tujuan penyelenggaraan survei, maka populasi sampel dibagi menjadi beberapa kuintil berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga¹⁷. Untuk tujuan penyelenggaraan survei, rumah tangga yang pengeluaran bulannya di bawah Rp 500.000/bulan diklasifikasikan sebagai “miskin”, sementara mereka yang memiliki pengeluaran bulanan berkisar di antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dikelompokkan sebagai “hampir miskin”¹⁸. Jumlah keluarga yang menerima manfaat BSM kemudian dikalkulasikan untuk masing-masing kuintil. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh **Gambar 2** di bawah ini, hanya sedikit lebih dari 50% dari para responden yang dikategorikan “miskin” dan “hampir miskin” menerima BSM. Gambar tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah keluarga yang berada di atas kuintil “miskin” dan “hampir miskin”, yang menerima BSM. **Gambar 2** juga membantu mengilustrasikan temuan-temuan pada bagian berikutnya mengenai kelayakan para murid yang menerima manfaat program BSM.

Gambar 3. Pengalokasian BSM Berdasarkan Tingkat Kemiskinan (Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga/ Bulan dalam Rupiah)



Tabel 3 menunjukkan pendistribusian BSM berdasarkan tingkat pendidikan serta kepemilikan sekolah (Negeri/ Swasta). Dari sampel orangtua yang diambil secara acak dengan pengeluaran bulanan kurang dari Rp 500.000, terlihat jelas bahwa mayoritas penerima BSM adalah keluarga yang memiliki anak dalam kelompok usia sekolah dasar (SD/ MI). Menarik untuk juga dicatat bahwa pada tingkat tersebut, 100% murid madrasah negeri menerima BSM, meskipun pada tingkat sekolah lanjutan (Madrasah Aliyah – MA) lebih banyak murid madrasah swasta-lah yang menerima BSM.

Tabel 4 memperlihatkan pendistribusian BSM kepada keluarga dengan pengeluaran kurang dari Rp 500.000/ bulan berdasarkan wilayah. Tabel ini menunjukkan distribusi di Jawa-Bali jauh lebih besar daripada di daerah lainnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pada saat dilakukannya survei hanya sedikit saja persentase BSM yang dicairkan, karena perjalanan di pulau Jawa-Bali relatif lebih mudah untuk mencairkan dana. Mungkin inilah alasan terjadinya perbedaan pada saat ini; seluruh dana diharapkan telah cair pada bulan Desember 2013.

¹⁷ Orangtua diminta untuk memberikan informasi mengenai pendapatan mereka.

¹⁸ Metodologi yang digunakan oleh ACDP 038 untuk menentukan tingkat kemiskinan ini berbeda dengan yang digunakan oleh BPS dalam menetapkan tingkat kemiskinan. Perbedaan antara kedua metodologi tersebut disajikan pada **Lampiran 2**.

Tabel 3. Persentase Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 yang Menerima BSM Berdasarkan Tingkat Pendidikan serta Kepemilikan Sekolah (Negeri/ Swasta)

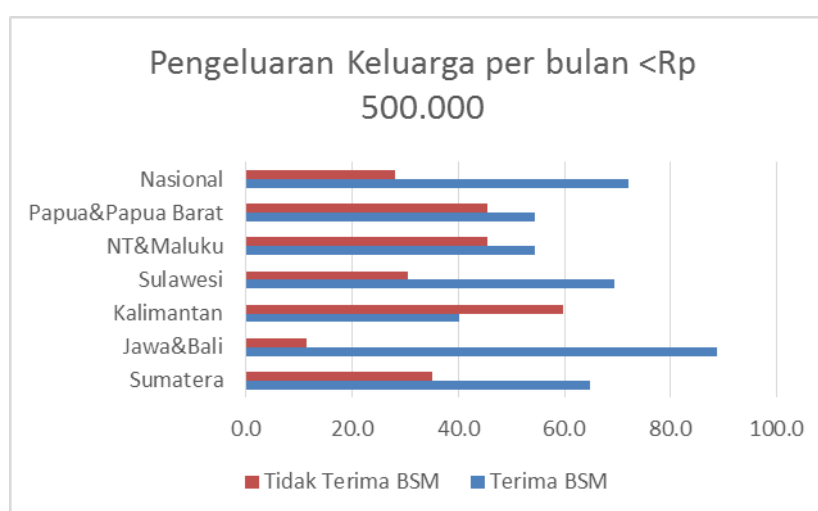
Tingkat*	Negeri/ Swasta	Menerima BSM	Tidak Menerima BSM	n = Orang
SD	S	74.2	25.8	689
	P	50.6	49.4	81
MI	S	100.0	0.0	25
	P	77.3	22.7	110
SMP	S	73.8	26.2	145
	P	72.0	28.0	50
MTS	S	100.0	0.0	20
	P	77.9	22.1	68
SMA	S	84.8	15.2	33
	P	38.5	61.5	26
MA	S	50.0	50.0	10
	P	65.8	34.2	38
SMK	S	31.6	68.4	19
	P	53.1	46.9	32
Rata-rata nasional		72.0	28.0	1,346

SD/MI = Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah; SMP/MTs = Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; SMA dan MA = Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah; SMK = Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 4. Pengalokasian BSM kepada Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 Berdasarkan Daerah

Wilayah	Menerima BSM	Tidak Menerima BSM	n = Orang
Sumatera	64.9	35.1	239
Jawa & Bali	88.6	11.4	553
Kalimantan	40.3	59.7	72
Sulawesi	69.4	30.6	216
NT & Maluku	54.5	45.5	198
Papua & Papua Barat	54.4	45.6	68
Rata-rata Nasional	72.0	28.0	1,346

Gambar 4. Pengalokasian BSM kepada Keluarga dengan Pengeluaran Bulanan Kurang dari Rp 500.000 Berdasarkan Daerah



3.1.2. Persentase murid yang menerima beasiswa tapi dinilai oleh kepala sekolah tidak layak untuk menerimanya?

Agak berlawanan dengan data yang dilaporkan mengenai akurasi pentargetan yang diterapkan, para kepala sekolah menyatakan bahwa sekitar 30% murid yang menerima BSM menurut mereka tidak layak untuk menerimanya. Kejadian terbanyak dilaporkan di Papua, Nusa Tenggara-Maluku dan Kalimantan (**Tabel 5**). Data kuantitatif dari survei tidak dapat menentukan secara tepat mengapa 30% dari para penerima BSM dianggap tidak layak. Meski demikian, sebagian bukti dari data kualitatif mungkin dapat memberikan beberapa petunjuk. Misalnya, suatu kasus dilaporkan terjadi di Nusa Tenggara-Maluku di mana para politisi menuntut untuk ditentukannya orang-orang yang mereka kenal sebagai penerima manfaat program. Dilaporkan juga beberapa kasus di mana murid tidak miskin menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari perangkat desa (dalam beberapa kasus, orang harus membayar agar SKTM-nya dikeluarkan). Juga terjadi beberapa kasus di mana jajaran elit setempat menekan kepala sekolah atau membentuk panitia terpilih untuk mencalonkan murid-murid yang sesungguhnya tidak layak agar murid pilihan mereka menerima BSM. Dibentuknya suatu "gugus tugas" yang terdiri atas unsur-unsur perangkat desa dan sekolah, seperti yang direkomendasikan di atas oleh sebagian pemangku kepentingan mungkin dapat membantu mengatasi masalah ini.

Tabel 5. Kelayakan Para Penerima BSM Menurut Kepala Sekolah Berdasarkan Daerah

Wilayah	Persentase Rata-rata Penerima BSM yang Dianggap Layak	Persentase Rata-rata Penerima BSM yang Dianggap Tidak Layak	n = Kepala Sekolah
Sumatera	23.0	14.4	33
Jawa&Bali	70.9	31.4	62
Kalimantan	11.5	40.5	11
Sulawesi	15.6	28.2	15
NT & Maluku	123.1	47.2	17
Papua & Papua Barat	124.9	47.3	15
Rata-rata Nasional	62.0	30.9	153

3.1.3. Persentase murid yang dirujuk oleh kepala sekolah untuk diikutsertakan pada program pendukung (*buffer program*)?

Model program BSM tahun 2013-2014 memprioritaskan agar BSM diberikan kepada anak-anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS dikeluarkan oleh TNP2K¹⁹ dari basis datanya yang berisi sekitar 60 juta keluarga dan 96 juta orang. Kartu BSM juga dikeluarkan oleh TNP2K langsung kepada murid. Akan tetapi, dikeluarkannya kartu BSM langsung kepada murid tahun ini dibatasi hanya kepada sekitar 600.000 orang dari sekitar 16,6 juta orang penerima manfaat program BSM.

Dengan pengetahuan bahwa kartu BSM akan dikeluarkan dalam jumlah terbatas dan kenyataan bahwa sebagian keluarga mungkin belum menerima KPS, maka dibuatlah suatu program pendukung yang dimasukkan ke dalam model terkini pelaksanaan BSM. Jika para murid maupun keluarganya belum menerima salah satu dari kedua kartu tersebut, maka mereka diperkenankan untuk mengajukan permohonan dikeluarkannya SKTM dari pemerintah desa/kelurahan dan memberikannya kepada sekolah.

Sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini, para kepala sekolah ditanyakan mengenai persentase murid yang mereka rujuk kepada "program pendukung". **Tabel 6** menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak "merujuk murid untuk diikutsertakan pada program pendukung" atau tidak mengetahui

¹⁹ TNP2K= Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

berapa persennya. Akan tetapi ada kemungkinan juga bahwa pertanyaannya tidak diberikan secara tepat karena pada umumnya istilah "program pendukung" tidak dipahami oleh responden.

Tabel 6. Persentase Kepala Sekolah yang Merujuk Muridnya kepada Program Pendukung BSM

Wilayah	Dirujuk kepada Program Pendukung BSM			n = Kepala Sekolah
	Ya	Tidak	Tidak Tahu	
	%	%	%	
Sumatera	10.52	67.42	22.06	485
Jawa & Bali	12.14	73.89	13.98	651
Kalimantan	6.25	64.06	29.69	128
Sulawesi	10.1	64.9	25	208
NT & Maluku	9.4	61.07	29.53	149
Papua & Papua Barat	13.33	43.33	43.33	90
Rata-rata Nasional	10.81	67.5	21.68	1,711

Data pada **Tabel 6** menunjukkan bahwa hanya sekitar 51% dari para penerima manfaat BSM dari sampel memberikan dokumen yang bersumber dari basis data nasional TNP2K, yaitu: Kartu BSM, KPS, dan dokumentasi PHK. Oleh karena itu, maka sekitar 49% dari sampel penerima manfaat BSM mungkin belum pernah didaftarkan pada basis data nasional TNP2K. Akan tetapi, kemungkinan tersebut tidak dapat dipastikan karena perkiraan ini didasarkan pada jumlah (persentase) penerima manfaat BSM yang menggunakan SKTM ataupun anak yatim seperti yang terdapat pada **Tabel 6** di bawah ini.

Ada kemungkinan bahwa sebagian orang yang menggunakan SKTM terdaftar pada basis data kemiskinan, tapi tidak menerima KPS. Hal ini tidak dapat diverifikasi lebih lanjut karena basis data TNP2K tidak terbuka bagi akses publik karena mengandung nama-nama serta ciri-ciri masing-masing perorangan.

Data kualitatif juga mengindikasikan adanya penggunaan SKTM secara lebih umum sebagai cara untuk mengajukan BSM. Hal ini khususnya terjadi pada madrasah dimana di setiap provinsi, SKTM digunakan dalam lebih banyak cara dibandingkan dengan penggunaan oleh sekolah reguler (**Tabel 7**). Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh kenyataan bahwa pedoman (juknis) yang dikeluarkan oleh Kemenag mensyaratkan agar mereka yang mengajukan BSM juga menyerahkan SKTM disamping dokumen-dokumen lainnya, seperti misalnya kartu BSM, KPS, dll.

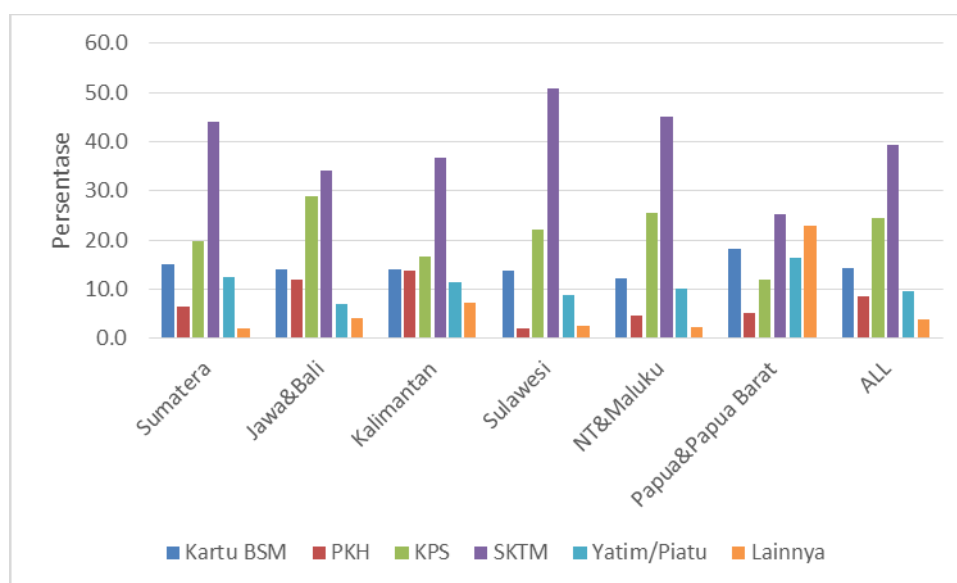
Suatu kasus yang menarik terjadi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dimana Kantor Dinas Pendidikan kabupaten mengeluarkan peraturan bahwa hanya murid yang keluarganya memiliki KPS sajalah yang boleh diusulkan untuk menerima BSM. Karena jumlah pemegang KPS yang mengajukan untuk menerima BSM jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kuota BSM yang dialokasikan untuk kabupaten tersebut, maka kebijakannya diubah sehingga para pemegang SKTM juga berhak untuk mengajukan diri untuk menerima BSM (lihat **Annex 1**, studi kasus di Kalimantan).

Penggunaan SKTM terbanyak dijumpai di Sulawesi, dimana 48% dari sekolah negeri dan 70% madrasah yang menjadi penerima manfaat program BSM mengeluarkan SKTM, sementara penggunaan SKTM yang paling sedikit di sekolah negeri terjadi di daerah Papua (22,1%) dan untuk madrasah di Kalimantan (37,6%) (**Tabel 7**).

Tabel 7. Jenis Dokumen yang Digunakan untuk Mengajukan Menerima BSM Berdasarkan Sekolah dan Madrasah: Persentase Murid

Wilayah	Sekolah/ Madrasah	Kartu BSM	PKH	KPS	SKTM	Anak Yatim/ Yatim Piatu	Lainnya	TOTAL
Sumatera	Madrasah	12.0	7.4	16.4	51.8	10.9	1.7	100
	Sekolah	15.8	6.4	20.6	42.3	12.9	1.9	100
Jawa & Bali	Madrasah	10.8	10.0	21.3	47.9	6.6	3.4	100
	Sekolah	15.1	12.5	31.6	29.3	7.2	4.3	100
Kalimantan	Madrasah	14.3	9.7	8.0	37.6	11.8	18.6	100
	Sekolah	13.9	15.6	20.5	36.4	11.2	2.4	100
Sulawesi	Madrasah	6.2	1.6	15.9	70.4	5.6	0.3	100
	Sekolah	14.8	2.1	23.0	48.0	9.3	2.9	100
NT & Maluku	Madrasah	4.9	1.5	24.1	55.7	12.8	1.0	100
	Sekolah	13.3	5.2	25.8	43.5	9.7	2.5	100
Papua & Papua Barat	Madrasah	16.7	0.0	12.1	56.1	9.1	6.1	100
	Sekolah	18.5	5.6	12.1	22.1	17.1	24.6	100
Rata-rata Nasional	Madrasah	10.8	8.2	19.0	50.4	8.2	3.5	100
	Sekolah	15.2	8.7	25.8	36.5	9.8	4.0	100
Rata-rata Menyeluruh	Nasional	14.3	8.6	24.4	39.4	9.5	3.9	100

Gambar 5. Penggunaan Dokumen untuk Mengajukan Menerima BSM: Persentase Murid



3.1.4. Berapa banyak, serta keluhan jenis apa sajakah yang telah diterima?

Suatu pusat penanganan pengaduan yang canggih telah didirikan di kantor Kemendikbud di Jakarta. Pusat ini telah mengedarkan suatu selebaran yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengarsipkan/melaporkan pengaduan. Data survei mengindikasikan bahwa mekanisme pengarsipan/ pelaporan pengaduan hanya sedikit sekali digunakan. Hanya sekitar 12% dari kepala sekolah/ madrasah mengatakan bahwa mereka memiliki sistem untuk mencatat pengaduan, akan tetapi hal tersebut hanya terjadi secara setempat – di sekolah masing-masing (**Tabel 8**). Ketika para Kepala Desa ditanyai apakah ada

mekanisme pencatatan pengaduan, hanya sekitar 17% dari mereka menyatakan tahu tentang adanya mekanisme tersebut (**Tabel 9**), 80% mengatakan bahwa tidak ada mekanisme seperti itu, sementara sisanya mengatakan tidak tahu.

Pada awal bulan Oktober 2013, Pusat Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menerima pengaduan apapun, akan tetapi telah masuk permintaan untuk melakukan klarifikasi terhadap program BSM. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada upaya sosialisasi secara signifikan tentang bagaimana menangani pengaduan, atau pengelolaan BSM memang dianggap sudah baik. (Tetapi, data kualitatif menunjukkan jumlah ketidakpuasan dan kekecewaan yang signifikan terhadap program tersebut). Dari sejumlah 1.711 kepala sekolah yang diwawancarai, 186 mengatakan bahwa mereka menerima pengaduan tentang pentargetan BSM. Sebagian besar mereka yang mengajukan pengaduan tercatat adalah para orangtua/ murid yang merasa bahwa mereka berhak mendapatkan BSM, tetapi tidak menerimanya (**Tabel 10**).

Gambar 6. Pusat Pengaduan BSM di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Tabel 8. Pengetahuan Kepala Sekolah Mengenai Keberadaan Mekanisme Pengarsipan Pengaduan BSM

Wilayah	Pengetahuan ttg Mekanisme Pengarsipan Pengaduan		Kepala Sekolah
	Ya	Tidak	
	%	%	
Sumatera	9.35	90.65	449
Jawa & Bali	13.36	86.64	614
Kalimantan	13.68	86.32	95
Sulawesi	13.98	86.02	186
Maluku & Nusa Tenggara	11.71	88.29	111
Papua & Papua Barat	15.15	84.85	66
Rata-rata Nasional	12.23	87.77	1,521

Tabel 9. Jawaban Kepala Desa Tentang Adanya Mekanisme Pengarsipan Pengaduan Mengenai BSM

Wilayah	Tidak Tahu	Ya	Tidak	n = Kepala Desa/ Lurah
	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	0.0	8.3	91.7	24
Jawa & Bali	0.0	11.1	88.9	18
Kalimantan	0.0	33.3	66.7	9
Sulawesi	7.1	42.9	50.0	14
NT & Maluku	0.0	0.0	100.0	9
Papua & Papua Barat	22.2	11.1	66.7	9
Rata-rata Nasional	3.6	16.9	79.5	83

Tabel 10. Jenis-jenis Pengaduan yang Diterima oleh Kepala Sekolah

Wilayah	Penerima Tidak Layak Menerima BSM	Tidak Menerima BSM Tapi Layak Diberikan	Penerima BSM Menerima Bantuan Lain	Pengaduan Lainnya	n= Kepala Sekolah
	%	%	%	%	Jumlah
Sumatera	26.19	64.29	9.52	19.05	42
Jawa & Bali	15.85	69.51	6.10	18.29	82
Kalimantan	.	69.23	.	7.69	13
Sulawesi	3.85	92.31	.	15.38	26
NT & Maluku	7.69	84.62	7.69	.	13
Papua & Papua Barat	10.00	20.00	10.00	20.00	10
Rata-rata Nasional	14.52	69.89	5.91	16.13	186

3.2 Pertanyaan Kunci Penelitian: Apakah biaya satuan (*unit cost*) yang diterapkan pada komponen Beasiswa dirasa cukup?

Pertanyaan-pertanyaan pelengkap yang membantu memberikan kajian tentang kecukupan BSM adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah biaya satuan yang diterapkan pada komponen beasiswa dirasa cukup?
- (2) Biaya-biaya apa saja yang harus dicukupi oleh beasiswa?
- (3) Biaya lain apa sajakah yang menggambarkan beban atau hambatan untuk bersekolah?
- (4) Berapa persenkah dana yang harus dicairkan dalam jangka waktu yang disyaratkan?

Jawaban terhadap masing-masing pertanyaan tersebut disajikan berikut ini berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan selama survei.

3.2.1 Apakah biaya satuan yang diterapkan pada komponen Beasiswa dirasa cukup?

Data pada **Tabel 11** dengan jelas menunjukkan bahwa menurut para pemangku kepentingan jumlah dana BSM tidak cukup. Para pejabat pemerintah setempat memiliki pandangan yang sama, menurut catatan FGD. Persentase terbesar kepala sekolah yang menyatakan bahwa dana tersebut tidak mencukupi berasal dari Nusa Tenggara-Maluku. Persentase terbesar kepala sekolah yang menyatakan bahwa dana yang diberikan saat ini cukup adalah yang berasal dari daerah Jawa-Bali (**Tabel 12**). Perlu dicatat bahwa lebih dari sepertiga jumlah kepala sekolah di daerah Papua tidak mengetahui bagaimana menjawab pertanyaan ini (**Tabel 12**).

Sekitar 66% dari jumlah orangtua di wilayah Kalimantan tidak dapat mengatakan apakah jumlah dana BSM saat ini cukup atau tidak (**Tabel 13**). Sebagian besar murid mengatakan bahwa dana BSM tidak cukup (**Tabel 14**). Yang menarik adalah secara rata-rata hampir sepertiga dari jumlah responden murid mengatakan bahwa dana BSM saat ini cukup dan 41,8% murid di wilayah Kalimantan juga memiliki pandangan yang sama.

Tabel 11. Rangkuman Penilaian Kecukupan Dana BSM (Kepala Sekolah, Orangtua, Murid)

Wilayah	Tidak Cukup	Cukup	Tidak Tahu	Total
	(%)	(%)	(%)	
Kepala Sekolah	66.4	19.1	14.6	1,711
Orangtua	48.9	19.3	31.9	5,133
Murid	54.5	32.9	12.5	14,613

Tabel 12. Penilaian Kepala Sekolah Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah

Wilayah	Tidak Cukup	Cukup	Tidak Tahu	n = Kepsek
	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	68.25	16.29	15.46	485
Jawa & Bali	67.28	25.35	7.37	651
Kalimantan	50.78	20.31	28.91	128
Sulawesi	69.23	17.31	13.46	208
Maluku & Nusa Tenggara	71.14	9.40	19.46	149
Papua & Papua Barat	57.78	6.67	35.56	90
Rata-rata Nasional	66.39	19.05	14.55	1,711

Tabel 13. Kajian Orangtua Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah

Wilayah	Tidak Cukup	Cukup	Tidak Tahu	n = Orangtua
	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	48.4	17.9	33.7	1,457
Jawa & Bali	55.5	25.4	19.2	1,953
Kalimantan	22.5	11.4	66.1	387
Sulawesi	51.0	16.6	32.4	627
NT & Maluku	47.2	9.4	43.4	449
Papua & Papua Barat	38.8	16.5	44.6	260
Rata-rata Nasional	48.9	19.3	31.9	5,133

Tabel 14. Kajian murid Mengenai Kecukupan Dana BSM Berdasarkan Daerah

Wilayah	Tidak Cukup	Cukup	Tidak Tahu	n = Murid
	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	57.2	25.9	16.8	4,219
Jawa & Bali	50.5	41.8	7.7	6,247
Kalimantan	55.9	25.2	18.9	631
Sulawesi	56.9	30.6	12.5	1,729
NT & Maluku	64.2	19.7	16.1	1,105
Papua & Papua Barat	51.8	29.8	18.5	682
Rata-rata Nasional	54.5	32.9	12.5	14,613

Tampaknya data di atas terkait dengan jumlah BSM yang diberikan sebelum tahun 2013. Mulai bulan Juli 2013, jumlah tersebut bertambah secara signifikan. Terlebih lagi, Kemendikbud dan Kemenag telah menambahkan Rp 200.000 kepada masing-masing BSM. Tabel-tabel di bawah ini (**Tabel 15** dan **16**) menunjukkan pengeluaran keluarga untuk sekolah pada tahun 2011 yang diambil dari data pada studi ACDP 006 tentang Pendidikan Dasar Gratis²⁰, jumlah BSM terkini, serta persentase dimana BSM menutupi pengeluaran. **Tabel 15** memberikan data sekolah/madrasah negeri untuk tingkat pendidikan dasar dan **Tabel 16** memberikan data bagi sekolah/ madrasah swasta (data untuk tingkat pendidikan menengah tidak tersedia). Untuk sekolah-sekolah negeri, BSM menutupi 68%-72% biaya-biaya sekolah reguler dan 56%-66% untuk madrasah. Sementara untuk sekolah swasta BSM menutupi sekitar 45%-66% pengeluaran untuk sekolah reguler serta 74%-100% pengeluaran madrasah.

²⁰ ACDP 038 Penilaian Cepat menggunakan data pengeluaran pendidikan tahun 2011 yang diambil dari studi ACDP 006 mengenai Pendidikan Dasar Gratis. Metodologi yang digunakan untuk menentukan rangkaian data ini adalah modifikasi dari metodologi BPS untuk menentukan pengeluaran pendidikan. ACDP 006 menggunakan rangkaian pertanyaan yang sama untuk menentukan pengeluaran di BPS. (Pertanyaan survei dan data dari Susenas 2003-2009 serta dari ACDP 006 tahun 2011 dilampirkan sebagai Lampiran 3 pada laporan ini). Perbedaan utama pada metodologinya adalah bahwa BPS bertanya kepada keluarga dari sampel acak untuk mendata pengeluaran dari setiap tingkatan sekolah tanpa mempertimbangkan apakah anak-anak mereka masih bersekolah ataupun tidak, ataupun tingkatan mereka di sekolah jika mereka masih bersekolah.

ACDP 006 mewawancarai 24 rumah tangga pada masing-masing tingkatan dan jenis sekolah dasar agar dapat menentukan pengeluaran terkini pada tahun 2011. Meskipun telah terjadi inflasi dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mengubah biaya-biaya pada tahun 2013, untuk tujuan analisis kecenderungan dalam rangka menjawab pertanyaan "ukuran yang tepat" bagi jumlah BSM, maka tim Penilaian Cepat meyakini bahwa data tahun 2011 mencukupi dan valid.

Tabel 15. Persentase Dana BSM yang Menutupi Biaya-Biaya pada Sekolah Negeri Berdasarkan Data Tahun 2011

SD			MI			SMP			MTs		
PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM
948,633	650,000	68.5%	1,149,253	650,000	56.6%	1,323,170	950,000	72%	1,429,470	950,000	66.4%

Tabel 16. Persentase Dana BSM yang Menutupi Biaya-Biaya pada Sekolah Swasta Berdasarkan Data Tahun 2011

SD			MI			SMP			MTs		
PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM	PENGELUARAN	BSM	%BSM
1,421,914	650,000	45.7%	72,192	650,000	74.5%	1,441,468	950,000	66%	946,361	950,000	100%

Ketika para kepala sekolah ditanyai pada saat wawancara mengenai jumlah yang ideal untuk BSM pada masing-masing jenjang pendidikan, mereka menyatakan secara umum bahwa jumlahnya harus dinaikkan sekitar 200% (**Tabel 17**). Jumlah tersebut akan menutupi sekitar 100% pengeluaran untuk bersekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah BSM memang dimaksudkan untuk menutupi seluruh pengeluaran untuk bersekolah, ataukah hanya sebagian dari pengeluaran tersebut? Analisis terhadap data kualitatif yang dikumpulkan terutama dari FGD yang terkait pertanyaan ini menunjukkan bahwa para kepala sekolah dan pejabat pemerintah merekomendasikan jumlah yang lebih besar daripada yang diusulkan oleh para orangtua dan murid (seperti yang dinyatakan di atas, hampir sepertiga jumlah murid menyatakan bahwa jumlah yang diberikan saat ini telah cukup).

Menariknya, para kepala madrasah merekomendasikan jumlah yang lebih sedikit daripada apa yang diusulkan oleh para kepala sekolah reguler. Hal ini dirasa ironis, karena sekitar 85% dari jumlah total madrasah di seluruh tingkatan berstatus swasta²¹, dan mereka terutama memenuhi kebutuhan murid dengan mengandalkan dari keluarga berpenghasilan rendah, sementara di sekolah negeri sebaliknya yang terjadi. Dalam konteks rekomendasi dari kepala sekolah, jika BSM ditujukan untuk murid miskin, maka madrasah swasta seharusnya diprioritaskan, baik karena jumlahnya yang banyak dan karena mereka telah diperlakukan tidak adil sebagai akibat dari kebijakan di masa lampau dan saat ini.

Yang mengejutkan adalah bahwa jumlah yang direkomendasikan oleh para kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) jauh lebih banyak daripada yang diusulkan oleh para kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan mempertimbangkan bahwa data kualitatif mengindikasikan bahwa SMK pada umumnya lebih mahal daripada SMA.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa dana BSM saat ini untuk pendidikan dasar dan menengah pertama di sekolah negeri dirasa cukup untuk mereka yang hampir miskin, meskipun beberapa penambahan jumlah BSM mungkin dibutuhkan bagi mereka yang sangat miskin, terutama 95% murid usia sekolah dasar dan 22% murid usia sekolah menengah pertama yang saat ini tidak bersekolah. Biaya-biaya sekolah dasar swasta lebih besar daripada di sekolah negeri, terutama pada kasus-kasus dimana sekolah dasar swasta merupakan satu-satunya alternatif, dan tidak ada pilihan lain, maka jumlah BSM dapat ditambah.

BSM untuk madrasah swasta menurut data pada **Tabel 16** sudah berjumlah 100%. Pada kasus ini, isunya bukanlah jumlah BSM, tetapi berapa BSM yang diberikan kepada madrasah swasta yang terbatas jika dibandingkan dengan sekolah/ madrasah negeri. Meskipun data kuantitatif yang spesifik tidak tersedia untuk tingkat pendidikan menengah atas, data kualitatif mengindikasikan bahwa pengeluaran sangat tinggi

²¹ <http://pendis.kemendiknas.go.id/file/dokumen/deskripmadrasah.pdf>

dan bahwa BSM pada jumlah Rp 1.200.000/ tahun tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya iuran dan pengeluaran lainnya.

Tabel 17. Ukuran Rata-Rata BSM (Rp / Tahun) yang Direkomendasikan oleh Kepala Sekolah Menurut Tingkat dan Jenis Sekolah serta Berdasarkan Daerah

Wilayah	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
Sumatera	1,399,327	1,161,000	1,995,882	1,573,333	3,402,941	2,457,273	2,083,636
Jawa & Bali	1,207,222	982,069	1,916,842	1,660,862	3,211,578	2,645,143	1,831,765
Kalimantan	1,416,428	900,000	2,012,500	1,500,000	4,000,000	1,100,000	1,490,000
Sulawesi	1,482,500	1,073,333	2,035,294	1,636,666	4,436,666	3,000,000	2,466,667
NT & Maluku	1,212,500	975,000	1,905,882	2,200,000	1,814,285	3,333,333	2,166,667
Papua & Papua Barat	1,382,222	1,200,000	1,916,666	N/A	3,033,333	3,000,000	2,000,000
Rata-rata Nasional	1,315,770	1,022,887	1,960,833	1,647,177	3,234,9123	2,580,681	1,935,250

3.2.2 Biaya-biaya apa saja yang harus dicukupi oleh beasiswa?

Para orangtua dan murid ditanyai bagaimana mereka menghabiskan dana BSM-nya (**Tabel 18** dan **19**). Sebagian besar mengatakan bahwa bagian terbesar dari dana tersebut dihabiskan untuk membeli seragam dan peralatan sekolah (tas jinjing, dsb.). Pengeluaran terbesar berikutnya adalah untuk pembelian buku dan alat tulis (dengan mengasumsikan bahwa 'buku' yang dimaksud adalah buku tulis atau fotokopi dari buku pelajaran, karena buku pelajaran seharusnya sudah tersedia melalui dana BOS).

Sekitar 34% dari para murid menyatakan bahwa mereka menggunakan dana BSM untuk membayar iuran sekolah dan pembayaran lainnya²², meskipun hal ini tidak disebutkan oleh para orangtua. Sekitar 16%-17% dari para orangtua dan murid mengatakan bahwa dana BSM digunakan untuk membayar transportasi menuju dan dari sekolah; penggunaan dana untuk transportasi yang paling sedikit terjadi di wilayah Kalimantan dan yang paling banyak di Papua.

Kenyataan bahwa sebagian besar dari para responden menyatakan bahwa dana BSM digunakan untuk membeli seragam mungkin dikarenakan jumlah seragam yang harus dibeli oleh seorang murid. Sebagai contoh yang ekstrim, murid SD di Kalimantan perlu membeli lima setel seragam sementara murid di tingkat yang lebih tinggi harus membeli enam setel (lihat Studi Kasus di Daerah Kalimantan, **Annex 1**).

Data yang disajikan pada **Lampiran 3** menunjukkan biaya-biaya terperinci untuk bersekolah sejak tahun 2003 – 2011²³. Sedangkan untuk tahun 2011, transportasi merupakan pengeluaran terbesar, yang diikuti oleh pembelian seragam, sementara data terakhir mengindikasikan bahwa seragam adalah hal termahal yang dibutuhkan untuk bersekolah sekarang ini.

²² Menurut Pedoman BSM Kemendikbud untuk tahun 2013-2014, berikut ini adalah penggunaan BSM yang diperbolehkan: (1) sarana belajar (buku, pensil, dsb.); (2) pakaian dan kebutuhan lainnya seperti tas sekolah; (3) transportasi; (4) uang saku; (5) membayar kursus maupun les tambahan. "Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBNP Tahun 2013". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2013, hlm.10. Panduan tersebut tidak menyebutkan pembayaran iuran sekolah. Diasumsikan bahwa pembayaran iuran sekolah hanya diperbolehkan bagi tingkat menengah atas karena pendidikan dasar, baik sekolah maupun madrasah, negeri maupun swasta, menerima dana BOS untuk menutupi pengeluaran operasional.

²³ Data tahun 2003-2009 berasal dari Susenas dan data tahun 2011 berasal dari studi ACDP 006 mengenai Pendidikan Dasar Gratis. Lihat catatan kaki 3.

Tabel 18. Pemanfaatan Dana BSM Menurut Orangtua Berdasarkan Daerah

Daerah	Membeli Buku dan Alat Tulis	Membeli Seragam dan Perlengkapan Sekolah, dll.	Transportasi	Uang Saku	Kursus Tambahan/ Les	Tambahan untuk Menutupi Kebutuhan Keluarga	Lainnya	n = Orangtua
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	54.6	60.5	18.1	12.9	7.9	3.8	6.4	1,457
Jawa & Bali	66.4	74.4	13.0	18.5	7.7	4.7	5.0	1,953
Kalimantan	28.9	34.1	4.4	9.0	1.6	3.1	2.3	387
Sulawesi	49.8	65.4	18.8	13.2	3.5	5.3	1.1	627
NT & Maluku	53.0	57.9	20.7	9.6	4.7	3.3	3.3	449
Papua & Papua Barat	52.7	47.3	22.3	19.6	4.6	5.0	5.4	260
Rata-rata Nasional	56.3	63.5	15.7	14.8	6.4	4.3	4.6	5,133

Tabel 19. Pemanfaatan Dana BSM Menurut murid Berdasarkan Daerah

Wilayah	Membayar luran Sekolah	Membeli Buku dan Alat Tulis	Membeli Seragam dan Perlengkapan Sekolah	Transportasi	Uang Saku	Kursus Tambahan	Tambahan untuk Menutupi Kebutuhan Keluarga	Lainnya	n = Murid
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	42.2	66.6	71.8	18.7	14.4	5.4	4.8	3.4	4,219
Jawa & Bali	32.0	73.0	82.1	12.2	15.3	6.7	4.9	1.9	6,247
Kalimantan	24.4	73.4	78.0	9.0	12.7	7.9	6.0	4.0	631
Sulawesi	18.1	71.7	88.3	20.5	17.2	3.3	9.9	1.9	1,729
NT & Maluku	44.4	76.2	78.0	34.7	22.0	4.7	6.6	0.5	1,105
Papua & Papua Barat	40.6	75.4	75.5	35.3	23.3	5.9	6.3	1.9	682
Rata-rata Nasional	34.3	71.4	79.1	17.7	16.0	5.8	5.7	2.3	14,613

3.2.3 Berapa persenkah dana yang harus dicairkan dalam jangka waktu yang disyaratkan?

Menurut Pedoman BSM tahun 2013-2014, dana BSM harus dicairkan pada saat menjelang awal setiap semester. Pencairan pertama harus dilakukan pada bulan Agustus 2013. Akan tetapi, pada bulan Agustus

2013, kenyataannya hanya 10% BSM yang telah dicairkan melalui Kemendikbud²⁴. Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dari 368 penerima manfaat program yang telah disetujui, dana telah dicairkan hanya kepada tujuh orang murid pada pertengahan bulan Oktober 2013 (lihat Studi Kasus Daerah Sulawesi, **Annex 1**).

Ketika para kepala sekolah ditanyai kapan melakukan pencairan dana BSM pertamanya mulai dari awal diluncurkannya program pada tahun 2010, terjadi keberagaman yang cukup besar antara satu daerah dengan daerah lainnya, yakni mulai bulan Mei hingga November (**Tabel 20**). Data kuantitatif ini harus dipertimbangkan dengan adanya data kualitatif yang diberikan pada studi kasus (**Annex 1**) dimana kasus-kasus dicatat untuk pencairan dana yang dilakukan pada bulan Mei adalah untuk tahun ajaran yang dimulai pada bulan Juli pada tahun sebelumnya. Adalah menarik untuk mencatat bahwa 26% dari seluruh kepala sekolah tidak mengetahui/ tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut (mungkin mereka lupa, atau adalah kepala sekolah yang baru ditunjuk, atau pencatatan yang dilakukan oleh sekolah kondisinya buruk atau tidak dapat diakses).

Tabel 20. Bulan-bulan Pertama Dicairkannya Dana BSM Menurut Kepala Sekolah (2010 -2013)

Wilayah	Bulan Pencairan Dana Pertama								n = Kepala Sekolah
	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Tidak Tahu	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sumatera	23.2	11.29	11.91	7.84	11.91	6.9	5.64	21.32	319
Jawa & Bali	16.02	14.2	16.43	8.11	11.56	11.36	4.26	18.05	493
Kalimantan	11.29	6.45	11.29	12.9	14.52	1.61	4.84	37.1	62
Sulawesi	28.32	13.27	16.81	8.85	8.85	6.19	2.65	15.04	113
NT & Maluku	15.38	7.69	7.69	13.46	9.62	19.23	3.85	23.08	52
Papua & Papua Barat	10.87	17.39	6.52	10.87	13.04	15.22	.	26.09	46
Rata-rata Nasional	18.89	12.63	14.01	8.76	11.52	9.49	4.33	20.37	1,085

Pedoman BSM tahun 2013-2014 menyatakan bahwa dana BSM harus dicairkan pada awal dari masing-masing semester. Ini akan menjadi ideal karena seperti yang telah dinyatakan di atas, dana tersebut sangat dibutuhkan pada awal tahun ajaran baru dan pada awal semester kedua untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar iuran. **Tabel 21** menunjukkan bahwa menurut lebih dari separuh dari jumlah kepala sekolah yang disurvei, selama dua-tiga tahun terakhir ini para murid mereka menerima pencairan dana sekali dalam setahun; sekitar 35% mengatakan dua kali dalam setahun, dan sangat sedikit yang mengatakan lebih dari dua kali pencairan dana, dan sekitar 9% dari para responden tidak tahu.

²⁴ Data dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud

Tabel 21. Jumlah Pencairan Dana BSM/ Tahun Menurut Kepala Sekolah Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Pencairan Dana BSM					n = Kepsek
	Sekali	Dua Kali	3 kali	4 kali	Tidak Tahu	
	%	%	%	%	%	
Sumatera	48.28	38.87	2.19	0.63	10.03	319
Jawa & Bali	51.12	39.55	0.81	1.01	7.51	493
Kalimantan	43.55	43.55	.	.	12.9	62
Sulawesi	73.45	19.47	.	.	7.08	113
NT & Maluku	55.77	26.92	.	1.92	15.38	52
Papua	65.22	21.74	.	.	13.04	46
Rata-rata Nasional	53	36.13	1.01	0.74	9.12	1,085

Penundaan dan ketidakteraturan dalam mencairkan dana BSM mengakibatkan dampak negatif terhadap program. Para responden yang memberikan data kualitatif kepada survei memberikan pernyataan kuat bahwa dana seharusnya dicairkan pada awal tahun ajaran, ketika dana tersebut dibutuhkan untuk membeli seragam dan perlengkapan lainnya, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh data di atas sebagai pengeluaran terbesar untuk bersekolah; dan dana juga dibutuhkan pada awal semester kedua untuk memperbarui perlengkapan sekolah dan di beberapa kasus membayar iuran yang menjadi tumpuan sekolah/ madrasah untuk menutup biaya operasional mereka.

3.3 Hingga pada taraf apakah kesulitan akses menuju pendidikan dapat diatasi oleh BSM?

Pertanyaan pelengkap yang membantu memberikan kajian terhadap sejauh mana BSM telah mengatasi kesulitan akses menuju pendidikan adalah sebagai berikut.

3.3.1 Biaya lain apa sajakah yang menjadi beban ataupun hambatan untuk bersekolah?

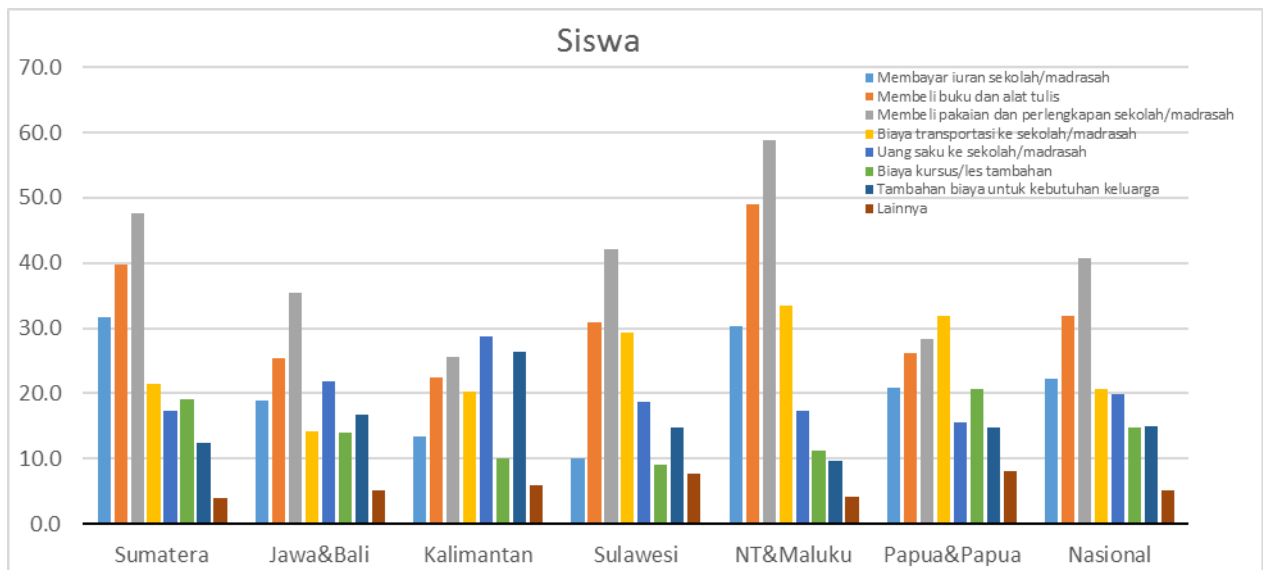
Hambatan-hambatan yang dirasakan terutama bersifat ekonomi. Serupa dengan data yang disajikan di atas, maka data yang diberikan oleh para orangtua pada bagian ini (**Tabel 22**) menunjukkan bahwa biaya untuk membeli seragam sekolah merupakan pengeluaran terbesar untuk bersekolah, yang diikuti dengan biaya transportasi. Para murid menyatakan bahwa pembelian seragam merupakan hambatan terbesar, diikuti dengan pembelian perlengkapan sekolah (**Gambar 6**). Biaya untuk membayar iuran, menurut murid, bervariasi menurut wilayah. Sumatera dan Nusa Tenggara-Maluku menunjukkan bahwa murid membayar lebih banyak untuk iuran, jika dibandingkan dengan pengeluaran lainnya untuk bersekolah. Sementara iuran sekolah merupakan pengeluaran terkecil jika dibandingkan dengan pengeluaran lainnya di Sulawesi. Pada studi kasus dicatat bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki kebijakan pendidikan gratis, dan data terlihat mendukung dampak dari kebijakan tersebut.

Hambatan-hambatan lainnya yang dilaporkan di dalam data kualitatif meliputi budaya menikahkan anak perempuan pada usia muda di beberapa daerah, terutama di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dan budaya mengajak anak untuk bekerja di Malaysia sebelum anak-anaknya menyelesaikan SMA. Pekerjaan musiman, seperti misalnya ketika murid diperintahkan untuk membantu orangtua di ladang/ kegiatan pertanian juga menjadi hambatan yang dihadapi di daerah-daerah pedesaan di Papua dan Nusa Tenggara-Maluku.

Tabel 22. Hambatan Bersekolah Menurut Orangtua Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Seragam, Perlengkapan	Biaya Transportasi	Lainnya ²⁵	n = Kepsek
	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	55.91	22.21	8.99	1,457
Jawa & Bali	56.04	12.01	16.44	1,953
Kalimantan	25.33	10.06	4.65	387
Sulawesi	41.60	23.15	11.48	627
NT & Maluku	58.80	24.27	9.84	449
Papua & Papua Barat	64.90	16.38	8.01	260
Rata-rata Nasional	51.70	17.50	11.90	5,133

Gambar 7. Hambatan Bersekolah Menurut murid Berdasarkan Wilayah



3.4 Apakah yang menjadi dampak dari program BSM yang baru?

Pertanyaan pelengkap yang membantu memberikan kajian terhadap dampak dari program BSM adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kehadiran/ angka pendaftaran
- (2) Pengurangan angka putus sekolah
- (3) Kembalinya anak-anak putus sekolah ke sekolah
- (4) Dukungan masyarakat bagi pendidikan.

Sebagian besar data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas diambil dari FGD yang diselenggarakan secara terpisah, masing-masing untuk guru, orangtua, kepala sekolah, murid, dan kepala desa di setiap wilayah yang disurvei. Di setiap FGD semua peserta berkumpul di suatu tempat di mana program BSM dijelaskan oleh para peneliti lapangan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian dibagi dan mendiskusikan rangkaian pertanyaan yang sama secara sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok melaporkan kesimpulannya setelah dilakukan diskusi kelompok kecil. Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebagian data kuantitatif juga diberikan untuk menjawab beberapa poin mengenai dampak yang dipertanyakan oleh pertanyaan kunci ini.

²⁵ Contoh penggunaan BSM lainnya meliputi: tabungan, kesehatan, membayar iuran untuk praktek kerja lapangan, kegiatan ekstra-kurikuler, membeli seragam batik, dan *study tour*.

3.4.1 Peningkatan angka pendaftaran dan berkurangnya angka putus sekolah

Selama dilaksanakannya program BSM dalam tiga tahun pertama, angka putus sekolah tetap berada pada taraf yang relatif rendah, dengan rata-rata sekitar 4,8 anak putus sekolah per sekolah/ madrasah per tahun (**Tabel 23**). Angka ini sangatlah rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Selatan dan Barat, Afrika, Amerika Latin, dan lain-lain²⁶. Angka terendah diantara wilayah tersebut dalam hal Kajian Cepat adalah pada tahun 2012 dan angka tertinggi pada tahun 2013, akan tetapi perbedaannya dari tahun ke tahun hanya sedikit. **Tabel 23** juga menunjukkan variasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya; wilayah Papua angka putus sekolahnya selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya; Kalimantan menunjukkan angka yang paling rendah.

Data tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Papua membutuhkan perhatian khusus. Alasan putus sekolah mungkin disebutkan secara terperinci; akan tetapi diasumsikan bahwa faktor-faktor disamping alasan ekonomi menjadi bagian dari penyebabnya: anak-anak yang sakit, orangtua pindah meninggalkan keluarga, anak-anak yang pindah sekolah, anak perempuan yang dinikahkan dini, dsb. Meskipun tidak ada data sebelum dilaksanakannya program BSM, tampaknya BSM membantu menjaga angka putus sekolah tetap pada taraf yang dapat diterima, kecuali untuk wilayah Papua.

Tabel 23. Angka Putus Sekolah (*Dropout Rates – DO*) Berdasarkan Data Sekolah Sampel (2011-2013)

Wilayah	Jumlah DO Rata-rata Per Wilayah	Rata-rata Angka Putus Sekolah: Per Sekolah/ Madrasah		
		2011	2012	2013
Sumatera	242.9	4.8	5.1	5.3
Jawa & Bali	206.7	4.5	4.1	4.6
Kalimantan	200.8	1.9	1.7	1.3
Sulawesi	174.3	3.6	3.0	5.5
NT & Maluku	244.3	5.8	4.8	4.4
Papua & Papua Barat	343.8	11.0	12.6	9.5
Rata-rata Nasional/ Wilayah	222.8	4.8	4.6	4.9

Tabel 24 dan **25** memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai angka putus sekolah. **Tabel 24** menunjukkan bahwa angka putus sekolah di madrasah lebih rendah daripada di sekolah regular, di empat dari enam wilayah (angka-angka yang muncul di Kalimantan sama untuk keduanya, sementara di Papua angka putus sekolah jauh lebih tinggi). Madrasah menjadi lebih berbasis masyarakat daripada sekolah, sehingga memunculkan perasaan solidaritas yang lebih besar diantara para murid dan staf. **Tabel 25** menunjukkan bahwa angka putus sekolah yang tertinggi justru berada di kabupaten-kabupaten yang paling berkembang (maju).

Sejumlah faktor mungkin dapat menjelaskan hal ini. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di wilayah dengan tingkat perekonomian yang relatif maju mungkin mengalami stigma yang lebih parah jika dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah dengan tingkat perekonomian yang rendah. Misalnya, seorang anak di wilayah pedesaan yang miskin, yang tidak mengenakan sepatu ke sekolah dianggap biasa, jika dibandingkan dengan anak yang tidak mengenakan sepatu ke sekolah di wilayah yang lebih makmur.

²⁶ <http://southasia.oneworld.net/news/unesco-report-signals-to-high-dropout-rates-in-education#.Uqz5MbnxtLN>

Jadi, seorang murid yang berasal dari keluarga miskin di wilayah makmur dan bersekolah di sekolah reguler/non-madrasah memiliki kemungkinan putus sekolah yang lebih tinggi karena mengalami tekanan sosial untuk menyamakan diri dengan lingkungannya. Sementara itu, murid di wilayah miskin dan bersekolah di madrasah secara umum menghadapi kondisi yang sama, sehingga tekanan sosial yang dialaminya untuk menyamakan diri dengan lingkungannya jauh lebih kecil.

Tabel 24. Angka Putus Sekolah (*Dropout* – DO) Menurut Jenis Sekolah Berdasarkan Data Sampel Sekolah (2011-2013)

Wilayah	Jenis Sekolah	Rata-rata Jumlah murid	Rata-rata DO per Tahun		
			2011	2012	2013
Sumatera	Madrasah	227.6	3.8	3.7	4.3
	Sekolah	246.4	5.0	5.4	5.5
Jawa & Bali	Madrasah	188.6	3.7	3.3	3.5
	Sekolah	212.1	4.8	4.4	5.0
Kalimantan	Madrasah	282.2	1.2	1.5	1.3
	Sekolah	178.7	2.1	1.7	1.3
Sulawesi	Madrasah	169.4	4.7	2.5	3.1
	Sekolah	175.2	3.3	3.1	6.0
NT & Maluku	Madrasah	226.0	1.3	2.6	1.6
	Sekolah	246.5	6.4	5.1	4.8
Papua & Papua Barat	Madrasah	232.7	12.5	8.5	14.0
	Sekolah	359.0	10.9	12.9	9.0
Rata-rata Nasional	Madrasah	208.3	3.6	3.2	3.7
	Sekolah	226.2	5.0	4.9	5.2
Rata-rata Nasional		222.8	4.8	4.6	4.9

Tabel 25. Angka Putus Sekolah (*Dropout* – DO) menurut Status Pembangunan Kabupaten/ Kota Berdasarkan Data Sampel Sekolah (2011-2013)

Wilayah	Status Pembangunan Kabupaten*	Rata-rata Jumlah Murid	Rata-rata Angka Putus Sekolah (DO) per Tahun		
			2011	2012	2013
Sumatera	MM	222.6	3.7	4.4	4.2
	KM	193.1	5.4	6.5	4.7
	M	278.8	5.3	4.9	6.4
Jawa & Bali	MM	186.5	3.5	3.1	3.6
	KM	228.3	5.9	5.7	6.4
	M	437.2	14.3	13.7	12.8
Kalimantan	MM	254.7	6.0	4.8	3.9
	KM	124.2	1.2	1.1	0.8
	M	288.2	0.1	0.4	0.5
Sulawesi	MM	156.7	3.7	3.3	5.8
	KM	174.9	3.3	2.2	5.6

Wilayah	Status Pembangunan Kabupaten*	Rata-rata Jumlah Murid	Rata-rata Angka Putus Sekolah (DO) per Tahun		
			2011	2012	2013
	M	219.3	2.9	2.9	3.9
NT & Maluku	MM	227.7	4.1	3.5	4.0
	KM	186.0	11.3	9.3	6.5
	M	348.0	4.9	1.6	2.1
Papua & Papua Barat	MM	332.1	11.7	12.4	4.8
	KM	262.2	12.1	14.2	13.5
	M	467.6	7.5	10.5	13.8
Rata-rata Nasional	MM	202.0	4.1	3.9	4.1
	KM	199.7	5.6	5.7	5.5
	M	298.4	5.6	5.1	6.2
Rata-rata Nasional		222.8	4.8	4.6	4.9

* MM= Maju Menengah KM=Kurang Maju M = Maju

Keempat tabel di bawah ini (**Tabel 26-29**) merangkum pandangan dari para kepala sekolah, guru, orangtua, serta murid mengenai dampak program BSM terhadap Angka Kehadiran, angka putus sekolah, serta faktor-faktor lain seperti hasil belajar/nilai akademis yang meningkat. Sementara hampir 80% dari jumlah kepala sekolah dan guru meyakini bahwa program BSM berhasil mengurangi angka putus sekolah; hanya sekitar 54% dari para orangtua dan 48% dari para murid yang menyetujui pendapat tersebut. 60%-65% dari jumlah guru dan kepala sekolah mengatakan bahwa program BSM berhasil meningkatkan angka kehadiran, sementara 38% dari jumlah orangtua dan 44% dari jumlah murid mengatakan bahwa BSM telah membantu meningkatkan angka kehadiran.

Sekitar 60% dari jumlah kepala sekolah, guru, dan murid mengatakan bahwa hasil belajar/ nilai akademis murid berhasil meningkat, sementara hanya 48% dari jumlah orangtua yang menyetujui pendapat tersebut. Menariknya, dampak terbesar dari pelaksanaan program BSM dari sudut pandang murid adalah bahwa program ini mengurangi beban keuangan keluarga (**Tabel 29**).

Tabel 26. Pandangan Kepala Sekolah Mengenai Dampak Program BSM

Wilayah	Mengurangi Angka Putus Sekolah	Meningkatkan Nilai Akademis	Meningkatkan Angka Kehadiran	Meningkatkan Angka Melanjutkan	n = Kepala Sekolah
	%	%	%	%	
Sumatera	81.29	62.81	54.34	63.03	449
Jawa & Bali	77.69	73.13	63.68	74.10	614
Kalimantan	80.00	61.05	52.63	62.11	95
Sulawesi	75.27	68.28	67.74	57.53	186
NT & Maluku	84.68	84.68	84.68	63.96	111
Papua & Papua Barat	63.64	62.12	53.03	43.94	66
Rata-rata Nasional	78.50	69.10	61.80	66.01	1,521

Tabel 27. Pandangan Para Guru Mengenai Dampak Program BSM

Wilayah	Mengurangi Angka Putus Sekolah	Meningkatkan Nilai Akademis	Meningkatkan Angka Kehadiran	Lainnya	n = Guru
	%	%	%	%	
Sumatera	82.3	67.5	60.6	5.3	955
Jawa & Bali	82.3	72.6	64.5	4.3	1,290
Kalimantan	82.4	60.5	63.3	4.3	256
Sulawesi	73.8	69.7	71.9	4.6	413
NT & Maluku	82.5	82.2	78.7	3.5	286
Papua & Papua Barat	64.6	63.4	68.9	3.7	161
Rata-rata Nasional	80.5	70.3	65.6	4.6	3,361

Tabel 28. Pandangan Orangtua Mengenai Dampak Program BSM

Wilayah	Mengurangi Angka Putus Sekolah	Meningkatkan Nilai Akademis	Meningkatkan Angka Kehadiran	Lainnya	n = Orangtua
	(%)	(%)	(%)	(%)	
Sumatera	57.38	46.40	34.04	2.95	1,457
Jawa & Bali	60.47	54.33	42.35	4.66	1,953
Kalimantan	24.80	21.97	23.26	2.07	387
Sulawesi	50.24	42.26	35.40	4.78	627
NT & Maluku	53.01	55.90	51.45	2.45	449
Papua & Papua Barat	54.60	61.86	48.62	1.91	260
Rata-rata Nasional	53.83	47.59	38.36	3.84	5,133

Tabel 29. Pandangan Para murid Mengenai Dampak Program BSM

Wilayah	Meningkatkan Nilai Akademis	Meningkatkan Angka Kehadiran	Mengurangi Angka Putus Sekolah	Meningkatkan Angka Melanjutkan	Mengurangi Beban Keluarga	Lainnya	n = Murid
Sumatera	59.5	46.1	46.1	44.4	69.1	0.6	4,219
Jawa & Bali	61.5	39.6	39.6	41.7	69.1	0.9	6,247
Kalimantan	52.6	39.9	39.9	34.5	65.6	1.1	631
Sulawesi	51.0	37.5	37.5	32.2	77.2	0.8	1,729
NT & Maluku	83.0	68.7	68.7	60.2	80.7	0.5	1,105
Papua & Papua Barat	59.4	47.7	47.7	31.5	76.1	0.7	682
Rata-rata Nasional	60.8	43.8	43.8	42.0	71.1	0.8	14,613

Catatan sekolah ditelaah untuk menentukan perubahan pada hasil ujian nasional sejak tahun 2011. Hasilnya menunjukkan adanya sedikit kecenderungan peningkatan di semua wilayah antara tahun 2011 dan 2013 meskipun puncaknya terlihat pada tahun 2012, diikuti oleh sedikit penurunan pada tahun 2013 (**Tabel 30**).

Tabel 30. Perubahan Pada Nilai Ujian Nasional (UN) 2011-2013

Wilayah	UN 2011		UN 2012		UN 2013	
	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std
Sumatera	7.12	1.20	7.24	1.07	7.18	1.20
Jawa & Bali	7.19	1.27	7.23	1.17	7.25	1.15
Kalimantan	6.34	1.98	6.68	1.53	6.84	1.00
Sulawesi	6.98	1.60	7.26	1.40	7.04	1.39
NT & Maluku	6.70	1.65	6.76	1.39	6.80	1.46
Papua & Papua Barat	6.39	1.92	6.56	1.97	6.87	1.58
Rata-rata Nasional	7.04	1.41	7.15	1.26	7.13	1.24

Dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan program BSM memberikan dampak positif terhadap pencegahan peningkatan murid yang absen serta putus sekolah. Pada kenyataannya BSM memiliki dampak positif terhadap perbaikan di kedua bidang tersebut. Nilai Ujian Nasional secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Seperti yang diindikasikan pada **Tabel 26**, 66% kepala sekolah mengatakan bahwa BSM telah membantu meningkatkan angka melanjutkan ke sekolah di tingkat lebih tinggi. Kenyataan bahwa 70% dari jumlah murid mengatakan bahwa dampak terbesar dari program BSM adalah dalam mengurangi beban keuangan keluarga yang sekaligus menunjukkan bahwa BSM juga berfungsi sebagai program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer – CCT*), yaitu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

3.4.2 Membantu Anak Putus Sekolah untuk Kembali ke Sekolah

Catatan sekolah yang menunjukkan kembalinya anak putus sekolah tidak tersedia. Hal ini tidak disebutkan di dalam FGD. Survei yang dilakukan hanya dapat menyimpulkan bahwa BSM ini ditargetkan untuk meningkatkan hasil belajar anak di sekolah dan mencegah mereka berhenti bersekolah. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kurang dieksposnya program tersebut. Sebagian besar murid menerima informasi mengenai BSM dari sekolah. Jadi jika anak-anak tidak bersekolah, maka kemungkinannya mereka tidak mengetahui bahwa mereka mungkin memenuhi syarat untuk kembali ke sekolah dengan memanfaatkan dana BSM. Sosialisasi program pada masyarakat sampel pun hanya dilakukan sekedarnya saja.

3.4.3 Dukungan Masyarakat Terhadap Pendidikan

Dampak program BSM terhadap dukungan masyarakat tidak terbukti di dalam survei. Seperti yang dinyatakan di atas, hanya dilakukan sosialisasi program secara sekedarnya saja di luar sekolah/ madrasah. Akan tetapi, kepala desa menganjurkan agar penyelenggara desa terlibat dalam membantu memvalidasi tingkat kemiskinan dari keluarga yang diajukan menerima dana BSM.

3.5 Apa yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan pemberian beasiswa kepada murid miskin di masa mendatang?

Pembelajaran berharga yang dirangkum di bawah ini disimpulkan dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari survei serta serangkaian pertemuan konsultasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah di tingkat nasional dan langsung. Informasi di bawah ini disajikan dalam konteks pembelajaran berharga, alih-alih rekomendasi. Rekomendasi dari

beberapa temuan berikut kemudian digunakan sebagai dasar penulisan Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) yang akan diserahkan sebagai bagian dari Laporan Akhir.

Peningkatan Mekanisme Penentuan Sasaran

- 1) Dampak BSM dirasakan paling minimal pada tingkat pendidikan dasar. Terkecuali di daerah terpencil yang miskin dan beberapa wilayah perkotaan, anak-anak akan tetap bersekolah di SD/ MI dengan ataupun tanpa adanya program BSM. Angka Partisipasi Nasional berkisar di angka 95%. Penyebab dari rendahnya angka partisipasi di tingkat pendidikan dasar mungkin sebagian disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, seperti misalnya kasus di Papua dimana sekolah sudah tidak beroperasi selama tiga bulan meskipun sebagian muridnya menerima BSM.
- 2) Data mengindikasikan bahwa sekitar 72% dari jumlah masyarakat paling miskin (sesuai definisi di dalam survei) menerima dana BSM, sementara hanya 50% dari jumlah masyarakat hampir miskin (juga sesuai definisi di dalam survei) menerima BSM. Suatu penolakan yang besar dikemukakan terutama oleh mereka yang tidak menerima dana BSM meskipun mereka berada pada tingkat kemiskinan yang sama dengan mereka yang menerimanya. Suatu porsi yang sangat kecil dari program BSM diberikan kepada kelas menengah ke atas. Meskipun jumlahnya sedikit, banyak orang yang mengetahui kenyataan ini. Oleh karenanya, banyak dari para responden pada survei mempertanyakan tentang akurasi dan transparansi program ini.
- 3) Murid tidak mengetahui apakah mereka akan menerima BSM, sampai pada saat mereka terdaftar di sekolah. Dampak dari hal ini terutama dirasakan oleh murid yang akan melanjutkan. Misalnya, seorang murid yang berasal dari keluarga sangat miskin, yang lulus dari SD mungkin tidak akan mendaftarkan dirinya di SMP karena tidak sanggup membayar biaya-biayanya. Akan tetapi, jika murid tersebut mengetahui di kelas 6 SD bahwa ia akan dapat menerima dana BSM di SMP, maka terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa ia akan melanjutkan persekolahannya. Hal ini tampaknya menjadi alasan diterapkannya kebijakan TNP2K saat ini, yaitu memberikan BSM kepada murid di kelas 1 dan kelas 7, sebagai upaya meningkatkan angka melanjutkan ke tingkat SMP. (Akan tetapi, seperti yang dibahas berikut ini, maka pesan ini harus disosialisasikan secara jauh lebih baik).

Perbaikan Tepat Jumlah

- 1) Seluruh responden menyatakan bahwa jumlah dana BSM harus ditambah, meski terdapat variasi yang cukup besar dalam hal jumlah yang diusulkan. Isu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sampai sejauh mana dana BSM dapat menutupi pengeluaran untuk biaya bersekolah. Jumlah dana BSM yang diberikan kepada masing-masing keluarga saat ini, yang telah ditambah secara signifikan pada awal tahun 2013 menunjukkan bahwa BSM mengatasi sekitar 69%-72% dari biaya-biaya untuk bersekolah di SD negeri, dan 56%-64% di madrasah negeri, sementara untuk SD swasta BSM menutupi 46%-66% biaya bersekolah, dan 74%-100% biaya bersekolah di madrasah swasta. Analisis terhadap data hasil survei menunjukkan bahwa dana BSM saat ini masih mungkin untuk ditambah bagi mereka yang tergolong sangat miskin, terutama 95% murid di usia pendidikan dasar dan 22% murid di usia pendidikan tingkat menengah pertama yang pada saat ini tidak bersekolah.
- 2) Di tingkat dasar, target BSM tampaknya lebih penting dibandingkan dengan jumlahnya, terutama untuk madrasah swasta. Akan tetapi, meskipun tidak ada data kuantitatif yang spesifik untuk tingkat lanjutan atas, data kualitatif menunjukkan bahwa pengeluaran di tingkat ini sangat tinggi dan BSM sejumlah Rp 1.200.000/ tahun dirasakan tidak cukup untuk menutupi biaya iuran dan pengeluaran lainnya. Hal ini kemudian menjadi keprihatinan yang serius, mengingat bahwa terdapat sekitar 400.000 murid putus sekolah di tingkat SMA per tahunnya dan karena angka pendaftaran terbilang kecil, maka perbandingan jumlah guru-murid juga sangat kecil, sehingga keseluruhan sistem pun tidak efisien.

- 3) "Satu ukuran tidak mungkin cocok untuk semua". Terjadi keberagaman yang cukup besar pada biaya hidup dan oleh karena itu biaya bersekolah di seluruh negeri, seperti yang diindikasikan oleh berbagai rangkaian data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagian responden menyebutkan bahwa jumlah BSM seharusnya disesuaikan dengan biaya hidup di masing-masing wilayah. Tampaknya penyesuaian jumlah BSM per wilayah ini dapat menjadikan program ini lebih efektif dan efisien biaya, daripada memberikan jumlah yang sama ke seluruh daerah.

Dampak BSM

- 1) Pendistribusian dana BSM yang kerap terlambat mengakibatkan dampak negatif terhadap program ini, karena murid membutuhkan uang pada awal tahun ajaran untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, membayar transportasi serta pada beberapa kasus membayar iuran dan pungutan. Mereka juga membutuhkan pencairan dana pada awal semester kedua untuk memperbarui perlengkapan sekolah dan membayar iuran, bilamana dibutuhkan. (Banyak dari para responden yang menyetujui dilakukannya pencairan sebanyak dua kali per tahun, ketimbang hanya satu kali). Terjadi beberapa kasus yang dilaporkan mengenai murid yang ditegur atau ditekan karena mereka belum membayar iurannya, disebabkan oleh terlambat diterimanya dana BSM. Beberapa kasus dilaporkan mengenai pendistribusian dana BSM yang terjadi pada akhir bulan Mei, untuk memenuhi kebutuhan tahun ajaran di bulan Juli satu tahun sebelumnya.
- 2) Porsi terbesar dana BSM digunakan untuk membeli seragam, terutama pada tingkat SD dan SMP (iuran menjadi pengeluaran terbesar bagi murid di tingkat SMA). Suatu kasus yang ekstrim dijumpai di wilayah Kalimantan dimana murid diwajibkan untuk membeli lima setel seragam untuk tingkat SD dan enam setel untuk tingkat SMP.
- 3) Data hasil survei mengindikasikan bahwa angka putus sekolah masih dapat diterima selama tiga tahun terakhir ini, dimana program BSM dilaksanakan, dengan pengecualian di wilayah Papua dimana angka putus sekolah masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di bagian lain di negara ini. Sementara sebagian besar dari para kepala sekolah dan guru meyakini bahwa BSM telah berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi, hanya kurang dari 50% dari jumlah orangtua dan murid yang mengkonfirmasi hal ini. Pada saat dilakukannya survei, pencairan sudah dilakukan terhadap hanya sebagian kecil dari dana BSM yang jumlahnya telah ditambah; oleh karena itu, maka masih terlalu dini untuk menentukan apakah jumlah dana BSM yang baru ini akan memperbaiki sikap orangtua dan murid terhadap partisipasi dan putus sekolah.
- 4) Hampir seluruh responden mengeluhkan mengenai prosedur pencairan dana BSM. Praktek yang diberlakukan saat ini adalah pencairan melalui bank, yang dirasa menyulitkan terutama untuk mereka yang tinggal jauh dari bank yang ditunjuk untuk mencairkan dana. Persyaratan administratif dirasakan sulit untuk dipatuhi oleh sebagian penerima dana; terkadang seseorang harus bolak-balik ke bank untuk dapat mematuhi persyaratan tersebut; murid terkadang harus menyimpan sejumlah uang untuk dapat membuka rekening, hal mana menjadi beban bagi keluarga miskin; perjalanan menuju dan pulang dari bank juga dirasakan mahal, dalam konteks uang dan waktu (dalam sebuah kasus di Papua, perjalanan ini harus dilakukan menggunakan perahu, yang memakan waktu tiga hari) dan terutama untuk para murid SD, seseorang dari pihak sekolah harus menemani mereka.
- 5) Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program BSM tahun 2013-2014 yang dikeluarkan secara bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas dengan jelas menyatakan bahwa dana BSM untuk murid tidak boleh dipotong oleh siapapun. Akan tetapi, telah terjadi banyak kasus pemotongan yang dilaporkan selama survei. Juknis tersebut juga menyatakan bahwa kepala sekolah dapat mewakili murid untuk menerima dana jika terlalu sulit bagi murid untuk melakukan perjalanan menuju lembaga yang mencairkan dana. Akan tetapi, tidak disebutkan di dalam Juknis bagaimana biaya

transportasi untuk mengambil dana tersebut dapat diatasi. Di beberapa tempat terpencil biaya transportasi dapat menjadi sangat besar. Sebagian besar Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sangat merekomendasikan dilakukannya pengelolaan dan administrasi dana tersendiri untuk mengatasi pengeluaran seperti itu.

BSM dan Isu tentang Jangkauannya

- 1) Sosialisasi program BSM dan KPS dirasakan sangat kurang. Beberapa responden survei, terutama para orangtua dan kepala desa, tidak memahami bahwa KPS dapat digunakan untuk mengajukan diri sebagai penerima BSM. Sejumlah kepala sekolah masih merasa belum jelas tentang beberapa peraturannya. Misalnya kepala sekolah kejuruan yang mengkhususkan pada agribisnis tidak menyadari bahwa Direktorat Pendidikan Kejuruan mengeluarkan sebuah juknis yang mengatur bahwa semua murid di sekolah kejuruan agribisnis layak menerima BSM, karena ia belum pernah menerima juknis tersebut pada saat survei dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 2013. Pada intinya, tidak ada responden yang mengetahui tentang Pusat Pengaduan BSM di Kemendikbud, ataupun bagaimana untuk melaporkan/ mengarsipkan pengaduan.
- 2) Kartu KPS dan BSM yang dirujuk dari basis data nasional TNP2K menjadi kriteria utama untuk mengusulkan penerima manfaat program BSM. Akan tetapi, survei ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 51% dari jumlah penerima dana BSM menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan menjadi penerima dana BSM. Hampir 50% menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau dikategorikan sebagai anak tanpa ayah atau yatim-piatu ataupun faktor-faktor lainnya, seperti misalnya tekanan politik. Survei ini tidak dapat menentukan apakah mereka yang menggunakan SKTM ada di dalam basis data nasional TNP2K akan tetapi tidak menerima KPS.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan SKTM dipertanyakan. Sebagian kasus dilaporkan dimana para pihak berwenang di desa mengeluarkan SKTM kepada siapapun yang memintanya, apakah mereka miskin ataupun tidak; dan pada beberapa kasus iuran dikenakan untuk mengeluarkan SKTM ini. Oleh karena itu, maka para pejabat sekolah mencurigai niat dari para kepala desa, dan pada saat yang sama kepala desa menyatakan bahwa mereka yang paling mengetahui siapa yang miskin dan tidak, dan karenanya harus dilibatkan dalam proses pentargetan program BSM. Beberapa saran telah diberikan untuk membentuk suatu gugus tugas yang terdiri dari para pejabat desa dan pejabat sekolah serta anggota komite sekolah untuk memvalidasi status kemiskinan mereka yang ditargetkan menerima dana BSM.
- 4) Beberapa kasus intervensi politik juga dilaporkan. Para politisi mengatakan bahwa mereka diberikan sejumlah uang di bawah program BSM untuk didistribusikan. Terjadi beberapa kasus dimana murid hanya diberikan setengah dari jumlah yang seharusnya mereka terima.

Meningkatkan jumlah bantuan untuk murid miskin dimasa depan

- 1) Suatu peran yang lebih besar harus mulai dipertimbangkan untuk dipegang oleh pemerintah provinsi. Pihak berwenang di tingkat provinsi yang dimintai pendapat pada saat survei mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses tersebut, akan tetapi ingin membantu jika peraturannya ditulis dan menjelaskan peran mereka di dalam program BSM. Misalnya, satu kabupaten di wilayah Kalimantan tidak dapat memenuhi kuota BSM-nya. Jika provinsi ini diberikan peran koordinasi, maka pemerintah provinsi dapat melakukan distribusi-ulang terhadap kuota menurut persediaan dan permintaan. Pemerintah provinsi juga dapat membantu memantau proses pentargetan, validasi data kemiskinan, serta pelaksanaan program.
- 2) Kementerian Agama memiliki suatu mekanisme yang tampaknya rumit. BSM untuk sekolah negeri dimasukkan ke dalam mata anggaran rutin (di bawah "Program"), sementara BSM

untuk madrasah swasta muncul di bawah mata anggaran yang berbeda (“Bantuan”). Rekomendasi telah diberikan agar Kemenag dan Kemendikbud menggunakan mekanisme yang sama untuk pentargetan, penganggaran, dan pemrograman BSM.

- 3) Wilayah Papua-Papua Barat memiliki kebutuhan yang berbeda dan lebih besar dari wilayah lainnya. Data menunjukkan misalnya bahwa angka putus sekolah masih lebih besar di Papua dibandingkan dengan daerah lain. Kurangnya dukungan infrastruktur dan manajemen guru yang buruk secara keseluruhan dalam pengembangan sosio-ekonomi terutama di daerah pedesaan, memerlukan perhatian khusus dan kebijakan BSM khusus.

Lampiran 1. Daftar Kabupaten Sampel

Region	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	NAD	Kabupaten Aceh Tengah
1	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang
1	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1	Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya
1	Jambi	Kabupaten Bungo
1	Nad	Kabupaten Aceh Jaya
1	Kep. Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan
1	Sumatera Utara	Kabupaten Deliserdang
2	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk
2	Bali	Kabupaten Tabanan
2	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang
2	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal
2	Banten	Kabupaten Serang
2	Jawa Timur	Kota Blitar
3	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara
3	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala
3	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya
4	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba
4	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamasa
4	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana
4	Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang
5	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang
5	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Nagekeo
5	Maluku	Kota Ambon
6	Papua Barat	Kabupaten Manokwari
6	Papua	Kabupaten Mappi
6	Papua Barat	Kota Sorong

Lampiran 2. Ringkasan Pemilihan Sampel

No	Sampel	Jumlah
1	Region	6
2	Kabupaten/Kota	27
3	Sekolah/Madrasah	1,692
	3.1. MI (Madrasah Ibtidaiyah)	151
	3.2. MTS (Madrasah Tsanawiyah)	115
	3.3. MA (Madrasah Aliyah)	66
	3.4. SD (Sekolah Dasar)	949
	3.5. SMP (Sekolah Menengah Pertama)	233
	3.6. SMA (Sekolah Menengah Atas)	94
	3.7. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	84
4	Kepala Sekolah	1,692
5	Guru	3,384
6	Murid	20,304
7	Orang Tua	5,076
8	Kepala Desa	24

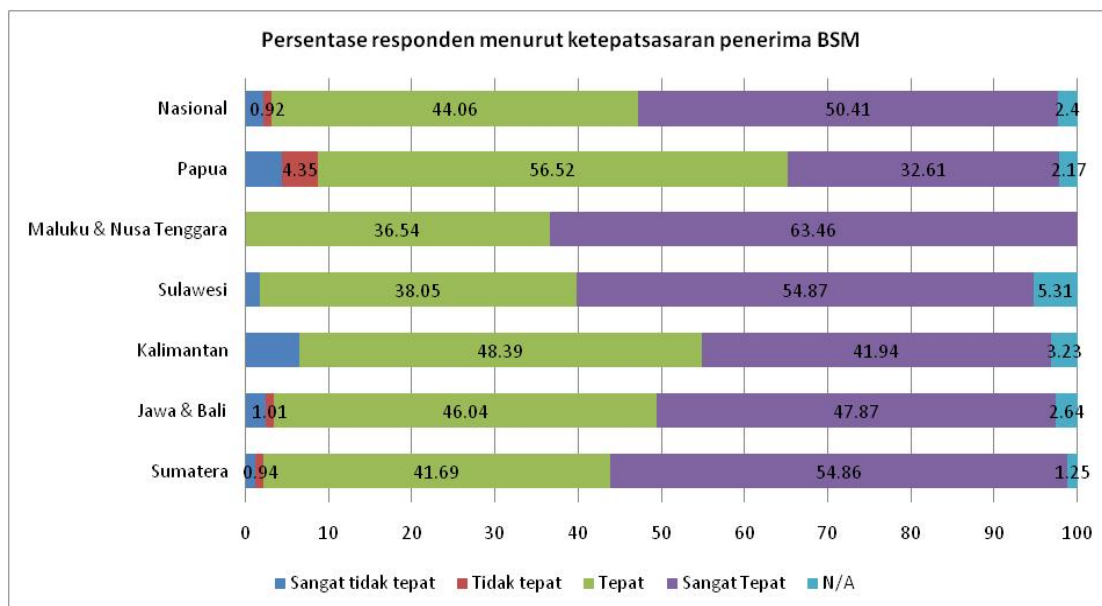
Lampiran 3. Ringkasan Responden Focus Group Discussion (FGD)

No	Sampel	Masing-masing FGD	Total
1	Region		6
2	Kabupaten/Kota		8
3	Kepala Sekolah	7	7x8=56
	Guru	7	7x8=56
	Murid	7	7x8=56
	Orang Tua	3	3x8=24
	Kepala Desa/Lurah	3	3x8=24
	Dinas Pendidikan	2	2x8=16
	Kandep Kemenag	1	1x8=8
TOTAL		30	240

Lampiran 4. Persepsi Responden- Responden Terkait Kelayakan BSM Berdasarkan Region

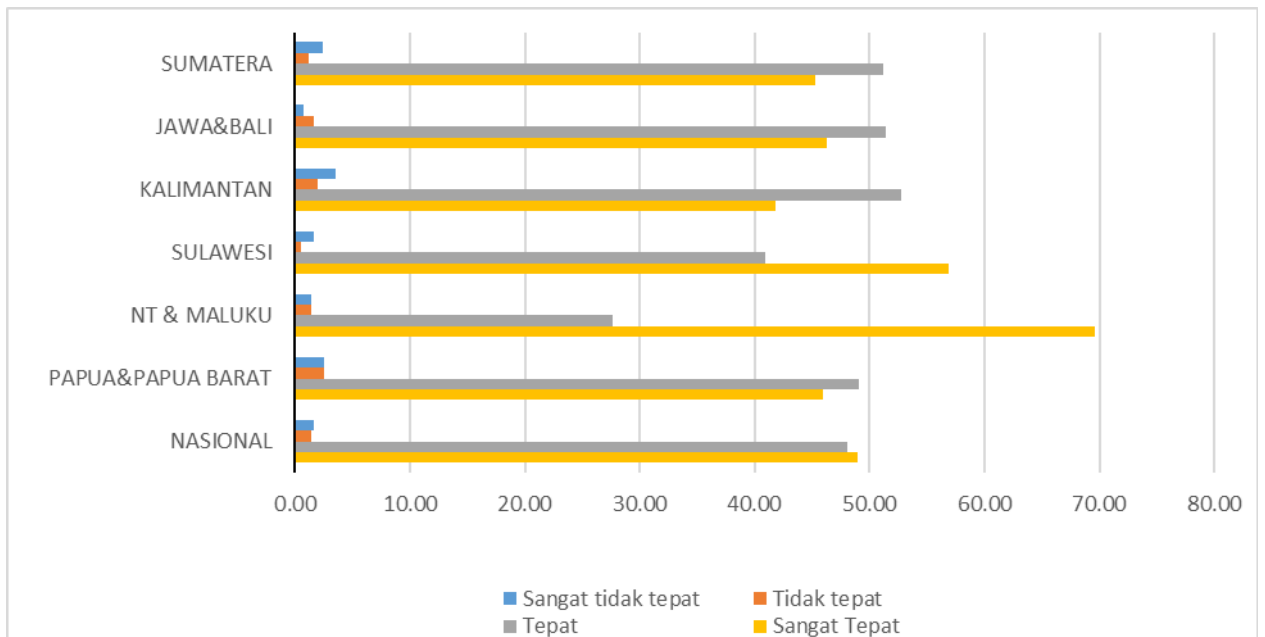
1. Kepala Sekolah

Region	Akurasi Pemilihan BSM berdasarkan Kepala Sekolah (%)					n Kepala Sekolah
	Sangat Tidak akurat	Akurat	Akurat	Sangat Akurat	N/A	
Sumatera	1.25	0.94	41.69	54.86	1.25	319
Jawa & Bali	2.43	1.01	46.04	47.87	2.64	493
Kalimantan	6.45	.	48.39	41.94	3.23	62
Sulawesi	1.77	.	38.05	54.87	5.31	113
NT & Maluku	.	.	36.54	63.46	.	52
Papua & Papua Barat	4.35	4.35	56.52	32.61	2.17	46
Rerata Nasional	2.21	0.92	44.06	50.41	2.4	1,085



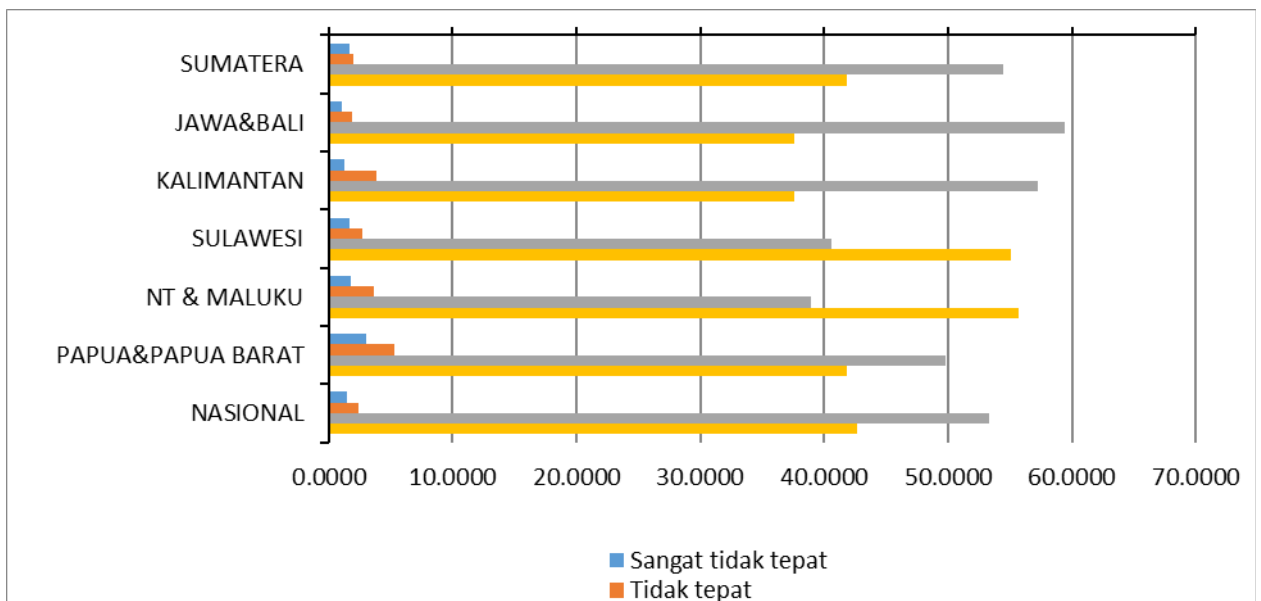
2. Guru

Region	Akurasi Pemilihan BSM berdasarkan Guru (%)				n = Guru
Sumatera	2.41	1.15	51.20	45.24	955
Jawa & Bali	0.70	1.63	51.40	46.28	1,290
Kalimantan	3.52	1.95	52.73	41.80	256
Sulawesi	1.69	0.48	40.92	56.90	413
NT & Maluku	1.40	1.40	27.62	69.58	286
Papua & Papua Barat	2.48	2.48	49.07	45.96	161
Rerata Nasional	1.67	1.40	48.02	48.91	3,361



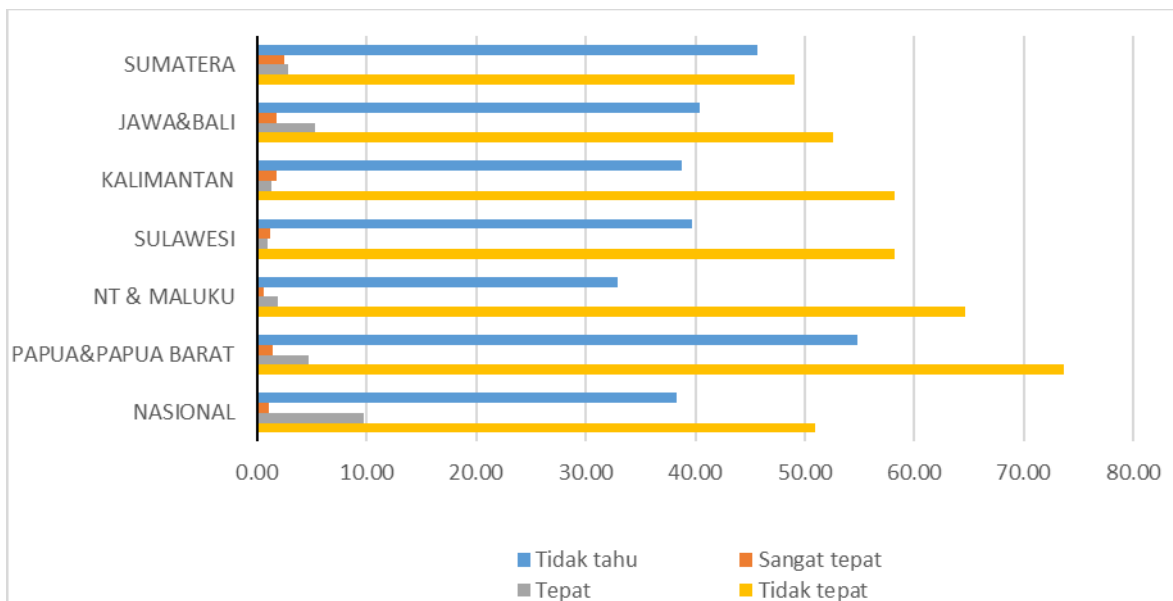
3. Murid

Region	Akurasi Pemilihan BSM berdasarkan Murid (%)				n = Murid
	Sangat Tidak akurat	Akurat	Akurat	Sangat Akurat	
Sumatera	1.73	1.98	54.50	41.78	5,605
Jawa & Bali	1.05	1.85	59.47	37.63	7,685
Kalimantan	1.27	3.87	57.28	37.58	1,498
Sulawesi	1.64	2.71	40.55	55.09	2,434
NT & Maluku	1.75	3.62	38.90	55.72	1,712
Papua & Papua Barat	3.06	5.35	49.78	41.81	916
Rerata Nasional	1.49	2.46	53.36	42.70	19,850



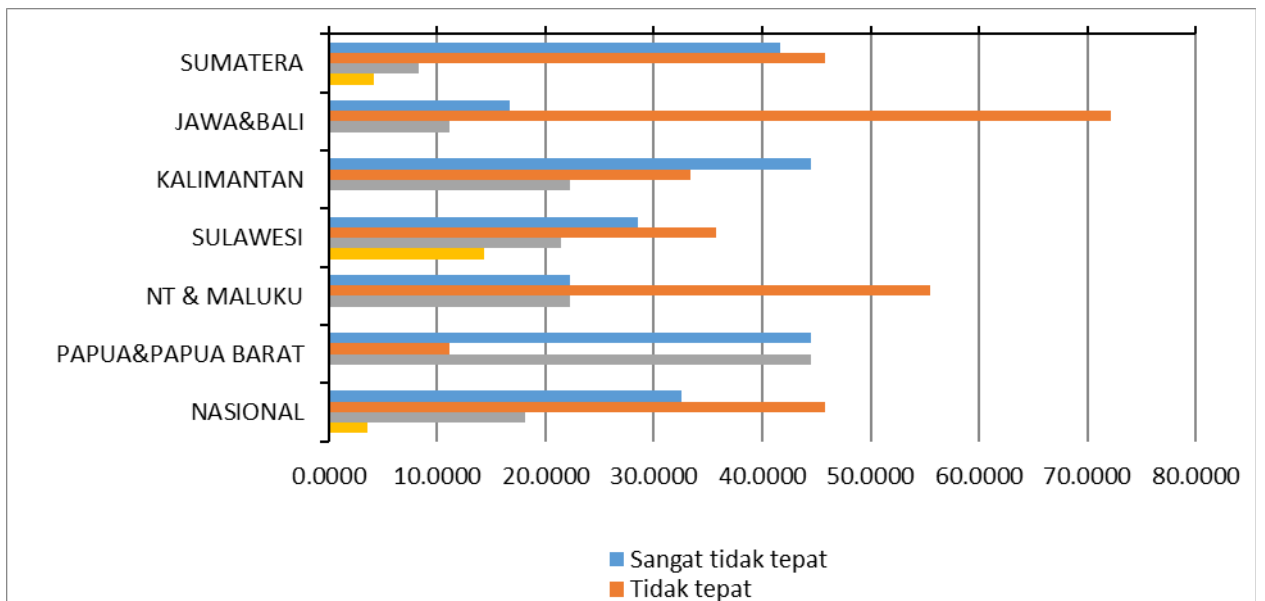
4. Orang Tua

Region	Akurasi Pemilihan BSM berdasarkan Orang Tua (%)				n = Orang Tua
	Sangat Tidak akurat	Akurat	Akurat	Tidak Tahu	
Sumatera	2.50	2.81	49.04	45.70	1,457
Jawa & Bali	1.79	5.30	52.59	40.35	1,953
Kalimantan	1.80	1.28	58.17	38.78	387
Sulawesi	1.18	0.95	58.23	39.64	627
NT & Maluku	0.57	1.91	64.61	32.91	449
Papua & Papua Barat	1.36	4.66	73.64	54.85	260
Rerata Nasional	1.09	9.73	50.94	38.25	5,133



5. Kepala Desa

Akurasi Pemilihan BSM berdasarkan Kepala Desa (%)					
Region	Sangat Tidak akurat	Akurat	Akurat	Sangat Akurat	n = Kepala Desa
Sumatera	41.67	45.83	8.33	4.17	24
Jawa & Bali	16.67	72.22	11.11	0.00	18
Kalimantan	44.44	33.33	22.22	0.00	9
Sulawesi	28.57	35.71	21.43	14.29	14
NT & Maluku	22.22	55.56	22.22	0.00	9
Papua & Papua Barat	44.44	11.11	44.44	0.00	9
Rerata Nasional	32.53	45.78	18.07	3.61	83



Lampiran 5. Metodologi ACDP 038 Dan Susenas BPS Untuk Menentukan Tingkat Kemiskinan

Penaksiran Cepat dalam ACDP 038 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2011 untuk pengeluaran keluarga pada setiap Kabupaten di Indonesia sebagai dasar untuk menentukan survey responden sebagai miskin, agak miskin dan diatas miskin. BPS mengumpulkan Data Susenas dengan menanyakan secara acak kepada 15 keluarga dalam kelompok populasi dan melakukan pertanyaan ekstensif terkait dengan pendapatan, penghasilan keluarga dan pengeluaran. BPS menganalisis data berdasarkan 14 kriteria untuk menentukan datar kemiskinan pada teks boks dibawah. Disebabkan karena keterbatasan waktu dari Penaksiran Cepat, dirasakan kurang efisien untuk menggunakan metodologi dan kriteria yang sama seperti BPS untuk menentukan kemiskinan.

KRITERIA BPS DALAM MENENTUKAN KEMISKINAN

Terdapat 14 kriteria untuk menentukan jika sebuah keluarga adalah miskin atau tidak: (1) luas rumah kurang dari 8 m² per orang; (2) lantai rumah tidak disemen atau menggunakan bambu atau kayu dengan kualitas rendah; (3) dinding rumah menggunakan bambu atau jerami atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester; (4) rumah tidak memiliki toilet sendiri atau punya namun harus berbagi dengan rumah lainnya; (5) tidak punya listrik; (6) sumber air berasal dari sumur atau dari mata air yang tidak terlindungi atau sungai atau air hujan; (7) bahan bakar untuk memasak adalah menggunakan kayu bakar/batubara/minyak tanah; (10) hanya makan satu atau dua kali setiap hari; (11) tidak mampu untuk membayar biaya perawatan kesehatan pada rumah sakit atau klinik; (12) pekerjaan sebagai petani dengan luas lahan 500 m² atau kurang, buruh tani, nelayan, pekerja konstruksi, buruh peternakan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000.- per bulan; (13) tingkat pendidikan adalah tingkat dasar (SD/MI); (14) memiliki simpanan atau barang berharga namun dapat dengan mudah diuangkan sebesar Rp. 500.000.- atau kurang. Jika sedikitnya 9 variabel tersebut terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dapat dinyatakan sebagai rumah tangga miskin.

Lampiran 6. Data Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1100	NAD	68,70	68,80	96,88	96,95	8,81	8,90	611,42	615,60	71,70	72,16	17	18	1,64
1101	Simeulue	62,98	63,05	98,66	98,85	8,52	8,62	618,86	622,72	69,28	69,73	350	352	1,45
1102	Aceh Singkil	64,92	65,10	96,24	96,25	7,76	7,77	610,14	613,88	68,58	68,98	382	386	1,28
1103	Aceh Selatan	66,93	67,03	96,53	96,55	8,43	8,44	606,47	610,56	69,97	70,36	322	327	1,28
1104	Aceh Tenggara	69,22	69,26	97,95	97,97	9,35	9,36	597,96	602,06	71,60	71,94	226	232	1,22
1105	Aceh Timur	69,74	69,80	98,21	98,25	8,49	8,51	588,15	592,58	70,55	70,94	293	301	1,35
1106	Aceh Tengah	69,64	69,70	98,60	98,65	9,52	9,70	618,69	622,73	73,69	74,18	128	126	1,84
1107	Aceh Barat	69,97	70,06	94,53	94,60	8,48	8,54	600,36	604,24	70,79	71,20	273	279	1,41
1108	Aceh Besar	70,75	70,81	96,96	96,98	9,55	9,77	610,30	614,39	73,32	73,83	144	140	1,92
1109	Pidie	69,53	69,68	95,91	96,30	8,67	8,72	612,56	616,29	71,92	72,43	215	213	1,79
1110	Bireuen	72,35	72,39	98,47	98,51	9,26	9,28	593,96	597,44	73,07	73,38	156	165	1,14
1111	Aceh Utara	69,74	69,80	97,81	97,83	9,15	9,19	607,90	612,04	72,46	72,85	190	193	1,40
1112	Aceh Barat Daya	66,99	67,19	96,34	96,47	7,72	8,01	617,50	621,49	70,29	70,95	303	300	2,23
1113	Gayo Lues	67,08	67,15	87,27	87,38	8,71	8,73	601,96	605,62	67,86	68,22	407	411	1,13
1114	Aceh Tamiang	68,37	68,47	98,27	98,32	8,78	8,85	598,26	602,79	70,79	71,26	272	274	1,60
1115	Nagan Raya	69,64	69,70	89,85	89,89	7,57	7,75	604,08	608,27	69,18	69,68	354	355	1,61
1116	Aceh Jaya	68,02	68,08	93,99	94,12	8,72	8,73	598,56	602,50	69,63	69,99	339	344	1,21

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
1117	Bener Meriah	67,63	67,69	98,50	98,79	8,77	8,81	605,49	610,71	70,98	71,51	257	258	1,83
1118	Pidie Jaya	69,24	69,30	95,45	95,48	8,64	8,68	622,16	626,89	72,38	72,82	194	196	1,58
1171	Kota Banda Aceh	70,88	71,15	99,16	99,18	12,09	12,20	632,24	636,28	77,45	78,00	24	22	2,44
1172	Kota Sabang	71,02	71,30	98,99	99,08	10,55	10,59	627,35	631,10	75,98	76,47	59	59	2,04
1173	Kota Langsa	70,58	70,75	99,20	99,30	10,45	10,51	603,34	607,95	73,85	74,37	120	121	2,00
1174	Kota Lhokseumawe	70,81	71,17	99,62	99,64	9,99	10,04	634,07	638,45	76,10	76,68	55	54	2,44
1175	Subulussalam	65,89	66,01	96,54	96,55	7,59	7,61	612,77	616,48	69,26	69,63	352	357	1,22
1200	SUMATERA UTARA	69,50	69,65	97,32	97,46	8,85	8,91	636,33	640,23	74,19	74,65	8	8	1,80
1201	Nias	69,60	69,77	90,44	90,78	6,41	6,42	607,16	610,40	68,66	69,09	378	379	1,37
1202	Mandailing Natal	63,62	63,70	99,33	99,34	7,80	7,92	636,51	640,33	70,60	71,04	287	296	1,47
1203	Tapanuli Selatan	67,21	67,34	99,81	99,83	8,94	8,95	642,53	647,03	74,02	74,45	115	115	1,66
1204	Tapanuli Tengah	68,11	68,26	95,78	95,82	8,13	8,15	618,97	623,03	71,21	71,63	246	253	1,47
1205	Tapanuli Utara	69,70	70,02	98,59	98,60	8,85	8,97	632,74	636,35	74,31	74,86	106	102	2,13
1206	Toba Samosir	70,68	70,75	98,35	98,49	9,80	9,85	646,36	649,91	76,55	76,93	42	42	1,63
1207	Labuhan Batu	69,54	70,02	97,95	97,96	8,53	8,55	635,23	639,53	74,03	74,65	114	110	2,36
1208	Asahan	68,98	69,13	96,90	97,70	7,67	7,92	631,24	634,67	72,54	73,25	186	170	2,59
1209	Simalungun	68,96	69,08	97,50	97,57	8,70	8,71	632,14	636,82	73,50	73,94	135	137	1,69
1210	Dairi	68,40	68,59	98,09	98,70	8,55	8,91	627,70	629,29	72,86	73,49	166	159	2,33
1211	Karo	72,19	72,29	98,69	98,72	9,10	9,22	625,48	629,36	75,34	75,79	73	73	1,84
1212	Deli Serdang	70,65	70,88	98,53	98,64	9,50	9,56	632,41	636,39	75,28	75,78	76	74	2,01
1213	Langkat	69,07	69,12	96,92	97,27	8,76	8,78	628,21	632,54	73,18	73,62	153	154	1,66
1214	Nias Selatan	70,01	70,36	85,20	85,28	6,33	6,40	600,47	604,39	67,15	67,72	428	427	1,73
1215	Humbang Hasundutan	67,87	67,96	98,21	98,22	9,05	9,31	614,37	617,64	71,94	72,43	214	212	1,77

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
1216	Pakpak Barat	67,60	67,81	96,52	96,53	8,20	8,22	614,58	617,98	70,80	71,20	271	280	1,36
1217	Samosir	69,73	69,84	96,61	97,47	9,52	9,54	623,89	627,89	73,70	74,27	127	122	2,18
1218	Serdang Bedegai	68,98	69,08	97,70	97,80	8,64	8,65	628,82	632,71	73,25	73,64	147	153	1,43
1219	Batu Bara	68,58	68,71	95,25	95,27	7,45	7,54	628,90	633,10	71,62	72,08	225	227	1,62
1220	Padang Lawas Utara	66,57	66,62	99,21	99,53	8,45	8,89	634,18	638,06	72,52	73,25	187	171	2,64
1221	Padang Lawas	67,03	67,09	99,65	99,66	8,13	8,40	625,64	630,00	71,98	72,55	209	204	2,03
1222	Labuhan Batu Selatan	69,95	70,23	98,84	98,93	8,21	8,24	630,27	634,67	73,84	74,38	122	120	2,06
1223	Labuhan Batu Utara	69,62	69,97	98,17	98,53	7,91	8,01	632,42	636,80	73,45	74,14	137	128	2,58
1224	Nias Utara	69,15	69,24	89,19	89,30	6,10	6,13	605,13	609,48	67,75	68,18	409	413	1,34
1225	Nias Barat	69,15	69,23	84,30	84,46	5,56	5,88	607,71	611,91	66,46	67,10	441	439	1,92
1271	Kota Sibolga	70,23	70,29	99,29	99,31	9,63	9,72	629,45	633,58	75,08	75,50	83	81	1,69
1272	Kota Tanjung Balai	70,43	70,76	98,99	99,02	8,81	8,89	624,45	628,81	74,14	74,72	110	108	2,24
1273	Kota Pematang Siantar	72,16	72,29	99,45	99,47	10,85	10,89	634,88	639,01	77,51	77,93	23	24	1,88
1274	Kota Tebing Tinggi	71,33	71,47	98,70	99,02	9,85	9,90	639,39	642,49	76,49	76,91	45	46	1,80
1275	Kota Medan	71,91	72,06	99,36	99,38	10,84	10,86	635,11	639,60	77,36	77,81	27	28	2,00
1276	Kota Binjai	71,77	71,89	99,19	99,20	9,89	9,99	633,37	637,70	76,41	76,88	47	48	1,99
1277	Kota Padang Sidempuan	69,59	69,72	99,70	99,72	10,19	10,21	629,11	632,81	75,21	75,58	78	78	1,49
1278	Gunung Sitoli	69,95	70,29	94,75	94,86	8,42	8,45	611,95	615,91	71,67	72,21	223	224	1,91
1300	SUMATERA BARAT	69,50	69,76	97,09	97,16	8,48	8,57	635,29	638,73	73,78	74,28	9	9	1,87
1301	Kepulauan Mentawai	68,45	68,54	93,58	93,67	6,51	6,52	606,53	609,56	68,75	69,06	373	383	0,98
1302	Pesisir Selatan	67,31	67,59	94,92	95,01	7,84	8,12	629,30	632,30	71,15	71,77	251	245	2,15
1303	Solok	66,60	66,95	97,19	97,21	7,60	8,03	627,25	631,02	70,93	71,73	260	247	2,78
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	66,92	67,25	94,78	94,79	7,43	7,50	633,55	636,58	70,92	71,40	261	265	1,64

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
1305	Tanah Datar	70,94	71,30	97,10	97,25	8,35	8,40	628,88	632,89	74,00	74,58	116	112	2,20
1306	Padang Pariaman	68,65	69,01	94,49	94,51	7,26	7,31	630,40	634,09	71,45	71,98	231	231	1,84
1307	Agam	69,04	69,23	97,85	97,86	8,50	8,59	629,65	633,28	73,28	73,74	146	146	1,70
1308	Limapuluh Koto	68,45	68,81	98,85	98,99	7,94	8,00	609,70	613,39	71,22	71,78	244	243	1,94
1309	Pasaman	67,44	67,77	98,73	98,82	7,61	7,66	639,84	642,90	72,71	73,19	173	175	1,76
1310	Solok Selatan	64,61	64,74	97,53	97,60	7,82	7,84	613,28	616,62	68,98	69,34	359	365	1,15
1311	Dharmas Raya	66,00	66,25	96,38	97,27	7,77	8,24	608,89	610,06	69,13	69,89	357	346	2,49
1312	Pasaman Barat	65,15	65,41	98,20	98,29	8,00	8,03	621,31	624,64	70,18	70,62	308	313	1,48
1371	Kota Padang	70,89	71,14	99,49	99,50	10,91	10,92	647,24	649,62	77,81	78,15	17	19	1,51
1372	Kota Solok	69,69	69,86	98,51	98,52	10,43	10,48	635,24	638,63	75,65	76,04	67	68	1,63
1373	Kota Sawah Lunto	71,65	71,86	98,55	98,62	9,14	9,23	624,52	627,79	74,96	75,41	85	86	1,79
1374	Kota Padang Panjang	71,30	71,66	99,30	99,31	10,23	10,73	646,57	647,98	77,45	78,12	25	20	3,00
1375	Kota Bukit Tinggi	71,53	71,69	99,92	99,93	10,50	10,58	651,09	655,31	78,26	78,73	12	11	2,19
1376	Kota Payakumbuh	70,62	70,78	99,18	99,19	9,66	9,72	636,22	640,51	75,81	76,29	61	63	1,96
1377	Kota Pariaman	69,02	69,25	98,92	98,93	9,90	9,92	628,66	632,35	74,46	74,89	98	101	1,69
1400	RIAU	71,40	71,55	98,35	98,42	8,58	8,63	646,63	650,83	76,07	76,53	3	3	1,92
1401	Kuantan Sengingi	68,33	68,43	97,82	98,06	7,99	8,03	645,21	649,28	73,70	74,15	126	127	1,73
1402	Indragiri Hulu	68,81	68,91	98,16	98,21	7,98	8,01	647,10	650,72	74,18	74,54	109	113	1,42
1403	Indragiri Hilir	71,39	71,63	99,06	99,15	7,62	7,63	643,16	647,22	75,24	75,71	77	76	1,91
1404	Pelalawan	68,82	68,95	98,46	98,48	8,21	8,24	630,99	635,05	73,18	73,59	152	155	1,54
1405	Siak	71,69	71,86	98,56	98,65	9,08	9,14	644,22	648,16	76,46	76,92	46	43	1,97
1406	Kampar	68,52	68,67	98,48	98,58	8,49	8,92	646,68	650,82	74,43	75,18	101	92	2,92
1407	Rokan Hulu	67,17	67,21	98,28	98,37	7,56	7,68	642,94	646,92	72,66	73,10	177	182	1,59

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
1408	Bengkalis	70,35	70,46	98,09	98,16	9,12	9,17	637,23	641,33	75,11	75,53	82	80	1,71
1409	Rokan Hilir	67,18	67,25	97,99	98,15	7,87	7,89	637,78	641,77	72,43	72,83	192	194	1,46
1410	Kepulauan Meranti	68,73	68,86	90,18	90,34	7,32	7,35	630,86	635,16	70,62	71,08	283	290	1,56
1471	Kota Pekanbaru	71,45	71,67	99,87	99,89	11,33	11,34	644,04	648,05	78,27	78,72	11	12	2,04
1473	Kota Dumai	71,64	71,95	99,31	99,35	9,72	9,73	653,00	657,01	77,75	78,25	20	16	2,23
1500	JAMBI	69,10	69,25	96,07	96,16	7,84	8,05	633,67	637,60	72,74	73,30	13	13	2,04
1501	Kerinci	70,83	70,96	97,24	97,25	8,11	8,20	635,00	639,64	74,26	74,76	108	106	1,94
1502	Merangin	68,40	68,61	97,47	97,52	7,50	7,55	627,76	631,42	71,95	72,40	212	215	1,59
1503	Sarolangun	69,43	69,57	94,76	94,97	7,14	7,32	638,24	642,92	72,46	73,08	189	186	2,24
1504	Batanghari	69,16	69,36	97,57	97,58	7,52	7,90	633,60	635,94	72,87	73,44	165	162	2,10
1505	Muara Jambi	69,26	69,32	95,97	96,71	7,98	8,02	630,79	633,40	72,69	73,12	176	179	1,58
1506	Tanjung Jabung Timur	70,42	70,76	92,43	92,44	6,26	6,30	633,68	638,15	71,49	72,05	229	228	1,97
1507	Tanjung Jabung Barat	69,70	69,87	97,92	97,93	7,54	7,58	627,59	631,78	72,79	73,24	169	172	1,67
1508	Tebo	69,11	69,24	94,92	94,93	7,10	7,41	630,24	634,36	71,67	72,30	224	219	2,21
1509	Bungo	67,27	67,54	96,16	96,33	8,14	8,16	633,57	638,02	71,95	72,50	213	207	1,95
1571	Kota Jambi	69,87	69,91	98,99	99,07	10,11	10,37	641,12	644,99	76,07	76,60	57	56	2,22
1572	Kota Sungai Penuh	70,96	71,03	97,24	97,25	9,19	9,23	656,11	658,66	76,76	77,02	36	40	1,14
1600	SUMATERA SELATAN	69,60	69,80	97,36	97,44	7,82	7,84	629,38	633,57	72,95	73,42	10	10	1,73
1601	Ogan Komering Ulu	69,40	69,50	98,43	98,47	8,38	8,40	624,60	629,57	73,14	73,59	154	156	1,70
1602	Ogan Komering Ilir	68,02	68,25	96,56	96,61	6,74	6,75	623,08	627,12	70,61	71,07	284	291	1,55
1603	Muara Enim (Liot)	67,66	67,85	98,82	98,85	7,49	7,52	614,40	618,62	70,81	71,26	270	273	1,56
1604	Lahat	68,23	68,57	97,78	97,83	8,28	8,31	612,05	616,13	71,30	71,83	243	239	1,84
1605	Musi Rawas	64,80	64,95	96,52	96,55	7,09	7,11	607,58	612,59	67,89	68,38	405	405	1,53

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
1606	Musi Banyuasin	69,86	70,12	97,01	97,70	7,51	7,61	616,57	619,92	71,81	72,44	218	211	2,24
1607	Banyuasin	67,41	67,59	96,46	96,50	7,02	7,06	614,14	618,83	69,78	70,28	330	334	1,65
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	69,37	69,44	97,90	97,93	7,45	7,47	613,03	617,55	71,42	71,82	233	240	1,43
1609	Ogan Komering Ulu Timur	68,36	68,42	94,73	94,85	6,91	7,29	612,16	616,35	69,68	70,34	336	328	2,18
1610	Ogan Ilir	66,27	66,57	97,62	97,71	7,53	7,56	610,66	615,47	69,51	70,09	343	341	1,91
1611	Empat Lawang	65,50	65,64	97,78	97,83	7,23	7,40	607,06	610,32	68,61	69,08	380	381	1,48
1671	Kota Palembang	71,13	71,37	98,71	98,73	9,96	9,98	636,39	640,30	76,23	76,69	54	53	1,90
1672	Kota Prabumulih	71,91	72,32	98,66	98,71	9,16	9,25	613,11	617,77	74,27	74,94	107	98	2,59
1673	Kota Pagar Alam	70,17	70,39	98,50	98,60	8,95	8,97	614,15	618,67	73,19	73,70	151	148	1,89
1674	Kota Lubuk Linggau	65,69	65,84	98,40	98,50	9,24	9,36	609,78	614,34	70,56	71,10	291	288	1,86
1700	BENGKULU	69,90	70,16	95,30	95,40	8,25	8,33	628,51	631,86	72,92	73,40	11	11	1,78
1701	Bengkulu Selatan	67,41	67,59	96,47	96,51	8,52	8,60	632,79	636,57	72,32	72,78	197	197	1,66
1702	Rejang Lebong	67,25	67,62	95,58	95,65	7,87	7,97	626,66	630,72	71,09	71,70	255	249	2,11
1703	Bengkulu Utara	69,54	69,75	92,42	92,90	7,47	7,67	628,50	632,59	71,50	72,19	228	225	2,41
1704	Kaur	67,23	67,54	96,06	96,36	7,91	7,94	610,84	613,14	69,99	70,43	320	320	1,45
1705	Seluma	65,70	65,98	93,90	93,96	7,41	7,43	592,17	595,40	66,86	67,29	434	436	1,30
1706	Mukomuko	67,81	67,99	94,06	94,08	7,41	7,69	624,59	627,72	70,55	71,11	292	287	1,88
1707	Lebong	66,65	67,04	95,41	95,54	7,79	7,92	618,78	622,36	70,05	70,66	317	310	2,06
1708	Kepahiang	64,26	64,57	95,89	95,91	7,63	7,78	610,59	614,02	68,08	68,63	398	398	1,73
1709	Bengkulu Tengah	70,12	70,19	91,86	91,89	7,06	7,25	591,13	595,19	68,51	69,01	386	384	1,58
1771	Bengkulu	70,49	70,66	99,25	99,28	10,99	11,03	647,59	650,68	77,62	77,99	22	23	1,66
1800	LAMPUNG	69,50	69,75	94,64	95,02	7,75	7,82	618,63	621,77	71,42	71,94	21	20	1,82
1801	Lampung Barat	67,14	67,45	97,28	97,33	7,42	7,46	603,43	606,45	69,28	69,72	351	353	1,45

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
1802	Tanggamus	69,33	69,74	95,32	95,47	7,36	7,40	620,19	623,22	71,31	71,83	242	238	1,82
1803	Lampung Selatan	68,44	68,74	94,85	94,91	7,41	7,49	611,32	614,29	70,06	70,53	316	315	1,55
1804	Lampung Timur	70,22	70,48	93,32	93,63	7,35	7,58	612,19	614,06	70,73	71,26	277	271	1,81
1805	Lampung Tengah	69,25	69,48	93,08	93,74	7,39	7,41	619,59	623,05	70,74	71,29	276	268	1,88
1806	Lampung Utara	67,94	68,21	95,25	95,32	7,96	8,10	612,28	614,70	70,36	70,81	301	306	1,51
1807	Way Kanan	69,45	69,70	94,61	94,89	7,27	7,32	604,38	607,79	69,92	70,43	324	319	1,69
1808	Tulang Bawang	68,86	69,13	93,80	94,52	7,10	7,20	617,89	620,96	70,34	70,96	302	299	2,10
1809	Pesawaran	68,40	68,56	94,41	95,58	7,46	7,51	608,64	610,53	69,77	70,30	333	332	1,76
1810	Pringsewu	68,51	68,64	94,19	94,72	8,58	8,60	626,32	628,80	71,97	72,37	210	217	1,40
1811	Mesuji	68,39	68,45	92,36	93,30	6,30	6,37	596,24	598,74	67,49	67,98	420	419	1,50
1812	Tulang Bawang Barat	68,66	68,72	92,48	93,03	7,45	7,47	602,17	604,38	68,98	69,32	360	368	1,08
1871	Kota Bandar Lampung	70,87	71,24	98,44	98,47	9,91	10,18	632,60	634,96	75,70	76,29	65	61	2,44
1872	Kota Metro	72,54	72,76	97,49	98,38	9,82	10,12	631,26	633,37	76,25	76,95	53	41	2,97
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	68,90	69,05	95,69	95,83	7,45	7,58	641,51	645,37	72,86	73,37	12	12	1,88
1901	Bangka	67,64	67,85	96,31	96,65	7,64	8,00	642,34	645,87	72,50	73,23	188	174	2,66
1902	Belitung	69,17	69,26	96,51	96,57	7,81	7,84	640,31	644,52	73,36	73,77	141	144	1,54
1903	Bangka Barat	67,78	67,90	92,86	93,59	6,87	6,95	627,09	629,50	70,07	70,54	315	314	1,57
1904	Bangka Tengah	67,92	68,05	95,90	95,95	6,86	6,96	632,28	635,69	71,22	71,63	245	252	1,43
1905	Bangka Selatan	67,72	67,92	93,62	93,66	5,99	6,01	593,57	596,94	66,97	67,36	432	432	1,20
1906	Belitung Timur	68,83	69,06	96,69	96,71	7,48	7,72	627,09	629,39	71,96	72,44	211	210	1,74
1971	Kota Pangkal Pinang	70,43	70,54	98,18	98,20	9,50	10,03	642,10	645,50	75,83	76,54	60	58	2,95
2100	KEPULAUAN RIAU	69,80	69,85	97,19	97,67	9,16	9,73	643,00	644,96	75,07	75,78	6	6	2,83
2101	Karimun	69,91	69,93	95,82	96,36	8,09	8,14	637,79	640,24	73,64	73,99	130	135	1,33

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
2102	Bintan	69,71	69,76	95,09	96,14	8,63	8,91	646,57	650,00	74,44	75,17	100	94	2,84
2103	Natuna	68,31	68,37	96,47	96,63	7,17	7,64	616,41	620,14	70,56	71,26	290	272	2,38
2104	Lingga	70,16	70,26	91,64	91,79	7,23	7,24	626,64	629,65	71,35	71,68	239	251	1,14
2105	Kepulauan Anambas	67,40	67,53	90,00	91,87	5,98	6,38	627,54	629,07	68,60	69,50	381	361	2,87
2171	Kota Batam	70,81	70,86	98,94	98,97	10,77	10,78	650,60	653,07	77,80	78,03	18	21	1,07
2172	Kota Tanjung Pinang	69,62	69,67	97,31	98,70	9,42	9,68	635,26	636,87	74,59	75,25	91	90	2,57
3100	DKI JAKARTA	73,20	73,35	99,13	99,15	10,93	10,95	628,67	632,17	77,60	77,97	1	1	1,66
3101	Kep. Seribu	70,55	70,66	98,36	98,38	7,96	8,19	590,55	591,84	70,82	71,16	269	284	1,16
3171	Kota Jakarta Selatan	73,51	73,69	99,23	99,37	11,08	11,09	649,00	651,70	79,47	79,82	2	2	1,70
3172	Kota Jakarta Timur	73,35	73,53	99,07	99,11	11,04	11,10	644,29	646,87	78,95	79,31	4	4	1,69
3173	Kota Jakarta Pusat	72,30	72,43	99,52	99,53	10,74	10,77	646,43	648,69	78,41	78,68	8	13	1,25
3174	Kota Jakarta Barat	73,46	73,63	98,96	98,98	10,74	10,75	645,26	647,14	78,84	79,09	5	6	1,18
3175	Kota Jakarta Utara	72,82	72,95	99,17	99,18	10,02	10,07	640,38	642,91	77,63	77,93	21	25	1,36
3200	JAWA BARAT	68,20	68,40	96,18	96,29	8,02	8,06	632,22	635,80	72,29	72,73	15	16	1,58
3201	Bogor	68,86	69,28	95,02	95,09	7,98	7,99	629,62	631,63	72,16	72,58	201	203	1,48
3202	Sukabumi	67,06	67,38	97,33	97,35	6,88	6,90	626,99	629,72	70,66	71,06	282	292	1,39
3203	Cianjur	66,00	66,35	97,55	97,64	6,82	6,85	614,83	617,59	69,14	69,59	355	359	1,46
3204	Bandung	69,02	69,10	98,72	98,75	8,37	8,46	638,56	642,00	74,05	74,43	113	117	1,46
3205	Garut	65,60	66,00	98,94	98,96	7,34	7,37	637,49	638,77	71,36	71,70	237	248	1,19
3206	Tasikmalaya	67,96	68,18	98,90	98,92	6,99	7,33	632,31	634,06	72,00	72,51	207	205	1,83
3207	Ciamis	67,29	67,47	97,59	97,93	7,19	7,47	630,86	631,63	71,37	71,81	236	242	1,53
3208	Kuningan	67,47	67,59	95,45	96,99	6,95	7,22	631,73	632,44	70,89	71,55	262	257	2,28
3209	Cirebon	65,29	65,41	92,33	92,41	6,85	6,87	631,55	635,25	68,89	69,27	362	371	1,22

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
3210	Majalengka	66,35	66,62	95,09	95,11	6,84	7,17	633,65	635,71	70,25	70,81	306	305	1,87
3211	Sumedang	67,42	67,52	97,73	97,75	7,93	7,94	636,01	638,36	72,42	72,67	193	202	0,91
3212	Indramayu	66,82	67,23	85,65	85,66	5,73	5,95	635,67	638,98	67,75	68,40	410	404	2,01
3213	Subang	69,39	69,54	92,45	92,47	6,92	6,94	630,09	633,46	71,14	71,50	252	259	1,25
3214	Purwakarta	67,06	67,35	95,71	96,07	7,42	7,44	633,15	635,21	71,17	71,59	249	256	1,46
3215	Karawang	66,70	67,00	93,21	93,22	6,95	7,02	629,62	633,04	69,79	70,28	327	333	1,62
3216	Bekasi	69,40	69,73	94,03	94,14	8,33	8,60	635,18	637,76	72,93	73,54	162	157	2,24
3217	Kab Bandung Barat	68,65	68,68	98,51	99,11	8,07	8,11	635,56	639,14	73,35	73,80	142	142	1,71
3271	Kota Bogor	68,87	68,97	98,77	98,79	9,79	9,80	647,89	651,25	75,75	76,08	63	65	1,36
3272	Kota Sukabumi	69,44	69,70	99,66	99,67	9,32	9,35	634,82	638,41	74,91	75,36	87	88	1,79
3273	Kota Bandung	69,72	69,78	99,67	99,70	10,44	10,45	636,89	640,65	76,06	76,39	58	60	1,39
3274	Kota Cirebon	68,50	68,52	97,05	97,06	9,47	9,75	647,96	651,47	74,93	75,42	86	85	1,96
3275	Kota Bekasi	69,64	69,70	98,51	98,56	10,53	10,58	643,92	646,92	76,36	76,68	50	55	1,35
3276	Kota Depok	73,09	73,22	98,94	98,96	10,94	10,97	649,20	651,46	79,09	79,36	3	3	1,29
3277	Kota Cimahi	69,18	69,25	99,65	99,74	10,50	10,61	633,20	637,86	75,51	76,01	71	71	2,04
3278	Kota Tasikmalaya	69,86	70,23	99,55	99,57	8,83	8,85	630,24	633,13	74,40	74,85	102	103	1,76
3279	Kota Banjar	66,26	66,38	97,26	97,30	8,01	8,12	631,36	635,10	71,38	71,82	235	241	1,54
3300	JAWA TENGAH	71,40	71,55	89,95	90,34	7,24	7,29	637,27	640,41	72,49	72,94	14	14	1,64
3301	Cilacap	70,82	71,12	90,28	91,48	6,85	6,86	634,50	636,62	71,73	72,34	221	218	2,16
3302	Banyumas	69,72	69,78	93,98	94,06	7,73	7,76	634,52	638,27	72,60	72,96	182	188	1,32
3303	Purbalingga	70,19	70,44	93,48	93,50	7,18	7,21	631,04	634,44	72,07	72,50	203	206	1,54
3304	Banjarnegara	69,04	69,20	88,43	88,48	6,33	6,34	634,04	638,79	69,91	70,39	325	324	1,58
3305	Kebumen	69,32	69,37	90,74	91,53	6,87	6,92	635,81	639,16	71,12	71,62	253	255	1,72

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
3306	Purworejo	70,52	70,78	91,51	91,74	7,75	7,84	634,97	636,29	72,55	72,91	185	190	1,31
3307	Wonosobo	69,98	70,23	90,47	91,16	6,27	6,55	629,76	630,41	70,52	71,06	296	293	1,85
3308	Magelang	70,12	70,18	91,35	93,29	7,26	7,33	636,96	638,16	72,08	72,69	202	201	2,19
3309	Boyolali	70,37	70,43	85,97	87,96	7,37	7,42	632,00	632,19	70,72	71,25	278	277	1,79
3310	Klaten	71,50	71,67	89,90	89,92	8,27	8,28	644,21	646,39	73,83	74,10	124	129	1,04
3311	Sukoharjo	70,23	70,29	90,69	90,72	8,36	8,52	646,94	649,96	73,57	73,97	134	136	1,49
3312	Wonogiri	72,28	72,35	82,18	83,50	6,32	6,35	647,21	649,51	71,33	71,86	241	236	1,84
3313	Karanganyar	72,20	72,28	86,91	88,90	7,39	7,41	647,94	649,70	73,19	73,82	150	141	2,35
3314	Sragen	72,56	72,75	84,36	84,41	6,99	7,02	628,04	630,61	71,00	71,33	256	267	1,14
3315	Grobogan	69,73	69,89	90,36	90,41	6,76	6,81	631,25	635,15	70,83	71,27	266	270	1,50
3316	Blora	71,34	71,41	83,19	85,06	6,25	6,45	642,36	642,83	70,61	71,25	285	276	2,17
3317	Rembang	70,13	70,23	91,17	91,36	6,85	6,89	641,28	644,43	72,07	72,45	204	209	1,35
3318	Pati	72,83	72,89	86,42	87,59	6,95	6,98	646,15	648,77	72,96	73,49	159	160	1,94
3319	Kudus	69,62	69,68	93,71	93,73	8,11	8,12	636,90	639,98	72,95	73,24	161	173	1,04
3320	Jepara	70,85	70,99	93,09	93,15	7,40	7,52	632,48	636,45	72,64	73,12	180	180	1,75
3321	Demak	71,24	71,59	91,36	92,53	7,59	7,60	632,22	632,87	72,58	73,09	183	183	1,88
3322	Semarang	72,47	72,54	93,62	93,67	7,75	7,87	634,97	637,71	74,10	74,45	112	116	1,36
3323	Temanggung	72,54	72,66	95,94	95,96	7,01	7,09	635,01	638,07	74,11	74,47	111	114	1,39
3324	Kendal	68,44	68,77	89,15	89,31	6,91	6,93	637,09	639,78	70,41	70,85	299	303	1,50
3325	Batang	70,11	70,34	88,09	89,90	6,71	6,72	630,11	631,55	70,41	71,06	298	294	2,20
3326	Pekalongan	69,01	69,28	92,05	92,08	6,66	6,70	639,95	643,53	71,40	71,86	234	234	1,62
3327	Pemalang	67,68	67,90	90,76	90,79	6,49	6,51	635,26	637,71	69,89	70,22	326	336	1,11
3328	Tegal	68,79	69,08	89,26	89,47	6,56	6,60	639,95	643,48	70,59	71,09	288	289	1,72

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
3329	Brebes	67,67	67,96	86,14	86,15	5,70	5,72	634,36	637,29	68,20	68,61	395	399	1,27
3371	Kota Magelang	70,22	70,28	97,25	97,29	10,21	10,22	649,52	651,91	76,60	76,83	39	50	1,00
3372	Kota Surakarta	72,16	72,25	96,68	96,71	10,32	10,34	652,43	655,77	77,86	78,18	16	18	1,45
3373	Kota Salatiga	71,03	71,14	96,50	96,52	9,94	9,97	647,54	650,39	76,53	76,83	43	51	1,28
3374	Kota Semarang	72,13	72,18	96,44	96,47	9,98	10,11	646,94	649,21	77,11	77,42	32	35	1,36
3375	Kota Pekalongan	70,32	70,48	95,68	95,93	8,66	8,69	640,55	644,01	74,47	74,90	97	100	1,70
3376	Kota Tegal	68,74	68,93	94,88	94,90	8,25	8,27	650,72	653,11	73,89	74,20	118	124	1,18
3400	D I YOGYAKARTA	73,22	73,27	90,84	91,49	9,07	9,20	646,56	650,16	75,77	76,32	4	4	2,25
3401	Kulon Progo	74,38	74,48	90,69	92,00	8,20	8,37	630,38	631,42	74,49	75,04	95	97	2,16
3402	Bantul	71,31	71,33	91,03	91,23	8,82	8,92	646,08	651,17	74,53	75,05	94	96	2,06
3403	Gunung Kidul	70,97	71,01	84,66	84,94	7,65	7,70	625,20	628,73	70,45	70,84	297	304	1,30
3404	Sleman	75,06	75,18	92,61	93,44	10,30	10,51	647,84	650,27	78,20	78,79	13	9	2,71
3471	Kota Yogyakarta	73,44	73,48	98,03	98,07	11,48	11,52	649,71	653,79	79,52	79,89	1	1	1,84
3500	JAWA TIMUR	69,60	69,86	88,34	88,52	7,24	7,34	643,60	647,46	71,62	72,18	18	17	1,97
3501	Pacitan	71,26	71,48	91,58	91,60	6,90	6,94	631,40	634,70	72,07	72,48	205	208	1,46
3502	Ponorogo	69,93	70,24	85,73	87,32	6,68	6,99	636,80	638,25	70,29	71,15	304	285	2,92
3503	Trenggalek	71,62	71,87	92,83	92,84	7,24	7,26	637,10	640,56	73,24	73,66	148	152	1,56
3504	Tulungagung	71,48	71,72	93,55	93,58	7,84	7,85	631,55	635,15	73,34	73,76	143	145	1,58
3505	Blitar	70,88	71,09	92,00	92,02	7,35	7,36	649,38	652,75	73,67	74,06	129	131	1,48
3506	Kediri	69,66	69,90	92,81	92,84	7,60	7,69	628,59	632,75	71,75	72,28	220	221	1,88
3507	Malang	68,96	69,23	89,55	89,59	6,80	7,02	634,85	639,07	70,54	71,17	295	283	2,17
3508	Lumajang	67,17	67,46	86,32	86,56	6,10	6,41	628,60	632,28	67,82	68,55	408	400	2,25
3509	Jember	62,84	63,03	83,48	83,60	6,53	6,73	626,60	630,48	64,95	65,53	458	459	1,66

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
3510	Banyuwangi	67,58	67,98	86,66	87,36	6,85	6,89	631,30	635,02	68,89	69,58	364	360	2,23
3511	Bondowoso	63,23	63,54	76,72	78,25	5,54	5,66	626,74	630,22	62,94	63,81	470	470	2,35
3512	Situbondo	63,19	63,36	78,24	78,27	6,18	6,19	633,58	637,51	64,26	64,67	466	466	1,14
3513	Probolinggo	61,13	61,42	78,91	80,44	5,57	5,80	636,00	638,17	62,99	63,84	469	469	2,27
3514	Pasuruan	64,01	64,31	89,99	90,03	6,34	6,54	635,84	639,73	67,61	68,24	413	410	1,92
3515	Sidoarjo	70,55	70,79	97,42	97,76	9,84	9,85	646,97	651,31	76,35	76,90	51	47	2,31
3516	Mojokerto	70,19	70,42	94,11	94,12	7,81	7,82	640,19	644,82	73,39	73,89	140	139	1,87
3517	Jombang	70,09	70,18	92,52	92,87	7,77	7,84	636,99	640,42	72,70	73,14	174	178	1,63
3518	Nganjuk	68,89	69,11	90,48	91,07	7,19	7,44	631,90	635,57	70,76	71,48	275	260	2,46
3519	Madiun	68,90	69,07	89,53	89,55	7,38	7,39	625,21	627,94	70,18	70,50	309	317	1,07
3520	Magetan	71,17	71,41	90,54	90,56	7,57	7,60	637,09	640,82	72,72	73,17	171	177	1,64
3521	Ngawi	69,91	70,24	85,14	85,54	6,36	6,99	622,75	624,99	68,82	69,73	369	351	2,93
3522	Bojonegoro	67,15	67,28	84,78	84,81	6,66	6,68	616,11	620,17	66,92	67,32	433	435	1,22
3523	Tuban	67,78	68,00	85,79	85,83	6,41	6,49	629,13	631,85	68,31	68,71	391	396	1,26
3524	Lamongan	68,20	68,37	87,15	88,71	7,19	7,46	631,84	634,92	69,63	70,52	338	316	2,91
3525	Gresik	70,98	71,22	94,47	94,56	8,53	8,84	640,59	644,70	74,47	75,17	96	93	2,76
3526	Bangkalan	63,32	63,48	82,84	82,87	5,16	5,30	632,41	636,44	64,51	65,01	464	464	1,42
3527	Sampang	63,00	63,49	66,03	67,56	3,95	4,20	632,47	636,12	59,70	60,78	478	478	2,67
3528	Pamekasan	63,99	64,39	80,84	81,82	6,11	6,32	625,49	629,18	64,60	65,48	462	460	2,48
3529	Sumenep	64,71	64,89	78,64	78,66	5,63	5,64	644,19	648,05	65,60	66,01	453	455	1,19
3571	Kota Kediri	70,41	70,64	97,53	97,56	10,20	10,21	643,35	648,01	76,28	76,79	52	52	2,12
3572	Kota Blitar	72,23	72,51	97,24	97,27	9,72	9,75	650,38	654,18	77,42	77,89	26	26	2,12
3573	Kota Malang	70,32	70,68	97,20	97,24	10,83	10,84	650,75	655,22	77,20	77,76	30	29	2,45

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
3574	Kota Probolinggo	70,17	70,52	92,49	92,51	8,52	8,53	650,48	654,52	74,33	74,85	104	104	2,02
3575	Kota Pasuruan	66,37	66,41	96,41	96,43	8,85	8,96	651,93	656,21	73,45	73,89	138	138	1,65
3576	Kota Mojokerto	71,56	71,78	97,12	97,13	9,97	9,98	648,01	652,47	77,02	77,50	34	34	2,07
3577	Kota Madiun	71,01	71,22	97,79	97,80	10,43	10,44	640,32	644,61	76,61	77,07	38	38	1,95
3578	Kota Surabaya	71,01	71,27	98,06	98,07	9,95	10,08	652,80	657,14	77,28	77,85	29	27	2,52
3579	Kota Batu	69,44	69,72	98,26	98,27	8,51	8,52	640,75	644,73	74,45	74,93	99	99	1,86
3600	BANTEN	64,90	65,05	96,20	96,25	8,32	8,41	629,70	633,64	70,48	70,95	23	23	1,56
3601	Pandeglang	63,77	63,95	96,35	96,37	6,47	6,81	626,73	628,41	68,29	68,77	393	393	1,54
3602	Lebak	63,28	63,35	94,60	94,82	6,24	6,25	629,44	632,21	67,67	67,98	411	420	0,95
3603	Tangerang	65,79	65,90	95,78	95,86	8,94	8,95	635,19	637,80	71,76	72,05	219	229	1,02
3604	Serang	63,51	63,88	95,23	95,72	7,05	7,25	631,19	633,72	68,67	69,33	377	367	2,09
3671	Kota Tangerang	68,37	68,41	98,39	98,41	9,98	10,04	643,18	645,90	75,17	75,44	79	83	1,12
3672	Kota Cilegon	68,58	68,62	98,72	98,73	9,67	9,68	645,43	648,88	75,29	75,60	75	77	1,23
3673	Kota Serang	65,13	65,47	96,47	96,89	7,51	8,01	636,77	639,17	70,61	71,45	286	263	2,86
3674	Kota Tangerang Selatan	68,54	68,65	98,15	98,19	10,15	10,70	643,75	645,78	75,38	76,01	72	70	2,56
5100	BALI	70,72	70,78	88,40	89,17	8,21	8,35	634,67	637,86	72,28	72,84	16	15	2,00
5101	Jembrana	71,80	71,88	89,82	90,69	7,80	7,81	632,03	635,24	72,69	73,18	175	176	1,80
5102	Tabanan	74,43	74,49	89,62	90,82	8,00	8,37	636,02	637,26	74,57	75,24	92	91	2,63
5103	Badung	71,80	71,85	92,92	92,96	9,38	9,45	638,13	641,27	75,02	75,35	84	89	1,32
5104	Gianyar	72,12	72,17	85,72	86,81	8,07	8,37	639,47	642,18	72,73	73,43	170	163	2,55
5105	Klungkung	69,10	69,15	82,09	82,39	7,11	7,35	652,50	655,28	70,54	71,02	294	297	1,65
5106	Bangli	71,64	71,73	83,80	85,64	6,63	6,66	636,02	639,00	70,71	71,42	279	264	2,41
5107	Karangasem	67,90	67,95	72,40	74,12	5,81	5,82	648,11	651,11	66,42	67,07	442	441	1,94

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
5108	Buleleng	69,15	69,34	88,46	88,63	7,29	7,36	634,02	637,03	70,69	71,12	280	286	1,46
5171	Kota Denpasar	73,01	73,06	97,33	97,49	10,65	10,70	642,36	645,85	77,94	78,31	15	15	1,69
5200	NUSA TENGGARA BARAT	62,11	62,41	81,05	83,24	6,77	6,97	639,89	642,80	65,20	66,23	32	32	2,97
5201	Lombok Barat	60,84	61,28	76,42	77,62	5,89	6,09	625,47	627,24	61,71	62,50	473	473	2,06
5202	Lombok Tengah	61,09	61,52	71,48	72,88	5,65	5,99	627,56	629,26	60,73	61,66	476	474	2,38
5203	Lombok Timur	60,75	61,32	80,02	82,89	6,33	6,61	624,06	625,27	62,68	63,93	471	468	3,36
5204	Sumbawa	60,72	60,82	89,78	90,85	7,21	7,35	631,70	634,41	66,07	66,67	446	445	1,78
5205	Dompu	61,05	61,16	83,69	86,35	7,32	7,71	638,52	641,82	65,51	66,70	454	444	3,45
5206	Bima	62,93	63,24	85,87	86,23	7,26	7,38	615,04	617,95	65,18	65,74	457	458	1,63
5207	Sumbawa Barat	61,28	61,45	90,75	91,47	7,23	7,52	629,89	631,73	66,47	67,08	440	440	1,81
5208	Lombok Utara	60,56	60,94	71,27	76,97	5,17	5,60	613,55	615,90	58,96	60,93	480	477	4,82
5271	Kota Mataram	66,64	67,13	91,82	91,85	9,21	9,22	645,13	648,01	72,32	72,83	196	195	1,84
5272	Kota Bima	62,98	63,10	93,74	93,77	9,39	9,71	615,28	618,42	68,56	69,10	383	378	1,73
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	67,50	67,76	88,59	88,74	6,99	7,05	603,75	607,31	67,26	67,75	31	31	1,50
5301	Sumba Barat	65,00	65,38	80,40	80,42	6,42	6,44	606,67	609,67	63,85	64,31	467	467	1,28
5302	Sumba Timur	61,94	62,13	83,20	84,45	6,11	6,26	597,05	599,77	61,80	62,50	472	472	1,84
5303	Kupang	65,45	65,69	89,02	89,23	6,85	7,44	602,43	604,41	66,00	66,77	447	443	2,27
5304	Timor Tengah Selatan	66,90	67,08	84,38	84,39	6,61	6,67	606,71	609,56	65,93	66,29	449	451	1,07
5305	Timor Tengah Utara	68,32	68,75	87,75	87,78	6,77	6,83	605,46	607,45	67,49	67,93	421	423	1,36
5306	Belu	66,00	66,35	83,07	83,08	6,33	6,34	599,00	601,69	64,34	64,75	465	465	1,14
5307	Alor	66,92	67,25	95,98	95,99	7,42	7,46	598,50	601,34	68,48	68,92	388	389	1,40
5308	Lembata	66,58	66,73	92,77	92,79	6,83	6,97	605,20	607,98	67,66	68,07	412	416	1,26
5309	Flores Timur	68,12	68,43	89,35	90,16	6,62	6,64	612,67	614,82	68,18	68,71	396	395	1,68

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
5310	Sikka	69,01	69,32	91,72	91,73	6,36	6,37	597,95	600,10	67,87	68,22	406	412	1,08
5311	Ende	64,82	65,05	93,52	93,96	7,38	7,39	603,27	606,31	67,11	67,58	429	429	1,43
5312	Ngada	67,16	67,31	95,49	96,23	7,26	7,62	612,31	614,40	69,45	70,13	344	340	2,21
5313	Manggarai	67,29	67,51	91,08	92,25	6,76	6,79	599,22	602,27	67,16	67,81	427	426	1,96
5314	Rote Nda	67,91	68,32	89,00	89,02	6,43	6,45	591,00	593,39	66,18	66,61	445	446	1,28
5315	Manggarai Barat	66,38	66,61	88,77	90,50	6,54	6,56	590,61	593,75	65,33	66,09	456	453	2,21
5316	Sumba Barat Daya	63,63	63,89	72,16	72,35	5,90	5,93	608,25	611,06	60,99	61,42	474	475	1,10
5317	Sumba Tengah	62,74	62,93	75,57	75,59	5,22	5,32	608,93	612,02	60,80	61,22	475	476	1,07
5318	Nageko	63,53	63,70	94,02	94,08	6,96	6,97	604,74	606,92	66,31	66,59	443	447	0,82
5319	Manggarai Timur	67,57	67,84	91,09	92,39	6,49	6,50	583,65	585,95	65,92	66,55	450	449	1,84
5320	Sabu Raijua	67,22	67,57	75,29	75,58	5,20	5,40	509,33	511,60	55,54	56,12	482	482	1,30
5371	Kota Kupang	72,63	73,04	98,52	98,54	11,06	11,07	629,51	631,56	77,31	77,71	28	31	1,75
6100	KALIMANTAN BARAT	66,60	66,75	90,26	90,51	6,82	6,89	631,65	635,85	69,15	69,66	28	28	1,65
6101	Sambas	61,27	61,48	90,55	91,55	5,94	6,20	623,02	627,35	64,93	65,80	459	456	2,46
6102	Bengkayang	68,84	68,97	88,71	88,72	6,32	6,50	604,11	606,88	67,55	67,98	418	421	1,31
6103	Landak	65,46	65,70	91,48	92,51	7,07	7,26	613,22	614,58	67,55	68,16	417	415	1,86
6104	Pontianak	67,24	67,30	89,91	89,94	6,53	6,56	625,72	629,01	68,75	69,07	374	382	1,01
6105	Sanggau	68,49	68,74	89,96	89,98	6,49	6,51	614,37	617,76	68,55	68,97	384	387	1,34
6106	Ketapang	67,45	67,66	90,20	91,36	6,30	6,42	614,43	617,92	67,89	68,63	404	397	2,30
6107	Sintang	68,32	68,53	90,46	90,54	6,59	6,65	609,98	613,68	68,31	68,77	392	394	1,45
6108	Kapuas Hulu	66,58	66,67	92,61	92,64	7,16	7,18	633,25	636,89	70,03	70,38	318	325	1,16
6109	Sekadau	67,34	67,37	89,17	90,15	6,32	6,34	606,31	609,84	66,99	67,52	430	430	1,59
6110	Melawai	67,76	67,82	92,37	92,40	7,22	7,25	607,26	610,77	68,67	69,01	376	385	1,07

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
6111	Kayong Utara	65,67	65,84	88,28	88,31	5,67	5,73	606,32	609,13	65,38	65,75	455	457	1,05
6112	Kubu Raya	66,30	66,37	88,25	88,30	6,57	6,68	621,30	626,22	67,56	68,06	416	417	1,55
6171	Kota Pontianak	67,22	67,40	94,97	95,02	9,36	9,45	638,64	642,47	72,96	73,43	160	164	1,74
6172	Kota Singkawang	67,21	67,34	89,66	89,69	7,40	7,44	619,65	622,81	68,86	69,21	365	375	1,13
6200	KALIMANTAN TENGAH	71,20	71,30	97,78	97,84	8,03	8,06	636,47	640,73	74,64	75,06	7	7	1,66
6201	Kotawaringin Barat	71,47	71,61	94,93	94,96	7,71	7,74	634,83	638,61	73,79	74,19	125	125	1,52
6202	Kotawaringin Timur	69,56	69,70	98,72	98,73	8,03	8,04	641,69	645,79	74,34	74,74	103	107	1,55
6203	Kapuas	70,78	70,90	97,19	97,21	7,32	7,34	634,51	638,56	73,60	74,00	132	134	1,53
6204	Barito Selatan	68,28	68,35	98,97	98,98	8,43	8,45	636,69	641,39	73,60	74,01	131	133	1,58
6205	Barito Utara	72,04	72,20	98,20	98,24	8,38	8,39	632,41	635,63	75,15	75,50	80	82	1,41
6206	Sukamara	67,85	67,92	95,57	95,59	7,09	7,18	641,43	645,77	71,98	72,42	208	214	1,56
6207	Lamandau	67,21	67,29	98,66	98,67	7,63	7,73	636,44	640,25	72,32	72,74	198	200	1,50
6208	Seruyan	67,99	68,04	99,31	99,32	7,76	7,77	630,75	635,21	72,55	72,93	184	189	1,38
6209	Katingan	67,50	67,60	99,47	99,48	7,99	8,35	632,80	637,39	72,65	73,32	179	168	2,48
6210	Pulang Pisau	67,56	67,65	94,32	96,23	7,31	7,65	639,16	640,75	71,53	72,37	227	216	2,98
6211	Gunung Mas	67,96	68,10	99,60	99,64	8,75	8,77	631,92	634,55	73,43	73,73	139	147	1,13
6212	Barito Timur	67,85	67,92	97,98	98,00	8,54	8,62	633,90	636,79	73,00	73,33	157	167	1,20
6213	Murung Raya	68,11	68,18	99,94	99,95	7,35	7,38	635,61	641,36	72,84	73,34	167	166	1,85
6271	Kota Palangka Raya	73,39	73,50	99,48	99,51	10,55	10,57	639,04	644,21	78,30	78,78	10	10	2,22
6300	KALIMANTAN SELATAN	63,81	64,17	95,94	96,14	7,65	7,68	637,46	640,73	69,92	70,44	26	26	1,71
6301	Tanah Laut	68,39	68,75	93,89	95,12	6,88	7,26	633,74	634,93	71,16	72,00	250	230	2,91
6302	Kota Baru	65,46	65,81	94,03	94,05	7,03	7,07	653,60	656,99	71,20	71,69	247	250	1,70
6303	Banjar	65,25	65,68	96,03	96,06	7,25	7,26	643,94	645,99	70,94	71,35	259	266	1,41

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
6304	Barito Kuala	61,86	62,31	93,03	94,15	7,07	7,15	634,53	637,93	67,54	68,36	419	406	2,52
6305	Tapin	67,22	67,48	95,70	95,72	7,12	7,15	627,15	630,54	70,58	71,00	289	298	1,45
6306	Hulu Sungai Selatan	63,95	64,32	96,77	96,80	7,35	7,36	648,81	650,70	70,83	71,20	265	278	1,27
6307	Hulu Sungai Tengah	65,28	65,65	97,42	97,43	7,44	7,47	635,57	638,16	70,77	71,19	274	282	1,46
6308	Hulu Sungai Utara	63,07	63,47	95,99	96,02	7,27	7,48	632,92	635,19	68,89	69,45	363	362	1,81
6309	Tabalong	63,08	63,36	96,01	96,47	8,14	8,15	638,85	641,15	70,00	70,45	319	318	1,48
6310	Tanah Bumbu	64,94	65,36	94,72	94,75	7,12	7,33	635,59	639,13	69,74	70,41	334	322	2,21
6311	Balangan	61,73	62,02	94,92	95,66	6,97	7,00	620,65	624,05	66,74	67,35	437	433	1,84
6371	Kota Banjarmasin	66,14	66,36	98,70	98,72	9,56	9,57	645,20	648,60	73,84	74,24	123	123	1,53
6372	Kota Banjar Baru	67,48	67,76	98,22	98,95	9,85	10,06	645,87	648,59	74,74	75,43	88	84	2,71
6400	KALIMANTAN TIMUR	71,20	71,40	97,05	97,21	8,87	9,19	642,51	646,01	75,56	76,22	5	5	2,68
6401	Pasir	73,09	73,44	96,00	96,70	7,85	8,08	629,93	632,84	74,66	75,40	90	87	2,93
6402	Kutai Barat	70,16	70,39	95,97	96,60	7,80	8,20	628,83	631,67	72,90	73,69	163	150	2,89
6403	Kutai	67,93	68,05	96,87	97,31	8,33	8,57	637,10	640,73	72,89	73,51	164	158	2,28
6404	Kutai Timur	68,61	68,82	97,28	98,25	7,86	8,15	624,58	628,24	72,05	72,88	206	191	2,96
6405	Berau	69,92	70,18	97,18	97,20	8,13	8,58	636,08	639,99	73,84	74,63	121	111	2,99
6406	Malinau	68,33	68,47	92,94	92,96	7,76	8,25	647,91	650,07	72,65	73,26	178	169	2,24
6407	Bulongan	72,90	73,11	95,56	95,61	8,11	8,15	635,92	639,50	75,11	75,54	81	79	1,74
6408	Nunukan	71,54	71,77	94,35	94,56	7,42	7,47	640,11	643,63	73,89	74,38	119	119	1,85
6409	Penajam Paser Utara	71,46	71,63	95,55	95,57	7,66	7,68	630,91	635,20	73,59	74,03	133	132	1,66
6410	Tana Tidung	72,64	72,70	89,05	89,08	7,10	7,24	618,43	622,47	71,42	71,87	232	233	1,58
6471	Kota Balikpapan	72,17	72,39	98,76	98,78	10,08	10,26	654,78	658,23	78,33	78,85	9	8	2,42
6472	Kota Samarinda	71,21	71,42	98,01	98,02	9,80	10,06	649,93	653,50	77,05	77,63	33	32	2,53

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
6473	Kota Tarakan	71,74	71,96	97,97	97,99	9,36	9,43	646,54	650,08	76,74	77,19	37	36	1,93
6474	Kota Bontang	72,42	72,60	99,20	99,21	10,04	10,38	633,43	636,97	76,88	77,52	35	33	2,75
7100	SULAWESI UTARA	72,22	72,33	99,45	99,46	8,89	8,92	634,88	639,57	76,09	76,54	2	2	1,86
7101	Bolaang Mongondow	71,58	71,70	98,29	98,31	7,39	7,41	617,02	622,05	72,99	73,47	158	161	1,75
7102	Minahasa	72,47	72,54	99,71	99,72	9,20	9,22	624,74	629,01	75,74	76,12	64	64	1,59
7103	Kep.Sangihe Talaud	73,01	73,19	98,70	98,73	7,71	7,73	636,09	640,88	75,58	76,07	68	67	2,00
7104	Kepulauan Talaud	71,89	72,12	99,53	99,56	8,75	8,78	628,16	632,03	75,30	75,76	74	75	1,86
7105	Minahasa Selatan	72,28	72,41	99,78	99,80	8,75	8,76	616,43	620,80	74,68	75,10	89	95	1,66
7106	Minahasa Utara	72,60	72,73	99,74	99,77	9,37	9,38	626,56	631,45	76,08	76,54	56	57	1,94
7107	Bolaang Mongondow Utara	69,91	70,06	98,39	98,42	7,31	7,42	624,89	628,48	72,63	73,08	181	185	1,64
7108	Minahasa Tenggara	70,03	70,10	99,48	99,51	8,39	8,40	611,42	615,70	72,71	73,09	172	184	1,39
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	68,62	68,71	99,76	99,77	8,45	8,47	627,98	632,24	73,30	73,70	145	149	1,48
7110	Bolaang Mongondow Selatan	71,29	71,34	98,32	98,33	6,29	6,50	595,40	599,68	70,36	70,87	300	302	1,73
7111	Bolaang Mongondow Timur	71,35	71,42	99,51	99,55	6,72	7,10	612,19	617,08	72,27	72,97	199	187	2,53
7171	Manado	72,64	72,70	99,86	99,91	10,60	10,83	639,30	643,59	78,02	78,57	14	14	2,49
7172	Kota Bitung	70,50	70,59	99,38	99,41	9,42	9,44	634,89	639,65	75,52	75,96	70	72	1,79
7173	Kota Tomohon	72,62	72,78	99,84	99,85	9,89	10,00	624,98	629,78	76,39	76,92	49	44	2,26
7174	Kota Kotamobago	71,80	71,96	99,62	99,65	9,12	9,14	627,95	632,84	75,53	76,03	69	69	2,02
7200	SULAWESI TENGAH	66,60	66,86	96,08	96,12	8,00	8,03	629,30	633,31	71,14	71,62	22	22	1,67
7201	Banggai Kepulauan	63,85	64,35	94,93	95,07	7,57	7,92	610,85	612,21	67,61	68,28	415	409	2,08
7202	Banggai	68,51	68,74	95,94	95,96	7,95	7,97	619,31	623,70	71,35	71,84	238	237	1,69
7203	Morowali	65,55	65,73	97,44	97,46	8,02	8,18	630,40	634,22	70,95	71,47	258	261	1,80
7204	Poso	64,96	65,20	97,90	97,94	8,76	8,78	617,50	621,11	70,28	70,71	305	308	1,46

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
7205	Donggala	65,27	65,64	94,66	94,69	7,52	7,54	630,10	634,07	69,78	70,32	329	331	1,77
7206	Toli-Toli	64,26	64,49	95,34	95,36	7,42	7,84	620,07	623,67	68,53	69,25	385	372	2,29
7207	Buol	65,38	65,62	98,64	98,67	8,25	8,27	610,82	615,15	69,79	70,27	328	335	1,61
7208	Parigi Moutong	65,16	65,47	93,93	93,96	7,12	7,16	624,45	627,58	68,83	69,28	368	370	1,43
7209	Tojo Una-Una	63,87	64,04	97,50	97,54	7,90	7,91	615,94	620,36	68,83	69,28	366	369	1,44
7210	Sigi	65,36	65,62	96,40	96,55	7,99	8,04	591,65	596,03	67,61	68,16	414	414	1,70
7271	Kodya Palu	69,99	70,26	99,25	99,31	10,97	10,98	635,57	640,03	76,40	76,92	48	45	2,18
7300	SULAWESI SELATAN	70,00	70,20	87,75	88,07	7,84	7,92	636,60	640,30	71,62	72,14	19	19	1,85
7301	Selayar	67,74	67,88	89,23	90,86	6,95	7,07	627,69	629,31	69,34	70,00	348	343	2,15
7302	Bulukumba	71,94	72,13	85,35	85,45	6,97	7,11	632,43	636,96	71,19	71,77	248	244	2,04
7303	Bantaeng	73,60	73,96	78,98	79,03	5,97	6,10	634,22	637,55	70,10	70,66	312	311	1,87
7304	Jeneponto	65,00	65,15	77,27	77,31	6,20	6,23	631,74	634,85	64,92	65,27	460	461	1,00
7305	Takalar	69,52	69,89	81,80	81,85	6,42	6,46	632,01	634,87	68,62	69,09	379	380	1,49
7306	Gowa	71,61	71,78	81,92	82,32	6,83	7,23	639,23	641,00	70,67	71,29	281	269	2,11
7307	Sinjai	71,99	72,24	86,45	86,59	6,74	7,07	609,50	612,34	69,53	70,16	342	338	2,09
7308	Maros	72,30	72,76	82,97	83,10	6,62	6,90	639,12	640,74	71,12	71,74	254	246	2,16
7309	Pangkajene Kepulauan	68,79	68,96	87,55	87,59	6,73	6,94	628,26	630,79	69,43	69,89	345	347	1,49
7310	Barru	68,85	69,05	89,23	89,25	7,61	7,62	632,98	635,74	70,86	71,19	264	281	1,16
7311	Bone	69,73	70,00	84,86	86,41	6,70	6,72	639,16	640,31	70,17	70,77	310	307	1,99
7312	Soppeng	71,63	71,74	86,67	86,71	7,25	7,28	637,16	640,46	71,89	72,23	216	222	1,22
7313	Wajo	70,94	71,37	83,53	84,97	6,22	6,51	639,49	640,11	70,22	71,04	307	295	2,75
7314	Sidenreng Rappang	72,50	72,81	89,63	89,77	7,25	7,27	628,61	630,64	72,37	72,74	195	199	1,36
7315	Pinrang	72,06	72,28	89,90	91,48	7,61	7,62	638,49	639,83	73,21	73,80	149	143	2,18

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
7316	Enrekang	74,99	75,19	90,44	90,49	8,30	8,32	626,63	628,53	74,55	74,84	93	105	1,14
7317	Luwu	73,70	74,04	91,48	91,63	7,74	7,80	630,71	633,08	73,98	74,42	117	118	1,71
7318	Tana Toraja	74,17	74,22	86,28	87,76	7,70	7,74	614,99	615,84	71,84	72,29	217	220	1,62
7322	Luwu Utara	71,56	71,68	92,36	92,86	7,46	7,49	650,85	653,06	74,32	74,69	105	109	1,44
7325	Luwu Timur	70,95	71,06	93,24	93,28	8,17	8,18	626,03	629,17	72,79	73,11	168	181	1,18
7326	Toraja Utara	73,54	73,58	83,80	83,83	7,22	7,67	601,89	604,71	69,56	70,15	341	339	1,92
7371	Kota Makasar	73,59	73,82	96,79	96,82	10,82	10,85	649,12	651,28	78,79	79,11	6	5	1,54
7372	Kota Pare Pare	74,27	74,49	97,16	97,17	9,63	9,76	641,55	644,04	77,78	78,19	19	17	1,86
7373	Kota Palopo	72,47	72,59	97,33	97,34	10,03	10,04	634,17	637,12	76,55	76,85	41	49	1,30
7400	SULAWESI TENGGARA	67,80	68,00	91,85	91,95	8,11	8,21	616,99	621,44	70,00	70,55	25	25	1,83
7401	Buton	68,58	68,93	86,57	86,60	6,72	6,93	624,45	626,92	68,80	69,34	371	364	1,75
7402	Muna	65,97	66,07	87,97	87,99	7,43	7,45	614,94	620,46	67,45	67,95	422	422	1,52
7403	Konawe/Kab Kendari	67,28	67,55	94,61	94,66	8,34	8,55	607,72	612,01	69,77	70,42	332	321	2,16
7404	Kolaka	67,13	67,38	93,25	93,27	7,90	8,08	630,68	635,29	70,83	71,46	267	262	2,17
7405	Konawe Selatan	67,63	67,78	94,12	94,13	7,63	7,65	608,83	612,53	69,42	69,80	346	348	1,26
7406	Bombana	67,71	67,91	89,28	89,31	6,82	7,12	601,24	605,24	67,20	67,85	425	425	1,97
7407	Wakatobi	68,07	68,18	89,86	90,37	6,89	7,59	596,29	598,19	67,20	68,04	424	418	2,56
7408	Kolaka Utara	65,55	65,69	93,07	93,58	7,55	7,57	621,28	623,79	68,93	69,33	361	366	1,30
7409	Buton Utara	68,28	68,60	87,02	88,25	8,02	8,03	603,44	607,64	68,07	68,86	399	392	2,46
7410	Konawe Utara	67,05	67,34	93,81	93,82	7,08	7,70	605,70	608,82	68,38	69,24	390	373	2,72
7471	Kota Kendari	69,09	69,17	98,60	98,63	11,25	11,37	631,54	635,17	75,66	76,07	66	66	1,71
7472	Kota Bau-Bau	70,39	70,69	95,58	95,60	9,84	9,87	616,11	621,67	73,48	74,10	136	130	2,34
7500	GORONTALO	66,81	67,11	96,00	96,10	7,38	7,45	622,92	626,77	70,28	70,82	24	24	1,80

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
7501	Boalemo	68,04	68,30	95,69	95,72	6,56	6,57	602,17	606,20	68,69	69,16	375	376	1,50
7502	Gorontalo	68,63	69,09	94,93	94,96	6,86	6,89	615,15	618,65	70,07	70,63	314	312	1,86
7503	Pokuwato	67,66	67,88	97,05	97,07	6,46	6,67	616,01	619,97	69,77	70,36	331	326	1,96
7504	Bone Bolango	68,56	68,90	97,41	97,44	7,78	7,85	620,89	624,35	71,71	72,22	222	223	1,80
7505	Gorontalo Utara	66,65	67,01	93,84	94,38	6,47	6,50	619,92	622,75	68,81	69,37	370	363	1,79
7571	Kota Gorontalo	66,80	66,98	99,43	99,45	9,85	10,09	625,75	629,71	73,08	73,67	155	151	2,20
7600	SULAWESI BARAT	67,80	68,00	88,48	88,54	7,11	7,15	631,76	635,84	69,64	70,11	27	27	1,55
7601	Majene	65,38	65,70	94,72	94,75	8,40	8,44	640,82	644,81	71,34	71,86	240	235	1,82
7602	Polewali Mamasa	64,99	65,26	85,92	85,94	6,95	6,96	631,64	635,99	67,38	67,88	423	424	1,54
7603	Mamasa	71,19	71,31	86,12	87,61	6,95	7,15	630,95	634,34	70,82	71,62	268	254	2,76
7604	Mamuju	68,51	68,76	89,18	89,23	7,00	7,01	621,51	625,54	69,32	69,78	349	349	1,52
7605	Mamuju Utara	67,55	67,59	95,57	95,59	7,19	7,22	616,92	621,70	69,99	70,41	321	323	1,39
8100	MALUKU	67,40	67,60	98,14	98,15	8,76	8,82	614,01	617,75	71,42	71,87	20	21	1,58
8101	Maluku Tenggara Barat	64,28	64,42	99,63	99,64	8,93	8,96	596,95	600,82	68,83	69,23	367	374	1,28
8102	Maluku Tenggara	67,99	68,19	99,54	99,58	8,75	8,77	619,17	622,65	72,45	72,85	191	192	1,46
8103	Maluku Tengah	65,75	65,89	99,09	99,10	8,85	8,86	615,09	618,96	70,86	71,25	263	275	1,33
8104	Buru	68,05	68,49	92,84	92,85	7,43	7,44	610,63	612,41	69,36	69,75	347	350	1,29
8105	Kepulauan Aru	67,73	67,94	99,05	99,06	7,56	7,59	603,24	604,60	70,09	70,33	313	329	0,83
8106	Seram Bagian Barat	66,56	66,68	98,28	98,29	8,29	8,41	601,01	604,56	69,64	70,07	337	342	1,42
8107	Seram Bagian Timur	65,86	66,07	98,14	98,16	7,83	7,86	590,83	594,63	68,09	68,53	397	401	1,38
8108	Maluku Barat Daya	64,14	64,35	98,13	98,25	8,01	8,02	582,17	585,23	66,60	66,99	438	442	1,17
8109	Buru Selatan	67,35	67,58	89,74	89,78	6,64	6,67	624,79	627,19	68,78	69,13	372	377	1,09
8171	Kota Ambon	73,01	73,16	99,59	99,61	11,18	11,22	638,83	642,52	78,56	78,97	7	7	1,90

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
8172	Kota Tual	68,70	69,04	99,70	99,71	9,46	9,86	659,39	660,79	76,51	77,10	44	37	2,53
8200	MALUKU UTARA	66,01	66,31	96,08	96,19	8,63	8,66	600,20	603,20	69,03	69,47	30	30	1,44
8201	Halmahera Barat	64,38	64,61	95,71	95,76	7,84	7,87	594,09	597,10	66,99	67,38	431	431	1,19
8202	Halmahera Tengah	66,58	66,98	96,79	96,81	8,24	8,25	599,03	602,13	69,13	69,60	356	358	1,52
8203	Kepulauan Sula	65,00	65,36	97,38	97,40	7,99	8,00	596,01	599,15	67,96	68,42	402	403	1,42
8204	Halmahera Selatan	65,47	65,69	95,83	95,85	7,48	7,69	602,30	605,35	67,98	68,50	400	402	1,62
8205	Halmahera Utara	65,87	66,19	95,98	96,87	7,38	7,79	599,81	602,54	67,98	68,87	401	391	2,78
8206	Halmahera Timur	65,32	65,65	95,72	95,74	7,83	7,84	599,26	601,83	67,90	68,30	403	408	1,24
8207	Pulau Morotai	65,23	65,55	93,89	93,91	6,15	6,25	578,62	581,45	64,61	65,09	461	462	1,35
8271	Kota Ternate	70,47	70,86	98,95	99,11	10,82	10,83	636,83	639,43	76,58	77,05	40	39	1,99
8272	Kota Tidore Kepulauan	65,06	65,25	97,62	97,67	8,75	8,79	609,10	611,76	69,62	69,97	340	345	1,16
9100	PAPUA BARAT	68,51	68,81	93,19	93,39	8,21	8,26	596,08	599,28	69,15	69,65	29	29	1,62
9101	Fak-Fak	70,52	70,88	97,46	98,13	9,27	9,37	589,06	592,30	71,46	72,13	230	226	2,35
9102	Kaimana	69,65	69,88	95,50	96,91	7,55	7,63	600,31	601,27	70,13	70,71	311	309	1,92
9103	Teluk Wondama	67,51	67,76	84,05	84,18	6,61	6,69	601,00	601,97	65,76	66,06	451	454	0,88
9104	Teluk Bintuni	68,21	68,54	85,90	87,05	6,90	6,91	598,46	600,33	66,58	67,17	439	437	1,76
9105	Manokwari	68,00	68,29	87,79	88,77	8,37	8,43	588,30	589,12	67,19	67,67	426	428	1,46
9106	Sorong Selatan	66,66	66,82	88,32	88,43	7,98	8,06	588,85	590,23	66,31	66,59	444	448	0,82
9107	Sorong	67,85	68,22	91,69	91,76	8,06	8,09	598,18	600,62	68,50	68,93	387	388	1,36
9108	Raja Ampat	66,17	66,50	93,62	94,13	7,35	7,43	560,70	562,22	64,58	65,06	463	463	1,34
9109	Tambrau	66,15	66,31	77,15	77,33	5,74	5,78	441,15	443,07	50,51	50,81	485	486	0,61
9110	Maybrat	66,33	66,62	90,73	90,87	7,78	8,00	582,12	583,20	66,00	66,43	448	450	1,28
9171	Kota Sorong	71,95	72,36	99,13	99,14	10,59	10,68	635,48	638,70	77,18	77,72	31	30	2,37

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010-2011
9400	PAPUA	68,60	68,85	75,60	75,81	6,66	6,69	606,38	609,18	64,94	65,36	33	33	1,19
9401	Merauke	62,76	62,88	87,99	88,22	9,33	9,35	597,46	601,71	65,73	66,19	452	452	1,36
9402	Jayawijaya	66,42	66,63	52,52	52,76	4,82	4,84	593,50	595,72	56,24	56,60	481	481	0,82
9403	Jayapura	67,32	67,53	96,65	96,89	9,54	9,56	622,12	626,25	72,25	72,75	200	198	1,82
9404	Nabire	67,55	67,80	83,59	83,66	6,55	6,78	616,41	618,79	66,81	67,33	436	434	1,54
9408	Yapen Waropen	68,04	68,55	88,82	89,11	6,58	6,63	634,83	636,30	69,69	70,19	335	337	1,65
9409	Biak Namfor	66,48	66,75	98,27	98,67	9,55	9,58	593,50	595,16	69,95	70,33	323	330	1,27
9410	Paniai	67,70	68,00	62,93	62,94	6,21	6,22	588,34	590,27	59,90	60,22	477	479	0,80
9411	Puncak Jaya	67,62	67,70	86,81	86,82	6,11	6,12	629,72	629,82	68,27	68,34	394	407	0,21
9412	Mimika	70,20	70,53	87,96	88,19	6,79	6,87	611,86	615,71	69,09	69,68	358	354	1,91
9413	Boven Digoel	67,03	67,13	32,94	33,25	3,37	3,39	581,19	585,04	50,21	50,64	487	487	0,88
9414	Mappi	66,18	66,28	31,43	31,46	4,27	4,30	586,21	590,07	50,45	50,83	486	485	0,76
9415	Asmat	67,22	67,32	31,10	31,13	4,33	4,35	593,31	597,16	51,55	51,92	484	484	0,78
9416	Yahukimo	66,81	67,09	32,52	32,76	2,47	2,86	584,54	587,40	49,59	50,30	490	489	1,42
9417	Pegunungan Bintang	65,76	66,00	32,32	32,50	2,46	2,54	585,04	588,02	48,99	49,45	492	491	0,90
9418	Tolikara	65,95	66,09	33,20	33,44	3,35	3,38	611,64	615,39	52,00	52,43	483	483	0,91
9419	Sarmi	66,35	66,46	87,55	87,67	6,44	6,55	614,89	616,74	66,84	67,15	435	438	0,94
9420	Keerom	67,10	67,31	92,15	92,38	7,36	7,39	618,86	621,33	69,26	69,64	353	356	1,25
9426	Waropen	65,53	65,86	77,11	77,26	6,33	6,37	605,71	608,26	63,27	63,71	468	471	1,21
9427	Supiori	65,96	66,23	96,19	96,68	8,03	8,08	598,60	600,65	68,46	68,92	389	390	1,45
9428	Membramo Raya	66,06	66,20	65,04	65,36	5,17	5,20	597,45	601,40	59,39	59,86	479	480	1,16
9429	Nduga	65,65	65,83	30,53	30,54	2,79	2,80	575,39	579,24	48,02	48,43	497	497	0,79
9430	Lanny Jaya	66,29	66,49	36,72	36,91	3,70	3,72	568,59	570,21	49,90	50,20	489	490	0,60

Kode	Provinsi	Indeks Harapan Hidup		Angka Buta Huruf		Rerata Usia Sekolah		Rerata Pengeluaran Per Kapita		IPM		Rangking IPM		Pengurangan Kekurangan
		(tahun)		(persen)		(tahun)		(dalam ribuan rupiah)						
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
9431	Mamberamo Tengah	66,27	66,44	34,34	34,52	2,90	2,91	570,95	573,80	48,96	49,32	493	493	0,71
9432	Yalimo	66,35	66,56	33,30	33,51	2,74	2,75	569,66	571,90	48,55	48,90	495	495	0,67
9433	Puncak	67,44	67,64	32,11	32,13	2,80	2,82	570,40	573,36	49,00	49,35	491	492	0,69
9434	Dogiyai	67,09	67,27	34,02	34,23	3,87	3,89	570,51	574,37	50,03	50,49	488	488	0,92
9435	Intan Jaya	66,80	66,83	27,39	27,78	2,07	2,10	588,12	590,70	48,42	48,74	496	496	0,64
9436	Deiyai	66,59	66,62	28,45	30,12	2,50	2,79	584,45	586,30	48,57	49,31	494	494	1,45
9471	Kota Jayapura	68,46	68,61	99,58	99,83	11,00	11,03	636,93	641,78	75,76	76,29	62	62	2,19
0000	Indonesia	69,43	69,65	92,91	92,99	7,92	7,94	633,64	638,05	72,27	72,77			1,79

Lampiran 7. Biaya Unit Lengkap Untuk Pendidikan Tahun 2003 – 2011²⁷

Jenjang Satuan Pendidikan SD

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean
Biaya pendaftaran(uang pangkal/gedung/daftar ulang)(Rp/tahun)harga konstan tahun 2011	24,592	104,930	210,446	96,128	231,496	15,469	32,904
Biaya SPP/Komite/POMGP3 (Rp/tahun),harga konstan tahun 2011	68,878	17,686	187,924	88,264	246,456	8,779	111,383
Biaya praktikum/ketrampilan (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	2,484	1,936	7,926	1,680	5,092	528	4,161
Biaya iuran lainnya (seperti OSIS) (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	2,354	556	4,094	1,324	2,732	42	4,570
Biaya evaluasi/ujian (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	5,384	1,848	9,724	2,132	5,872	11,485	7,113
Biaya bahan penunjang matapelajaran (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	9,114	11,338	21,522	7,882	14,840	30,052	73,246
Biaya seragam sekolah dan olahraga (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	67,492	76,636	102,314	214,030	254,814	257,160	288,144
Biaya buku pelajaran/panduan/diktat (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	48,894	61,734	128,208	27,754	75,714	80,852	150,469

²⁷ Sumber Data : 2003 – 2009 Data Susenas. 2011 ACDP 006 "Free Basic education"

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	
Biaya alat tulis dan perlengkapan lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	43,676	47,556	67,696	38,576	46,946	180,502	211,682
Biaya transportasi (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	29,396	27,650	99,308	164,592	177,214	348,347	498,364
Biaya kursus yang diselenggarakan sekolah (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	5,340	5,374	26,976	5,450	21,276	3,290	4,871
Biaya lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	58,822	61,566	56,956	7,768	13,506	12,127	35,007
	366,426	418,810	923,094	655,580	1,095,958	948,633	1,421,914

Jenjang Satuan Pendidikan MI

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	
Biaya pendaftaran(uang pangkal/gedung/daftar ulang)(Rp/tahun)harga konstan tahun 2011	13,496	154,974	125,514	87,556	71,688	26,030	59,539
Biaya SPP/Komite/POMGP3 (Rp/tahun),harga konstan tahun 2011	66,964	24,198	47,644	101,518	143,820	22,764	137
Biaya praktikum/ketrampilan (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	1,174	2,078	1,726	1,126	1,934	1,038	1,042
Biaya iuran lainnya (seperti OSIS) (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	2,194	1,534	664	1,418	1,266	-	12,901

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean
Biaya evaluasi/ujian (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	7,732	2,188	4,010	2,246	4,452	6,667	50,905
Biaya bahan penunjang matapelajaran (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	5,378	16,670	13,156	9,026	9,760	46,041	28,935
Biaya seragam sekolah dan olahraga (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	64,812	85,090	72,844	228,782	224,634	300,787	219,453
Biaya buku pelajaran/panduan/diktat (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	39,060	58,388	58,744	25,002	35,458	103,722	83,987
Biaya alat tulis dan perlengkapan lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	41,456	41,042	41,808	32,568	32,354	172,948	122,590
Biaya transportasi (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	15,634	39,624	23,360	162,674	163,212	399,868	259,866
Biaya kursus yang diselenggarakan sekolah (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	1,326	4,322	3,876	4,612	4,682	1,695	9,468
Biaya lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	80,320	77,738	86,702	8,574	11,860	67,693	23,369
	339,546	507,846	480,048	665,102	705,120	1,149,253	872,192

Jenjang Satuan Pendidikan SMP

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean
Biaya pendaftaran(uang pangkal/gedung/daftar ulang)(Rp/tahun)harga konstan tahun 2011	107,616	227,806	391,756	187,038	297,322	165,888	174,043
Biaya SPP/Komite/POMGP3 (Rp/tahun),harga konstan tahun 2011	209,948	80,876	303,194	165,398	325,572	135,366	327,231
Biaya praktikum/ketrampilan (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	9,218	8,682	14,830	4,552	8,690	4,194	6,880
Biaya iuran lainnya (seperti OSIS) (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	12,036	5,522	12,898	4,316	9,150	12,818	23,920
Biaya evaluasi/ujian (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	12,470	5,704	25,278	4,092	12,630	9,533	30,915
Biaya bahan penunjang matapelajaran (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	20,458	24,910	35,362	15,246	20,492	72,577	60,588
Biaya seragam sekolah dan olahraga (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	115,298	118,730	131,372	272,044	278,328	257,030	283,536
Biaya buku pelajaran/panduan/diktat (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	93,492	109,674	170,024	48,030	94,022	125,747	107,832
Biaya alat tulis dan perlengkapan lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	69,144	72,164	85,968	50,998	55,868	186,477	160,997
Biaya transportasi (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	179,796	158,532	183,098	259,356	255,302	266,535	150,682
Biaya kursus yang diselenggarakan sekolah (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	13,912	17,150	30,580	10,974	21,148	403	17,683
Biaya lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	99,672	101,480	105,572	13,656	19,216	86,602	97,171
	943,060	931,230	1,489,932	1,035,700	1,397,740	1,323,170	1,441,478

Jenjang Satuan Pendidikan MTs

Komponen Biaya	Tahun						
	2003	2006		2009		2011	
	Status Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan		Status Satuan Pendidikan	
	N+S Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean	Negeri Mean	Swasta Mean
Biaya pendaftaran(uang pangkal/gedung/daftar ulang)(Rp/tahun)harga konstan tahun 2011	74,464	174,628	171,728	173,996	107,672	261,472	81,933
Biaya SPP/Komite/POMGP3 (Rp/tahun),harga konstan tahun 2011	165,792	48,836	90,912	165,136	193,768	123,224	125,112
Biaya praktikum/ketrampilan (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	5,152	5,944	5,566	3,324	4,272	368	6,364
Biaya iuran lainnya (seperti OSIS) (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	8,366	4,892	4,542	4,014	4,982	2,000	8,474
Biaya evaluasi/ujian (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	14,660	5,018	10,166	5,512	9,370	2,395	94,276
Biaya bahan penunjang matapelajaran (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	14,216	15,812	19,414	13,922	13,376	39,347	34,717
Biaya seragam sekolah dan olahraga (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	115,962	105,410	104,938	268,900	275,928	350,227	246,128
Biaya buku pelajaran/panduan/diktat (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	65,552	76,596	80,698	40,484	42,646	162,275	73,110
Biaya alat tulis dan perlengkapan lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	58,782	57,378	59,244	47,196	43,444	164,399	126,227
Biaya transportasi (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	113,254	134,366	85,922	259,122	276,396	211,010	100,385
Biaya kursus yang diselenggarakan sekolah (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	5,774	9,814	7,720	7,384	6,712	8,333	16,802
Biaya lainnya (Rp/tahun), harga konstan tahun 2011	103,860	91,478	90,502	15,122	17,848	104,429	32,833
	745,834	730,172	731,352	1,004,112	996,414	1,429,479	946,361

Daftar Pustaka

- Bantuan Siswa Miskin: Cash Transfers for Poor Students (Social Assistance Program and Public Expenditure Review 5). World Bank, February 2012
- Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomik Indonesia". Badan Pusat Statistik (BPS), February 2012.
- Berita Resmi Statistik, No. 47/07, Th. XVI". Badan Pusat Statistik (BPS), July 2013.
- Conditional Cash Transfer Schemes for Alleviating Human Poverty: Relevance for India". United Nations Development Programme (UNDP), India, 2009.
- Evaluating The Performance Of SGP And SIGP: A Review Of The Existing Literature And Beyond". Paper No. 2004-3. Cristóbal Ridao-Cano and Deon Filmer, World Bank, May 2004
- Financing Education In Indonesia". Asian Development Bank (ADB), 1998
- Framework Of Monitoring And Evaluation Activity Bantuan Siswa Miskin Program". TNP2K. February, 2013
- Kumpulan Tanya-Jawab Program Program Penanggulangan Kemiskinan". Power Point. TNP2K. December 2012
- Mekanisme Implementasi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Dan Program Percepatan Dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Sekretariat Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). June 2013
- Pakistan: Child Support Program (CSP) (<http://www.friendsmania.net/forum/pakistan-free-scholarships-programs/10214.htm>)
- Republic of the Philippines: Conditional Cash Transfer Program (Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)) (http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Conditional_Cash_Transfer_Program)
- Towards More Transparent Financial Management: Scholarships And Grants Programmes In Indonesia". Stephen Baines. UNESCO, 2005

Aneks 1. Risalah Kebijakan BSM

PENDAHULUAN

Survey ACDP 038 dilakukan pada bulan Oktober 2013 dalam rangka untuk memberikan masukan dalam menentukan keberlangsungan kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di masa mendatang terutama dalam hal menyasar para penerima BSM serta menetapkan jumlah dana yang ideal yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan program. Disamping mengumpulkan dan menganalisis informasi yang secara langsung berkaitan dengan kedua komponen program tersebut, maka survei juga mengumpulkan data dan informasi pelengkap yang berkaitan dengan dampak program terhadap - angka partisipasi, putus sekolah, serta melanjutkan- ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Survei tersebut juga mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan bagaimana program BSM dijalankan; akan tetapi, hal ini bukan menjadi tujuan utama survei.

Risalah kebijakan ini diawali dengan mengidentifikasi beberapa isu strategis utama – pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab – yang dimaksudkan untuk membantu mengklarifikasi dan memprioritaskan tujuan serta tujuan akhir program BSM di masa mendatang. Identifikasi isu-isu strategis ini kemudian diikuti oleh opsi-opsi kebijakan yang didasarkan pada analisis terhadap data survei.

ISU-ISU STRATEGIS

BSM sebagai suatu program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) bertujuan untuk memberikan uang tunai kepada siswa miskin dalam upaya untuk menjaga agar murid tetap bersekolah, meningkatkan angka partisipasi serta angka melanjutkan, serta meringankan beban keuangan yang dirasakan oleh keluarga miskin untuk membayar keperluan pendidikan. Program yang berlangsung saat ini telah berlaku sejak tahun 2010. Mulai bulan Juli tahun 2013 jumlah penerima BSM telah menjadi dua kali lipat dan jumlah uang tunai bantuannya pun meningkat. Peningkatan subsidi uang tunai ini dimaksudkan untuk mengkompensasi peningkatan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan sebagai akibat naiknya harga barang maupun jasa akibat naiknya harga BBM yang mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2013. Dalam rangka merencanakan keberlanjutan program BSM di masa mendatang, maka beberapa keputusan strategis berikut ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

- 1) Apakah program yang telah dikembangkan ini menjadi tindakan sementara untuk membantu keluarga miskin dan hampir miskin untuk menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga yang begitu tajam, atukah ini merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) di bawah program penanggulangan kemiskinan yang akan berlanjut terus di masa mendatang? Jawabannya dapat mengakibatkan dampak yang serius terhadap penentuan anggaran belanja negara.
- 2) Apakah BSM merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan – yaitu dengan memberikan uang tunai yang digunakan untuk membantu menutupi kebutuhan pendidikan, sehingga rumah tangga dapat menggunakan uangnya untuk keperluan lainnya? Atukah program ini merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk para siswa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mereka dapat terus melanjutkan ataupun kembali ke sekolah. Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana program ini dikelola dan dijalankan. (Program BTB biasanya mencakup kedua tujuan tersebut; akan tetapi untuk keputusan strategis tertentu, kedua tujuan tersebut harus diprioritaskan).
- 3) Tujuan akhir dari program BSM adalah untuk memberikan bantuan berupa dana tunai kepada keluarga miskin dan hampir miskin²⁸ dengan cara membagikan uang tunai secara langsung kepada anak-anak untuk membantu menutupi pengeluaran pendidikan, sehingga pendapatan keluarga dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang diperkirakan naik setelah dikurangnya subsidi BBM pada bulan Juli tahun 2013. Dengan mengasumsikan berlanjutnya anggaran untuk BSM maka keputusan strategis berikut

²⁸ Kebijakan yang berlaku saat ini memberikan BTB kepada keluarga yang hampir miskin, disamping kepada keluarga yang sangat miskin.

harus diambil: apakah merupakan tindakan yang lebih baik untuk membagikan uang tunai yang jumlahnya relatif kecil kepada sebanyak-banyaknya keluarga, ataukah sebaiknya uang tersebut tetap difokuskan kepada pencapaian sasaran pendidikan nasional, seperti misalnya program wajib belajar (dan juga kemungkinan diterapkannya belajar universal 12 tahun di masa mendatang), yang akan berdampak pada lebih sedikitnya jumlah keluarga yang menerima BSM?

- 4) Sejumlah wilayah (di provinsi dan kabupaten/ kota) telah menetapkan kebijakan belajar universal 12 tahun. Terdapat banyak bukti bahwa hal ini mungkin dijadikan kebijakan nasional dalam waktu dekat. Dengan mempertimbangkan bahwa pencapaian tujuan ini merupakan usaha jangka panjang (pada saat ini angka partisipasi SMP hanya sekitar 78%) dan juga mempertimbangkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan di jenjang atas (dibandingkan dengan pendidikan dasar ada program BOS), apakah seharusnya tujuan utama BSM adalah untuk membantu mengatasi kebutuhan kebijakan semacam ini?

BEBERAPA OPSI KEBIJAKAN

1. Mengurangi jumlah BSM pada jenjang pendidikan dasar (SD/ MI) dan meningkatkan jumlah BSM untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK

Dampak BSM dirasakan paling minimal pada jenjang pendidikan dasar. Kecuali di daerah-daerah miskin dan terpencil serta di beberapa daerah perkotaan, anak-anak akan tetap bersekolah di SD/MI dengan atau tanpa adanya BSM. Tingkat partisipasi nasional berkisar di angka 95%. (Penyebab rendahnya angka partisipasi SD di beberapa daerah sebagian disebabkan oleh faktor-faktor non-finansial, seperti misalnya kasus di Papua dimana sekolah tidak beroperasi selama tiga bulan meskipun sebagian siswanya menerima BSM). Tingkat partisipasi nasional untuk jenjang SMP/ MTs adalah 78%. Sekitar 240.000 orang siswa putus sekolah dari SMA/ MA/ SMK setiap tahunnya.

Suatu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah untuk membatasi BSM hanya untuk 5% siswa di jenjang dasar yang tidak bersekolah dan untuk anak yatim dan piatu, serta jumlah dana bantuannya dialihkan kepada sebanyak 22% dari siswa di jenjang SMP yang tidak bersekolah dan untuk 240.000 orang siswa SMP/MTs yang tidak melanjutkan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membebaskan sejumlah uang yang digunakan bagi keperluan untuk meningkatkan jumlah dana tunai yang dibutuhkan di jenjang pendidikan menengah. Misalnya, beberapa SMK mensyaratkan siswanya membayar Rp 1 juta untuk mengikuti ujian akhir. Terdapat banyak kasus dimana anak perempuan menikah sebelum menyelesaikan sekolahnya, sebagian besar karena alasan keuangan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah dana BSM untuk siswa di tingkat menengah dapat mengurangi angka pernikahan dini.

2. Menerapkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah

Jika kuota BSM pada jenjang pendidikan dasar dialihkan ke jenjang menengah untuk meningkatkan partisipasi, maka isu seragam sekolah harus diatasi. Data lapangan mengindikasikan bahwa 51% dari penggunaan dana BSM di jenjang dasar adalah untuk pembelian seragam, karena di sebagian besar daerah sekolah mewajibkan empat hingga enam jenis seragam. Dalam upaya mempertahankan angka partisipasi saat ini tanpa adanya BSM, maka kebijakan mengenai seragam perlu diubah untuk membatasi jumlah jenis seragam hingga hanya satu atau dua saja. Hal yang sama juga berlaku untuk jenjang menengah pertama dan atas. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli berbagai macam seragam menjadi salah satu biaya pendidikan yang paling besar dan tidak memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Jumlah jenis seragam yang dibutuhkan pada jenjang menengah juga perlu dikurangi.

3. Meningkatkan ketepatan identifikasi tingkat kemiskinan para penerima BSM

Data survei menunjukkan bahwa dari latar belakang sosial-ekonomi para orangtua, tampaknya para penerima BSM selama ini tidak sepenuhnya efektif. Untuk tujuan survei, maka populasi sampel dibagi menjadi beberapa kuintil yang didasarkan pada pengeluaran bulanan keluarga. Keluarga yang pengeluaran bulannya di bawah Rp 500.000/bulan diklasifikasikan sebagai keluarga "miskin", sementara mereka yang pengeluaran bulannya berkisar antara Rp 500.001 – Rp 1.000.000 diklasifikasikan sebagai "hampir miskin".

Data survei menunjukkan bahwa sedikit di atas 50% responden survei dari keluarga "miskin" dan "hampir miskin" menerima BSM; jadi hanya mencapai sekitar satu setengah dari keseluruhan sasaran BSM. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa hampir 25% dari para penerima BSM adalah siswa dari keluarga yang miskin ataupun hampir miskin (yaitu keluarga yang pengeluarannya di atas Rp 1 juta per bulan).

Data survei ini dengan jelas mengindikasikan bahwa BSM telah diberikan kepada keluarga miskin dan non-miskin dan bahwa banyak dari keluarga yang paling miskin sekalipun tidak menerima BSM. Kenyataan ini telah menjadi sumber ketegangan sosial di beberapa tempat, dan jika situasi semacam ini terus berlanjut, maka ketegangan sosial dapat menjadi lebih buruk di masa mendatang karena baik Kemendikbud maupun Kemenag tidak memiliki kuasa yang jelas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, maupun sekolah yang dapat benar-benar mencapai warga miskin.

Karena para pihak berwenang di Kemendikbud maupun Kemenag serta di sekolah/ madrasah belum efektif menentukan sasaran program BSM, maka suatu opsi kebijakan yang dapat mengatasi kenyataan ini adalah dengan memberikan data TNP2K KPS/BSM kepada setiap kepala desa. Data TNP2K seharusnya kemudian diverifikasi di tingkat desa oleh komite khusus yang terdiri dari para kepala sekolah, anggota komite sekolah, serta kepala desa maupun sekretaris desa.

Orang-orang maupun keluarga yang terdaftar pada basis data TNP2K dan ternyata tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai warga miskin kemudian tidak diperbolehkan untuk mengajukan diri menerima BSM. Mereka yang ternyata miskin akan tetapi tidak termasuk di dalam basis data TNP2K harus diberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Lalu diperbolehkan untuk menggunakan SKTM-nya sebagai dasar untuk mengajukan diri sebagai penerima BSM. Nama-nama tersebut kemudian dikirimkan kepada TNP2K melalui sistem proposal BSM, melalui Kemendikbud dan Kemenag.

4. Memadukan BSM dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Seluruh responden menyatakan bahwa jumlah uang pada BSM harus ditingkatkan, akan tetapi terdapat beragam pendapat mengenai berapa angka idealnya. Isu kebijakan yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah sejauh mana BSM seharusnya menutupi beban biaya keperluan untuk bersekolah. Jumlah dana yang diberikan dalam satu paket BSM saat ini, yang telah mengalami peningkatan secara signifikan pada awal tahun 2013 menunjukkan bahwa BSM menutupi sekitar 69% -72% biaya-biaya pendidikan dasar di sekolah negeri dan 56%-64% di madrasah negeri, sementara itu menutupi biaya pendidikan di sekolah swasta sekitar 46%-66% dan 74%-100% di madrasah swasta. Analisis dari data survei tersebut menunjukkan bahwa dana

BSM saat ini dapat dinaikkan untuk mereka yang sangat miskin, terutama bagi sekitar 5% dari anak usia SD dan 22% anak usia SMP yang saat ini tidak terdaftar di sekolah.

Untuk dapat menjangkau anak-anak yang mengalami kendala geografis, sosial, dan ekonomi, BSM dapat dipadukan dengan strategi penanggulangan kemiskinan dengan mempromosikan program-program peningkatan pendapatan melalui saluran-saluran yang selaras, seperti misalnya Paket A untuk jenjang SD, Paket B untuk jenjang SMP, dan Paket C untuk jenjang SMA.

5. Mengumumkan para penerima BSM sebelum tahun ajaran baru dimulai

Para siswa tidak mengetahui apakah mereka akan menerima BSM, hingga mereka terdaftar di sekolah. Hal ini dapat berakibat fatal, terutama bagi para siswa yang akan melanjutkan. Misalnya, seorang siswa dari suatu keluarga yang sangat miskin yang telah lulus dari SD mungkin bahkan tidak mendaftar di SMP karena biayanya yang mahal. Akan tetapi, jika siswa tersebut mengetahui bahwa ia akan menerima BSM di SMP, maka besar kemungkinannya bagi siswa tersebut untuk melanjutkan ke SMP. Hal ini tampaknya menjadi alasan bagi dikeluarkannya kebijakan TNP2K saat ini, yaitu memberikan BSM kepada para siswa di kelas 1 dan kelas 7, dalam upaya meningkatkan angka melanjutkan.

Suatu opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah untuk mengeluarkan peraturan bagi tim verifikasi kemiskinan di tingkat desa (Opsi Kebijakan 1, di atas) untuk mencantumkan nama-nama siswa yang akan menerima BSM pada tahun ajaran berikutnya pada semester kedua. Pengaturan waktu ini memastikan agar siswa mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan BSM pada tahun ajaran berikutnya, dimana hal ini akan memungkinkan dilakukannya pencairan dana BSM pada awal tahun ajaran, yaitu tepat di saat dana tersebut sangat dibutuhkan.

6. Memastikan bahwa dana BSM dicairkan pada awal setiap semester

Pencairan dana BSM yang terlambat dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap program BSM sendiri. Karena siswa membutuhkan uang pada awal tahun ajaran untuk membeli seragam sekolah, perlengkapan, membayar transportasi serta pada beberapa kasus membayar iuran sekolah dan iuran lainnya. Terdapat beberapa kasus dimana dilaporkan bahwa siswa ditegur ataupun dipermalukan karena mereka belum membayar iuran yang menjadi kewajibannya karena BSM terlambat dicairkan. Beberapa kasus juga dilaporkan dimana BSM didistribusikan pada bulan Mei, sementara tahun ajaran dimulai pada bulan Juli tahun sebelumnya.

Kebijakan di atas, untuk memilih para penerima BSM sebelum dimulainya tahun ajaran baru memungkinkan BSM untuk dicairkan tepat pada waktunya.

7. Menyesuaikan jumlah dana BSM dengan perbedaan di tingkat regional

"Satu jumlah tidak cukup untuk semua". Studi tersebut menemukan bahwa terdapat keberagaman yang tinggi dalam hal biaya hidup, dan oleh karenanya biaya untuk bersekolah di seluruh pelosok negeri pun berbeda, seperti yang diindikasikan oleh berbagai rangkaian data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa orang responden merekomendasikan kebijakan yang menyesuaikan jumlah dana BSM dengan tingkat biaya hidup di masing-masing wilayah. Tampaknya hal ini akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien daripada memberikan jumlah dana yang sama di semua tempat.

8. Merevisi Mekanisme Pencairan Dana BSM

Telah diterima keluhan hampir di seluruh wilayah penerima BSM mengenai prosedur pencairannya. Praktek yang berjalan saat ini dimana pencairan dilakukan melalui bank dirasakan bermasalah, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari bank. Persyaratan administratif dirasakan sulit untuk dipenuhi oleh beberapa pihak. Ada harus beberapa kali ke bank untuk dapat memenuhi syarat administratif tersebut. Siswa kerap diminta untuk menyimpan sejumlah uang untuk membuka rekening di bank, hal mana tentunya menjadi beban bagi keluarga miskin. Perjalanan menuju dan dari bank dirasakan mahal, baik dari segi uang maupun waktu (pada

suatu kasus di Papua, perjalanan menuju dan kembali dari bank harus dilakukan dengan menggunakan perahu yang secara total memakan waktu tiga hari, sekali jalan) dan terutama bagi para siswa SD, seorang perwakilan dari sekolah harus mendampingi.

Petunjuk Teknis (Juknis) BSM tahun 2013-2014 yang dikeluarkan secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Atas dengan jelas menyatakan bahwa dana BSM untuk siswa tidak boleh dipotong oleh pihak manapun. Akan tetapi, di banyak kasus terjadi pemotongan yang kemudian dilaporkan di dalam survei. Juknis tersebut juga menyatakan bahwa kepala sekolah dapat mengambil dana BSM untuk siswanya jika dirasa terlalu sulit bagi siswa untuk melakukan perjalanan menuju ke lembaga yang melakukan pencairan dana. Akan tetapi, tidak disebutkan di manapun di Juknis tentang bagaimana biaya transportasi akan diberikan bagi mereka yang mengambil dana BSM tersebut. Di sebagian daerah terpencil, biaya transportasi ini berjumlah cukup besar. Sebagian besar dari para pejabat Dinas Pendidikan serta kepala sekolah sangat merekomendasikan adanya dana untuk pengelolaan dan pelaksanaan, untuk dapat menutupi pengeluaran semacam itu.

Dua opsi kebijakan harus dipertimbangkan untuk memperbaiki mekanisme pendistribusian dana. Pertama, kembali ke sistem kantor pos yang dirasa tidak terlalu bermasalah dibandingkan dengan pencairan yang dilakukan melalui bank. Kedua, jika dana harus diambil dari bank oleh pejabat sekolah atas nama siswa, maka dana untuk transportasi harus khusus diadakan untuk sekolah/ madrasah. Pencairan dari pejabat sekolah langsung kepada siswa harus dimonitor, orangtua/ yang merawat siswa harus diberi tahu dan melakukan verifikasi tertulis bahwa siswa telah menerima utuh, serta perlu dibuat sanksi atas penyalahgunaan dana tersebut, dan diterapkan secara konsisten.

9. Meningkatkan dan memperluas sosialisasi program BSM

Sosialisasi program BSM dan KPS dirasakan sangat kurang. Beberapa responden survei, terutama para orangtua siswa dan kepala desa, tidak memahami bahwa KPS dapat digunakan untuk mengajukan diri menerima BSM. Sejumlah kepala sekolah juga merasa tidak jelas mengenai sebagian peraturannya. Misalnya, seorang kepala sekolah SMK bidang agribisnis tidak mengetahui bahwa Direktorat Pendidikan Kejuruan telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan/ teknis bahwa seluruh siswa SMK Agribisnis berhak mengajukan diri untuk menerima BSM. Mereka belum menerima petunjuk tersebut pada saat dilakukannya survei pada pertengahan bulan Oktober tahun 2013. Pada intinya, tidak ada responden yang mengetahui keberadaan Pusat Pengaduan BSM di Kantor Kemendikbud, maupun bagaimana cara mengajukan keluhan.

Pesan yang jelas dan mudah dipahami mengenai program BSM maupun KPS, termasuk prosedur pengajuan pengaduan, yang perlu dipahami oleh setiap siswa dan orangtuanya maupun walinya di negara ini. Dua opsi kebijakan untuk memperkuat dan memperluas sosialisasi juga dianjurkan. Pertama, membuat kontrak dengan suatu perusahaan humas untuk mensosialisasikan program-program tersebut melalui berbagai media. Kedua, Kemendikbud dan Kemenag dapat membuat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta kementerian lainnya yang berkaitan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan program BSM ini.

10. Mencegah orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan distribusi BSM ataupun melakukan seleksi terhadap penerima BSM

Terjadi beberapa kasus yang dilaporkan, dimana terjadi intervensi politik. Para politisi mengatakan bahwa mereka diberikan sejumlah dana BSM untuk didistribusikan. Dan juga terjadi kasus dimana siswa hanya diberikan setengah dari jumlah dana yang seharusnya mereka terima.

Suatu opsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BSM semacam itu adalah dengan mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengindikasikan bahwa hanya pihak komite desa sajalah yang memiliki wewenang untuk melakukan nominasi BSM berdasarkan verifikasi terhadap data kemiskinan.

11. Peranan yang lebih besar untuk pemerintah provinsi

Para pihak yang berwenang di tingkat provinsi yang dimintai pendapatnya dalam survei mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan di dalam proses, akan tetapi ingin membantu jika ada peraturan tentang peranan mereka dalam pelaksanaan program BSM. Misalnya, suatu kabupaten di wilayah Kalimantan tidak dapat memenuhi kuota BSM. Jika saja pemerintah provinsi diberikan peran untuk berkoordinasi, maka mereka dapat melakukan distribusi langsung terhadap kuota, menurut kuota dan permintaan yang ada. Pemerintah provinsi juga dapat memantau penetapan sasaran, memvalidasi data kemiskinan, serta dalam pelaksanaan program itu sendiri.

12. Membangun suatu mekanisme BSM di Kemenag

Kemenag memiliki suatu mekanisme yang kelihatannya rumit. BSM untuk madrasah negeri dikategorikan menjadi mata anggaran rutin (di bawah "Program"), sementara BSM untuk madrasah swasta muncul di bawah mata anggaran yang berbeda ("Bantuan"). Para responden survei merekomendasikan suatu opsi kebijakan dimana Kemenag dan Kemendikbud menggunakan mekanisme yang sama dalam hal penetapan sasaran, penganggaran, serta pemrograman BSM.

13. Menerapkan suatu pendekatan khusus untuk pengelolaan BSM di Papua

Suatu kebijakan BSM yang khusus perlu dibuat bagi wilayah Papua-Papua Barat. Dalam semangat RUU Otonomi Khusus, maka distribusi BSM dapat dilakukan bagi semua siswa di pedesaan. Alasannya adalah karena mereka semuanya miskin dan komunitasnya masih tertinggal. Meskipun setelah lebih dari satu dekade penerapan otonomi khusus, kesenjangan sosial-ekonomi antara komunitas asli/adat Papua dengan para pendatang tidak semakin sempit. Kemiskinan, angka pengangguran, serta buruknya prasarana di daerah pedesaan menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi tidaklah signifikan. Di daerah perkotaan, BSM dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria terseleksi tertentu, sesuai dengan kriteria yang ada.

14. Memperkuat peranan Mekanisme Penanganan Keluhan di tingkat Nasional, Provinsi, serta Kabupaten

Suatu pusat penanganan keluhan yang canggih telah dibangun di Kemendikbud Jakarta. Pusat ini telah menerbitkan berbagai selebaran yang menjelaskan bagaimana suatu keluhan dapat dilaporkan/dicatat. Data survei mengindikasikan sedikitnya penggunaan mekanisme pengarsipan keluhan. Hanya sekitar 12% kepala sekolah/madrasah saja yang mengindikasikan adanya suatu mekanisme untuk mencatat keluhan, akan tetapi sebagian besar hanya terjadi di tingkat lokal. Mulai awal bulan Oktober 2013, Pusat Keluhan Nasional Kemendikbud belum menerima keluhan sama sekali, meski terdapat beberapa kasus permintaan penjelasan mengenai program BSM. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai bagaimana menangani keluhan belum signifikan, atau, pengelolaan BSM memang sudah dianggap berjalan dengan baik.

Aneks 2. Studi Kasus

DAFTAR STUDI KASUS

Wilayah Sumatera

Wilayah Jawa-Bali

Wilayah Kalimantan

Wilayah Sulawesi

Wilayah Nusa Tenggara–Maluku

Wilayah Papua

1. Wilayah Jawa Bali

1.1 Latar Belakang

Data dan informasi yang digunakan dalam studi kasus ini dikumpulkan dari enam wilayah: Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Kendal dan Magelang, Jawa Tengah; Kabupaten Nganjuk dan Kota Blitar, Jawa Timur; dan Kabupaten Tabanan, Bali.

Jawa dan Bali merupakan dua pulau terpadat di Indonesia. Meskipun keduanya mencakup area yang kurang dari 7% dari seluruh negeri, mereka memiliki 60% dari penduduk Indonesia (142.700.000 -Sensus 2010²⁹) dengan 54,72% dari penduduk di bawah garis kemiskinan tinggal di Pulau Jawa (14,36 jutadari total 28 juta³⁰).Ada perbedaan yang besar dalam pencapaian pendidikan di enam provinsi Jawa dan Provinsi Bali. Jakarta dan Yogyakarta, keduanya telah mencapai 97% pendidikan dasar umum dua belas tahun sejak Tahun 2011, sedangkan Bali akan mencapainya pada tahun depan (2014), Jawa Timur pada Tahun 2018 dan Jawa Tengah pada Tahun 2019. Sisanya, dua provinsi Jawa Barat dan Banten akan mencapainya pada tahun 2020³¹.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendidikan, dan juga setelah diumumkannya kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013, Pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa empat program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah mempertahankan kesejahteraan mereka, salah satunya adalah program BSM. Untuk tahun ajaran 2013-2014, sekitar 60% dari penerima manfaat BSM telah dialokasikan untuk wilayah Jawa dan Bali. Sekitar 42% dari total penerima manfaat telah dialokasikan untuk tiga provinsi terbesar di Jawa dalam hal populasi (Jawa Barat: 2.447.719: Jawa Timur: 2.391.083, dan Jawa Tengah: 2.155.151).

Gambar 8. Penerima BSM dari Madrasah MI NU 45 Trimulyo, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah



²⁹ BPS 2010

³⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/627052/warga-miskin-tembus-2807-juta-di-maret-terbanyak-ada-di-jawa>

³¹ Data Kemendikbud, 2012

1.2 Temuan

Penentuan Sasaran

1. Fokus kepada SD/Madrasah. Pemangku kebijakan di Kabupaten Magelang, Serang dan Nganjuk mengatakan bahwa siswa dari SMP/MTS dan SMA/MA hanya merupakan persentase yang sangat kecil dari seluruh siswa yang menerima BSM. Di salah satu kabupaten di tahun ajaran 2012/2013 hanya sekitar 1.500 siswa SMP dan SMA yang diusulkan untuk mendapatkan program BSM, namun hanya 5% dari mereka mendapatkan BSM. Hal ini memberikan kesan bahwa BSM hanya difokuskan pada siswa SD (SD/MI).

Gambar 9. Ruang kelas dari satu Madrasah Dasar Swasta, MIS Daar El-Muflihin, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten



2. Perbedaan pandangan dalam menentukan target. Responden umum dari kantor-kantor pemerintahan dan juga sekolah mengatakan bahwa murid-murid tersebut benar ditargetkan untuk mendapatkan BSM karena mereka memiliki bukti kemiskinan berupa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Tanda Miskin (KTM). Namun, murid, orang tua dan kepala desa yang menjadi responden terus pandangan bahwa meskipun beberapa penerima BSM memenuhi kriteria kemiskinan, masih banyak siswa miskin yang tidak menjadi target. Selanjutnya, menurut mereka, banyak murid yang memiliki sertifikat kemiskinan tidak benar-benar miskin dan tidak layak untuk menerima BSM.
3. Fluktuasi status keuangan dalam keluarga menyebabkan ketidakakuratan dalam menggunakan KPS untuk penargetan BSM. Menurut para pemangku kepentingan di Blitar, Kendal, Nganjuk, dan Serang, KPS hanya didistribusikan sekali, dan menurut beberapa responden, daftar penerima manfaat tersebut belumlah diperbarui. Dan karena fluktuasi status keuangan keluarga pada beberapa keluarga yang dinilai tidak miskin kemudian jatuh miskin, keluarga tersebut karenanya tidak memiliki KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Meskipun di beberapa tempat keluarga tersebut dapat menggunakan Kartu Tanda Miskin (KTM) untuk mengajukan permohonan BSM, hal ini tidak berlaku di tempat-tempat di mana hanya KPS yang merupakan sarana untuk memenuhi syarat mendapatkan BSM. Di sisi lain, beberapa keluarga yang menerima KPS mungkin sekarang tidak lagi miskin, tetapi karena mereka memiliki KPS, mereka menggunakannya untuk mendapatkan BSM meskipun mereka tidak lagi membutuhkan.

Gambar 10.Orangtua Murid dari PMI NU 45 Trimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah



Penerima BSM

1. Penerbitan sertifikat kemiskinan keluarga yang tidak memenuhi syarat telah mencegah siswa sebenarnya layak untuk menerima BSM, menjadi tidak mendapatkan BSM. Beberapa kepala desa menyatakan bahwa Kartu Tanda Miskin (KTM) sering diberikan kepada keluarga tidak miskin sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mengajukan permohonan BSM. Hal ini terutama berlaku ketika para pemohon yang kenal dengan para perangkat desa. Meskipun "politik lokal" adalah alasan utama untuk terjadinya kejadian-kejadian ini, alasan lain adalah kenyataan bahwa kepala desa yang disurvei di wilayah ini belum menerima sosialisasi BSM atau KPS yang baik dan benar. *(Temuan ini juga terjadi di wilayah lain.)*

Gambar 11.Sebuah Madrasah yang sukses: MA Darul Muta'alimin,Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur



2. Kasus "double dipping". Sebuah kasus yang menarik dari murid penerima BSM ganda di kota Blitar (Jawa Timur). Beberapa murid yang tinggal dan pergi ke sekolah di Blitar menerima BSM khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (BSM - Daerah). Ada juga banyak murid yang bersekolah di Blitar yang tinggal di tempat lain.(Hal ini berlaku terutama bagi murid tingkat sekunder). Karena murid ini tidak tinggal di Blitar, maka mereka tidak dapat memperoleh sertifikat dari kemiskinan dari Pemerintah Kota Blitar.(Tidak diketahui apakah murid tersebut dapat memperoleh sertifikat dari tempat tinggal mereka atau tidak, dan Pemerintah Blitar dan pejabat sekolah yang akan menerima sertifikat tersebut). Karena jumlah murid yang relatif besardi Kota Blitar,maka kuota BSM nasional menjadi relatif besar. Karena murid yang tidak tinggal di Blitar tidak memiliki sertifikasi untuk mengajukan BSM,maka murid yang sudah menerima BSM dari Pemerintah Kota juga berlaku untuk mendapatkan BSM nasional.

3. Kasus penerima yang tidak memenuhi syarat. Pemangku Kepentingan di Kabupaten Boros, Provinsi Banten, melaporkan bahwa beberapa murid yang menerima BSM tidak ada dalam daftar yang diusulkan untuk BSM. Ia juga melaporkan bahwa beberapa anak di bawah usia lima tahun mendapat BSM. Insiden ini menghasilkan banyak protes oleh orang tua murid yang layak sehingga menyebabkan gangguan di sekolah.

Kecukupan Dana BSM

1. Kebutuhan yang berbeda pada berbagai tingkat pendidikan. Orang tua pada dasarnya sangat berterima kasih atas bantuan apa pun yang dapat didapatkan dari Pemerintah. Jumlah BSM saat ini untuk tingkat pendidikan dasar (kelas 1-9 (SD / MI / SMP / MTS)) sudah cukup karena pendidikan pada tingkat ini sudah bebas dari biaya. Namun, orang tua murid menengah atas (SMA / MA / SMK) meminta agar besaran BSM ditingkatkan.

Gambar 12. Kegiatan belajar aktif di ruang kelas Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah



2. "Berbagi kekayaan"-kurangnya kebutuhan keuangan untuk SD. Di beberapa sekolah terpencil di Kabupaten Magelang, Serang, dan Kendal, orang tua dan murid yang menerima BSM diketahui setuju untuk berbagi dana BSM dengan orang lain yang tidak mendapatkan BSM. Misalnya, dalam satu SD 28 murid diusulkan untuk menerima BSM, namun hanya 10 yang mendapatkan BSM. Dana dari 10 penerima kemudian dibagi di antara 24 murid yang pada awalnya diusulkan. Rupanya hal ini dilakukan sebagian untuk menenangkan orang tua yang berpikir bahwa hanya karena mereka terdaftar untuk BSM maka mereka secara otomatis akan mendapatkannya. Karena tidak ada keluhan dari penerima BSM ini dapat menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan di tingkat sekolah dasar bukanlah masalah besar bagi banyak keluarga miskin.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah yang paling banyak membutuhkan pendanaan. Pemangku Kepentingan di Kabupaten Magelang dan Tabanan menyatakan bahwa murid SMK membutuhkan bantuan keuangan yang paling besar karena mereka membayar uang sekolah yang cukup mahal (lebih dari Rp 200.000 per bulan dalam beberapa kasus). Selain itu, mereka diminta untuk membayar dalam jumlah substansial untuk ujian dan sertifikasi. Di SMK yang memiliki sertifikasi standar nasional, biaya untuk melakukan ujian dan menerima sertifikat kelulusan mungkin rata-rata adalah Rp. 1 juta.

4. Ketidakeimbangan dalam menggunakan KPS untuk penargetan penerima BSM. Di Kabupaten Blitar, Magelang, Tabanan, Serang, dan Kendal beberapa sekolah memiliki kesulitan dalam menggunakan KPS untuk menargetkan penerima BSM karena banyak keluarga miskin yang belum memiliki KPS sehingga mereka ditinggalkan ketika KPS digunakan oleh sekolah-sekolah dan dinas pendidikan Kabupaten sebagai kriteria utama untuk penerima nominasi.
5. Terbatasnya jumlah penerima manfaat. Dalam banyak kasus, keluarga yang memang miskin dan memenuhi syarat untuk BSM tidak menerimanya karena kuota yang diberikan ke Kabupaten atau sekolah/madrasah tidak cukup untuk menutupi semua mereka yang membutuhkan. Hal ini mencegah banyak murid untuk mampu melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya.

Dampak

1. Peningkatan kehadiran. Sekolah dapat lebih mengontrol kehadiran murid karena jika penerima BSM tidak hadir secara teratur, BSM mereka bisa dipotong.
2. Peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pejabat sekolah juga menyatakan bahwa karena murid miskin menerima BSM, mereka mampu membayar biaya sekolah mereka, biaya laboratorium, dll yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sekolah dengan cara yang lebih tepat waktu, tanpa BSM murid miskin cenderung selalu menunggakpembayaran biaya yang kemudian menempatkan beban pada operasi sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, BSM telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh sekolah.
3. Mengurangi perasaan rendah diri murid miskin. Menurut murid yang menerima BSM, rasa rendah diri untuk menghadiri sekolah telah berkurang karena tunggakan biaya sekolah telah dilunasi pada saat BSM dicairkan. Manfaat BSM untuk anak-anak miskin disamping untuk meningkatkan kinerja adalah adanya perubahan psikologis yang terjadi ketika "geng" dari murid non - miskin yang membuat anak merasa "minder" karena ketidakmampuan keuangan mereka, tidak lagi memperlakukan mereka demikian. Keseluruhan komunikasi antara miskin dan non - miskin meningkatkan karena BSM.

Gambar 13. Pengajaran dan belajar yang mengambil tempat di ruang kelas Sekolah Dasar di SDN Gantang 1, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah



4. Sikap orang tua miskin yang lebih baik terhadap pendidikan. Dengan BSM, orang tua dari anak-anak yang menerima BSM sekarang lebih cenderung untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat berikutnya pada pendidikan yang lebih tinggi. Sebelumnya mereka berpikir hanya orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena BSM membantu untuk menutupi biaya, buku, perlengkapan sekolah, dll; mereka sekarang dapat mengalokasikan dana keluarga yang sebelumnya digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut untuk kebutuhan penting lainnya seperti perbaikan gizi keluarga. Ada bukti di wilayah

Jawa-Bali yang dimana BSM-nya telah memiliki efek meningkatkan kehadiran di sekolah dan transisi ke tingkat sekolah yang lebih tinggi.

Pelajaran yang diambil

1. Pencairan BSM di tahap akhir ajaran dan peraturan dalam mencegah murid untuk mengklaim BSM dari mereka yang berhak. Murid miskin umumnya memerlukan dana pada awal semester atau awal tahun ajaran baru, namun pencairan dana BSM umumnya terlambat, yaitu, di masa lalu dana hanya dicairkan pada akhir tahun ajaran. Oleh karena itu, pembayaran biaya murid miskin' adalah tunggakan untuk sebagian besar tahun ajaran yang menempatkan beban pada sekolah/madrasah. Selain itu, kasus yang dilaporkan di Kabupaten Serang, Kendal, Magelang, Blitar, Nganjuk, dan Tabanan bahwa keterlambatan pencairan BSM untuk murid di kelas 9 dan 12 berarti bahwa mereka tidak pernah menerima dana karena mereka sudah lulus atau sekolah. Beberapa kasus yang ditemukan di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, di mana murid yang menerima BSM di kelas enam pada tahun ajaran sebelumnya dan yang tidak menerima dana sebelum akhir tahun sekolah dan yang kini telah memasuki SMP tidak bisa mengambil uang yang menjadi hak mereka karena kantor pos menyatakan bahwa mereka tidak bersekolah lagi. Karena dana tersebut tidak dicairkan, maka dana tersebut masih ada di kantor pos, dan sekolah kemudian menawarkan penggantian nama murid yang saat ini terdaftar dan memiliki keadaan ekonomi yang sama (miskin). Namun, nama-nama ini ditolak oleh kantor pos sehingga dana tersebut tidak pernah dicairkan. Ada kasus di Kabupaten Serang dimana murid yang diusulkan untuk menerima BSM pada tahun lalu masih belum menerima dana pada saat survei (Oktober 2013).
2. Penarikan dana BSM dari bank adalah beban sekolah. Banyak pejabat sekolah mengeluh bahwa murid penarikan dana BSM dari bank daerah telah mengganggu sekolah dan menempatkan beban keuangan pada sekolah karena sekarang harus ada seseorang dari sekolah yang menemani murid ke bank agar mereka dapat menarik dana tersebut. Selain membuang-buang waktu, dana tambahan untuk transportasi juga harus dikeluarkan. (Kasus ini dilaporkan di Serang, Kendal, Magelang, Blitar, Nganjuk dan Tabanan). Dalam kasus di Kalimantan Tengah, sekolah menolak untuk mengambil BSM karena sekolah ini terletak jauh dari bank dan sehingga biaya transportasi menjadi lebih dari nilai BSM.
3. Penarikan dana BSM dari bank lokal menciptakan masalah bagi murid dan sekolah. Beberapa murid mengalami kesulitan penarikan dana BSM dari bank lokal untuk sejumlah alasan. Di beberapa tempat, terutama di desa di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan beberapa tempat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, keluhan terkait dengan dana BSM yang harus disimpan di rekening bank murid yang bersangkutan. Namun, di tempat-tempat ini bank membutuhkan murid untuk melakukan deposit sebesar Rp. 50.000 untuk membuka rekening. Karena murid ini berasal dari keluarga miskin, membuat deposito tersebut sangat sulit bagi mereka. Oleh karena itu, sekolah/madrasah harus masuk dan memberika pinjaman untuk menjadi deposit ke murid yang menciptakan beban tambahan pada sekolah.
4. Siswa yang menyalahgunakan dana BSM. Muncul keprihatinan mengenai dampak negatif dari pemberian dana BSM secara langsung kepada murid karena beberapa murid telah menggunakan uang secara tidak benar. Uang yang seharusnya untuk membayar uang sekolah, membeli perlengkapan sekolah, dll, digunakan untuk membeli hal-hal yang bukan untuk sekolah seperti telepon genggam baru, game online, dll.
5. Hasil negatif memberikan dana BSM kepada orang tua, bukan langsung kepada siswa. Ada juga bisa berdampak negatif jika dana BSM diberikan kepada orang tua tanpa sekolah mendapat informasi. Kasus dilaporkan di Kota Blitar dimana orang tua menggunakan dana BSM untuk kebutuhan lain dengan hasilnya murid menjadi tidak memiliki uang untuk membayar untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk sekolah. Ketika orangtua berhadapan dengan

sekolah, orang tua berpendapat bahwa uang itu digunakan oleh murid untuk sekolah, tetapi dalam banyak kasus murid tidak tahu menahu tentang penggunaan dana.

6. Orang tua lebih memilih agar BSM disalurkan langsung kepada siswa. Dalam beberapa kasus pejabat sekolah, menawarkan kepada orang tua murid penerima BSM, pilihan untuk mencairkan dana: opsi pertama adalah untuk memberikan dana kepada orang tua dan pilihan kedua adalah dengan memberikan langsung kepada murid. Dalam kebanyakan kasus, orang tua memilih opsi yang kedua.
7. Kesulitan dalam memperoleh Kartu Tanda Miskin (SKTM / KTM). Beberapa murid dan orang tua di Kabupaten Tabanan, Bali dan Kabupaten Serang, Banten telah mengeluh bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Miskin (SKTM) dari aparat desa mereka diwajibkan untuk membayar biaya administrasi yang bervariasi dalam ukuran dari Rp.50, 000 - Rp.70,000 atau lebih tergantung pada desa.
8. Kelemahan Dinas Pendidikan dalam melakukan manajemen BSM. Beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Serang merasa bahwa Dinas Pendidikan tidak transparan dalam mensosialisasikan kuota BSM. Satu sekolah tidak menerima BSM tahun lalu. Beberapa pemangku kepentingan juga menyatakan bahwa dinas pendidikan membuat proses pengusulan penerima BSM sulit.
9. Kurangnya jelas petunjuk/pedoman/sosialisasi BSM menyebabkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan. Di Kabupaten Magelang di sekolah disampaikan nama-nama pemohon BSM dan dokumentasi kemiskinan mereka, yang dalam kasus Magelang adalah KPS keluarga, untuk Dinas Pendidikan Kecamatan (UPT) yang kemudian diteruskan daftar untuk Kantor Pendidikan tingkat Kabupaten. Untuk tahun ajaran 2013-2014 Dinas Pendidikan Kabupaten mendapatkan 33.504 nama untuk BSM pada bulan Agustus yang mana 8.000 nama telah disetujui/diverifikasi oleh Kemendikbud. Verifikasi dari 8.000 penerima disetujui oleh bank lokal yang berlangsung pada bulan September. Pencairan dari Rp. 425.000 dibuat pada akhir September awal Oktober. Namun, murid dan sekolah bingung karena mereka tidak tahu apakah penyaluran dilakukan per tahun atau per semester, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kecamatan tidak bisa menjelaskan situasi. Mereka bingung karena pada 2012-2013 ada dua pencairan - yang terakhir pada bulan Mei - Juli 2013, akhir tahun ajaran. Dengan demikian, pada saat survei (Oktober 2013) mereka masih tidak tahu apakah pada Juli 2013 pencairan tersebut adalah pembayaran terakhir untuk tahun ajaran 2012-2013 atau pencairan pertama untuk 2013-2014. Di Kabupaten Serang beberapa guru madrasah masih tidak mengerti mekanisme dimana BSM yang dikururkan dari Kemenag ke daerah untuk madrasah. Di Kabupaten Tabanan, Bali beberapa kepala masih bingung tentang program BSM karena mereka belum menerima pedoman resmi (juknis) BSM. Mereka menerima sosialisasi tahun lalu, tetapi mekanisme baru belum disosialisasikan.

Gambar 14. Sebuah ruang kelas Madrasah tingkat menengah di MA Ma'arif Borobudur, Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah



10. Administrasi dana BSM sekolah yang menyebabkan kurangnya pemahaman murid terkait program BSM. Rata-rata murid di Magelang pada tahun ajaran lalu tidak tahu bagaimana mekanisme dana BSM yang disalurkan, sehingga ketika mereka menerima dana karena pejabat sekolah menarik dana, terus uang tersebut kemudian disalurkan kepada murid untuk membayar biaya, dll, dan murid harus menandatangani setiap penarikan. Pada akhir tahun ajaran terdapat sisa dana, jika ada, dikembalikan kepada murid atau orang tua. Mayoritas responden orang tua di Magelang juga tidak sepenuhnya memahami tentang program BSM (surveyor menjelaskan program kepada mereka pada saat wawancara (Oktober 2013)). Meskipun mereka diminta untuk menandatangani pemberitahuan resmi (Berita Acara), mereka tidak mengetahui jumlah BSM yang anak-anak mereka terima atau bagaimana dana dicairkan. Untuk 2013-2014 masalah ini tidak ada karena murid harus mengambil dana BSM langsung dari bank itu sendiri.

1.3 Rangkuman dan Kesimpulan

Secara keseluruhan, para pemangku kepentingan di wilayah ini sepakat bahwa program BSM pada prinsipnya memiliki dampak positif bagi murid, orang tua dan pemangku kepentingan sekolah karena biaya untuk pendidikan dapat dikurangi. BSM memiliki respon yang sangat baik dari masyarakat karena BSM adalah seperti "sinar cahaya yang bersinar di tengah ekonomi dalam kehidupan yang serba sulit ini". Bahkan murid merasa lega dengan adanya BSM. Dengan BSM mereka tidak mengeluh lagi tentang biaya sekolah. BSM telah membantu murid untuk lebih menikmati sekolah, dan mereka lebih aktif di sekolah karena mereka tidak begitu khawatir tentang biaya sekolah mereka. Menurut para pemangku kepentingan, kelemahan utama dalam program ini adalah dalam sistem manajemen.

Penargetan. Sebagian besar pemangku kepentingan setuju bahwa BSM ini ditujukan bagi murid miskin. Banyak yang merasa bahwa program ini berfokus pada sekolah dasar/madrasah, sedangkan kebutuhan besar untuk pendanaan BSM adalah untuk tingkat sekolah yang lebih tinggi. Ada persepsi yang sangat berbeda pada hal kelayakan penargetan. Para pejabat Pemerintah dan sekolah percaya penargetan yang tepat, sedangkan kepala desa, orang tua dan murid percaya bahwa banyak murid non-miskin yang menerima BSM dan kuota untuk BSM tidak cukup untuk mencakup semua keluarga miskin yang memiliki anak di sekolah. Ada kasus yang juga dilaporkan murid penerima BSM tapi yang tidak diusulkan oleh sekolah/madrasah. Jadi, untuk sementara konsep yang disampaikan sudah sangat baik dan dengan banyak murid miskin yang dibantu untuk dapat bersekolah secara teratur, dan ada banyak daerah di mana sasaran BSM dapat ditingkatkan.

Kecukupan Jumlah. Banyak responden survei di wilayah Jawa-Bali merasa bahwa BSM untuk pendidikan dasar tidak terlalu penting dibandingkan dengan kebutuhan untuk pendidikan senior dan tersier karena pada tingkat pendidikan dasar sebagian besar sudah bebas dari biaya, sedangkan biaya untuk tingkat sekolah yang lebih tinggi adalah sangat mahal. Pandangan itu terungkap bahwa murid sekolah kejuruan (SMK) harus memiliki jumlah pendanaan tertinggi karena biayanya jauh lebih mahal daripada sekolah/madrasah tingkat atas biasa. Tampaknya ada ruang lingkup dalam wilayah Jawa - Bali untuk lebih menyesuaikan jumlah dana di antara berbagai tingkat pendidikan.

Dampak. Sekolah dapat lebih mengontrol kehadiran murid karena jika penerima BSM tidak hadir secara teratur, BSM mereka bisa dipotong. Pejabat sekolah juga menyatakan bahwa karena murid miskin menerima BSM, maka mereka mampu membayar biaya sekolah mereka, biaya laboratorium, dll yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sekolah dengan cara yang lebih tepat waktu yang membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk seluruh sekolah. Menurut murid yang menerima BSM, rasa rendah diri untuk menghadiri sekolah telah berkurang karena tunggakan biaya sekolah dapat dilunasi pada saat BSM dicairkan. Dengan BSM orang tua dari anak-anak yang menerima BSM lebih cenderung untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan berikutnya yang lebih tinggi.

Pelajaran. Model baru untuk menerapkan BSM yang mulai berlaku pada awal tahun ajaran 2013-2014 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model sebelumnya bahwa dana BSM harus diambil langsung oleh siswa. Mekanisme ini lebih transparan untuk orang tua dan murid karena mereka tahu persis jumlah dana yang mereka terima dari Pemerintah dan tahu kapan itu dicairkan. Namun, ada beberapa daerah yang perlu perbaikan di wilayah Jawa - Bali. Pertama, banyak dari komunitas sekolah bingung tentang model baru karena kurangnya pedoman untuk sekolah dan kurangnya sosialisasi bagi masyarakat sekolah dan dalam beberapa kasus kurangnya pemahaman penuh oleh pejabat Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk program tersebut. Kedua, pencairan melalui sistem perbankan lokal bermasalah di banyak daerah karena murid harus meninggalkan sekolah dan dalam beberapa kasus harus melakukan perjalanan jarak jauh ke bank menyalurkan yang mahal dalam hal waktu dan uang. Hal ini di samping fakta bahwa beberapa bank mengharuskan murid untuk membuat setoran awal untuk membuka rekening yang merupakan beban tambahan bagi masyarakat miskin. Ketiga, pencairan langsung kepada murid di beberapa hasil kasus rentan penyalahgunaan dana oleh murid, namun ini tampaknya hal tidak tersebar luas. Keempat, dalam kasus di mana Pemerintah Kabupaten memberikan nominasi untuk penerima BSM hanya pada keluarga yang memiliki KPS, banyak keluarga yang memenuhi syarat untuk berbagai alasan tapi tidak memiliki kartu. Dalam kasus di mana Kartu Tanda Miskin (SKTM / KTM) dapat digunakan untuk memverifikasi kelayakan, ada kasus penyalahgunaan dimana keluarga non-miskin dapat memperoleh sertifikat tersebut dan dalam beberapa kasus ada keluarga harus membayar biaya kepada Pemerintah desa untuk mendapatkan mereka.

2. Wilayah Kalimantan

2.1 Pendahuluan

Beberapa studi kasus dalam analisis rangkaian pengadaan data dan informasi yang diambil di beberapa tempat di seluruh wilayah masing-masing. Dalam rangka untuk menyajikan informasi dari perspektif yang berbeda, studi kasus ini berfokus pada salah satu dari tiga Kabupaten sampel untuk wilayah Kalimantan (Kabupaten Barito Kuala), dan selanjutnya memfokuskan satu sekolah kecil yang merupakan perwakilan dari berbagai sekolah di wilayah tersebut (SD Sungai Tunjang).

2.2 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki penduduk hanya 3.768.123 orang, dengan komposisi 1.906.921 laki-laki dan 1.862.302 perempuan³². Ekspor provinsi ini meningkat 26,5 % pada tahun 2010, peningkatan tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia, rata-rata nasional hanya 8-12,5 % per tahun. Pada kuartal pertama tahun 2011 saja, ekspor dari provinsi mencapai lebih dari 55 % dari target yang ditetapkan sebesar US \$ 7,3 miliar³³. Karena pembangunan ekonomi ini, Kalimantan Selatan telah secara signifikan mengurangi garis kemiskinan dari 7% pada tahun 2005 menjadi 4,77% pada tahun 2013³⁴. Provinsi ini mengalokasikan dukungan beasiswa kepada murid miskin dari anggaran provinsi. Pada 2011/2012, anggaran provinsi dialokasikan Rp.8.6 miliar untuk 303 beasiswa untuk SD - murid menengah atas. Hal ini di samping 48.078 beasiswa senilai Rp. 20 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah pusat.

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu dari tiga Kabupaten yang termasuk dalam survei di provinsi Kalimantan. Penduduk Kabupaten adalah 276.066 orang di antaranya 15.800 (5,72 %) hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Barito Kuala baru-baru ini telah menerima 16.111 KPS (yang berarti bahwa beberapa penerima KPS berada di atas garis kemiskinan). Dari jumlah ini 9.638 dari mereka telah menggunakan KPS mereka untuk menerapkan BSM beasiswa untuk anak-anak mereka. Distribusi aplikasi adalah : 7234 untuk SD / MI, 1.657 untuk SMP / MTs, dan 747 SMA / MA / SMK.

³² BPS data, 2011

³³ The Jakarta Post, 08/13/2011

³⁴ Data BPS. 2013

Gambar 15.Orang tua dari murid yang Memperoleh BSM dari Madrasah Menengah Atas XII MAN 5 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.Orangtua adalah Petani dengan Satu Tanaman/Tahun.Mereka juga bekerja pada pekerjaan paruh waktu.



2.3 Temuan

Penentuan Sasaran

1. Perubahan kebijakan BSM. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Kabupaten mengumumkan kebijakan yang sejalan dengan sistem BSM baru yang hanya murid yang keluarganya menerima KPS akan memenuhi syarat untuk diusulkan untuk BSM untuk tahun ajaran dimulai pada bulan Juli 2013. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman baru yang masih memungkinkan murid yang tidak memiliki KPS untuk mengajukan BSM jika mereka dapat menunjukkan kemiskinan. 16.111 keluarga menerima KPS di Kabupaten ini. Dari jumlah tersebut hanya 2.899 aplikasi yang diajukan untuk menggunakan KPS untuk BSM. Namun, penerima kuota BSM untuk 2013-2014 untuk Kabupaten ini adalah 14.921 (lihat tabel di bawah). Dihadapkan dengan perbedaan besar antara kuota BSM Kabupaten dan jumlah penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan memegang KPS, Dinas Pendidikan dapat menerima proposal dari kepala sekolah untuk memungkinkan juga para pemegang non KPS yang memiliki Kartu Tanda Miskin(SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa untuk dapat diusulkan menjadi penerima BSM dan mengubah kebijakan yang berlaku. Namun, rupanya perubahan kebijakan diumumkan untuk dekat dengan batas waktu untuk mengajukan proposal ke Kemendikbud dengan hasil bahwa 5.828 murid dari keluarga miskin dan hampir miskin tidak berpotensi menerima BSM tahun ini seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Kuota BSM dan Proposal 2013-2014 dari Kabupaten Barito Kuala

No.	Tingkatan	Kuota	Usulan		Total
			KPS	Non KPS	
1	SD	7.234	989	1.139	2,128
2	MI	2.036	12	1.800	1,812
3	SMP	1.657	405	951	1,356
4	MTs	1.760	65	1.528	1,593
5	SMA	718	23	695	718
6	SMK	431	-	431	431
7	MA	1.085	499	556	1,055
8	MAK	-	-	-	-
Total		14,921	1.993	7.100	9.093

Gambar 16. Penerima BSM dari MIN Anjir Muara Kota Tengah, Kabupaten Barito Kuala di Rumahnya



2. Pengurangan jumlah BSM di bawah sistem penargetan baru berdasarkan KPS. SD Sungai Tunjang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan hanya memiliki 72 murid di kelas 1-6. Dari 2010 -2012, setiap tahun setidaknya 20 murid di sekolah ini diberikan BSM. Namun, di bawah sistem penargetan baru, hanya 12 keluarga di desa Sungai Tunjang dari populasi 1.000 orang yang menerima KPS. Dari jumlah tersebut, sembilan murid diterapkan untuk BSM untuk 2013-2014. Selanjutnya, tak satu pun dari 20 murid yang menerima BSM di tahun terakhir dinominasikan untuk BSM untuk tahun sekolah saat ini. Penurunan jumlah penerima manfaat tersebut telah menyebabkan kisruh di desa tersebut. Berdasarkan mekanisme penargetan sebelumnya, kepala sekolah berkonsultasi dengan kepala desa untuk memperoleh Kartu Tanda Miskin (SKTM) sebagai dasar pencalonan penerima manfaat BSM. Ada komunikasi yang konstruktif antara sekolah dan kepala desa dalam mempersiapkan proposal BSM. Dalam sebuah komunitas kecil, seperti Sungai Tunjang, setiap orang sangat akrab satu sama lain. Komunikasi yang terus-menerus dan interaksi antara dan di antara anggota masyarakat

tersebut tampaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Namun, semangat tersebut telah memburuk karena beberapa alasan yang kepala sekolah tidak tahu atau memahami perubahan kebijakan yang dijelaskan di atas atau menerima informasi terlambat.

3. Ketidakakuratan data KPS. Kepala sekolah SDN Sungai Tunjang melaporkan keprihatinannya tentang ketidakakuratan data KPS. Menurut pengamatannya, 15-20% dari distribusi KPS adalah salah sasaran. Beberapa responden survei lain juga menyatakan keprihatinan dengan data yang digunakan untuk mengklasifikasikan keluarga miskin dan tidak miskin. Beberapa sumber percaya bahwa kriteria klasifikasi yang relatif karena, menurut para pemangku kepentingan ini, kriteria tersebut tidak memperhitungkan pertimbangan informasi seperti pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Akibatnya banyak keluarga miskin dikeluarkan dari KPS dan karena itu anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuk BSM. Ada rekomendasi untuk dibentuk gugus tugas khusus di tingkat desa yang terdiri dari wakil sekolah dan aparat desa yang akan bertanggung jawab untuk memverifikasi data kemiskinan dan kelayakan BSM.

Gambar 17. Hanya satu murid di Sekolah Dasar di MIN Anjir Muara Kota Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima BSM.



Kecukupan Dana BSM

1. Penggunaan dana BSM. Sebagian besar responden percaya bahwa dana tersebut digunakan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pedoman program tersebut. Dana tersebut digunakan terutama untuk membeli seragam, pakaian lain, membeli buku dan membayar biaya lain³⁵. Berdasarkan responden di Kalimantan Selatan, diperkirakan ada lima kategori biaya sekolah sebagai berikut: (1) seragam sekolah (35%), (2) buku (25%), (3) transportasi (20%), (4) alat tulis (notebook, kertas, pensil, dll) (10%), (5) uang saku, biaya lain-lain (10%).
2. Seragam sekolah yang berlebihan di Kalimantan Selatan. Murid di kelas 1 -12 diharuskan untuk membeli lima jenis seragam untuk sekolah:
 - i. Seragam Nasional
 - ii. Seragam Provinsi
 - iii. Seragam Olahraga
 - iv. Seragam Pramuka
 - v. Batik.

Sebagai tambahan, murid di kelas 7 – 12 juga harus membeli baju laboratorium.

³⁵ Berdasarkan Panduan BSM Kemendikbud untuk Tahun 2013-2014, hal-hal berikut ini adalah penggunaan BSM yang diperbolehkan: (1) suplai (buku, pensil, dll.), (2) baju dan kebutuhan lain seperti tas sekolah, (3) biaya transpor, (4) uang saku, (5) biaya kursus /special lessons (*les tambahan*). "Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN(BSM) APBNP TAHUN 2013". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013. Halaman 10.

- Perbedaan pendapat tentang jumlah BSM. Mayoritas responden menyatakan bahwa jumlah BSM harus ditingkatkan di seluruh tingkat. Misalnya, ada rekomendasi BSM untuk SD ditingkatkan menjadi Rp 1.200.000-Rp. 1.500.000 per tahun dari saat ini Rp. 450,000/tahun. Namun, kepala sekolah SDN Sungai Tunjang melaporkan bahwa ukuran BSM saat ini sudah cukup karena tidak ada biaya transportasi bagi murid untuk pergi ke sekolah. Sebagian besar dari mereka berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan sepeda. Biaya hidup di desa ini tidak terlalu tinggi. Misalnya, dengan Rp 2.000 murid dapat membeli seporasi nasi goreng dicampur dengan saus tomat dan telur goreng.

Gambar 18. Banyak murid menggunakan sepeda untuk menuju sekolah, SDN Sungai Tunjang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan



- Alasan untuk merekomendasikan kenaikan. Menurut responden, selain mencakup biaya untuk barang-barang biasa seperti yang tercantum di atas, ada biaya lain yang tidak dipertimbangkan dalam formula untuk menentukan BSM seperti membayar untuk penggunaan internet untuk menyelesaikan tugas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa orang tua bahwa selain meliputi biaya langsung untuk pendidikan keluarga juga perlu menggunakan dana BSM untuk pengeluaran lain seperti membayar tagihan listrik.

Dampak

- Peningkatan tingkat pendaftaran dan transisi. Kebanyakan pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala percaya bahwa BSM telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan mendukung hal ini dengan memberikan informasi berikut:

Tingkat Sekolah	Tahun Sekolah	
	2011-2012	2012-2013
Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,55 %	97,75%
Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)	85,78 %	89,91%
Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	56,84%	63,82%

Pejabat tersebut percaya bahwa dengan dukungan terus menerus dari program BSM, Kabupaten Barito Kuala dapat mencapai yang pendidikan universal 12 tahun sekolah. Di SDN Sungai Tunjang, tahun lalu, semua 14 murid lulusannya melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah pertama (SMP atau MTs).

Tren ini juga digambarkan oleh data yang diambil dari dua sekolah sampel. SDN Sungai Rasau memiliki 85 siswa. Tahun lalu total pendaftaran meningkat sebesar 12 murid baru sementara tahun ini (2013) pendaftaran meningkat menjadi 15 siswa. SDN Sungai Tunjang menerima 10 murid baru tahun lalu dan 14 murid baru pada tahun ajaran yang dimulai Juli 2013. Hal ini bisa disebabkan oleh kenyataan bahwa sekolah didekatnya baru-baru ini ditutup karena tingkat pendaftaran yang rendah. Populasi Desa Sungai Tunjang hanya sekitar 1.000 dan laju pertumbuhan penduduk sekitar atau di bawah 0%.

2. Peningkatan kehadiran. Menurut Kepala SDN Sungai Tunjang bahwa dampak kehadiran langsung dari BSM sudah sangat baik. Tingkat kehadiran murid sekitar 96%, atau dari 72 murid, hanya sekitar 3 murid absen sehari. Namun, data absensi sebelum BSM itu tidak tersedia, karena itu, perbandingan kuantitatif tidak dapat dibuat. Perlu dicatat bahwa kehadiran sejak Juli 2013 tetap hampir sama meskipun dana BSM belum dicairkan pada saat survei dan fakta bahwa jumlah penerima BSM untuk tahun ajaran saat ini telah berkurang lebih dari setengah (lihat di atas).

Gambar 19. Hanya Satu Murid Sekolah Menengah Pertama dari 40 murid di XII MAN 5 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima BSM



3. Tingkat putus sekolah tetap stabil. Angka putus sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah sekitar 0,4% (120 putus dari populasi sekolah dari 29.745). Alasan utama adalah bahwa anak-anak dituntut untuk bekerja untuk membantu mendukung keluarga.
4. Mengurangi dampak pencairan danadi akhir. Dana BSM sebagian besar dibutuhkan pada awal tahun ajaran pada saat keluarga harus pengeluaran jumlah yang signifikan untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, dan dalam kasus sekolah swasta membayar biaya yang diperlukan untuk operasi sekolah/madrasah. Pada saat survei (pertengahan Oktober 2013), lebih dari tiga bulan setelah awal tahun sekolah saat ini, hanya sedikit penerima manfaat telah menerima dana. Pencairan di Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini (pertengahan Oktober 2013) adalah sebagai berikut: 181 (2,5%) murid SD (SD / MI); 201 (12,1%) SMP (SMP / MTs); 23 (3,1%) SLTA (SMA / MA / SMK).

Pelajaran yang diambil

1. Pencairan dana BSM melalui madrasah menyebabkan kebencian. Sejumlah orang tua dan murid di Kabupaten Barito Kuala mengeluh bahwa praktek menyalurkan dana BSM melalui manajemen madrasah tidak adil dan beberapa menyatakan bahwa praktek itu ilegal. Para responden mengatakan bahwa setelah dikurangi biaya murid hanya menerima Rp. 70,000-150,000 untuk kebutuhan mereka yang lain. Dalam beberapa kasus madrasah setelah dikurangi biaya yang disediakan barang, bukan uang tunai. Barang tersebut termasuk sepatu dan seragam yang tidak sesuai dengan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengatakan bahwa ia akan menghapus atau mengganti kepala sekolah yang terlibat dalam praktek seperti di sekolah-sekolah di bawah kekuasaannya.
2. Kesulitan yang dihadapi oleh murid miskin, orang tua dan sekolah saat mengambil dana dari bank. Beberapa sekolah di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menolak untuk menarik dana BSM mereka dari bank lokal karena biaya transportasi untuk mencapai bank untuk menarik dana hampir lebih besar dari nilai BSM. Misalnya, transportasi pulang pergi dengan "ojek" dari Montalat atau Purukcahu desa ke Muara Teweh, ibu Kota Kabupaten di mana bank menyalurkan terletak, akan membutuhkan biaya Rp 400.000 untuk setiap siswa. Sementara, di tingkat SD / MI, nilai BSM adalah Rp 450.000 per tahun. Selain itu, sebagian dari Bank lokal di Kalimantan mengharuskan setiap murid untuk melakukan deposit minimal Rp 20.000 untuk membuka rekening yang manalagi keluarga miskin menjadi beban. Untuk beberapa murid penarikan dana dari bank membuang-buang waktu. Sebagai contoh, murid dari desa Kuripang di Kabupaten Barito Kuala harus melakukan perjalanan ke Marabahan, di mana bank yang menyalurkan mereka berada. Untuk sampai di sana, murid harus melakukan perjalanan dengan "kelotok" (perahu kecil dengan mesin) yang memakan waktu 6-8 jam mengakibatkan murid yang absen dari sekolah selama satu atau dua hari. Sebagaimana dilaporkan dalam semua daerah lain, bank memiliki prosedur administrasi yang ketat dan rumit yang mengakibatkan waktu terbuang dan sering biaya tambahan. Dalam kondisi seperti ini mekanisme pencairan BSM melalui kantor pos yang memiliki fasilitas yang lebih baik untuk menjangkau daerah-daerah terpencil mungkin solusi yang lebih baik. Kelemahan dari mekanisme ini adalah bahwa kantor pos mengharapkan untuk menerima kompensasi sebesar Rp 10.000 untuk setiap penerima BSM untuk layanan mereka. Untuk alasan ini banyak pejabat sekolah direkomendasikan suatu proses dimana dana dapat dikumpulkan oleh satu orang pada satu waktu.
3. Kebutuhan dana manajemen BSM. Beberapa kepala sekolah menyarankan agar sekolah/madrasah dialokasikan dana khusus untuk menutupi biaya transportasi untuk penarikan dana BSM, untuk biaya administrasi lainnya dan untuk verifikasi data dan biaya operasional³⁶.
4. Kurangnya sosialisasi yang tepat dari KPS/BSM sehingga telah dicabutnya beberapa keluarga miskin yang sebenarnya berhak menerima manfaat. Karena program KPS/BSM belum benar disosialisasikan, beberapa responden orang tua tidak tahu atau memahami bagaimana menggunakan KPS untuk mengajukan permohonan BSM untuk anak-anak mereka, dengan demikian, dalam beberapa kasus orang-orang yang akan memenuhi syarat untuk BSM tidak menyajikan kartu untuk pejabat sekolah dengan hasilnya anak-anak mereka tidak dimasukkan dalam daftar sekolah murid yang layak untuk BSM. Beberapa juga tidak mengerti bagaimana dana BSM dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah.
5. Kasus kecemburuan pada keluarga yang tidak menerima KPS. Di Kabupaten Barito Kuala tampaknya ada lebih banyak murid dari keluarga miskin yang tidak menerima KPS daripada mereka yang telah menerimanya. Hal ini mengakibatkan kecemburuan di antara mereka yang tidak diusulkan untuk BSM karena mereka tidak memiliki KPS.

³⁶ Merupakan bentuk formulir *Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)*.

2.4 Rangkuman dan Kesimpulan

Sebagian besar responden menyatakan bahwa program BSM sangat membantu bagi masyarakat miskin untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa BSM telah memiliki dampak positif dalam meningkatkan kehadiran, mengurangi putus sekolah, meningkatkan prestasi akademik siswa, dan peningkatan sikap positif orang tua terhadap pendidikan. Namun, karena model baru-baru ini telah dilaksanakan mereka belum memiliki cukup pengalaman untuk mengungkapkan apadampakn yang mereka pikirkan. Sebagian besar responden merasa harus ada peningkatan substansial dalam dana BSM, tapi penilaian cepat dalam satu desa kecil menunjukkan bahwa untuk tingkat SD jumlahnya cukup dan selanjutnya BSM tampaknya memiliki sedikit dampak atau tidak berdampak pada kehadiran di sekolah, angka putus sekolah dan tingkat transisi. Ada banyak keluhan tentang sistem penyaluran dana melalui bank, yang untuk sekolah yang terletak jauh dari bank harus mengeluarkan dana mahal untuk biaya perjalanan dan juga waktu yang dikonsumsi. Kebijakan Kabupaten Barito Kuala memungkinkan hanya pemegang KPS untuk mengajukan BSM harus diubah untuk memungkinkan penggunaan Kartu Tanda Miskin. Sebagai akibat dari kebijakan tingkat Kabupaten ini dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, jumlah murid yang diusulkan untuk BSM oleh Kabupaten adalah sekitar 50 % kurang dari kuota yang dialokasikan oleh Kemendikbud. Secara keseluruhan, banyak responden merasa frustrasi dengan mekanisme manajemen dan administrasi yang mereka rasa terlalu "birokratis". Mereka juga merasa bahwa manajemen pusat dari KPS tidak adil karena banyak keluarga miskin yang berhak mendapatkan kartu tidak menerimanya. Kebutuhan untuk tim khusus yang terdiri dari wakil sekolah dan aparat desa untuk memverifikasi data kemiskinan diungkapkan. Sosialisasi juga sangat kurang, dan begitu banyak orang tua, dan beberapa pejabat sekolah, yang tidak benar-benar tahu tentang atau memahami sistem baru.

Penargetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala mengumumkan kebijakan yang sejalan dengan sistem BSM baru yang hanya murid yang keluarganya menerima KPS akan memenuhi syarat untuk diusulkan untuk BSM untuk tahun ajaran dimulai pada bulan Juli 2013. Namun, dihadapkan dengan perbedaan besar antara kuota BSM Kabupaten dan jumlah penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan memegang KPS, Dinas Pendidikan mengubah kebijakannya juga memungkinkan pemegang non-KPS yang memiliki Kartu Tanda Miskin (SKTM) untuk mengajukan permohonan BSM. Namun, rupanya perubahan kebijakan diumumkan untuk dekat dengan batas waktu untuk mengajukan proposal ke Kemendikbud dengan hasil bahwa 5.828 murid dari keluarga miskin dan hampir miskin tidak diberi berpotensi menerima BSM tahun ini. Kebijakan-kebijakan ini memiliki efek negatif dalam satu sekolah sampel. SD Sungai Tunjang, dimana dari 2010 -2012, setiap tahun setidaknya 20 murid di sekolah ini diberikan BSM. Namun, di bawah sistem penargetan baru, hanya 12 keluarga di desa Sungai Tunjang dari populasi 1.000 orang yang diterima KPS. Dari jumlah tersebut, sembilan murid diterapkan untuk BSM untuk 2013-2014. Tak satu pun dari 20 murid yang menerima BSM di tahun terakhir dinominasikan untuk BSM untuk tahun sekolah saat ini. Penurunan jumlah penerima manfaat telah menyebabkan kisruh di desa. Kepala sekolah SDN Sungai Tunjang percaya bahwa sekitar 15-20 % dari distribusi KPS telah salah sasaran. Beberapa responden survei lain juga menyatakan keprihatinan dengan data yang digunakan untuk mengklasifikasikan keluarga miskin dan tidak miskin.

Gambar 20. SMKN 2 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sekolah menengah Kejuruan dengan Instalasi Listrik sebagai salah satu mata pelajaran. 30 murid menerima BSM dari sejumlah 165 yang mengajukan. Pada foto Praktikum, Ali adalah satu-satunya di kelas XII yang menerima BSM



Kecukupan BSM. Sebagian besar responden percaya bahwa dana tersebut digunakan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pedoman program tersebut. Dana tersebut digunakan terutama untuk lima kategori biaya pendidikan : seragam sekolah (35 %) ; buku (25 %) , transportasi (20 %) ; persediaan (buku catatan, kertas, pensil, dll)(10 %) , uang saku, biaya pendidikan dan lain-lain (10 %). (Namun, penggunaan BSM untuk membayar biaya sekolah berdasarkan pedoman Kemendikbud dipertanyakan dan fakta bahwa BOS ditujukan untuk meniadakan pembayaran). Di Kalimantan Selatan, orang tua memperkirakan BSM kemungkinan akan hanya mencakup 20-25 % dari total pengeluaran rumah tangga miskin. Mayoritas responden menyatakan bahwa jumlah BSM harus ditingkatkan di seluruh tingkatan. Misalnya, ada rekomendasi yang BSM untuk SD ditingkatkan menjadi Rp 1.200.000 - Rp. 1.500.000 per tahun dari saat ini Rp 450.000 per tahun. Menurut responden, selain mencakup biaya untuk barang-barang biasa seperti yang tercantum di atas, ada biaya lain yang tidak dipertimbangkan dalam formula untuk menentukan BSM seperti membayar untuk penggunaan internet untuk menyelesaikan tugas. Sebagian besar responden orang tua menyatakan bahwa selain meliputi biaya langsung untuk pendidikan, keluarga juga perlu menggunakan dana BSM untuk pengeluaran lain seperti membayar tagihan listrik. Namun, kepala sekolah SDN Sungai Tunjang melaporkan bahwa untuk ukuran saat ini BSM sudah cukup karena tidak ada biaya transportasi bagi murid untuk pergi ke sekolah. Sebagian besar dari mereka berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan sepeda. Biaya hidup di desa ini tidak terlalu tinggi.

Dampak. Kebanyakan pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala percaya bahwa BSM telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan kehadiran di sekolah. Kenaikan angka partisipasi untuk SMA (SMA/MA/SMK) dari 56,84% pada tahun 2011-2012 untuk 63,825 pada 2012-2013 ini disebabkan sebagian BSM. Menurut Kepala SDN Sungai Tunjang sebagai dampak langsung dari kehadiran BSM sudah sangat baik. Tingkat kehadiran sekitar 96 %, atau dari 72 siswa, hanya sekitar 3 murid absen sehari. Namun, data absensi sebelum BSM tidak tersedia, karena itu, perbandingan kuantitatif tidak dapat dibuat. Beberapa atribut peningkatan tingkat transisi ke BSM. Misalnya, di SDN Sungai Tunjang, tahun lalu, semua 14 lulusannya melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah pertama (SMP atau MTs). Angka putus sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah sekitar 0,4 %. Alasan utama adalah bahwa anak-anak dituntut untuk bekerja untuk membantu mendukung keluarga. Di Kalimantan Selatan beberapa putus sekolah bermigrasi ke Malaysia, dan di antara ini ada telah dilaporkan kasus-kasus perdagangan manusia perempuan dan anak-anak. Ada juga kasus pernikahan dini untuk anak perempuan. Beberapa responden survei berpendapat bahwa kejadian kasus seperti ini akan berkurang jika jumlah BSM meningkat secara substansial, terutama untuk SMA. Akhir pencairan dana mengurangi dampak karena sebagian besar dana yang dibutuhkan pada awal tahun ajaran pada saat keluarga harus pengeluaran jumlah yang signifikan untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, dan dalam kasus sekolah swasta membayar biaya yang diperlukan untuk operasi

sekolah/madrasah. Pada saat survei (pertengahan Oktober 2013), lebih dari tiga bulan setelah awal tahun sekolah saat ini, hanya sedikit penerima manfaat telah menerima dana. Mengingat fakta bahwa pembayaran BSM sering terlambat dicairkan untuk membayar kebutuhan sekolah ketika mereka yang paling dibutuhkan dan rendahnya jumlah penerima BSM, sejauh mana dampak BSM pada peningkatan pendaftaran, kehadiran dan putus sekolah terbuka untuk diperdebatkan.

Pelajaran. Sejumlah orang tua dan murid di Kabupaten Barito Kuala mengeluh bahwa praktek menyalurkan dana BSM melalui manajemen madrasah tidak adil dan beberapa menyatakan bahwa praktek itu ilegal. Dalam beberapa kasus di madrasah, biaya yang disediakan telah dikurangi dengan barang, dan bukan uang tunai. Barang tersebut termasuk sepatu dan seragam yang tidak sesuai dengan siswa. Sekolah yang terletak di desa-desa yang jauh dari bank yang menyalurkan BSM, memiliki kesulitan karena biaya transportasi untuk melengkapi dokumen bank, dan ada responden yang merasa rumit dan memakan waktu. Dalam beberapa kasus di wilayah ini beberapa sekolah menolak BSM karena biaya transportasi yang hampir sama seperti nilai BSM. Selain itu, sebagian dari Bank lokal di Kalimantan mengharuskan setiap murid untuk deposit minimal Rp 20.000 untuk membuka rekening, yang bagi keluarga miskin dirasakan sebagai beban. Karena kesulitan yang dihadapi dibawah sistem pencairan baru, banyak pejabat Kabupaten dan sekolah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan dana tambahan untuk perjalanan dan administrasi, termasuk validasi data kemiskinan. Beberapa mengajukan pengeluaran kembali oleh kantor pos, tetapi kelemahan dari mekanisme ini adalah bahwa kantor pos mengharapkan untuk menerima kompensasi sebesar Rp 10.000 untuk setiap penerima BSM untuk layanan mereka. Untuk alasan ini banyak pejabat sekolah merekomendasikan suatu proses di mana dana dapat dikumpulkan oleh satu orang pada satu waktu. Karena program KPS/BSM belum benar disosialisasikan, beberapa responden orang tua tidak tahu tentang atau memahami bagaimana menggunakan KPS untuk mengajukan permohonan BSM untuk anak-anak mereka. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, orang-orang yang walaupun memenuhi syarat untuk BSM namun tidak memiliki KPS maka anak-anaknya tidak dimasukkan dalam daftar murid yang layak untuk BSM. Beberapa juga tidak mengerti bagaimana dana BSM dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah.

3. Wilayah Nusa Tenggara - Maluku

3.1 Pendahuluan

Beberapa studi kasus dalam rangkaian analisis pengadaan data dan informasi yang diambil di beberapa tempat di seluruh wilayah masing-masing. Dalam rangka untuk menyajikan informasi dari perspektif yang berbeda, studi kasus ini berfokus pada tiga Kabupaten sampel untuk Nusa Tenggara - Maluku (Kabupaten Kupang dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) provinsi dan Kota Ambon, Provinsi Maluku).

3.2 Latar Belakang

Empat provinsi termasuk dalam daerah survei adalah Nusa Tenggara - Maluku (Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku dan Maluku Utara) dianggap terbelakang. Jumlah total penduduk provinsi ini 11.752.275 (Sensus 2010). Menurut data BPS, jumlah penduduk masing-masing dari empat provinsi tergolong berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut : NTT : 23,03 % (4.683.827 orang) ; Maluku : 27,74 % (1.533.506) : NTB : 21,55 % (4.496.855), dan Maluku Utara : 8,08% (1.035.478). Secara keseluruhan, wilayah ini memiliki persentase terbesar kedua miskin (20,1 %) setelah Papua dan Papua Barat.

Selain itu, ada perbedaan besar prestasi pendidikan di provinsi-provinsi. Maluku kemungkinan akan mencapai 97 % pendidikan dua belas tahun universal tahun depan (2014), sedangkan tiga provinsi yang tersisa mungkin akan mencapainya pada tahun 2018.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendidikan, dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013, Pemerintah menerapkan kebijakan baru dari empat program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah mempertahankan kesejahteraan mereka, salah satunya adalah program BSM. Pada saat survei, jumlah penerima BSM dialokasikan untuk daerah itu tidak tersedia.

Gambar 21. Penerima manfaat BSM di Tingkat Dasar, SDN Fataleke, Kabupaten Nagakeo, Provinsi NTT

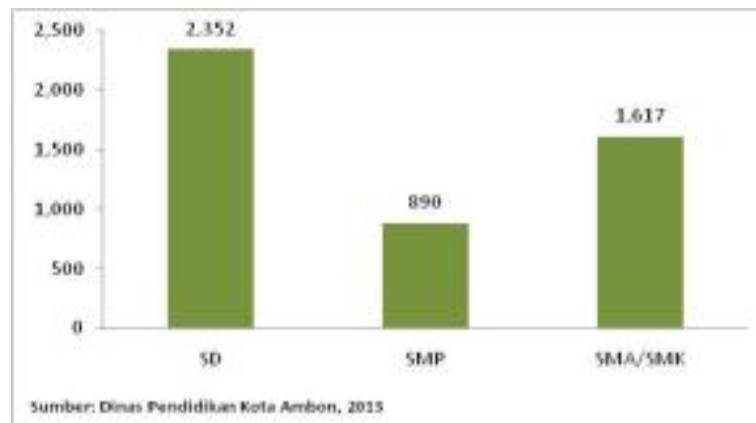


3.3 Temuan

Penentuan Sasaran

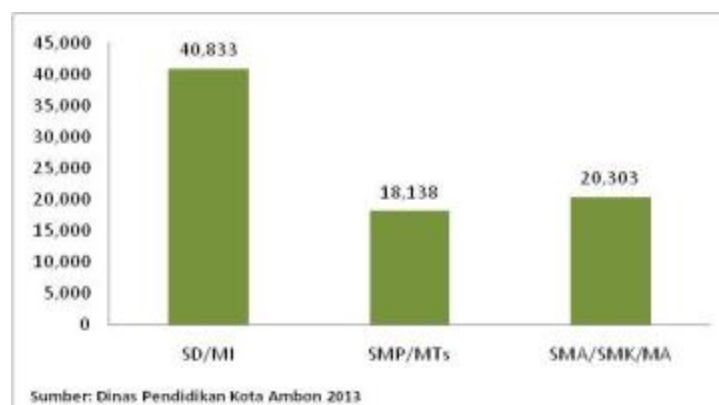
1. Alasan penetapan kuota untuk penerima BSM dipertanyakan. Di Kota Ambon pada 2012-2013, sejumlah 4859 murid menerima BSM. Dari jumlah tersebut 48% adalah (SD) murid (2.352 siswa) SD dan sisanya dibagikan kepada tingkat menengah (SMP) dan SLTA (SMA / SMK) (lihat Gambar 15, di bawah).

Gambar 22. Sebaran Penerima BSM berdasarkan Tingkat Sekolah di Kota Ambon 2012/2013



Jika kuota ditetapkan berdasarkan distribusi murid antara tingkatan kelas, proporsi BSM dialokasikan untuk SD adalah logis. Namun, jika metode yang sama diterapkan untuk distribusi antara Menengah Pertama dan Menengah Atas (SMP dan SMA / SMK), distribusi tersebut tidak logis karena hampir dua kali lebih banyak dari murid Menengah Atas yang menerima BSM dibandingkan dengan Menengah Pertama meskipun jumlah murid di tingkat ini hampir sama (Gambar 16).

Gambar 23. Distribusi jumlah murid di Kota Ambon 2012/2013



2. Penentuan sasaran khusus bagi murid di sekolah kejuruan tertentu (SMK). Sebuah kasus khusus ditemukan di sekolah kejuruan agribisnis SMK St. Isidorus. Sekolah ini berafiliasi dengan Kemendikbud pada tahun 2010, yang sebelumnya berada di bawah manajemen Kementerian Pertanian. Program utama sekolah ini adalah hortikultura dan peternakan. Dalam tahun-tahun

sebelumnya sekolah dialokasikan kuota BSM³⁷, tetapi tidak ada kuota yang dialokasikan untuk 2013-2014. Karena sekolah tidak diberitahu jatahnya, kepala sekolah mengusulkan 309 dari 314 murid untuk BSM karena mereka semua dianggap miskin. (Lima murid menerima jenis beasiswa). Ternyata hal ini adalah keputusan yang bijaksana karena Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mengeluarkan peraturan bahwa untuk tahun ajaran 2013-2014 semua murid di sekolah vokasi (SMK) yang mengkhususkan diri agribisnis yang akan diberikan BSM. Kepala sekolah tidak menyadari peraturan ini sampai ia diberitahu itu oleh surveyor. Pada Oktober 2013 dana BSM belum dicairkan sehingga sekolah masih tidak tahu berapa banyak murid akan diberikan BSM dan kapan.

3. Contoh penargetan yang tidak tepat. Kebanyakan pemangku kepentingan di wilayah ini berpendapat bahwa pemilihan sasaran BSM sudah tepat, tetapi ditemukan kasus-kasus dimana murid yang menerima BSM tidak diklasifikasikan sebagai miskin atau hampir miskin. Sebagai contoh, di Kupang seorang murid yang orang tuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) menerima BSM.

Gambar 24. Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama, SMPN 3 Taebenu, Kabupaten Kupang (murid perempuan yang berdiri, ayahnya adalah PNS, menerima BSM)



4. Terbatasnya penggunaan KPS. Di Nusa Tenggara - Maluku sangat sedikit murid telah menggunakan KPS untuk mengajukan BSM. Kebanyakan menggunakan Kartu Tanda Miskin (SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa.
5. Validitas data untuk menentukan KPS dan BSM kartu (Kartu BSM) dipertanyakan. Beberapa kepala mempertanyakan keakuratan data yang digunakan untuk menentukan penerima KPS atau BSM kartu karena beberapa yang telah menerima ini diketahui tidak miskin atau hampir miskin. Selain itu, beberapa kepala desa di Kabupaten Kupang menyatakan bahwa beberapa keluarga yang menerima KPS dan kartu BSM tidak dipilih dengan benar karena data untuk memilih keluarga-keluarga itu tidak akurat dan mutakhir. Mereka lebih lanjut mengeluh bahwa belum ada koordinasi dengan Pemerintah desa dalam pengolahan penerima KPS. Ada banyak rekomendasi untuk membentuk tim di tingkat desa untuk memeriksa validitas data yang digunakan untuk menentukan usulan penerima BSM.

Beberapa kepala sekolah menyatakan data untuk menentukan penerima KPS tidak akurat, sehingga KPS tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih penerima BSM. Mereka merekomendasikan penggunaan Kartu Tanda Miskin (SKTM). Mereka menyarankan bahwa karena kepala sekolah dan guru

³⁷ Seluruh siswa SMK bidang studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran dapat menerima BSM. "Petunjuk Teknis Tahun 2013. Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Kejuruan. Directorate Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jendral Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013". Page 4.

mengetahui kondisi ekonomi murid mereka, maka mereka harus memilih calon BSM dan kemudian memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Miskin dari Pemerintah desa.

6. Kuota untuk menentukan jumlah BSM penerima manfaat harus didasarkan pada data yang akurat. Banyak responden survei merasa bahwa kuota yang dialokasikan untuk wilayah NTT - Maluku harus ditingkatkan karena jumlah keluarga miskin di wilayah tersebut besar. Mereka merasa bahwa kuota tidak ditentukan berdasarkan data yang akurat. Mereka mencatat bahwa ada banyak murid dari keluarga miskin yang layak menerima BSM tetapi tidak menerimanya karena keterbatasan kuota. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang merekomendasikan bahwa kuota untuk sekolah yang ditentukan pada tingkat nasional akan dialokasikan untuk Kabupaten akan dialokasikan di bawah yurisdiksi mereka.

Gambar 25. Contoh rumah keluarga miskin di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT



7. Validitas menggunakan sertifikasi kemiskinan (SKTM) juga dipertanyakan. Kepala sekolah dan guru mencatat bahwa beberapa murid yang memperoleh SKTM dari Pemerintahan desa tidak akurat karena aparat desa tidak mengevaluasi status kemiskinan sebenarnya dari mereka yang mengajukan permohonan, sehingga warga non-miskin mengajukan permohonan dan dalam beberapa kasus mendapatkan BSM. Hal ini terjadi sebagian besar karena tidak adanya koordinasi antara sekolah dan aparat desa.

Kecukupan dana BSM

1. Pengeluaran BSM. Murid SD dan SMP menggunakan dana BSM untuk membeli perlengkapan sekolah (buku catatan, pensil, dll), lembar latihan (LKS), fotokopi, seragam, dan uang saku (terutama makanan ringan). Baik murid SD maupun SMP yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan uang untuk transportasi karena sekolah mereka masih berada dalam jarak untuk berjalan kaki. Di sisi lain murid menengah atas (SMA/SMK) menyatakan bahwa sebagian besar dana BSM digunakan untuk membayar biaya sekolah dan transportasi.
2. Pendapat yang berbeda tentang kecukupan BSM. Kepala Sekolah dan orang tua menyatakan bahwa dana BSM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, murid SD dan SMP mengatakan bahwa jumlah BSM cukup untuk membayar untuk keperluan yang dijelaskan di atas terutama karena mereka tidak perlu membayar untuk transportasi. Murid SLTA percaya bahwa dana BSM tidak cukup karena biaya yang sangat tinggi dan mereka harus mengeluarkan banyak uang pada perjalanan.

Dampak

1. Keterlambatan pencairan telah mengurangi dampak BSM. Kepala Sekolah dan orang tua menyatakan bahwa dana BSM harus dicairkan pada awal sekolah ketika dana paling dibutuhkan untuk membayar biaya, membeli seragam, perlengkapan dll. Sehingga pencairan di tahap akhir akan sulit megoptimalkan penggunaan dana.
2. BSM telah meningkatkan kehadiran dan prestasi akademik murid. Beberapa murid menyatakan bahwa karena BSM mereka dapat bersekolah lebih teratur dan mencegah putus sekolah. Beberapa kepala sekolah mengatakan bahwa dengan BSM murid lebih penuh perhatian di kelas dan lebih disiplin dan sehingga kinerja akademik mereka meningkat. Kepala sekolah SMPN 3 Satu Atap ("Satu Atap") Taebenu Kabupaten Kupang telah mengeluarkan instruksi bahwa penerima BSM yang putus sekolah harus mengembalikan dana BSM mereka, yang selanjutnya akan dialokasikan untuk murid miskin lainnya.

Gambar 26. Ruang Kelas Sekolah Dasar, SD Inpres Malawona, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT



3. Siswa yang tidak menerima BSM menjadi cemburu. Kepala Sekolah di Kabupaten Kupang dan Nagekeo mengatakan bahwa murid yang memenuhi kriteria untuk BSM dan yang tidak menerimanya menjadi cemburu. Mereka juga menyatakan bahwa kuota BSM mereka tidak cukup untuk menutupi semua murid yang memenuhi kriteria kemiskinan. Kepala SD K Galawea, Kabupaten Nagekeo dalam upaya untuk mengurangi kecemburuan di kalangan murid karena keterbatasan kuota BSM, mencoba untuk mengusulkan murid yang berbeda setiap tahun.
4. Prosedur administrasi Dinas Pendidikan telah berdampak negatif terhadap program. Menurut Kepala Sekolah, perubahan sering terjadi dalam bentuk format pengusulan penerima BSM oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang sehingga sekolah terlambat untuk mengusulkan daftar penerima. Selain itu, ada sekolah yang tidak pernah melengkapi berkas penerima manfaat yang diusulkan karena revisi dokumen memerlukan masukan dari orang tua yang merupakan proses yang memakan waktu. Hal ini memiliki efek pembatalan murid yang dokumennya tidak selesai dan karenanya tidak disampaikan ke Dinas Pendidikan.

Gambar 27. Sekolah Dasar Katolik Galawe, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)



Pelajaran yang diambil

1. Interferensi oleh partai politik. Kasus ini dilaporkan oleh Kabupaten Kupang dimana anggota partai politik yang tidak bertanggung jawab untuk program BSM menyampaikan informasi kepada sekolah bahwa yang dapat mencalonkan penerima BSM adalah hak partai. Hal ini sangat mengganggu proses pencalonan di sekolah. (Tidak jelas apakah ini terkait dengan fakta bahwa beberapa anggota DPR yang diberikan 5.000 beasiswa BSM untuk dibagikan kepada konstituen mereka).
2. Pencairan BSM di akhir tahun ajaran mencegah murid untuk mengklaim BSM mereka. Beberapa kasus ditemukan di Kabupaten Kupang di mana murid yang menerima BSM di kelas enam pada tahun ajaran sebelumnya tidak menerima dana sebelum akhir tahun sekolah dan kini telah memasuki SMP. Kantor pos menyatakan bahwa murid tidak diperbolehkan untuk mengklaim uang yang menjadi hak mereka karena mereka tidak lagi bersekolah di tingkat tersebut. Untuk "menyiasati hal ini" Kepala Sekolah harus mengklaim bahwa murid masih menghadiri kelas enam. Namun, efek negatif dari strategi ini adalah bahwa murid yang kini masuk SMP hanya menerima jumlah yang dialokasikan untuk SD (Rp. 360.000) dan bukan peruntukan SMP sebesar Rp. 550.000. Akhir pencairan juga menempatkan beban pada keluarga miskin yang perlu menghabiskan dana yang signifikan untuk membayar sekolah di awal tahun ajaran yang berarti bahwa kebutuhan keluarga lain yang dikorbankan.
3. Dana BSM dari bank adalah beban pada sekolah dan murid dari keluarga miskin. Kepala sekolah dan guru mengatakan bahwa sekolah terganggu karena personil sekolah harus menemani murid untuk bank lokal untuk menarik dana BSM. Kegiatan ini mengkonsumsi banyak waktu karena biasanya ada antrian panjang di bank. Selanjutnya, prosedur yang diberlakukan oleh bank memerlukan dokumentasi yang luas yang sering terjadi dalam harus membuat beberapa perjalanan ke bank. Bank-bank juga menuntut murid untuk menyimpan sejumlah uang dalam rekening mereka yang berarti mereka tidak dapat menarik semua dana hingga akun tersebut ditutup. Misalnya Bank NTT membutuhkan murid untuk menyimpan setidaknya Rp. 20.000 dalam rekening. Murid yang tinggal jauh dari bank terdekat juga dikenakan biaya perjalanan yang cukup besar untuk menarik dana. Seperti dibahas di atas, karena persyaratan perbankan, dalam beberapa kasus, perjalanan diperlukan. Beberapa responden survei merekomendasikan bahwa pencairan melalui kantor pos atau menyimpan dana BSM di rekening bank sekolah adalah lebih tepat terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak jauh dari bank terdekat. Orang tua yang disurvei di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang setuju dengan gagasan memiliki dana BSM yang disimpan di rekening sekolah dan kemudian disalurkan kepada siswa. Namun, responden menolak usulan untuk penarikan dana dari kantor pos, yang, meskipun dalam kebanyakan kasus lebih dekat dengan tempat tinggal mereka daripada bank terdekat, karena juga masih dianggap terlalu jauh bagi mereka untuk melakukan perjalanan yang memakan waktu dan mahal.

Namun, meskipun banyak kepala sekolah menyarankan agar pencairan BSM dilakukan melalui rekening sekolah, tercatat bahwa metode ini juga memiliki kekurangan juga karena kepala sekolah harus menandatangani untuk penarikan, tetapi jika ia tidak hadir maka akan ada penundaan penyaluran.

Misalnya dalam kasus MA AL Fatah Kota Ambon pada tahun 2012 dana BSM masih disimpan di rekening madrasah di kantor pos, karena kepala sekolah tidak hadir untuk waktu yang cukup lama karena ia sedang naik haji. Disarankan bahwa masalah ini dapat diselesaikan jika semua pihak berwenang yang terlibat dapat menghormati surat kuasa dari lembaga untuk menarik dana atas nama kepala sekolah.

Gambar 28. Orang Tua Murid yang menerima BSM di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Siswa yang menyalahgunakan dana BSM. Muncul keprihatinan mengenai dampak negatif dari pemberian dana BSM secara langsung kepada murid karena beberapa murid telah menggunakan uang secara tidak benar. Uang yang seharusnya untuk membayar uang sekolah, membeli perlengkapan sekolah, dll digunakan untuk membeli hal-hal yang bukan untuk sekolah seperti telepon genggam baru, dll. Dalam suatu kasus di SMA, karena sekolah tidak memiliki kontrol atas penggunaannya murid, mereka sering harus bernegosiasi secara langsung dengan orang tua untuk memastikan bahwa murid membayar biaya yang diperlukan. Penyalahgunaan BSM menjadi perhatian bagi kepala sekolah kejuruan SMK St Isidorus, Kabupaten Nagekeo. Selama tahun ajaran 2011-2012 dana BSM yang disimpan di rekening bank sekolah dan dikelola oleh bendahara sekolah. Pencairan dana dibahas dengan masing-masing penerima dengan hasil murid sepakat bahwa dana BSM akan digunakan untuk membayar biaya sekolah mereka. Kepala sekolah mengatakan bahwa metode ini mengurangi beban keluarga untuk membayar biaya sekolah.
2. Kurangnya jelas petunjuk/pedoman/sosialisasi BSM menyebabkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan. Ada kasus kesalahan serius yang dibuat karena kurangnya sosialisasi dan instruksi yang jelas sehingga para pemangku kepentingan yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda dari pelaksanaan program. Beberapa kepala sekolah di Kabupaten Kupang dan Nagekeo tidak dapat mengajukan permohonan untuk BSM karena hanya satu hari sebelum batas waktu pengiriman berkas pencalonan, mereka baru menerima pemberitahuan proses aplikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kurangnya sosialisasi dan petunjuk/pedoman dalam dokumen yang tidak akurat dan dalam beberapa kasus sekolah tersebut ditolak kuota BSMnya. (Lihat juga kasus sekolah kejuruan agribisnis SMK St Isidorus bawahdi atas).

Gambar 29. Contoh Sosialisasi yang baik di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT



3.4 Rangkuman dan Kesimpulan

Secara keseluruhan, para pemangku kepentingan di wilayah ini sepakat bahwa target untuk menerima BSM adalah tepat karena memfokuskan dukungan keuangan bagi murid dari keluarga miskin dan hampir miskin. Perbedaan pendapat yang ditemukan mengenai jumlah dana BSM yang tepat untuk setiap tingkat pendidikan. Murid di tingkat SD dan SMP percaya bahwa saat ini tingkat pembiayaan BSM sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun pemangku kepentingan dan orang tua berpikir jumlah harus ditingkatkan. Temuan utama di Nusa Tenggara - Maluku adalah jumlah yang tidak proporsional dari penerima BSM tingkat SD, sedangkan kebutuhan BSM jauh lebih besar di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Pemangku Kepentingan percaya bahwa kuota yang diberikan ke daerah tidak cukup mengingat tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ada keluhan utama dalam mekanisme BSM untuk penargetan penerima dan pencairan dana. Ada banyak kasus murid non-memenuhi syarat yang menerima BSM sementara banyak murid layak tidak menerima karena adanya penggunaan data yang tidak valid atau mutakhir dan karena campur tangan kepentingan lain dalam pencalonan penerima BSM. Pencairan dana BSM melalui bank lokal juga menemukan masalah, terutama untuk keluarga dan sekolah yang terletak jauh dari bank yang menyalurkan BSM tersebut.

Penargetan. Temuan utama di wilayah NTT - Maluku adalah jumlah yang tidak proporsional dari penerima BSM tingkat SD, sedangkan kebutuhan untuk BSM jauh lebih besar di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Pemangku Kepentingan percaya bahwa kuota yang diberikan ke daerah tidak cukup mengingat tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ada keluhan utama tentang mekanisme BSM untuk menargetkan penerima manfaat karena responden merasa bahwa data untuk menentukan KPS dan penerima kartu BSM tidak akurat dan tidak mutakhir. Penggunaan Kartu Tanda Miskin (SKTM) saat ini bermasalah karena di banyak desa biasanya diberikan kepada siapa saja yang meminta, baik yang miskin maupun tidak. Dengan demikian, ada banyak kasus murid non -miskin justru menerima BSM. Sementara banyak murid yang layak justru tidak menerima BSM. Ada juga kasus yang dilaporkan bahwa anggota partai politik menuntut sekolah untuk menerima pencalonan penerima manfaat dari mereka karena mereka mengatakan hal tersebut adalah hak partai untuk melakukannya. Ada banyak rekomendasi untuk membentuk tim independen di tingkat desa terdiri dari sekolah dan pejabat Pemerintah Desa untuk memeriksa validitas data yang digunakan untuk menentukan penerima BSM yang diusulkan.

Kecukupan Dana BSM. Murid SD dan SMP menggunakan dana BSM untuk membeli perlengkapan, seragam, dan uang saku (terutama makanan ringan), dll. Baik SD dan SMP yang diwawancarai mengatakan jumlah BSM

sudah cukup terutama karena mereka tidak perlu membayar untuk transportasi karena sekolah mereka masih berada dalam jarak berjalan kaki. Namun, orang tua dan pejabat Pemerintah percaya bahwa jumlah BSM harus ditingkatkan untuk tingkat-tingkat sekolah lanjutan. Di sisi lain murid menengah atas (SMA / SMK) menyatakan bahwa sebagian besar dana BSM digunakan untuk membayar biaya sekolah dan transportasi. Semua setuju bahwa BSM tidak cukup untuk menutupi biaya sekolah menengah (SMA / SMK) dan sehingga jumlah tersebut harus ditingkatkan.

Dampak. Penundaan dalam menyalurkan hasil BSM dalam mengurangi dampak dimaksudkan dari program BSM. Kepala Sekolah dan orang tua menyatakan bahwa dana BSM harus dicairkan pada awal tahun ajaran ketika dana paling dibutuhkan untuk membayar biaya, membeli seragam, perlengkapan dll. Pencairan di akhir Tahun Ajaran sangat mengurangi penggunaan optimal dari dana BSM tersebut. Beberapa murid menyatakan bahwa karena adanya BSM, maka mereka dapat bersekolah lebih teratur dan terhindar dari putus sekolah. Beberapa kepala sekolah mengatakan bahwa dengan BSM murid menjadi lebih penuh perhatian di kelas dan lebih disiplin sehingga kinerja akademik mereka meningkat. Kepala Sekolah mengatakan bahwa murid yang memenuhi kriteria untuk BSM namun tidak menerimanya telah menjadi cemburu. Menurut Kepala Sekolah, seringnya perubahan dalam format untuk mengusulkan penerima BSM dari Dinas Pendidikan mengakibatkan sekolah-sekolah menjadi terlambat untuk mengusulkan daftar penerima. Dalam beberapa kasus mereka tidak dapat memenuhi tenggat waktu untuk menyerahkan calon BSM.

Pelajaran yang diambil. Pencairan dana BSM melalui bank lokal saat ini banyak bermasalah, terutama untuk keluarga dan sekolah yang terletak jauh dari bank yang menyalurkan BSM karena murid perlu disertai oleh pejabat sekolah atau anggota keluarga, dan semuanya harus melakukan perjalanan jarak jauh ke Bank terdekat. Perjalanan ini mahal dalam hal biaya dan buang-buang waktu. Prosedur verifikasi Bank yang sangat menuntut koreksi dalam dokumentasi sering mengakibatkan beberapa perjalanan untuk menarik dana jadi berulang-ulang. Beberapa responden survei merekomendasikan pencairan melalui kantor pos atau menyimpan dana BSM di rekening bank sekolah dirasa lebih tepat terutama untuk sekolah-sekolah yang terletak jauh dari bank terdekat. Beberapa kekhawatiran tentang dampak negatif dari pemberian dana BSM secara langsung kepada murid karena beberapa murid telah menggunakan uang secara tidak benar. Akhirnya keluhan diungkapkan atas kurangnya kejelasan petunjuk/pedoman/sosialisasi untuk BSM yang menyebabkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan. Kurangnya sosialisasi dan instruksi yang jelas mengakibatkan para pemangku kepentingan yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda dari pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus hal ini telah mengakibatkan ketidaktepatan sasaran.

4. Wilayah Papua

4.1 Pendahuluan

Data dan informasi untuk studi kasus ini dikumpulkan dari tiga Kabupaten berikut: Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Mappi, Provinsi Papua.

4.2 Latar Belakang

Di bidang politik, melalui otonomi khusus, Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya mereka. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah pusat juga mendukung melalui desentralisasi fiskal yang cukup besar untuk secara langsung mendukung percepatan pembangunan di dua provinsi sebagai salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia³⁸.

Menurut data dari sensus 2010, penduduk Papua adalah 2.833.381 terdiri dari 1.505.883 laki-laki dan 1.327.498 perempuan. Pada tahun yang sama, penduduk Provinsi Papua Barat adalah 760.422 yang terdiri dari 402.398 laki-laki dan 358.024 perempuan. Secara total ada 3.593.803 orang di daerah survei.

Alokasi anggaran nasional untuk Papua sebesar Rp 28 triliun pada tahun 2011. Provinsi-provinsi lain menerima porsi yang lebih kecil dari anggaran, sebagai perbandingan provinsi Gorontalo dialokasikan Rp 5,1 triliun, Sumatera Barat Rp 16,4 triliun, Banten Rp 13,5 triliun dan Kalimantan Timur - salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang kaya minyak - Rp 7,46 triliun. Menggunakan logika sederhana, jika Rp 28 triliun disalurkan ke masing-masing 2,8 juta orang di Papua, akan menambah sekitar Rp. 10 juta per tahun untuk pendapatan masyarakat³⁹. Tapi setelah satu dekade otonomi khusus, kemiskinan, korupsi, pengangguran dan infrastruktur yang buruk tetap belum terselesaikan. Namun, otonomi telah sangat berhasil dalam mengubah kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk asli Papua dan pendatang ke provinsi⁴⁰.

Prestasi pendidikan di wilayah ini jauh terbelakang dibanding sebagian besar wilayah lain di negeri ini. Sebagai contoh, tingkat pencapaian pendidikan universal dua belas tahun provinsi Yogyakarta pada tahun 2011 adalah 97 %. Dibanding dengan Papua dan Papua Barat, mereka diproyeksikan mencapai 97 % pada tahun 2020⁴¹.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendidikan, dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013, Pemerintah menerapkan kebijakan baru dari empat program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah mempertahankan kesejahteraan mereka, salah satunya adalah program BSM. Pada saat survei, jumlah penerima BSM dialokasikan untuk daerah itu tidak tersedia.

Banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia menghadapi hambatan dalam mengelola pendidikan, tetapi wilayah Papua tampaknya memiliki lebih banyak hambatan yang ekstrim yang mencegah murid di daerah

³⁸ Sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 12 Undang-undang, Gubernur dan Wakilnya hanya boleh masyarakat asli Papua. Lebih lanjut lagi, semua anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) haruslah masyarakat asli Papua. Pasal 28 menyatakan bahwa hanya masyarakat asli Papua boleh membuat Partai Politik.

³⁹ Hafid Abbas, *Managing Papua With Heart*, Jakarta Post. Tue, 11/01/2011

⁴⁰ Dimasa yang lalu, penduduk pendatang memegang kekuatan sosialekonomi dan politik. Gambaran ini telah berubah secara drastis sejak masa awal otonomi khusus. Kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah beralih ke tangan masyarakat asli Papua.

⁴¹ Data KemenDikbud, 2012

terpencil dari menghadiri sekolah secara teratur. Program BSM bertujuan untuk meningkatkan kehadiran dengan memberikan bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin yang akan digunakan untuk membantu membayar biaya sekolah. Namun, ada beberapa kendala di wilayah Papua bahwa keberadaan BSM tidak bisa membantu. Sebagai contoh, dalam kasus satu sekolah yang dilaporkan di bawah, meskipun murid menerima sudah BSM, sekolah tersebut belum mengadakan kelas selama sekitar tiga bulan. Salah satu hambatan utama untuk sekolah di daerah terpencil adalah kekurangan guru atau fakta bahwa guru tidak muncul hanya untuk sekolah. Pada daerah terpencil selain kurangnya fasilitas sekolah juga kekurangan fasilitas kesehatan dasar seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Guru yang tidak berasal dari masyarakat juga menemukan kesulitan dalam mencari perumahan. Selanjutnya, transportasi ke daerah-daerah terpencil juga sulit, memakan waktu dan mahal. Misalnya, satu-satunya cara praktis untuk perjalanan Marauke, sebuah Kota besar di Provinsi Papua, Kabupaten Mappi adalah dengan jalur udara, tetapi hanya ada penerbangan sekali setiap dua hingga tiga minggu. Untuk alasan ini dan fakta bahwa guru sering hanya dibayar setiap tiga atau empat bulan, membuat mengajar di daerah terpencil tidak menarik.

Gambar 30. Murid Sekolah Dasar yang menerima BSM di Tahun 2012 pada SD YPK II, Kampung Baru, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua



4.3 Temuan

Penentuan Sasaran

1. Perbedaan pandangan tentang penargetan. Murid dan orang tua yang menerima BSM di Kabupaten Mappi dan Manokwari dan Kota Sorong mengatakan bahwa penargetan BSM adalah tepat dan benar karena penargetan itu sesuai dengan prosedur, yaitu, mereka miskin. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan beberapa kepala sekolah dan guru. Namun, murid dan orang tua dari Kabupaten ini yang tidak atau belum menerima BSM memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa banyak murid yang menerima BSM berasal dari kalangan menengah hingga keluarga kelas atas. Mereka menyatakan bahwa sekolah dengan murid dari keluarga kelas atas adalah yang diterima ke dalam prioritas alokasi BSM. Beberapa pemangku kepentingan menyarankan bahwa semua murid di daerah pedesaan akan diberikan BSM karena semua yang tinggal di daerah pedesaan miskin. Temuan selektif dapat dibuat untuk daerah perkotaan.

Gambar 31.Orang Tua murid penerima BSM yang terlihat berkecukupan dari SMP YPP Siloam, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat



1. Persepsi ketidakadilan dalam alokasi BSM memiliki dampak negatif di masyarakat. Dalam tiga wilayah yang akan disurvei melaporkan bahwa kepala sekolah karena jumlah murid yang menerima BSM kurang dari jumlah yang diusulkan, iri muncul di antara para murid yang tidak menerima BSM. Persepsi ketidakadilan dalam mengalokasikan hasil BSM pada orang tua kehilangan kepercayaan di sekolah dan dalam beberapa kasus ketegangan sosial telah muncul.
2. Ketidakkuratan data KPS. Wilayah yang akan disurvei telah memberikan prioritas BSM keluarga yang memegang KPS. Survei responden menyatakan keprihatinan mereka tentang ketidakkuratan data KPS karena banyak keluarga dianggap miskin belum menerima KPS.
3. Persepsi kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penargetan penerima BSM. Banyak pemangku kepentingan di Kota Sorong percaya bahwa mekanisme untuk mengusulkan penerima BSM tidak bertanggung jawab atau tidak transparan. Pemangku kepentingan lainnya di tiga wilayah yang disurvei menyatakan bahwa meskipun program BSM telah berjalan sejak tahun 2010, beberapa sekolah mengaku tidak pernah menerima BSM. Kekhawatiran tentang menggunakan KPS sebagai kriteria utama untuk penargetan telah menyebabkan konflik antar pemangku kepentingan seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Gambar 32.SD YPPK St. Xaverius Boven Digoel, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua



4. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi Program BSM yang baru telah mempengaruhi penargetan. Salah satu dari banyak konsekuensi negatif akibat dari kurangnya sosialisasi mekanisme BSM baru adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintahan Desa dan sekolah. Akibatnya beberapa orang tua dan murid di Kota Sorong tidak menyadari bahwa KPS merupakan salah satu persyaratan untuk melamar BSM. Hal ini juga menyebabkan

ketegangan dan perpecahan sosial yang dibuktikan dalam Focus Group Discussion di Kota Sorong dimana para pemangku kepentingan tersebut menuduh satu sama lain untuk dianggap tidak akurat dan tidak pantas BSM menargetkan.

Gambar 33. Kondisi Hunian dari Keluarga Miskin di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua



Kecukupan dana BSM

1. Penggunaan dana BSM. Sebagian besar responden menyatakan bahwa ketika dana dikucurkan kepada siswa, mereka gunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, dan sepatu, perlengkapan (buku tulis, pena, dll), uang saku (terutama untuk makanan ringan), dan transportasi. Beberapa murid menyumbangkan uang untuk biaya rumah tangga (membeli beras, sabun, dll).

Gambar 34. Murid umumnya menggunakan perahu untuk menuju sekolah pada banyak tempat di Papua



2. Contoh manajemen dana BSM yang tidak sah. Kepala sekolah SD YPPK Mur Mappi, Kabupaten Mappi mengumpulkan dana BSM dan menyalurkan dana dalam bentuk sekolah dan seragam pramuka, sementara pada SD YPPK Linggua, pihak sekolah menggunakan dana BSM untuk memberikan murid sarapan gratis, makanan sehat dan susu selama istirahat. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa sekolah seperti SD YPK 15 Ottow Geisler Manokwari, Kabupaten Manokwari mengumpulkan dana BSM dan dalam semangat "keadilan" membagi uang diantara semua siswa, termasuk penerima non-BSM.

3. Jumlah BSM harus ditingkatkan secara signifikan untuk wilayah Papua. Pemangku Kepentingan merekomendasikan bahwa jumlah BSM untuk Papua dinaikkan menjadi tiga hingga empat kali jumlah yang dialokasikan di provinsi lain karena kebanyakan orang di Papua miskin dan biaya hidup sangat tinggi.

Dampak

1. Kehadiran dan kinerja penerima BSM membaik. Mayoritas murid dan orang tua yang menerima BSM berterima kasih untuk bantuan BSM. Mereka menyatakan bahwa murid lebih termotivasi untuk bersekolah dan memperhatikan lebih karena mereka tidak lagi khawatir tentang bagaimana untuk membayar biaya sekolah. Orang tua merasa beberapa beban keuangan mereka terangkat dengan adanya BSM. Murid penerima BSM juga menyatakan bahwa mereka tidak merasa rendah diri atau merasa stigma karena datang dari keluarga miskin.
2. BSM berdampak pada tingkat kehadiran. Beberapa guru melaporkan bahwa tampaknya tidak ada hubungan yang signifikan antara BSM dan peningkatan murid yang hadir. Dilaporkan selama survei bahwa tidak ada kelas yang diadakan selama tiga bulan di SD SD YPPK sekolah Kathan, Kabupaten Mappi, namun, sebagian besar murid di sekolah ini menerima BSM. Ironisnya, di SD Inpres Toghom, Kabupaten Mappi, kelas diadakan secara normal, namun tidak satupun dari murid yang menerima BSM.

Gambar 35. Sekolah Dasar YPPK Kathan, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua dimana tidak ada kelas dilangsungkan selama 3 bulan



3. Perbedaan opini yang objektif tentang dampak BSM pada kehadiran. Sebagian besar responden menyatakan bahwa BSM mendorong murid untuk menghadiri kelas-kelas serta memotivasi mereka untuk terus belajar. Namun, beberapa orang mengatakan kehadiran murid semata-mata tergantung pada dukungan dari orang tua mereka dan motivasi murid itu sendiri.

Gambar 36. Tingkat Kehadiran atau penerimaan yang rendah pada SMP Negeri 1 Mappi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua



Pelajaran yang diambil

1. Ketidakpuasan dengan mekanisme BSM baru. Beberapa kepala sekolah menyatakan ketidakpuasan dengan mekanisme BSM baru dan lebih memilih model sebelumnya. Salah satu pokok menyarankan agar BSM dimasukkan dalam BOS karena sekolah sekarang memiliki pengalaman dan memahami prosedur pengelolaan BOS.
2. Kasus penyalahgunaan dana oleh sekolah dan Pemerintah Kabupaten. Kasus dilaporkan di Kabupaten Mappi dimana kepala sekolah mengumpulkan biaya manajemen sebesar Rp 60.000 - Rp 100.000 dari setiap penerima BSM. Seorang anggota staf dari Dinas Pendidikan mengatakan bahwa dana manajemen ini digunakan untuk membeli komputer. Kasus juga dilaporkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, dimana ditarik dana Rp 50.000 - Rp 100.000 dari setiap penerima BSM. Survei ini tidak dapat menentukan seberapa luas penyebaran praktek ini. Namun telah dicatat bahwa praktek ilegal ini terus berlangsung di bawah model BSM yang baru.
3. Mekanisme penyaluran yang berbeda dianjurkan untuk berbagai tingkat pendidikan. Responden survei mencatat bahwa guru atau personil sekolah harus menemani murid yang lebih muda untuk mengumpulkan dana BSM. Hal ini menempatkan beban pada staf dan hasilnya menjadi membuang-buang waktu mengajar di kelas. Murid di kelas-kelas atas dapat menarik dana tanpa disertai oleh personil sekolah. Kesulitan utama diungkapkan oleh pemangku kepentingan yang tinggal jauh dari bank yang menyalurkan BSM. Mereka menganjurkan untuk menggunakan kantor pos untuk mencairkan dana BSM di daerah terpencil, sedangkan penggunaan bank di daerah perkotaan dapat diterima.

Gambar 37.SMP penerima BSM di SMP YPP Siloam, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat



4.4 Rangkuman dan Kesimpulan

Salah satu karakteristik utama dari wilayah Papua Barat - Papua adalah perbedaan persepsi dan sikap terhadap program BSM. Mereka yang menerima BSM tampaknya melihat program lebih menguntungkan daripada mereka yang tidak. Beberapa pemangku kepentingan mengatakan bahwa BSM meningkatkan kehadiran, sementara yang lain mengatakan tidak ada bedanya. Setiap murid di daerah pedesaan harus menerima BSM sedangkan alokasi untuk daerah perkotaan bisa lebih selektif. Pemangku kepentingan daerah pedesaan mempertimbangkan sistem penyaluran melalui bank tidak didukung mekanisme bank juga untuk daerah perkotaan. Ketegangan sosial dan perbedaan pendapat muncul tentang pembagian KPS dan pencalonan penerima BSM, karena sebagian diakibatkan karena kurangnya sosialisasi.

Penargetan. Responden survei memiliki perbedaan pandangan tentang kesesuaian penargetkan penerima manfaat BSM. Murid dan orang tua yang menerima BSM mengatakan bahwa penargetan BSM sudah tepat karena BSM ditargetkan kepada orang miskin. Namun, murid dan orang tua dari Kabupaten ini yang tidak atau belum menerima BSM memiliki pendapat yang berbeda. Mereka percaya bahwa mekanisme untuk mengusulkan penerima BSM tidak bertanggung jawab atau transparan dengan hasil bahwa murid dari tengah keluarga kelas atas masih diterima kedalam prioritas dalam alokasi penerima BSM. Persepsi ketidakadilan dalam mengalokasikan BSM telah menghilangkan kepercayaan orang tua pada sekolah-sekolah, dan dalam beberapa kasus ketegangan sosial telah muncul. Ketidakpuasan dengan kebijakan pemberian prioritas bagi BSM untuk keluarga yang memegang KPS diungkapkan karena beberapa responden khawatir tentang ketidakakuratan data KPS karena banyak keluarga dianggap miskin belum menerima KPS. Ada juga keluhan bahwa kuota untuk wilayah Papua tidak cukup karena sejumlah besar orang miskin di wilayah tersebut. Pemangku kepentingan lainnya di tiga wilayah yang akan disurvei menyatakan bahwa meskipun program BSM telah berjalan sejak tahun 2010, beberapa sekolah tidak pernah menerima BSM. Beberapa mengusulkan agar semua murid di daerah pedesaan menerima BSM sedangkan alokasi di daerah perkotaan bisa lebih selektif.

Kecukupan Dana BSM. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dana yang dikucurkan kepada siswa, mereka gunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, dan sepatu, perlengkapan (buku tulis, pena, dll), uang saku (terutama untuk makanan ringan), dan transportasi. Beberapa murid menyumbangkan uang untuk biaya rumah tangga (membeli beras, sabun, dll). Ada beberapa kasus distribusi BSM yang tidak sah. Sebagai contoh di masa lalu beberapa sekolah mengumpulkan dana BSM dan dalam semangat "keadilan", dana BSM tersebut dibagi diantara semua siswa, termasuk penerima non-BSM. Meskipun secara teknis tidak diperbolehkan, namun kepala SD YPPK Mur Mappi, Kabupaten Mappi

mengumpulkan dana BSM dan menyalurkan dana dalam bentuk seragam sekolah dan seragam pramuka, sementara pada SD YPPK Linggua, pihak sekolah menggunakan dana BSM untuk memberikan para murid sarapan, makanan sehat dan susu. Pemangku Kepentingan merekomendasikan bahwa jumlah BSM untuk Papua ditambah menjadi tiga hingga empat kali jumlah yang dialokasikan di provinsi lain karena kebanyakan orang di Papua miskin dan biaya hidup sangat tinggi.

Dampak. Perbedaan terlihat sangat berbeda pada dampak BSM terkait pendaftaran, kehadiran, putus sekolah, dan prestasi akademik. Mayoritas murid dan orang tua yang menerima BSM bahwa murid lebih termotivasi untuk bersekolah dan memperhatikan lebih karena mereka tidak lagi khawatir tentang bagaimana untuk membayar biaya sekolah. Sedangkan murid penerima BSM menyatakan bahwa mereka tidak merasa rendah diri atau merasakan stigma karena datang dari keluarga miskin. Namun, beberapa guru melaporkan bahwa tampaknya tidak ada hubungan yang signifikan antara BSM dan peningkatan murid yang hadir. Misalnya, satu sekolah dasar belum mengadakan kelas selama tiga bulan, meskipun sebagian besar murid di sekolah ini menerima BSM. Sedangkan sekolah lain dimana tidak ada murid yang diterima dalam program BSM, kelas-kelasnya telah berjalan normal. Murid mengatakan bahwa kehadiran murni tergantung dukungan dari orang tua mereka dan motivasi murid itu sendiri.

Pelajaran. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi Program BSM yang baru telah berdampak negatif terhadap dampak yang diinginkan. Salah satu dari banyak konsekuensi negatif akibat dari kurangnya sosialisasi mekanisme BSM yang baru adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintahan Desa dan sekolah. Akibatnya beberapa orang tua dan murid tidak menyadari bahwa KPS merupakan salah satu persyaratan untuk melamar BSM. Kasus ketegangan dan perpecahan sosial yang dilaporkan atas masalah ini. Kasus dilaporkan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan mengumpulkan biaya manajemen ilegal sebesar Rp 50.000 - Rp 100.000 dari setiap penerima BSM. Survei ini tidak dapat menentukan seberapa luas penyebaran praktek ini. Telah dicatat bahwa praktek ilegal ini masih terus berlangsung di bawah model BSM yang baru. Namun, kasus-kasus ini lebih menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan kebijakan dalam pemantauan yang lebih baik dan penerapan sanksi. Ketidakpuasan juga tercatat dalam praktek penyaluran dana BSM melalui bank yang tersebar luas, terutama di kalangan pemangku kepentingan yang tinggal di daerah pedesaan. Perjalanan dari dan ke bank yang mahal dalam hal biaya untuk transportasi dan waktu yang terbuang. Sejumlah pemangku kepentingan menganjurkan kembali ke sistem pencairan oleh kantor pos, sementara yang lain merekomendasikan bahwa dana BSM dapat dimasukkan ke dalam dana BOS sehingga memungkinkan sekolah untuk menyediakan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh BSM.

5. Wilayah Sulawesi

5.1 Pendahuluan

Data untuk studi kasus ini diambil dari tiga Kabupaten yang termasuk dalam sampel wilayah Sulawesi. Namun, dalam rangka untuk menyajikan informasi dari perspektif yang berbeda, studi kasus ini berfokus terutama pada salah satu Kabupaten, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya memfokuskan satu sekolah kecil yang merupakan perwakilan dari berbagai sekolah seperti di wilayah ini (SMAN 10 Bulukumba).

5.2 Latar Belakang

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sejumlah 8.032.551 orang di sepanjang sepuluh tahun sensus 2010, atau 46 % dari total populasi wilayah Sulawesi. Provinsi ini adalah keenam provinsi terpadat di Indonesia. Provinsi ini memiliki laju pertumbuhan penduduk dari 1,17 % di atas disesuaikan Indonesia sensus tahun 2000 angka, yang kurang dari rata-rata nasional sebesar 1,49 %. Sejumlah 13,3% penduduk berada di bawah garis kemiskinan nasional⁴² dibandingkan dengan rata-rata nasional 11,66 % di bawah garis kemiskinan⁴³.

Sebelum pengenalan BSM pada tahun 2008, 67.756 beasiswa diberikan kepada murid miskin di Sulawesi Selatan dari anggaran nasional dan lokal sebagai bagian dari program pendidikan gratis yang provinsi untuk semua SD, murid SMA dan SMP. Sejalan dengan kebijakan provinsi untuk mempromosikan akses universal terhadap pendidikan, Kabupaten Bulukumba, salah satu dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan, juga telah mengadopsi pendidikan universal yang gratis dari tingkat dasar sampai menengah atas. Tujuan utama dari beasiswa adalah untuk memungkinkan para murid untuk membayar biaya transportasi, seragam, dan buku⁴⁴. Tahun ini, Provinsi mengeluarkan 484.617 KPS bagi rumah tangga miskin Kabupaten Bulukumba yang menerima 6.000⁴⁵ KPS yang diberikan oleh TNP2K dan didistribusikan melalui kantor pos. Keluarga miskin dapat menggunakan kartu ini untuk mengajukan permohonan BSM untuk anak-anak mereka.

SMAN 10 Bulukumba adalah sekolah umum SMA (kelas 10-12), terletak di daerah pedesaan dengan perjalanan empat puluh menit dari Dinas Pendidikan. Sekolah ini terletak di dekat hutan durian, tetapi memiliki cukup ruang untuk berbagai kegiatan olahraga seperti bola voli dan bulu tangkis. Sekolah ini memiliki empat bangunan utama: kantor, perpustakaan dan kelas. Secara keseluruhan, sekolah ini memiliki 29 guru. Jumlah murid yang terdaftar tahun ini (2013/2014) adalah 896. Sekitar 60 % dari mereka (538) adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

⁴² http://en.wikipedia.org/wiki/South_Sulawesi

⁴³ Situs TNP2K. 2013

⁴⁴ Dari The Jakarta Post, 07/31,2008: "The funds for the scholarship will be taken from the local and national budgets... The scholarships will be disbursed four times a year, starting in August or September. ...the administration would distribute Rp 360,000 for each elementary school student, Rp 500,000 for junior high students and Rp 780,000 for high school students. According to data from the South Sulawesi Education Office, 31,967 elementary school students, 25,235 junior high school students and 10,554 high students will receive a scholarship. They were categorized as poor students by the school's principals and the village heads."

⁴⁵ Antara 7/9/2013.

Gambar 38. Keluarga yang hidup di lingkungan seperti ini adalah pada sasaran dari BSM



5.3 Temuan

Penentuan Sasaran

1. Ketidakpastian alokasi BSM. Sekitar 6.000 keluarga di Kabupaten Bulukumba baru-baru ini menerima KPS dari kantor TNP2K melalui kantor pos. Sekitar 2.500 dari keluarga menggunakan kartu KPS mereka untuk mengajukan permohonan BSM untuk anak-anak mereka. Namun, di bawah sistem distribusi BSM baru, hanya 368 (14,72%) dari mereka yang telah disetujui pada saat survei (pertengahan Oktober 2013). Pada saat survey pejabat Kabupaten dan pemangku kepentingan tidak tahu jika hanya jumlah ini yang akan disetujui untuk seluruh tahun ajaran. SMAN 10 Bulukumba mengusulkan 96 murid untuk mendapatkan BSM untuk tahun ajaran saat ini, dan hanya 66 yang telah disetujui.

Gambar 39. Rumah penerima BSM dari SDN 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan



2. Kasus Salah Sasaran. Beberapa ketidakpuasan dengan sistem penargetan diungkapkan karena banyak pihak merasa bahwa murid tidak layak dari latar belakang keluarga ekonomis telah

menerima BSM sementara yang benar-benar membutuhkan BSM justru tidak menerimanya. Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bulukumba memperkirakan bahwa dalam dua tahun sebelum program BSM, hanya 40 % dari penerima BSM yang tergolong miskin. Dalam satu sekolah diaporkan bahwa 10 dari 50 penerima manfaat (20 %) adalah anak-anak dari guru.

3. Perlunya validasi status kemiskinan murid yang diusulkan untuk BSM. Di Kabupaten Bulukumba pemohon untuk BSM harus menghasilkan Kartu Tanda Miskin dari Pemerintah desa, termasuk mereka yang memiliki KPS. Para kepala desa mengeluh bahwa mereka tidak menerima informasi dari pihak sekolah/madrasah tentang murid yang diusulkan untuk BSM. Karena banyak kasus yang dilaporkan murid dari keluarga tidak miskin yang diusulkan untuk BSM, direkomendasikan bahwa tim akan dibentuk di tingkat sekolah - desa untuk memverifikasi status kemiskinan yang diusulkan untuk BSM. Ada juga saran bahwa Pendidikan Kabupaten dan Kantor Dinas Agama Kabupaten memvalidasi status kemiskinan yang diusulkan oleh sekolah/madrasah sebelum mengirimkan nama-nama ke Kemendikbud dan Kemenag untuk mendapatkan persetujuan akhir. Mereka percaya upaya ini akan meningkatkan akuntabilitas, akurasi, dan transparansi mekanisme penentuan sasaran BSM.

Gambar 40. Orang Tua Murid yang menerima BSM, SDN 4 Bantenge, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan



4. Contoh praktik penargetan yang baik. Pada saat pelaksanaan survei ditemukan beberapa contoh yang baik dari verifikasi data untuk memastikan bahwa penerima sudah dipilih dengan benar. Misalnya, kepala SMKN 1 Bulukumba melaporkan bahwa sebagai langkah untuk mencegah salah sasaran, pejabat sekolah melakukan kunjungan ke rumah murid untuk memvalidasi bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga miskin.

Gambar 41. Focus Group Discussion antara Kepala Sekolah, Guru, dan Pejabat Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan



5. Kurangnya jumlah penerima BSM. Pemangku kepentingan melalui daerah yang disurvei di wilayah Sulawesi menyatakan bahwa jumlah penerima BSM dialokasikan untuk wilayah ini tidak cukup untuk menutupi semua murid yang layak menerima. Hal ini disebabkan kuota yang tidak mencukupi dan sebagian juga karena jumlah besar murid non-miskin yang menerima BSM.

Gambar 42. Sukri, seorang murid Sekolah Dasar pada SDN 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Province yang menerima BSM. Ibunya tidak memiliki KPS



Kecukupan Dana BSM

1. Penggunaan dana BSM. Sebagian besar responden percaya bahwa ketika dana dikucurkan kepada siswa, mereka akan menggunakannya sebagaimana dimaksud sesuai dengan pedoman program tersebut. (Lihat di bawah contoh bagaimana dana digunakan ketika disalurkan ke pihak sekolah). Dana tersebut digunakan terutama untuk membeli buku, seragam, dan transportasi. Beberapa murid menggunakan BSM untuk membayar rumah dan untuk membantu biaya keluarga lainnya. Orang tua di Kabupaten Bulukumba memperkirakan dana BSM digunakan untuk pengeluaran berikut :(1) buku (30 %), (2) seragam sekolah (25 %), (3) transportasi (15 %), (4) buku tulis(15 %), dan (5) uang saku, biaya dan lain-lain (15 %). Pemangku Kepentingan memperkirakan bahwa hanya 15 % dari dana BSM yang digunakan untuk membayar transportasi ke dan dari sekolah, namun, orang tua percaya bahwa tingginya biaya transportasi merupakan hambatan terbesar dalam mencegah anak-anak mereka untuk bersekolah⁴⁶. Di madrasah swasta yang disurvei (MI, MTs dan MA Darul Istiqama, Bulukumba)

⁴⁶ Menyadari bahwa ongkos merupakan faktor yang menentukan kehadiran di sekolah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah menyediakan bis untuk sarana transportasi murid dari wilayah miskin kepada pusat Kota.

manajemen madrasah mengumpulkan dana BSM dan dikurangi Rp.300,000/bulan untuk menutupi biaya tersebut. Namun, ini sudah meliputi makanan, seragam, dan semua kegiatan murid termasuk program ekstrakurikuler.

Gambar 43. Sekolah Dasar 224 Garanta, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan tidak dipertimbangkan sebagai Sekolah Miskin. Namun dari 300 murid, 100 mengajukan BSM dengan 40 murid telah menerima BSM



2. Perbedaan pandangan tentang peningkatan rekomendasi dalam ukuran BSM. Kepala sekolah, guru dan pejabat Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Kemenag mengusulkan peningkatan ukuran BSM sebagai berikut: SD (SD / MI) Rp 1.200.000, SMP (SMP / MTs) Rp 1.500.000, dan menengah (SMA / MA / SMK Rp 2.000.000). Selain itu mereka mengusulkan bahwa jasa manajemen sebesar Rp 500.000 per sekolah dialokasikan untuk menutupi verifikasi data, biaya operasional dan pelaporan.

Di Kabupaten Bulukumba, orang tua memperkirakan BSM hanya mencakup 35% - 40% dari total pengeluaran rumah tangga miskin⁴⁷. Biaya sekolah utama adalah untuk buku, sepatu, seragam dan transportasi. Menurut orang tua, belanja untuk masing-masing tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Orang Tua untuk Pengeluaran Sekolah

Tingkat Sekolah	Transportasi	Biaya Lain	Total
Sekolah Dasar (SD/MI)	Rp 700.000	Rp 400.000	Rp 1.100.000
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Rp 1.200.000	Rp 800.000	Rp 2.000.000
Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Rp 1.600.000	Rp 1.000.000	Rp 2.600.000

Orangtua telah mengusulkan bahwa ukuran BSM agar ditingkatkan sebagai berikut: SD (SD / MI) Rp 500.000 per semester, sekolah menengah pertama (SMP / MTs) Rp 700.000 / semester, dan sekolah menengah atas (SMA / MA / SMK) Rp 750.000 / semester. Rekomendasi ini sekitar dua kali jumlah BSM saat ini. Perlu dicatat bahwa peningkatan direkomendasikan oleh orang tuasedikit lebih rendah dari yang diusulkan oleh sekolah dan pejabat Pemerintah daerah.

⁴⁷ Berdasarkan nilai pada Bulan Juli 2013

Gambar 44. Ruang Kelas SMAN 15 Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dua Murid dalam kelas ini menerima BSM



Dampak

1. Peningkatan substansial dalam tingkat transisi. Salah satu tujuan dari BSM adalah untuk meningkatkan akses, partisipasi, pendaftaran dan prestasi dari anak-anak yang berasal dari latar belakang miskin dan tertinggal. Hal ini tampaknya menjadi kasus di SMAN 10 Bulukumba. Sekolah ini telah melihat peningkatan yang signifikan dari pendaftaran dari tujuh kelas 10 kelas paralel pada tahun 2011 untuk delapan kelas 10 kelas pada tahun 2012 untuk sembilan kelas pada tahun 2013. (Ukuran kelas berkisar antara 35-40 siswa). Sekitar 60 % dari total murid berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sebagian besar dari mereka adalah farmers, nelayan dan peternak sapi, 2-4 % orang tua bekerja di Malaysia. Satu SMP di Kabupaten Bulukumba (MTs Al Maarif) yang sebelum BSM memiliki rata-rata 70 murid baru yang masuk kelas 7 (SPM Kelas 1) melaporkan 200 % peningkatan -300 % dalam pendaftaran murid baru setelah program BSM diperkenalkan. Peningkatan transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA juga dilaporkan di wilayah tersebut. Tahun lalu sekitar 28 % dari SMAN 10 lulusan Bulukumba (80 dari 290) terus pendidikan tinggi, ini 12 murid yang diterima BSM.
2. Tingkat drop menurun atau tetap stabil. Meskipun tingkat putus sekolah di Kabupaten Bulukumba cukup rendah (2 % -3 %) mereka masih belum mencapai nol karena praktek-praktek budaya dan kondisi ekonomi. Beberapa putus bermigrasi ke Malaysia, dan di antara ini ada telah dilaporkan kasus-kasus perdagangan manusia perempuan dan anak-anak. Ada juga kasus pernikahan dini untuk anak perempuan. Beberapa responden survei berpendapat bahwa kejadian kasus seperti ini akan berkurang jika jumlah BSM meningkat secara substansial, terutama untuk SMA.
3. Perbaikan dalam kehadiran dan motivasi. Selain tingkat transisi ditingkatkan dijelaskan di atas, pemangku kepentingan mengatakan bahwa program BSM telah menjadi faktor meningkatkan tingkat kehadiran, meningkatkan kepercayaan diri, dan dalam mengurangi putus sekolah. Misalnya, tingkat kehadiran di SMAN 10 Bulukumba adalah 90 % -100 %. (Siswa dapat kehilangan dana BSM jika kehadiran turun di bawah 75 %). Namun, peningkatan kehadiran juga ditemukan di antara murid yang tidak menerima BSM tahun-tahun sebelumnya.
4. Akhir pencairan dana mengurangi dampak. Beberapa pemangku kepentingan merekomendasikan bahwa BSM sebagian dana bisa dicairkan pada awal tahun ajaran pada saat mereka yang paling dibutuhkan karena keluarga harus pengeluaran jumlah yang signifikan untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, dan dalam kasus sekolah swasta membayar biaya yang diperlukan untuk sekolah/madrasah operasi. murid juga menyatakan bahwa dana akan dicairkan dalam dua angsuran untuk mencegah menghabiskan semua dana sekaligus. (Rekomendasi ini mendukung kebijakan baru dari pencairan per semester).

Pelajaran yang diambil

1. Kesulitan dalam menggunakan bank lokal untuk menyalurkan BSM. Seperti dijelaskan di atas (Paragraf 1, Target) 368 BSM penerima telah disetujui oleh manajemen program Kemendikbud dan Kemenag BSM. Pada saat survei, awal Oktober 2013, bank menyalurkan lokal (Bank Sulselbar Bulukumba) hanya dibayar tujuh dari mereka⁴⁸. Alasan yang diberikan oleh bank adalah Bupati telah meminta bank untuk memprioritaskan pembayaran untuk sertifikasi guru. Bank tidak memiliki sumber daya manusia untuk mengelola beberapa pengeluaran pada saat yang sama mengakibatkan keterlambatan penyaluran BSM. Sekolah / madrasah yang terletak di beberapa pulau-pulau kecil di wilayah tersebut membutuhkan sampai tiga hari untuk perjalanan ke dan dari bank menyalurkan terdekat mengakibatkan biaya yang besar dalam hal biaya perjalanan dan waktu yang dibutuhkan jauh dari sekolah. Beberapa responden menyarankan kantor pos lebih efisien untuk menyalurkan dana BSM. Beberapa juga menyarankan bahwa satu orang dari sekolah diperbolehkan untuk mengumpulkan dana untuk semua murid pada satu waktu. Persyaratan administrasi bank juga ditemukan akan sulit untuk mengikuti dan dalam beberapa kasus memerlukan beberapa perjalanan ke bank untuk membuka rekening dan menarik dana.
2. Kebutuhan dana manajemen BSM. Beberapa kepala sekolah disarankan agar sekolah/madrasah dialokasikan dana khusus untuk menutupi biaya transportasi untuk penarikan dana BSM dan untuk biaya administrasi lainnya seperti verifikasi data dan biaya operasional. Sebagai alternatif beberapa orang tua dan murid menyarankan bahwa dana khusus ditambahkan ke BSM untuk menutupi biaya untuk transportasi ke bank menyalurkan.
3. Distribusi yang tidak sah dana BSM di sekolah/madrasah. Dalam tahun-tahun sebelumnya dalam beberapa kasus di mana jumlah penerima BSM BSM dialokasikan kurang bahwa jumlah yang diusulkan, kepala sekolah berinisiatif untuk mendistribusikan porsi dana BSM penerima kalangan murid yang diusulkan yang tidak diberikan BSM. Hal ini dilakukan dengan niat baik tapi prakteknya bisa dianggap ilegal sesuai dengan pedoman teknis BSM dan mereka yang bertanggung jawab untuk praktek bisa dikenakan sanksi. Orang tua dari murid yang BSM didistribusikan kepada orang lain menyadari bahwa hal ini dilakukan dengan niat baik, namun demikian mereka merasa ditipu ("dirugikan"). Ada juga laporan dari sekolah/madrasah pemotongan dana BSM murid dalam tahun terakhir. Di Kabupaten Bulukumba di 71 dari 72 sekolah yang disurvei tidak ada yang menerima dana BSM secara penuh. Rata-rata mereka hanya menerima Rp 100.000-200.000. Hanya SMAN 10 memberi siswanya jumlah penuh.
4. Contoh bagaimana sekolah menggunakan dana BSM siswa.muriddi Kabupaten Bulukumba disediakan gambar berikut bagaimana dana BSM yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya di tingkat SD dan SMP. Pihak sekolah mengumpulkan uang atas nama siswa. 50 % -60 % dari dana tersebut digunakan untuk membeli seragam sekolah untuk anak-anak, murid di kelas 1-9 Bulukumba membutuhkan 4-6 set seragam. Sekitar 15-20 % dari dana tersebut digunakan untuk membeli buku (buku teks assumingly tidak karena mereka ditutupi oleh dana BOS) dan lembar latihan (LKS). Kontribusi untuk biaya pengembangan sekolah menyerap 10 % -15 % dari dana. Sisanya 20 % -30 % digunakan untuk membayar kegiatan ekstra kurikulum, administrasi pendaftaran baru, biaya kuliah, orientasi sekolah, dan ujian.
5. Kurangnya sosialisasi model BSM baru. Seperti dilaporkan di daerah lain survei, banyak pihak, terutama orang tua dan aparat desa, tidak sepenuhnya memahami program terutama dalam bagaimana menggunakan KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Tidak ada responden dalam survei di Kabupaten Bulukumba memahami tata cara pengajuan pengaduan dengan BSM Complaint Center didirikan di Jakarta Kemendikbud.

⁴⁸ The seven students are from SDN 28 Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang.

5.4 Rangkuman dan Kesimpulan

Sebagian besar responden setuju bahwa metode distribusi BSM baru yang dimulai pada Juli 2013 ditargetkan dengan benar, yaitu, murid dari keluarga miskin. Menurut mereka ini juga berlaku untuk BSM menargetkan tahun-tahun sebelumnya : 2010/2011 dan 2011/2013. Program BSM telah menjadi faktor untuk meningkatkan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah secara teratur. BSM telah memberikan kontribusi untuk mengubah perilaku dan kinerja murid sebagaimana tercermin dalam kehadiran mereka, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi putus sekolah dan meningkatkan angka transisi. Namun, peningkatan kehadiran juga ditemukan di antara murid yang tidak menerima BSM tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar pemangku kepentingan ingin program BSM akan dilanjutkan, tetapi kebanyakan orang tua, aparat desa dan beberapa kepala sekolah masih tidak mengerti atau tahu tentang sistem baru menggunakan KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Keprihatinan yang mendalam diungkapkan tentang ketidakadilan dalam penargetan penerima BSM, kecemburuan yang timbul di kalangan murid dan orang tua yang merasa mereka layak, tetapi yang belum diberikan BSM, kekurangan dari jumlah BSM, dan sistem pencairan melalui bank lokal, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari bank.

Penargetan. Beberapa ketidakpuasan dengan sistem penargetan BSM diungkapkan karena banyak pihak merasa bahwa murid tidak layak dari latar belakang keluarga ekonomi mampu diterima dalam program BSM di tahun terakhir, sedangkan yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya. Pemangku Kepentingan Kabupaten Bulukumba memperkirakan bahwa dalam dua tahun sebelumnya program BSM hanya 40 % dari penerima BSM yang tergolong miskin. Lebih dari tiga bulan setelah program BSM baru dimulai, hanya sejumlah kecil penerima manfaat yang diusulkan telah disetujui oleh Kemendikbud / Kemenag dan pejabat Kabupaten dan sekolah/madrasah tidak yakin ketika alokasi akhir dibuat. Selain memproduksi KPS untuk mengajukan permohonan BSM, keluarga juga harus memiliki Kartu Tanda Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa. Para kepala desa mengeluh bahwa mereka tidak menerima informasi dari pihak sekolah/madrasah tentang murid yang diusulkan untuk BSM. Karena banyak kasus yang dilaporkan murid dari keluarga tidak miskin yang diusulkan untuk BSM, direkomendasikan bahwa tim akan dibentuk di tingkat sekolah-desa yang terdiri dari sekolah dan aparat desa untuk memverifikasi status kemiskinan yang diusulkan untuk BSM. Pemangku kepentingan di seluruh wilayah yang disurvei di wilayah Sulawesi menyatakan bahwa jumlah penerima BSM dialokasikan untuk wilayah ini tidak cukup untuk menutupi semua murid yang layak menerima.

Kecukupan dana BSM. Sebagian besar responden percaya bahwa ketika dana yang dikucurkan kepada siswa, dana tersebut dapat digunakan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pedoman program tersebut. Dana tersebut digunakan terutama untuk membeli buku, seragam, dan transportasi. Beberapa murid menggunakan BSM untuk membantu biaya keluarga lainnya. Pemangku Kepentingan memperkirakan bahwa hanya 15 % dari dana BSM yang digunakan untuk membayar transportasi ke dan dari sekolah, namun, orang tua percaya bahwa biaya transportasi merupakan hambatan terbesar yang mencegah anak-anak mereka untuk dapat bersekolah. Di Kabupaten Bulukumba, orang tua memperkirakan BSM hanya mencakup 35 % - 40 % dari total pengeluaran rumah tangga miskin. Semua pemangku kepentingan merekomendasikan jumlah BSM meningkat sebesar 100% atau lebih. Usulan peningkatan dari Orangtua hanya sedikit lebih rendah dari yang diusulkan oleh kepala sekolah, guru dan pejabat Kabupaten. Selain itu mereka mengusulkan bahwa adanya jasa manajemen sebesar Rp 500.000 per sekolah yang dialokasikan untuk menutupi biaya verifikasi data, biaya operasional dan pelaporan.

Dampak. Peningkatan substansial dalam tingkat transisi dilaporkan oleh beberapa sekolah/madrasah sebagai hasil dari program BSM. Tiga madrasah menengah pertama dalam sampel melaporkan kenaikan sebesar 200% -300 % setelah awal program BSM pada tahun 2010. Harga transisi yang lebih tinggi dari SMP ke SMA dan dari SMA ke perguruan tinggi juga dicatat. Tingkat putus sekolah yang dilaporkan cukup rendah 2-3%. Pada tingkat SLTA penyebab utama putus sekolah adalah praktek-praktek budaya dan kondisi ekonomi. Beberapa murid putus sekolah telah bermigrasi ke Malaysia, dan di antaranya ada yang telah

dilaporkan menjadi kasus-kasus perdagangan manusia (perempuan dan anak-anak). Ada juga kasus pernikahan dini untuk anak perempuan. Beberapa responden survei berpendapat bahwa kejadian kasus seperti ini akan berkurang jika jumlah BSM meningkat secara substansial, terutama untuk SMA. Selain peningkatan tingkat transisi, pemangku kepentingan mengatakan bahwa program BSM telah menjadi faktor dalam peningkatan tingkat kehadiran, meningkatkan kepercayaan diri, dan dalam mengurangi angka putus sekolah. Namun, peningkatan kehadiran juga ditemukan di antara murid yang tidak menerima BSM tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pemangku kepentingan merekomendasikan bahwa sebagian dana BSM bisa dicairkan pada awal tahun ajaran pada saat mereka paling membutuhkan BSM karena keluarga harus mengeluarkan jumlah yang signifikan untuk membeli seragam, perlengkapan sekolah, dan dalam kasus sekolah swasta, murid harus membayar biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sekolah/madrasah.

Pelajaran. Meskipun semua pihak sepakat bahwa program BSM memiliki niat baik mereka mengungkapkan banyak kekhawatiran tentang metode baru dalam menyalurkan dana BSM melalui bank lokal. Alasan ini meliputi kurangnya kapasitas bank untuk mencairkan tepat waktu, prosedur administrasi yang memberatkan dan bahwa dalam beberapa kasus membutuhkan beberapa perjalanan untuk membuka rekening dan menarik dana dan untuk sekolah yang terletak jauh dari bank terdekat, murid dan orang tua mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar transportasi dan membuang-buang waktu. Dibutuhkan waktu hingga tiga hari bagi murid di pulau-pulau terpencil untuk melakukan perjalanan ke bank. Banyak responden merekomendasikan untuk kembali ke pencairan melalui kantor pos dan beberapa direkomendasikan bahwa salah satu wakil dari sekolah diperbolehkan untuk mengumpulkan dana bagi semua penerima BSM pada satu waktu. Beberapa kepala sekolah menyarankan agar sekolah/madrasah dialokasikan dana khusus untuk menutupi biaya transportasi untuk penarikan dana BSM dan untuk biaya administrasi lainnya seperti verifikasi data dan biaya operasional. Sebagai alternatif beberapa orang tua dan murid menyarankan bahwa dana khusus ditambahkan ke BSM untuk menutupi biaya transportasi ke bank. Meskipun sistem baru pencairan dana BSM secara langsung kepada murid masih memiliki kekurangan seperti yang dijelaskan di atas, keluhan yang diungkapkan tentang penggunaan dana BSM tahun-tahun sebelumnya ketika juga terlihat. Sebagai contoh, kasus yang dilaporkan dari kepala sekolah yang menyalurkan dana BSM di antara semua murid miskin, termasuk mereka yang tidak disetujui sebagai penerima BSM. Orang tua yang dana anak-anak yang digunakan dengan cara ini merasa marah dan dicurangi. Pihak sekolah/madrasah juga memotong dana untuk keperluan lain. Tahun lalu hanya satu dari 72 sekolah yang menyalurkan BSM dalam jumlah penuh kepada mereka yang berhak. Seperti dilaporkan di daerah survei lain, banyak pihak, terutama orang tua dan aparat desa, yang tidak sepenuhnya memahami program terutama dalam bagaimana menggunakan KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Tidak ada responden dalam survei di Kabupaten Bulukumba yang memahami tata cara pengajuan pengaduan melalui BSM Complaint Center yang didirikan di Kemendikbud Jakarta.

6. Wilayah Sumatera

6.1 Pendahuluan

Informasi untuk studi kasus ini diambil dari delapan Kabupaten di lima provinsi di wilayah Sumatera: (i) Aceh (Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya), (ii) Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang), (iii) Sumatera Barat (Kabupaten Damasraya), (iv) Jambi (Kabupaten Muara Bungo dan Tanjung Jabung Timur) dan (v) Bangka Belitung (Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Selatan).

6.2 Latar Belakang

Pulau Sumatera memiliki sepuluh provinsi⁴⁹ dengan jumlah penduduk 52.210.926 (Sensus 2010) yang setara dengan 21,31 % dari total penduduk Indonesia⁵⁰. Sumatera memiliki luas lahan sekitar 3,7 kali lebih besar dari Jawa, namun penduduknya adalah 2,7 kali lebih kecil⁵¹. Menurut data BPS, 6,4 juta (12,3 %) dari populasi di wilayah ini berada di bawah garis kemiskinan⁵². Sebagai perbandingan, 54,72 % penduduk Jawa yang berada di bawah garis kemiskinan.

Ada perbedaan besar dalam prestasi pendidikan di sepuluh provinsi. Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki tingkat partisipasi bruto tertinggi pada tingkat dasar dan menengah di wilayah tersebut. Ketiga provinsi kemungkinan akan mencapai 97 % pendidikan dua belas tahun universal pada 2015. Bangka Belitung dan Bengkulu akan mencapainya pada tahun 2016, Aceh pada tahun 2018, Jambi dan Sumatera Selatan pada 2019, dan Riau, dan Lampung pada tahun 2020⁵³.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendidikan, dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013, Pemerintah menerapkan kebijakan baru dari empat program kompensasi untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah mempertahankan kesejahteraan mereka, salah satunya adalah program BSM. Pada saat survei, jumlah penerima BSM dialokasikan untuk daerah itu tidak tersedia⁵⁴.

⁴⁹ Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, and Sumatra Utara.

⁵⁰ BPS 2010

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Data Dikbud, 2012

⁵⁴ For example on October 4, 2013, the head of the Education Office (*Dinas Pendidikan*) in Kabupaten Aceh Barat Daya stated that his office had not received any information regarding BSM quotas for his district as of October 4, 2013. <http://www.ajnn.net/>

Gambar 45.Orang Tua Penerima BSM



6.3 Temuan

Penentuan Sasaran

1. Tujuan program ini sudah tepat (untuk masyarakat miskin) tetapi sasaran dari penerima manfaat BSM sebenarnya tidak sempurna. Target dari penerima BSM dapat dikatakan masih belum 100% benar. Semua murid dan orang tua murid yang menerima BSM mengatakan bahwa penargetan yang benar - yaitu, mereka yang menerima BSM memenuhi kriteria. Murid yang tidak menerima BSM hanya mengatakan bahwa penargetan benar dalam hal itu ditujukan untuk orang miskin. Namun, banyak murid yang tidak menerima BSM mengatakan penargetan tersebut tidak benar karena ada banyak murid yang belum menerima BSM yang lebih miskin dan lebih layak daripada beberapa murid yang menerimanya. Pemangku kepentingan lainnya termasuk kepala sekolah dan guru juga mengakui bahwa sasaran penerima BSM tidak 100 % benar.
2. Ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BPS. Terutama dalam kasus 2013-2014 yang menargetkan mekanisme melalui penerbitan KPS kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam database yang terintegrasi nasional keluarga miskin, data BPS tidak akurat atau tidak lengkap. Ada banyak keluarga miskin yang tidak diidentifikasi sebagai keluarga miskin oleh BPS dan sebagainya yang tidak termasuk dalam database nasional keluarga miskin. Dalam beberapa kasus mereka yang memegang KPS mungkin tidak lagi miskin, meskipun pada saat pengumpulan data BPS, mereka miskin. Di sisi lain, beberapa keluarga yang belum menerima KPS sekarang miskin meskipun pada saat pengumpulan data BPS mereka tidak dianggap miskin. Selanjutnya, definisi "miskin" berbeda dari daerah ke daerah.

Gambar 46. Upacara Bendera pada SDN 6 Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung



3. Contoh praktik penargetan yang baik. Beberapa Pemerintah provinsi dan Kabupaten juga menyediakan beasiswa bagi murid dari keluarga miskin, untuk anak-anak yatim dan yatim piatu dan murid dengan prestasi akademik. Survei di wilayah Sumatera tidak menemukan bukti duplikasi beasiswa sebelum tahun ajaran 2013-2014. Sebagai contoh, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Sumatera Utara, memberikan beasiswa bagi prestasi akademik yang baik. Dila, seorang murid dengan prestasi akademik yang baik, tidak diberikan beasiswa karena dia menerima BSM. Dinas pendidikan Provinsi Aceh mendistribusikan sekitar 1.800.000 beasiswa untuk anak-anak yatim dan yatim piatu tanpa membedakan antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Survei tidak menemukan bukti dari penerima BSM juga menerima beasiswa ini. Namun, di bawah sistem baru dimana BSM diberikan langsung kepada murid tanpa terlebih dahulu memberitahu sekolah mungkin ada duplikasi di masa depan karena sekolah tidak akan tahu siapa yang telah menerima BSM pada saat mengusulkan murid untuk jenis lain dari beasiswa.
4. Kurangnya sosialisasi tentang KPS / BSM. Masih banyak keluarga miskin dan aparat desa yang tidak tahu bahwa KPS dapat digunakan untuk mengajukan permohonan BSM. Mereka juga tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan KPS. Hal ini menunjukkan bahwa program baru belum disosialisasikan dengan baik.
5. Peran untuk Dinas Pendidikan dan pejabat Kemenag Kabupaten dalam proses BSM baru berkurang. Para pejabat tidak puas dengan sistem baru untuk penargetan penerima manfaat. Karena ketentuan KPS adalah kriteria utama untuk mengajukan BSM, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengontrol proses penargetan/seleksi di tingkat sekolah/madrasah.
6. Masalah dalam menggunakan sertifikasi kemiskinan di tempat KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Beberapa sekolah/madrasah membantu murid miskin yang keluarganya tidak memiliki KPS untuk mendapatkan Kartu Tanda Miskin (SKTM) atau bukti lain untuk menunjukkan kemiskinan yang dapat digunakan di tempat KPS untuk mengajukan permohonan BSM. Sebelum penggunaan KPS awal pada 2013-2014 tahun ajaran, sertifikasi kemiskinan adalah kriteria utama untuk penerima manfaat pencalonan BSM. Dalam beberapa kasus, kepala desa akan mengeluarkan SKTM kepada siapa pun yang meminta untuk itu apakah orang tersebut miskin atau tidak agar tidak menunjukkan pilih kasih atau menyinggung perasaan seseorang. Hasilnya adalah beberapa orang yang memiliki SKTM tapi yang benar-benar tidak miskin, mungkin menerima BSM.
7. Sistem kuota dapat menyebabkan BSM salah sasaran dalam beberapa kasus. Survei kepada responden melaporkan bahwa beberapa sekolah dengan murid non-miskin diusulkan untuk BSM karena tidak cukupnya keluarga miskin untuk mengisi kuota yang diberikan sekolah. Pada saat yang sama ada sekolah/madrasah dengan banyak murid miskin namun kuota yang diberikan tidak cukup untuk menampung mereka semua. Dalam kasus yang menarik di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dua lulusan SMK, Anggie (perempuan) dan

Robbi (laki-laki) telah mengetahui tentang BSM karena mereka berada di kelas 1, SMK. Keduanya berasal dari keluarga hampir miskin, tetapi hanya Robbie telah menerima BSM. Anggie menyatakan tidak ada kecemburuan atau kekecewaan bahwa ia tidak menerimanya. Mereka berdua mencatat bahwa ada banyak murid di sekolah yang belum menerima BSM (sekitar 30 %).

8. Kasus di masa lalu. Selama periode 2010-2012 BSM, beberapa kasus yang dicatat, guru mencalonkan murid non-miskin karena berbagai alasan.
9. Banyak kasus kepala sekolah dan guru bersikap adil dalam memilih calon BSM. Berbeda dengan kasus di atas, banyak contoh yang dikutip dalam survei dari kepala sekolah dan guru yang menunjukkan kepedulian nyata bagi murid miskin dan membantu mereka untuk mendapatkan BSM selama periode 2010-2012. Dalam kasus ini proses yang adil dan transparan, dengan komite sekolah yang terlibat dalam proses tersebut. Ada juga kasus para pelaku berusaha mencari sumber pendanaan untuk membantu para murid yang tidak menerima BSM.
10. Ada kebutuhan untuk kerjasama yang lebih baik antara sekolah dan aparat desa dalam penargetan penerima BSM. Para kepala desa menyatakan kebutuhan untuk memiliki kerjasama yang lebih baik antara sekolah, termasuk komite sekolah, dan Pemerintahan desa dalam penargetan penerima BSM. Kerja sama tersebut bisa dalam bentuk tim independen untuk menentukan siapa yang benar-benar miskin dan layak BSM dan tidak bergantung pada KPS sebagai satu-satunya kriteria untuk seleksi. Tim ini akan bertemu secara teratur untuk memperbarui data kemiskinan di desa. Beberapa responden survei merasa yakin bahwa data kemiskinan di tingkat desa harus diperbarui secara teratur. Tim harus memiliki anggota yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Kecukupan Dana BSM

1. Penggunaan dana BSM. Sebagian besar responden survei menyatakan bahwa dana BSM digunakan untuk membeli berbagai barang-barang yang dibutuhkan untuk sekolah seperti seragam, pakaian olahraga, sepatu, perlengkapan (tas, pensil, buku tulis, dll), makanan ringan dan transportasi (lihat Tabel di bawah). Namun, untuk murid sekolah menengah atas (SMA / SMK / MA), hampir seluruh BSM digunakan untuk menutupi biaya sekolah. Beberapa responden menyatakan bahwa dana BSM di rumah tangga sangat miskin juga digunakan untuk kebutuhan bagi seluruh keluarga, meskipun prioritas diberikan kepada kebutuhan pendidikan.

Gambar 47. SMPN 2 Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung



2. Jumlah BSM harus ditingkatkan. Orang tua dan murid yang menerima BSM sangat berterima kasih atas dukungan BSM karena mengurangi beban keuangan pada orangtua miskin untuk membayar sekolah. Namun, orang tua dan pejabat Pemerintah yang menjadi responden

percaya bahwa jumlah BSM saat ini tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan siswa. Beberapa pejabat Pemerintah setempat menyarankan jumlah BSM yang akan cukup untuk menutupi biaya untuk sekolah di setiap jenjang pendidikan yang tercantum dalam tabel berikut. Pendapat lain disajikan di bawah ini.

Tabel 3.Rekomendasi pejabat Pemerintah terkait Jumlah BSM

Komponen Biaya	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
Seragam Sekolah -1	150.000	250.000	250.000
Seragam Sekolah -2	150.000	250.000	250.000
Seragam Pramuka	150.000	250.000	
Seragam Olah Raga	80.000	100.000	100.000
Sepatu	150.000	200.000	250.000
Tas Sekolah	125.000	150.000	150.000
Buku dan Alat Tulis	100.000	150.000	200.000
Makanan Ringan dan Transport	1.250.000	1.250.000	1.875.000
Biaya Sekolah			960.000
Jumlah	2.155.000	2.600.000	4.035.000

Gambar 48.Membeli makanan ringan di sekolah merupakan tradisi: SDN 10 Pulau Punjung, Kabupaten Darmastraya, Provinsi Sumatera Barat



Gambar 49. Ruang Kelas SMA dan Murid yang menggunakan Seragam Olah Raga di SMAN I Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung



Sekolah Dasar. Ibu Epi dan suaminya, Bapak Suryono, keduanya bekerja di sektor informal. Penghasilan gabungan mereka adalah sekitar Rp.3, 500,000 / bulan. Mereka memiliki tiga anak di sekolah dasar yang belum menerima BSM karena pendapatan mereka dianggap berada di atas garis kemiskinan. Ibu Eli memperkirakan biaya tahunan untuk satu anak sebagai berikut:

Tabel 4. Perkiraan Pengeluaran Tahunan untuk Sekolah Dasar oleh Orang Tua

Unit Biaya	Pengeluaran Tahunan
Seragam Sekolah	Rp 80.000
Seragam Pramuka	Rp 85.000
Sepatu	Rp 70.000
Tas Sekolah	Rp 50.000
Uang saku/ Jajan (Rp.2,000/day)	Rp 500.000
Jumlah	Rp 725.000

Total biaya untuk tiga anak-anak adalah sekitar Rp.3.5-4 juta / tahun. BSM akan menutupi sekitar 40% dari biaya untuk satu anak.

Gambar 50. Anak-anak Ibu Epi dan temannya menolong usaha Ibu Epi dalam berjualan dengan menggunakan gerobak makanan



Sekolah Kejuruan (SMK). Meskipun jumlah BSM untuk SMA telah meningkat dari Rp.780.000/tahun menjadi Rp.1.200.000/tahun telah mencakup sekitar sepertiga dari biaya. Anggie, seorang murid SMK perempuan, yang tidak menerima BSM, memperkirakan pengeluaran tahunan sebagai berikut:

Tabel 5. Perkiraan Pengeluaran Tahunan Murid Sekolah Kejuruan

Komponen Biaya	Pengeluaran Tahunan
Uang Sekolah (1 tahun)	Rp 1.250.000
Seragam Praktikum	Rp250.000
Sepatu	Rp70.000
Ongkos (@ Rp. 5.000/hari)	Rp 1.250.000
Stocking ⁵⁵ (1 pair/week @ Rp. 10.000)	Rp520.000
Jumlah	Rp 3.270.000

Sementara kasus-kasus diatas menggambarkan bahwa BSM hanya mencakup sekitar sepertiga dari biaya untuk sekolah, perlu dicatat bahwa perkiraan biaya berdasarkan pengalaman orang tua dan murid lebih realistis dibandingkan proyeksi yang dibuat oleh pejabat Pemerintah daerah.

3. Jumlah BSM harus dibedakan berdasarkan lokasi. Survei responden menyatakan bahwa jumlah BSM harus ditentukan oleh lokasi. Artinya, BSM harus dibedakan untuk lokasi terpencil, pedesaan dan perkotaan dan menurut biaya hidup di berbagai daerah.

Dampak

1. Perbedaan pendapat mengenai efek BSM pada tingkat kehadiran. Sebagian besar responden survei menyatakan bahwa BSM meningkatkan kehadiran dan meningkatkan motivasi siswa. Namun, beberapa responden juga menyatakan bahwa kehadiran tergantung pada karakteristik individu siswa. Jika murid "malas" untuk menghadiri sekolah maka dia akan terus absen dengan atau tanpa BSM.
2. BSM mengurangi perasaan rendah diri di kalangan murid SD. Murid SD merasa lebih percaya diri karena dengan BSM mereka dapat membeli seragam sekolah, sepatu, tas dan perlengkapan lainnya, yang mana sebelum mendapat BSM mereka harus bersekolah tanpa perlengkapan yang sesuai. Di wilayah Sumatera responden survei mengatakan bahwa tidak ada stigma yang melekat pada murid yang menerima BSM karena kondisi mereka kemiskinan adalah fakta kehidupan. Murid yang menerima BSM berterima kasih untuk itu.
3. Kurangnya jumlah yang cukup dari BSM menghasilkan kekecewaan dan frustrasi. Personil sekolah, khususnya kepala sekolah, merasa frustrasi ketika jumlah murid yang menerima BSM jauh lebih sedikit atau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jumlah murid yang diusulkan untuk BSM. Hasil frustrasi menjadikan orang tersebut menjadi kurang peduli dengan program BSM. Orang tua dari keluarga miskin memiliki banyak perasaan yang sama. Kekecewaan kumulatif dengan berbagai program pengentasan kemiskinan membuat mereka kurang peduli dengan program BSM. Beberapa sekolah telah mencoba untuk mengkompensasi kurangnya

⁵⁵ Anggie merupakan murid pada Sekolah Kejuruan Perhotelan yang membutuhkan stoking bagi murid perempuan. (Karena dia membeli yang paling murah, maka *stocking* itu sudah rusak dalam waktu seminggu)

BSM diberikan dalam berbagai cara. Misalnya, kepala sekolah SDN 10 Pulau Punjung Darma Raya telah mencoba untuk menemukan sumber-sumber lain untuk memberikan beasiswa bagi murid miskin yang tidak menerima BSM. Kepala sekolah Madrasah Aliyah di Tanjabtim merasa dipaksa untuk membagi BSM dengan murid lain yang diusulkan untuk BSM tapi tidak menerimanya.

4. Prosedur perbankan menyebabkan keterlambatan dalam menyalurkan BSM yang mengurangi dampak. Kepala Bagian Pendidikan madrasah di kantor Kabupaten Aceh Tengah Kemenag menjelaskan bahwa tahun lalu dana yang disalurkan melalui kantor pos sangat terlambat, dalam beberapa kasus dana baru tiba setelah murid telah menyelesaikan ujian dan lulus. Jadi, menurut dia, BSM tidak berdampak pada kinerja atau kehadiran karena dana yang dibutuhkan pada awal tahun ajaran. Sistem pencairan dalam menyalurkan BSM menyebabkan keterlambatan di beberapa daerah. Pejabat itu mengatakan bahwa ia mulai mempersiapkan untuk proses baru pada awal tahun 2013 dengan meminta staf bank untuk datang ke madrasah untuk membantu murid membuka rekening. Namun, bank beberapa kali mengubah prosedur dan informasi yang diperlukan. Pada saat survei (pertengahan Oktober 2013) hanya beberapa madrasah mampu untuk melengkapi dokumen yang diperlukan oleh bank. Dengan demikian, akan ada penundaan besar dalam menyalurkan dana di bawah sistem baru Di Kabupaten Aceh Tengah.

Pelajaran yang diambil

1. Kebutuhan dana manajemen BSM. Staf Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kemenag merasa bahwa manajemen BSM menempatkan beban tambahan pada mereka dan merekomendasikan bahwa Pemerintah pusat menyediakan dana manajemen BSM ekstra. Sekolah / madrasah juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan dana manajemen untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Biaya ini biasanya diambil dari BSM siswa.
2. Keuntungan dari BSM yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Keuntungan dari menyalurkan langsung BSM kepada murid adalah: (i) penerima manfaat merasa bangga bahwa mereka dapat mengambil uang sendiri dan merasa bahwa privasi mereka dilindungi, dan (ii) mengurangi beban psikologis pada kepala sekolah dan guru jika mereka tidak bertanggung jawab untuk mengambil dan mencairkan dana. Namun, beberapa kasus yang ditemukan di mana sekolah memegang dokumen rekening bank murid dan di mana bank hanya mengucurkan dana atas rekomendasi sekolah. Berdasarkan model sebelumnya dimana uang disalurkan oleh kantor pos, dalam banyak kasus personil sekolah/madrasah (kepala sekolah dan / atau guru) menarik dana BSM dan kemudian disalurkan dana kepada murid atau orang tua, dengan atau tanpa keterlibatan siswa. Hal ini terutama berlaku untuk SD dan SMP (SD / MI dan SMP / MTs). Di sekolah menengah / madrasah atas (SMA / MA / SMK) yang digunakan pada praktikum ini, dana tersebut digunakan langsung untuk membayar biaya sekolah, dengan demikian, para murid ini tidak pernah menerima dana untuk menutupi biaya-biaya lain.

Gambar 51. Ruang kelas SMAN I Toboali. Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung



1. Kerugian menggunakan sistem perbankan untuk mengucurkan dana BSM. Banyak orang tua lebih memilih sekolah untuk menarik dana BSM karena prosedur yang diminta oleh bank sulit bagi orang tua miskin, dan jika bank yang terletak jauh dari tempat mereka tinggal mereka harus membayar biaya transportasi untuk pergi ke bank yang bisa sangat mahal. Selain itu, bank mengharuskan beberapa jumlah tetap dalam rekening bank sehingga mereka tidak dapat menarik 100 % dari dana.
2. Bank perlu meningkatkan fasilitas penjangkauan. Sistem penyaluran BSM akan bekerja dengan baik jika uang dapat ditarik dari ATM. Tapi banyak sekolah/madrasah yang terletak jauh dari bank lokal. Oleh karena itu, bank perlu untuk memperkenalkan atau memperluas layanan yang sulit dijangkau seperti kantor pos mobile. Jika bank tidak terletak di dekatnya atau jika mereka tidak memberikan layanan penjangkauan sehingga murid dapat dengan mudah dan murah mencairkan dana, jasa kantor pos harus digunakan di lokasi tersebut.
3. Sekolah/madrasah perlu tahu siapa yang menerima BSM. Personil sekolah/madrasah sangat merasa bahwa bank menyalurkan harus memberitahu mereka yang menerima BSM dan ketika dicairkan sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kinerja penerima dan kehadiran
4. Ada kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja BSM penerima manfaat dan penggunaan dana. Beberapa pemangku kepentingan menyatakan pendapat bahwa sekolah/madrasah diminta untuk memonitor dan mengevaluasi kehadiran BSM penerima manfaat dan bagaimana penggunaan dana. Hasil evaluasi harus digunakan dalam menentukan apakah penerima harus terus menerima BSM atau BSM dihentikan karena kehadiran yang buruk dari penyalahgunaan dana.

6.4 Rangkuman dan Kesimpulan

Secara keseluruhan, para pemangku kepentingan di wilayah ini sepakat bahwa program BSM pada prinsipnya memiliki dampak positif bagi siswa, orang tua dan pemangku kepentingan sekolah karena biaya untuk pendidikan dikurangi. Dengan murid BSM tidak mengeluh lagi tentang biaya sekolah. BSM telah membantu murid untuk menikmati sekolah yang lebih, dan mereka lebih aktif di sekolah karena mereka tidak begitu khawatir tentang biaya pendidikan mereka. Menurut para pemangku kepentingan, kelemahan utama dalam program ini adalah dalam sistem manajemen.

Penargetan. Sebagian besar pemangku kepentingan setuju bahwa BSM ini ditujukan bagi murid miskin. Ada persepsi yang sangat berbeda pada kelayakan penargetan. Para pejabat Pemerintah dan sekolah percaya penargetan yang tepat, sedangkan kepala desa, orang tua dan murid percaya bahwa banyak murid non-miskin menerima BSM dan kuota untuk BSM tidak cukup untuk mencakup semua keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah. Ada banyak keluhan di wilayah Sumatera tentang ketergantungan pada KPS untuk menentukan BSM menargetkan karena banyak percaya bahwa data BPS yang di atasnya manfaat KPS

ditentukan tidak akurat sehingga banyak keluarga miskin tidak menerima KPS sementara beberapa yang menerima KPS tidak layak untuk menerima BSM. Ada juga kesulitan dengan menggunakan Kartu Tanda Miskin sebagai dasar untuk penargetan BSM. Dalam beberapa kasus, kepala desa akan mengeluarkan SKTM kepada siapa pun yang meminta untuk itu apakah orang tersebut miskin atau tidak agar tidak menunjukkan pilih kasih atau menyinggung perasaan seseorang. Hasilnya adalah beberapa orang yang memiliki SKTM tapi yang benar-benar tidak miskin, mungkin menerima BSM. Jadi, sementara konsep yang sangat baik dan banyak murid miskin dibantu untuk bersekolah secara teratur, ada banyak daerah di mana sasaran dapat ditingkatkan.

Kecukupan Jumlah. Banyak responden survei di wilayah Sumatera menyatakan bahwa dana BSM digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk sekolah seperti berbagai seragam, pakaian olahraga, sepatu, perlengkapan (tas, pensil, buku tulis, dll), makanan ringan dan transportasi. Beberapa responden menyatakan bahwa dana BSM di rumah tangga sangat miskin juga digunakan untuk kebutuhan bagi seluruh keluarga, meskipun prioritas diberikan kepada kebutuhan pendidikan. Untuk murid sekolah menengah atas (SMA / SMK / MA), hampir seluruh BSM digunakan untuk menutupi biaya. Biaya tertinggi untuk sekolah kejuruan. Orang tua dan murid yang menerima BSM sangat berterima kasih atas dukungan karena mengurangi beban keuangan pada orangtua miskin untuk membayar sekolah. Namun, responden tersebut mengatakan bahwa jumlah BSM saat ini mencakup 30 % - 40 % dari pengeluaran sekolah. Namun, Pemerintah daerah nyatanya menunjukkan kurangnya pemahaman tentang biaya sekolah, mereka menyatakan bahwa jumlah BSM harus sekitar tiga kali lipat jatah saat ini untuk menutupi semua kebutuhan sekolah. Responden survei juga menyatakan bahwa jumlah BSM harus ditentukan oleh lokasi. Artinya, BSM harus dibedakan untuk lokasi terpencil, pedesaan dan perkotaan dan menurut biaya hidup di berbagai daerah.

Dampak. Sebagian besar responden survei menyatakan bahwa BSM meningkatkan kehadiran dan meningkatkan motivasi siswa. Namun, beberapa responden juga menyatakan bahwa kehadiran tergantung pada karakteristik individu siswa. Jika murid "malas" untuk menghadiri sekolah maka dia akan terus absen walau dengan atau tanpa BSM. Murid SD merasa tidak rendah diri karena dengan BSM mereka dapat membeli seragam sekolah, dll, yang sebelum BSM mereka tidak dapat membelinya. Di wilayah Sumatera responden survei mengatakan bahwa tidak ada stigma yang melekat pada murid yang menerima BSM karena kondisi mereka kemiskinan adalah fakta kehidupan. Personil sekolah, khususnya kepala sekolah, merasa frustrasi ketika jumlah murid yang menerima BSM jauh lebih sedikit atau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jumlah murid yang diusulkan untuk BSM. Hasil frustrasi tersebut membuat orang tersebut menjadi kurang peduli dengan program BSM. Orang tua dari keluarga miskin memiliki banyak perasaan yang sama. Kekecewaan kumulatif dengan berbagai program pengentasan kemiskinan membuat mereka kurang peduli dengan program BSM. Keterlambatan pencairan BSM mengurangi dampak program, terutama jika dana yang diterima hanya menjelang akhir tahun ajaran.

Pelajaran. Staf Dinas Pendidikan dan Kabupaten/Kemendiknas merasa bahwa manajemen BSM menempatkan beban tambahan pada mereka dan merekomendasikan bahwa Pemerintah pusat menyediakan dana manajemen BSM ekstra. Sekolah / madrasah juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan dana manajemen untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Biaya ini biasanya diambil dari BSM siswa. Keuntungan dari BSM menyalurkan langsung kepada murid bahwa penerima manfaat merasa diberdayakan karena mereka dapat mengambil uang sendiri dan mengurangi beban psikologis pada kepala sekolah dan guru jika mereka tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Banyak orang tua lebih memilih sekolah untuk menarik dana BSM karena prosedur yang diminta oleh bank sulit dipenuhi bagi orang tua miskin, dan jika bank yang terletak jauh dari tempat mereka tinggal mereka harus membayar biaya transportasi untuk pergi ke bank yang bisa sangat mahal. Selain itu, beberapa bank mengharuskan jumlah minimal dalam rekening bank sehingga mereka tidak dapat menarik 100% dana. Oleh karena itu, bank perlu untuk memperkenalkan atau memperluas layanan jangkauan seperti kantor pos mobile. Jika bank tidak

terletak didekatnya atau jika mereka tidak memberikan layanan penjangkauan sehingga murid tidak dapat dengan mudah dan murah mencairkan dana, maka jasa kantor pos harus digunakan di lokasi tersebut.